



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2020



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN BANTUL
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 2020





**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**Kabupaten Bantul
Provinsi D.I. Yogyakarta
TAHUN 2020**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 disusun dalam rangka untuk memenuhi kewajiban Bupati Bantul sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan dan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama Tahun 2020. Selain itu, laporan ini juga diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Penyusunan buku laporan ini secara umum telah disesuaikan dengan sistematika yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tertanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 dan secara khusus telah disesuaikan dengan Surat Edaran Kementerian Pandayagaunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 tahun 2021 tertanggal 4 Maret 2021 pada sub Bab Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah .

Buku laporan ini dapat disusun atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terkait, baik dalam penyediaan, pengumpulan dan pengolahan data. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami juga menyadari bahwa buku laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik, saran dan evaluasi dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Bantul, 26 Maret 2021

 **BUPATI BANTUL**

H. ABDUL HALIM MUSLIH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah	2
b. Data Geografis Wilayah	2
c. Jumlah Penduduk.....	5
d. Jumlah Kapanewon (Kecamatan) dan Kalurahan (Desa) Kabupaten Bantul	8
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah.	9
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	15
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	18
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	20
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	21
c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	23
d. Perjanjian Kinerja	26
e. Program Pembangunan Pemerintah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	28
f. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	41
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	88
a. Latar Belakang.....	88
b. Dasar Hukum.....	90
c. Kebijakan Umum.....	91
d. Arah Kebijakan.....	93
BAB II	97
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	97
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia	97
2.1.2. Angka Kemiskinan	98
2.1.3. Angka Pengangguran.....	99

2.1.4.	Pertumbuhan Ekonomi	100
2.1.5.	Pendapatan Per Kapita.....	102
2.1.6.	Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio	103
2.2.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	104
2.2.1.	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	104
2.2.2.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	118
2.2.3.	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	208
2.3.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	211
2.3.1.	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	211
2.3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	214
2.3.3.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	216
2.3.4.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	220
2.3.5.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional.....	223
2.3.6.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.	224
a.	Indeks Tata Kelola Pemerintahan/ Indonesia Governance Index (IGI).....	225
b.	Umur Harapan Hidup	229
c.	Angka Harapan Lama Sekolah	242
d.	Angka Kemiskinan	249
e.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.....	252
f.	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio).....	254
g.	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	256
h.	Cakupan Industri Kreatif	259
i.	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	262
j.	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura	265
k.	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan	266
l.	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	268
m.	Pertumbuhan Produksi Perikanan.....	269
n.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	271
o.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	276
p.	Desa Tangguh Bencana	279
q.	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	283
r.	Angka Kriminalitas.....	286

s.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	288
2.3.7.	Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	292
2.3.8.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai	316
BAB III	323
3.1.	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota	323
3.2.	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota.....	323
3.2.1.	Target Kinerja.....	324
3.2.2.	Realisasi.....	325
3.3.	Permasalahan dan Kendala	334
3.4.	Saran dan Tindak Lanjut.....	335
BAB IV	339
4.1.	Urusan Pendidikan.....	339
4.1.1.	Jenis Pelayanan Dasar	339
4.1.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	340
4.1.3.	Realisasi.....	343
4.1.4.	Alokasi Anggaran	347
4.1.5.	Dukungan Personil	349
4.1.6.	Permasalahan dan Solusi	351
4.2.	Urusan Kesehatan	355
4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar	355
4.2.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	360
4.2.3.	Realisasi.....	366
4.2.4.	Alokasi Anggaran	376
4.2.5.	Dukungan Personil	379
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi	381
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum.....	383
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	383
4.3.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	384
4.3.3.	Realisasi.....	385
4.3.4.	Alokasi Anggaran	387
4.3.5.	Dukungan Personil	390
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	392

4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	394
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar	394
4.4.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	395
4.4.3.	Realisasi.....	396
4.4.4.	Alokasi Anggaran	398
4.4.5.	Dukungan Personil	401
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi	401
4.5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rakyat.....	403
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	403
4.5.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	405
4.5.3.	Realisasi.....	408
4.5.4.	Alokasi Anggaran	419
4.5.5.	Dukungan Personil	420
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi	425
4.6.	Urusan Sosial.....	428
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	428
4.6.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	430
4.6.3.	Realisasi.....	436
4.6.4.	Alokasi Anggaran	444
4.6.5.	Dukungan Personil	445
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi	448
BAB V	453

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2020	6
Tabel 1.1.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.1.3	Daftar Kapanewon Dan Kalurahan Di Kabupaten Bantul	8
Tabel 1.1.4	Jumlah Pegawai Di Pemerintah Kabupaten Bantul.....	12
Tabel 1.1.5	Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 (Sebelum Dilakukan Audit BPK)	16
Tabel 1.1.6	Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	17
Tabel 1.1.7	Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Sasaran Daerah Dan Indikator Sasaran Daerah Beserta Target Indikator Sasaran Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Bantul.....	24
Tabel 1.1.8	Kinerja Awal Tahun 2020 Dan Perubahan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020.....	27
Tabel 1.1.9	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Pada Tabel 6.8 RPJMD Perubahan 2016-2021 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.19 Tahun 2018.....	29
Tabel 1.1.10	Matriks Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Pada RKPD Perubahan Tahun 2020 Peraturan Bupati Bantul No 99 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020	41
Tabel 2.1.1	Capaian Indikator kinerja Makro	97
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020	99
Tabel 2.1.3	PDRB Harga Berlaku Dan Harga Konstan	100
Tabel 2.1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2019 Dan 2020.....	101
Tabel 2.2.1	Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Bantul Tahun 2020	104
Tabel 2.2.2	Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	118
Tabel 2.2.3	Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan.....	208
Tabel 2.3.1	Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2020.....	213
Tabel 2.3.2	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2020 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2020	215
Tabel 2.3.3	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun 2019	217
Tabel 2.3.4	Matriks Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2016 – 2020	219

Tabel 2.3.5	Matriks Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2020 Dibandingkan Dengan Target RPJMD Perubahan 2016-2021	220
Tabel 2.3.6	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Pada Tahun 2020 Terhadap Capaian Pda Tingkat Nasional	223
Tabel 2.3.7	Hasil Pengukuran Arena Indikator IGI	226
Tabel 2.3.8	Kegiatan Inovasi Puskesmas Dalam Rangka Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tahun 2020.....	231
Tabel 2.3.9	Capaian Indikator IKS Kabupaten Bantul Tahun 2020.....	235
Tabel 2.3.10	Hasil Capaian Tatanan PHBS Tahun 2016-2020	239
Tabel 2.3.11	Jumlah Dokter Kabupaten Bantul Tahun 2015-2020.....	241
Tabel 2.3.12	Daftar Kepesertaan Jaminan Kesehatan.....	242
Tabel 2.3.13	Rencana Dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar.....	244
Tabel 2.3.14	Rencana Dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar.....	246
Tabel 2.3.15	Jumlah Perpustakaan Di Kabupaten Bantul.....	248
Tabel 2.3.16	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Bantul Tahun 2014 – 2020	249
Tabel 2.3.17	Data Jumlah Bantuan Sosial Terdampak Covid-19	250
Tabel 2.3.18	Data Kemiskinan Tahun 2020.....	250
Tabel 2.3.19	PDRB Harga Berlaku Dan Harga Konstan	252
Tabel 2.3.20	Komponen Yang Mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2015-2020	252
Tabel 2.3.21	Obyek Wisata Di Kabupaten Bantul Tahun 2020.....	257
Tabel 2.3.22	Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	258
Tabel 2.3.23	Prestasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Selama Tahun 2020.....	258
Tabel 2.3.24	Cakupan Industri Kreatif Tahun 2017-2020	260
Tabel 2.3.25	Perkembangan Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2018-2020	263
Tabel 2.3.26	Produksi Benih Padi UPT BBP Tahun 2020.....	264
Tabel 2.3.27	Luas Panen, Produksi, Dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020.....	265
Tabel 2.3.28	Luas Panen, Produksi, Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan.....	267
Tabel 2.3.29	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2019-2020	269
Tabel 2.3.30	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019-2020	270
Tabel 2.3.31	Skala Kriteria Nilai IKLI.....	271

Tabel 2.3.32	Nilai Indeks Pelayanan Infrastruktur Gabungan	272
Tabel 2.3.33	Potensi Bencana Di Kabupaten Bantul	280
Tabel 2.3.34	Kejadian Dan Lokasi Bencana Di Kabupaten Bantul	281
Tabel 2.3.35	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul.....	284
Tabel 2.3.36	Angka Kriminalitas Pada Kabupaten Bantul Tahun 2020	286
Tabel 2.3.37	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020.....	289
Tabel 2.3.38	Jumlah Program Kegiatan Per IKU Sasaran Strategis Kabupaten Bantul Yang Didukung.....	293
Tabel 2.3.39	Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama.....	295
Tabel 2.3.40	Anggaran Dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.....	316
Tabel 2.3.41	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	317
Tabel 2.3.42	Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2020	318
Tabel 2.3.43	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2020.....	320
Tabel 3.2.1	Realisasi Penyaluran Bantuan Benih Kedelai Tahun 2020 (Per Desember).....	325
Tabel 3.2.2	Realisasi Penyaluran Bantuan Benih Kacang Tanah Tahun 2020 (Per Desember)	326
Tabel 3.2.3	Realisasi Penyaluran Bantuan Benih Padai Inbrida Tahun 2020 (Per Desember).....	326
Tabel 3.2.4	Realisasi Penyaluran Benih Jagung Hibrida Tahun 2020	327
Tabel 3.2.5	Target Dan Realisasi Pembinaan Pasca Panen Dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2020 Dengan Sumber Dana Tugas Pembantuan.	328
Tabel 3.2.6	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah DIY Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Bantul	329
Tabel 4.1.1.	Jenis Pelayanan Dasar Dan Indikator Pada Bidang Urusan Pendidikan	339
Tabel 4.1.2.	Jenis Dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pendidikan.....	340
Tabel 4.1.3.	Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan.....	341
Tabel 4.1.4.	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan.....	344
Tabel 4.1.5.	Alokasi Anggaran Dan Realisasi Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan.....	348
Tabel 4.1.6.	Sebaran Personil Pengampu Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Pada Masing-Masing Unit Kerja.....	351
Tabel 4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar Dan Indikator Pada Bidang Urusan Kesehatan	355
Tabel 4.2.2.	Jenis Dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Kesehatan	358
Tabel 4.2.3.	Rumus Perhitungan Proyeksi Target Sasaran Per Jenis Layanan Dasar	360
Tabel 4.2.4.	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	361
Tabel 4.2.5.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan.....	367

Tabel 4.2.6.	Anggaran Pelayanan Langsung Kepada Sasaran/Penerima Layanan Per Jenis Layanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Oleh Puskesmas	377
Tabel 4.2.7.	Anggaran Penunjang SPM Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan	378
Tabel 4.2.8.	Sebaran Personil Pengampu Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Pada Masing-Masing Unit Kerja.....	380
Tabel 4.2.9.	Dukungan Personil Atau Tenaga Kesehatan Yang Terlibat Secara Langsung Dalam Pelayanan SPM Bidang Urusan Kesehatan.....	380
Tabel 4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar Dan Indikator Pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum	383
Tabel 4.3.2.	Jenis Dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	383
Tabel 4.3.3.	Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	384
Tabel 4.3.4.	Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	385
Tabel 4.3.5.	Alokasi Anggaran Dan Realisasi Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	388
Tabel 4.3.6.	Sebaran Personil Pengampu Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Pada Masing-Masing Unit Kerja.....	392
Tabel 4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar Dan Indikator Pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	394
Tabel 4.4.2.	Jenis Dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	394
Tabel 4.4.3.	Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	395
Tabel 4.4.4.	Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	396
Tabel 4.4.5.	Daftar Warga Korban Bencana Yang Direlokasi Tahun 2020.....	398
Tabel 4.4.6.	Alokasi Anggaran Dan Realisasi Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	400
Tabel 4.5.1.	Indikator Capaian Dan Mutu Layanan Tiap Jenis Pelayanan Dasar Pada Masing-Masing Sub Urusan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas.....	404
Tabel 4.5.2.	Target Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	406
Tabel 4.5.3.	Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	408
Tabel 4.5.4.	Jenis Ancaman Dan Jumlah Penduduk Terpapar	412
Tabel 4.5.5.	Media Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Per Jenis Ancaman	412
Tabel 4.5.6.	Jumlah Pemasangan Rambu Evakuasi Dan Papan Informasi Bencana.....	413
Tabel 4.5.7.	Jumlah Kejadian Bencana Dalam Kurun 2016 - 2020	417
Tabel 4.5.8.	Jumlah Layanan Per Jenis Layanan Pencarian Dan Pertolongan.....	419
Tabel 4.5.9.	Alokasi Anggaran Dan Realisasi Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas	420
Tabel 4.5.10.	Sebaran Personil Pengampu Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Pada Masing-Masing Unit Kerja.....	422

Tabel 4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar Dan Indikator Capaian SPM Bidang Sosial.....	428
Tabel 4.6.2.	Jenis Dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Sosial.....	429
Tabel 4.6.3.	Target Capaian SPM Bidang Sosial.....	430
Tabel 4.6.4.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial.....	436
Tabel 4.6.5.	Alokasi Anggaran Dan Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Sosial.....	445
Tabel 4.6.6.	Sebaran Personil Pengampu SPM Bidang Urusan Sosial Pada Masing-Masing Unit Kerja.....	447
Tabel 4.6.7.	Mitra PSKS Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Kabupaten Bantul	448

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda, 2019)	3
Gambar 1.1.2. Persentase Wilayah Kapanewon di Kabupaten Bantul. (Sumber : Bantul dalam Angka 2021; BPS; data diolah).....	4
Gambar 4.5.1. Rambu dan papan informasi yang terpasang di tahun 2020.....	413
Gambar 4.5.2. Peta Wilayah Manajemen Kebakaran	424
Gambar 4.6.1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemenuhan SPM urusan bidang sosial oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.....	443

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.1	Pagu Indikatif urusan wajib pelayanan dasar dan urusan non wajib pelayanan dasar dalam RPJMD perubahan 2016-2021	93
Grafik 1.1.2	Plafon Indikatif urusan wajib pelayanan dasar dan urusan non wajib pelayanan dasar dalam KUA tahun 2020.....	95
Grafik 2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 (Sumber : BPS; data diolah).....	100
Grafik 2.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta dan Nasional pada tahun 2015-2020.....	102
Grafik 2.1.3	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bantul (juta rupiah) tahun 2016 – 2021 (Sumber BPS; Kabupaten Bantul dalam Angka 2021; data diolah)	102
Grafik 2.1.4	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 (Sumber : BPS; Bappeda 2021; data diolah	103
Grafik 2.3.1	Persentase Realisasi Capaian IKU Kabupaten Bantul terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	216
Grafik 2.3.2	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2019.....	218
Grafik 2.3.3	Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2020 terhadap Target tahun 2020 pada RPJMD 2016-2021	222
Grafik 2.3.4	Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021.....	222
Grafik 2.3.5	Trend Umur Harapan Hidup Kabupaten Bantul dan Kabupaten lainnya dalam Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016 – 2020.....	230
Grafik 2.3.6	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu-Lintas yang ditangani PSC 119 di Kabupaten Bantul berdasarkan Umur pada Tahun 2020.....	237
Grafik 2.3.7	Distribusi berdasarkan Kelompok Kategori Status di Kabupaten Bantul pada Tahun 2020.....	237
Grafik 2.3.8	Trend Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020	243
Grafik 2.3.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dan Nasional Tahun 2016-2020	254
Grafik 2.3.10	Trendline Gini Ratio Kabupaten Bantul tahun 2016-2020	254
Grafik 2.3.11	Grafik Jumlah Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran Strategis (Sumber : Bappeda, BKAD 2020; data diolah)	293

Grafik 4.1.1.	Persentase selisih realisasi indikator utama capaian SPM bidang urusan pendidikan terhadap usia anak kisaran umur tertentu	347
Grafik 4.1.2.	Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan pendidikan terhadap APBD	348
Grafik 4.1.3.	Personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan pendidikan berdasarkan pendidikan	350
Grafik 4.2.1.	Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan kesehatan terhadap APBD	377
Grafik 4.2.2.	Sebaran tingkat pendidikan personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan kesehatan	379
Grafik 4.3.1.	Persentase selisih realisasi indikator utama capaian SPM bidang urusan pekerjaan umum terhadap usia anak kisaran umur tertentu	387
Grafik 4.3.2.	Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan pekerjaan umum terhadap APBD	388
Grafik 4.3.3.	Personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan pekerjaan umum berdasarkan pendidikan	391
Grafik 4.4.1.	Persentase selisih realisasi indikator utama capaian SPM bidang urusan pekerjaan umum terhadap usia anak kisaran umur tertentu	398
Grafik 4.4.2.	Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terhadap APBD	399
Grafik 4.4.3.	Personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat berdasarkan pendidikan	401
Grafik 4.5.1.	Kejadian kebakaran di Kabupaten Bantul tahun 2020	418
Grafik 4.5.2.	Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan trantibumlinmas terhadap APBD	419
Grafik 4.5.3.	Personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan trantibumlinmas	421
Grafik 4.5.4.	Sebaran satgas menurut tingkat pendidikan	423
Grafik 4.5.5.	Sebaran satgas menurut jenis kelamin	423
Grafik 4.5.6.	Sebaran kompetensi satgas PBK	424
Grafik 4.6.1.	Pemenuhan mutu layanan per jenis layanan	442
Grafik 4.6.2.	Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan sosial terhadap APBD	444
Grafik 4.6.3.	Grafik Personil Pelaksana Penerapan SPM Bidang urusan Sosial Berdasarkan Pendidikan	446

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah, bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunungkidul. Kontrak Kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif

1.1.1. Penjelasan Umum

Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar Tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal penetapan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bantul (20 Juli) diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul setiap tahunnya. Selain itu, tanggal 20 Juli juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul, mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan Stadsgementie Ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi : Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta.

b. Data Geografis Wilayah

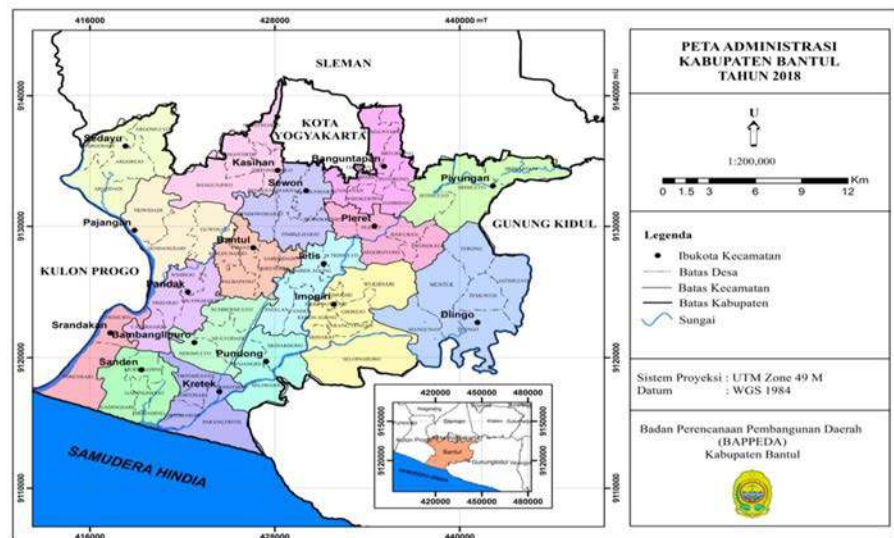
Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (**Gambar 1.1.1**) dengan batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Perbatasan wilayah administratif dengan kabupaten lain telah terpasang pilar-pilar batas wilayah yang bertujuan untuk tertib administrasi di wilayah perbatasan dan langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya konflik terkait batas wilayah di masa mendatang. Pemasangan pilar batas wilayah mengacu pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas daerah. Berikut peraturan perundangan tentang penetapan batas wilayah administratif Kabupaten Bantul dengan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



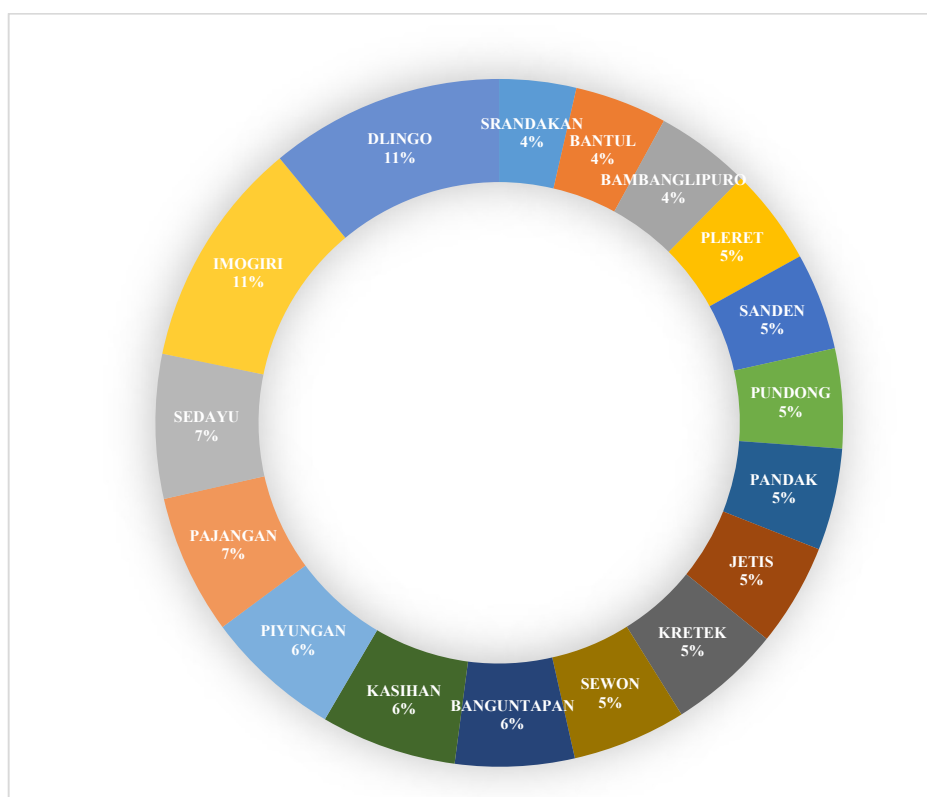
Gambar 1.1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda, 2019)

Permendagri penetapan batas tersebut masih perlu untuk diperbaharui. Pilar yang telah terpasang sebagai rangkaian tahap penegasan batas yang telah ditetapkan dalam permendagri masih relatif jauh jarak antar pilarnya sehingga belum mewakili untuk dilakukan penarikan garis batas. Kabupaten Bantul bersama dengan Kabupaten/Kota di DIY yang berbatasan telah melaksanakan kegiatan perapatan pilar batas dalam upaya untuk pemutakhiran batas administrasi.

Wilayah Kabupaten Bantul secara geografis terletak antara $110^{\circ}12'34''$ - $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}44'04''$ $08^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan. Kabupaten Bantul apabila dilihat dari bentang alamnya terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga

dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil. Sungai besar yang melalui wilayah Kabupaten Bantul antara lain Sungai Opak, S. Oyo dan S. Progo. Sedangkan sungai kecil yang melewati wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari sungai kecil lintas kabupaten dan sungai kecil dalam kabupaten. Sungai kecil lintas kabupaten antara lain S. Bedog, S. Buntung, S. Code, S. Gadjahwong, S. Gawe, S. Kedung Semerangan, S. Kenteng, S. Konteng, S. Krusuk, S. Kuning, S. Mruwe, S. Timoho, dan S. Winongo. Sungai kecil dalam kabupaten antara lain S. Belik, S. Celeng, S. Kedung Miri, S. Kramat, S. Pesing, S. Plilan, S. urang, dan S. Winongo Lama.

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km² (15,91% dari luas DIY) dan terbagi atas 17 Kapanewon (Kecamatan). Kapanewon Dlingo merupakan Kapanewon yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km² (11,02%), sedangkan Kapanewon dengan wilayah paling sempit adalah Kapanewon Srandakan yaitu 18,32 Km² (3,61%). Persentase luas wilayah menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada **Gambar 1.1.2**



Gambar 1.1.2. Persentase Wilayah Kapanewon di Kabupaten Bantul. (Sumber : Bantul dalam Angka 2021; BPS; data diolah)

Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran, daerah perbukitan serta daerah pantai. Secara garis besar, satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam ($>70\%$) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari;

- a) Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (fluviomarine) dengan kemiringan lereng datar-landai, Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal;
- b) Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi;
- c) Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada semester II tahun 2020 sebanyak 954.706 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 475.871 jiwa atau 49,84% dan penduduk Perempuan sebanyak 478.435 jiwa atau 50,16%. Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 272.771 jiwa atau 28,57%, sedangkan yang paling sedikit adalah Srata III yaitu sebesar 437 atau 0,046% dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.

Tabel 1.1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul tahun 2020

No	Kapanewon	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Persen (%)
1	SRANDAKAN	15,475	15,607	31,082	3.26%
2	SANDEN	15,713	16,097	31,810	3.33%
3	KRETEK	15,076	15,688	30,764	3.22%
4	PUNDONG	17,587	18,079	35,666	3.74%
5	BAMBANGLIPURO	20,620	21,086	41,706	4.37%
6	PANDAK	26,118	25,918	52,036	5.45%
7	PAJANGAN	18,271	18,280	36,551	3.83%
8	BANTUL	32,146	32,506	64,652	6.77%
9	JETIS	29,237	29,394	58,631	6.14%
10	IMOGIRI	31,730	32,105	63,835	6.69%
11	DLINGO	19,872	20,126	39,998	4.19%
12	BANGUNTAPAN	56,476	56,822	113,298	11.87%
13	PLERET	24,430	24,067	48,497	5.08%
14	PIYUNGAN	26,320	26,542	52,862	5.54%
15	SEWON	50,539	50,024	100,563	10.53%
16	KASIHAN	52,215	52,384	104,599	10.96%
17	SEDAYU	24,046	24,110	48,156	5.04%
JUMLAH		475,871	478,835	954,706	
Persentase		49.84%	50.16%		

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II tahun 2020; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul; data diolah

Tabel 1.1.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KAPANEWON	TINGKAT PENDIDIKAN										TOTAL
		BELUM / TIDAK SEKOLAH	BELUM TAMAT SD	TAMAT SD/ SEDERAJAT	TAMAT SMP/ SEDERAJAT	TAMAT SMA/ SEDERAJAT	DI/ DII	DIII/ SARJANA MUDA	D IV/ SRATA I	SRATA II	SRATA III	
1	SRANDAKAN	5,063	3,221	5,391	4,379	10,221	305	665	1,720	112	5	31,082
2	SANDEN	5,000	2,224	6,157	4,961	10,158	310	731	2,163	104	2	31,810
3	KRETEK	4,586	2,521	5,678	4,678	10,304	285	702	1,892	110	8	30,764
4	PUNDONG	6,515	2,630	8,417	5,625	10,154	227	544	1,482	68	4	35,666
5	BAMBANGLIPURO	7,760	2,858	7,811	6,022	13,320	372	935	2,453	169	6	41,706
6	PANDAK	9,951	3,803	12,541	7,732	14,241	305	914	2,397	146	6	52,036
7	PAJANGAN	7,308	3,587	8,346	6,536	8,690	205	483	1,295	95	6	36,551
8	BANTUL	11,828	4,975	10,740	8,749	20,489	566	1,838	5,015	428	24	64,652
9	JETIS	11,071	4,954	11,290	8,847	17,286	381	1,201	3,374	211	16	58,631
10	IMOGIRI	14,246	3,491	18,232	10,382	13,841	290	866	2,367	109	11	63,835
11	DLINGO	8,711	3,035	10,871	9,042	7,334	146	228	601	29	1	39,998
12	BANGUNTAPAN	20,683	10,494	16,410	15,102	31,788	974	3,759	12,456	1,480	152	113,298
13	PLERET	10,393	4,503	10,523	7,313	12,107	270	605	2,559	209	15	48,497
14	PIYUNGAN	10,617	4,497	8,667	7,281	16,905	379	1,062	3,183	259	12	52,862
15	SEWON	19,441	7,339	17,629	14,129	28,728	843	2,858	8,657	863	76	100,563
16	KASIHAN	18,762	8,249	16,649	14,927	32,209	734	2,720	9,277	1,005	67	104,599
17	SEDAYU	9,127	3,597	8,931	6,908	14,996	345	1,012	2,995	219	26	48,156
JUMLAH		181,062	75,978	184,283	142,613	272,771	6,937	21,123	63,886	5,616	437	954,706
PERSENTASE		18.97%	7.96%	19.30%	14.94%	28.57%	0.73%	2.21%	6.69%	0.59%	0.05%	100.00%

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II tahun 2020; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul; data diolah

d. Jumlah Kapanewon (Kecamatan) dan Kalurahan (Desa) Kabupaten Bantul

Kapanewon dan kemantren adalah pembagian wilayah administratif di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapanewon setara dengan kecamatan tingkat kabupaten sementara kemantren setara dengan kecamatan tingkat kota. Kapanewon dipimpin oleh panewu sedangkan kemantren yang dipimpin oleh mantri pamong praja. Penyebutan tersebut diberlakukan pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.25 tahun 2019. Terdapat 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul, dengan daftar sebagai berikut :

Tabel 1.1.3 Daftar Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul

No	Kode Kemendagri	Kapanewon	Daftar Kalurahan
1.	34.02.01	Srandakan	Poncosari, Trimurti
2.	34.02.02	Sanden	Gadingsari, Gadingharjo, Murtigading, Srigading
3.	34.02.03	Kretek	Donotirto, Parangtritis, Tirtohargo, Tirtomulyo, Tirtosari
4.	34.02.04	Pundong	Panjangrejo, Bangunharjo, Srihardono
5.	34.02.05	Bambanglipuro	Mulyodadi, Sidomulyo, Sumbermulyo
6.	34.02.06	Pandak	Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo
7.	34.02.07	Pajangan	Guwosari, Sendangsari, Triwidadi
8.	34.02.08	Bantul	Bantul, Palbapang, Ringinharjo, Sabdodadi, Tirenggo
9.	34.02.09	Jetis	Canden, Patalan, Sumberagung, Trimulyo
10.	34.02.10	Imogiri	Girirejo, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, Selopamioro, Sriharjo, Wukirsari
11.	34.02.11	Dlingo	Dlingo, Jatimulyo, Mangunan, Muntuk, Temuwuh, Terong
12.	34.02.12	Banguntapan	Banguntapan, Baturetno, Jagalan, Jambidan, Potorono, Singosaren, Tamanan, Wirokerten
13.	34.02.13	Pleret	Bawuran, Pleret, Segoroyoso, Wonokromo, Wonolelo
14.	34.02.14	Piyungan	Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani
15.	34.02.15	Sewon	Bangunharjo, Panggunharjo, Pendowoharjo, Timbulharjo
16.	34.02.16	Kasihnan	Bangunjiwo, Ngestiharjo, Tamantirto, Tirtonirmolo
17.	34.02.17	Sedayu	Argodadi, Argorejo, Argosari, Argomulyo

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah.

1) Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, telah ditetapkan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri atas :

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat Daerah
- Dinas Daerah, sebanyak 19 (sembilan belas) Dinas Daerah
- Badan Daerah, sebanyak 4 (empat) Badan Daerah
- Kapanewon, sebanyak 17 (tujuh belas) Kapanewon

Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 berjumlah 45 berkurang 9 dari sebelumnya di tahun 2019 berjumlah 54 PD, untuk kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah umum bidang kesatuan bangsa dan politik dan Rumah Sakit Umum Daerah belum dilakukan penyesuaian kelembagaannya sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disamping itu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

2) Unit Kerja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul, tidak semuanya melaksanakan urusan wajib. PD yang melaksanakan urusan, beberapa diantaranya ada yang melaksanakan 2 (dua) jenis urusan wajib dan ada yang hanya melaksanakan 1 (satu) urusan wajib serta ada juga PD yang melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik; urusan persandian). Perangkat Daerah yang melaksanakan 2 (dua) urusan wajib sebanyak 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (urusan pekerjaan umum; urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman);
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (urusan penataan ruang; urusan pertanahan);
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (urusan pendidikan; urusan kepemudaan dan olahraga);
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (urusan sosial; urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak);
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (urusan perpustakaan; urusan kearsipan);
6. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; urusan pemberdayaan masyarakat desa).

Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) urusan wajib sebanyak 13 (tiga belas) Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Kesehatan (Urusan Kesehatan);
2. RSUD Panembahan Senopati (Urusan Kesehatan);
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil);
4. Dinas Kebudayaan (urusan kebudayaan) ;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Statistik);
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (urusan koperasi dan usaha kecil menengah; urusan perindustrian);
7. Dinas Lingkungan Hidup (urusan lingkungan hidup);
8. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (urusan pangan);
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (urusan penanaman modal);
10. Dinas Perhubungan (urusan perhubungan)
11. Satuan Polisi Pamong Praja (urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat);
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat); dan
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (urusan tenaga kerja).

3) Pegawai Pemerintah

Jumlah pegawai di Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menangani fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah adalah sebanyak 751 pegawai. Kualifikasi pendidikan pegawai pada urusan penunjang relatif cukup baik dimana lebih dari setengahnya atau 59,12% memiliki jenjang pendidikan tinggi atau diatas SMA, sisanya sekitar 40,35% memiliki jenjang pendidikan rendah atau SMA kebawah. Jumlah pegawai pada kategori pendidikan tinggi didominasi oleh pegawai lulusan D-IV/S1 sebanyak 279 pegawai, diikuti S2 sebanyak 107.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan										Golongan				Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional									
		SD	SM P	SM A	D-I	D-II	D-III	D-IV/S1	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon				Jabatan						
															II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Staf	Fungsional	Perangkat Desa	CPNS	
Kapanewon Srandakan	17	0	1	6	0	0	0	8	2	0	0	4	12	1	0	0	1	1	5	2	7	0	1	0	
Sekretariat	42	0	2	16	0	0	2	16	6	0	2	8	24	8	0	1	4	0	9	0	28	0	0	0	
Sekretariat DPRD	38	0	2	16	0	0	1	15	4	0	2	8	22	6	0	1	4	0	9	0	24	0	0	0	
Sekretariat KPU	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Sekretariat BNN	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
Inspektorat	50	50	0	1	7	0	0	4	23	14	0	0	8	21	21	0	1	6	0	3	0	10	30	0	
Total	751	751	6	26	271	2	2	54	279	107	0	18	166	464	103	1	8	37	29	151	31	406	63	15	
Persentase			40.35%			59.12%						2.40%	22.10%	61.78%	13.72%	0.13%	1.07%	4.93%	3.86%	20.11%	4.13%	54.06%	8.39%	2.00%	
URUSAN PILIHAN																									
Kelautan dan Perikanan	16	0	2	3	0	0	1	6	4	0	0	4	10	2	0	0	0	1	3	1	11	0	0	0	
Pariwisata	63	2	7	33	0	0	8	8	5	0	5	32	21	5	0	1	1	3	8	0	49	1	0	0	
Pertanian	136	0	1	44	0	0	8	62	21	0	2	33	81	20	0	1	1	3	11	2	55	63	0	0	
Perdagangan	100	3	7	62	0	0	1	17	10	0	7	45	40	8	0	1	1	3	9	1	81	4	0	0	
Perindustrian	12	0	0	4	0	0	0	4	4	0	0	3	6	3	0	0	0	2	3	0	7	0	0	0	
Transmigrasi	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	
Total	330	330	5	17	147	0	0	18	99	44	0	14	118	160	38	0	3	3	12	35	4	205	68	0	
Persentase			51.21%			48.79%						4.24%	35.76%	48.48%	11.52%	0.00%	0.91%	0.91%	3.64%	10.61%	1.21%	62.12%	20.61%	0.00%	
PUM																									
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	16	0	0	6	0	0	0	8	1	0	0	3	10	3	0	0	1	2	6	0	7	0	0	
Total			37.50%			56.25%						0.00%	18.75%	62.50%	18.75%	0.00%	0.00%	6.25%	12.50%	37.50%	0.00%	43.75%	0.00%	0.00%	
URUSAN WAJIB																									
Pendidikan	39 81	0	25	375	7	202	62	3084	224	2	21	162	1725	2073	0	1	0	4	15	0	599	3362	0	0	
Kesehatan	15 29	3	23	215	17	1	766	319	184	1	10	277	1070	172	0	2	3	10	26	26	468	994	0	0	
Dinkes	104 7	1	16	146	15	0	531	228	109	1	5	191	743	108	0	1	1	4	15	26	328	672	0	0	
RSUD	482	2	7	69	2	1	235	91	75	0	5	86	327	64	0	1	2	6	11	0	140	322	0	0	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 4	5	7	55	0	0	6	13	18	0	6	43	43	12	0	1	1	5	17	3	76	1	0	0	
DPUPKP	95	5	7	52	0	0	5	11	15	0	6	41	37	11	0	1	1	4	14	3	71	1	0	0	
Dispertaru	9	0	0	3	0	0	1	2	3	0	0	2	6	1	0	0	0	1	3	0	5	0	0	0	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai		Kualifikasi Pendidikan									Golongan				Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional									
			SD	SM P	SM A	D-I	D-II	D-III	D-IV/S1	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon						Jabatan			
																II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Staf	Fungsional	Perangkat Desa	CPNS
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10		0	0	3	0	0	0	4	3	0	0	3	6	1	0	0	0	1	3	1	5	0	0	0
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	77		2	7	30	0	0	4	22	12	0	2	15	53	7	0	2	1	7	17	0	43	7	0	0
Satpol PP	46		0	2	24	0	0	2	13	5	0	0	8	35	3	0	1	1	3	8	0	26	7	0	0
BPBD	31		2	5	6	0	0	2	9	7	0	2	7	18	4	0	1	0	4	9	0	17	0	0	0
So	29		0	0	10	1	0	2	9	7	0	0	5	18	6	0	1	1	3	8	0	16	0	0	0
sia																									
Tenaga Kerja	52		0	2	15	0	7	23	5	0	0	8	33	11	0	0	1	3	10	1	22	24	15	0	0
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7		0	0	2	0	0	0	3	2	0	0	1	2	4	0	0	0	1	3	1	4	0	0	0
Pangan	17		0	0	8	0	0	1	4	4	0	0	7	7	3	0	0	0	1	3	0	13	0	0	0
Pertanahan	30		1	2	8	0	0	3	8	8	0	1	11	13	5	0	1	1	2	8	0	18	0	0	0
Lingkungan Hidup	103		2	13	51	0	0	2	24	11	0	7	59	30	7	0	1	1	3	13	1	84	0	0	0
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52		0	0	23	0	0	8	14	7	0	0	8	38	6	0	1	1	3	11	0	31	5	0	0
Pemberdayaan Masyarakat Desa	13		0	0	5	0	0	0	8	0	0	0	0	13	0	0	0	0	1	3	0	9	0	0	0
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27		0	0	8	0	0	5	7	7	0	0	2	16	9	0	1	1	2	9	0	14	0	0	0
Perhubungan	47		1	0	25	0	4	0	11	6	0	1	22	19	5	0	1	1	3	7	0	30	5	0	0
Komunikasi dan Informatika	37		0	0	4	0	1	4	23	5	0	0	7	25	5	0	1	1	3	9	0	17	3	0	0
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	27		1	1	11	0	0	2	4	8	0	2	10	8	7	0	1	0	2	7	0	16	1	0	0
Penanaman Modal	32		0	0	7	0	0	3	16	6	0	0	2	23	7	0	1	1	4	11	0	11	4	0	0
Keperempuanan dan Olahraga	11		2	1	1	0	0	1	4	2	0	0	4	4	3	0	0	0	1	3	0	7	0	0	0
Statistik	8		0	0	0	0	0	1	4	3	0	0	1	6	1	0	0	0	1	4	0	3	0	0	0
Diskominfo	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Bappeda	7		0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	1	5	1	0	0	0	1	3	0	3	0	0	0
Persandian	5		0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0
Kebudayaan	31		0	1	6	0	0	6	10	8	0	0	8	17	6	0	1	1	3	9	0	16	1	0	0
Perpustakaan	27		0	0	5	1	0	10	7	4	0	0	3	20	4	0	1	1	2	5	0	12	10	0	0
Ar	10		0	0	3	0	2	0	5	0	0	0	2	7	1	0	0	0	1	2	0	1	5	0	0
si																									
p																									
TOTAL	6266	6266	17	82	871	26	217	910	3611	529	3	58	686	3177	2345	0	18	18	74	197	54	1517	4414	0	0
PERSENTASE (%)			15.48%			84.52%						0.93%	10.95%	50.70%	37.42%	0.00%	0.29%	0.29%	1.18%	3.14%	0.86%	24.21%	70.44%	0.00%	0.00%

Sumber : BKPP Kab. Bantul 2020

Jumlah pegawai yang tergolong kedalam jenjang pendidikan rendah sebagian besar merupakan lulusan SMA yakni sebanyak 271 pegawai. Pada kelompok golongan, persentase terbanyak merupakan pegawai golongan III sebesar 61,78% diikuti golongan II sebesar 22,10% kemudian berturut turut golongan IV (13,72%) dan golongan I (2,40%). Pada kelompok pejabat struktural dan fungsional, staf merupakan jumlah yang terbanyak sebesar 406 pegawai atau 54,06%. Jumlah terbanyak berikutnya adalah pegawai eselon IVA sebesar 151 pegawai atau 20,11%. Sedangkan pejabat fungsional yang menangani urusan penunjang daerah hanya sebanyak 63 pegawai atau 8,39%. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional tersaji pada Tabel 1.1.4

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten Bantul ditargetkan Rp 2.157.411.830.374,19 terealisasi sebesar Rp 2.104.834.822.639,42 terdapat selisih kurang dari target sebesar Rp 52.577.077.734,77 atau tercapai 97,56% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Realisasi yang melebihi dari target hanya berasal pada komponen Pendapatan Asli Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 420.780.615.321,87 dan terealisasi sebesar 113,98% atau terealisasi Rp 479.604.971.572,42, sedangkan untuk pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih belum mencapai nilai yang direncanakan. Adapun target dan realisasi dari sumber-sumber pendapatan daerah ditampilkan pada **Tabel 1.1.5**

Tabel 1.1.5 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 (sebelum dilakukan audit BPK)

No	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	420.780.615.321,87	479.604.971.572,42	113,98
	Pajak Daerah	175.265.482.000,00	200.826.187.667,73	114,58
	Retribusi Daerah	24.354.322.386,00	30.465.840.962,75	125,09
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.704.142.455,07	25.137.579.049,59	101,75
	Lain-lain PAD yang Sah	196.456.668.480,80	223.175.363.892,35	113,60
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.654.413.826.632,32	1.541.369.668.067,00	93,17
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.279.745.464.554,00	1.268.337.753.395,00	99,11
	Dana Bagi Hasil Pajak	29.672.739.000,00	35.684.047.957,00	120,26
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	1.424.507.000,00	796.423.668,00	55,91
	Dana Alokasi Umum	931.996.005.000,00	923.213.607.000,00	99,06
	Dana Alokasi Khusus	87.962.960.000,00	79.954.421.216,00	90,90
	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	228.689.253.554,00	228.689.253.554,00	100,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	191.989.028.000,00	86.583.558.000,00	45,10
	Dana Penyesuaian	191.989.028.000,00	86.583.558.000,00	45,10
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	152.621.840.588,32	159.398.655.115,00	104,44
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	152.621.840.588,32	159.398.655.115,00	104,44
	Bantuan Keuangan-LRA	30.057.493.490,00	27.049.701.557,00	89,99
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	30.057.493.490,00	27.049.701.557,00	89,99
	3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	82.217.388.420,00	83.860.183.000,00
Pendapatan Hibah		82.217.388.420,00	83.860.183.000,00	102,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN-LRA		2.157.411.830.374,19	2.104.834.822.639,42	97,56

Sumber : BKAD Kab. Bantul; Akses simral.bppt.go.id/bantulkab tanggal 15 Maret 2021

Berdasarkan Tabel 1.1.5 di atas terlihat bahwa realisasi sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Bantul masih didominasi oleh Pendapatan Transfer yaitu mempunyai kontribusi sebesar 73,23%, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah dengan kontribusi sebesar 22,79%, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 3,98%.

2) Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah pada tahun 2020 sebesar 87,86% dengan rincian sebagaimana disajikan pada **Tabel 1.1.6** Pada tahun 2020 belanja daerah Kabupaten Bantul dianggarkan sebesar Rp 2.092.468.606.701,77 terealisasi sebesar Rp 1.909.792.977.422,99 atau 87,7%, dengan perincian anggaran belanja operasional sebesar Rp 1,715,291,480,862.44, terealisasi sebesar Rp 1.591.418.386.553,34 atau 92,76; anggaran belanja modal sebesar Rp 234.111.281.876,00 terealisasi sebesar Rp 216.802.731.355,65 atau 92,61%, dan anggaran belanja tak terduga sebesar Rp 142.765.843.963,33, terealisasi sebesar Rp 101.571.859.514,00 atau terealisasi sebesar 71,15%.

Tabel 1.1.6 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (sebelum dilakukan audit BPK RI)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BELANJA				
1.	BELANJA OPERASI	1.715.591.480.862,44	1.591.418.386.553,34	92,76
	Belanja Pegawai	994.101.728.747,34	925.569.594.009,00	93,11
	Belanja Barang dan Jasa	612.575.068.915,10	562.553.987.249,41	91,83
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	106.079.683.200,00	102.534.905.294,93	96,66
	Belanja Bantuan Sosial	2.835.000.000,00	759.900.000,00	26,80
2.	BELANJA MODAL	234.111.281.876,00	216.802.731.355,65	92,61
	Belanja Modal Tanah	6.770.845.978,00	6.218.148.953,00	91,84
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.264.079.869,00	76.415.025.209,00	95,20
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.832.823.095,00	26.972.415.318,25	93,55
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	117.250.646.434,00	106.223.050.375,40	90,59
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	912.886.500,00	900.265.500,00	98,62
	Belanja Modal Aset Lainnya	80.000.000,00	73.826.000,00	92,28
3.	BELANJA TAK TERDUGA	142.765.843.963,33	101.571.859.514,00	71,15
	Belanja Tak Terduga	142.765.843.963,33	101.571.859.514,00	71,15
JUMLAH BELANJA		2.092.468.606.701,77	1.909.792.977.422,99	91,27
TRANSFER				
1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	22.871.517.593,40	22.871.517.591,78	100,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	18.500.000.000,00	18.499.999.998,88	100,00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.371.517.593,40	4.371.517.592,90	100,00
2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	268.118.528.110,00	161.477.548.110,00	60,23
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	91.448.260,00	91.448.260,00	100,00
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	268.027.079.850,00	161.386.099.850,00	60,21
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER	290.990.045.703,40	184.349.065.701,78	63,35
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.383.458.652.405,17	2.094.142.043.124,77	87,86
	SURPLUS / (DEFISIT)	(226.046.822.030,98)	10.692.779.514,65	(4,73)

Sumber : BKAD Tahun 2021; Akses simral.bppt.go.id/bantulkab per tanggal 15 Maret 2021.

Transfer dianggarkan sebesar Rp 290.990.045.703,40 terealisasi sebesar Rp 184.349.065.701,78 atau 63,35%, yang terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan Rp 22.871.517.593,40 terealisasi 100% atau sebesar Rp 22.871.517.591,78 dan transfer bantuan keuangan dianggarkan Rp 268.118.528.110,00 terealisasi Rp 161.477.548.110,00 atau 60,23%.

Realisasi belanja dan transfer pada tahun 2020 mencapai 87,86% disebabkan antara lain adanya refocusing terhadap pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan adanya pandemi SARS-Covid-19, beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan hingga 100% hingga pada akhir TW IV dan beberapa belanja yang tidak maksimal yang disebabkan mundurnya penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah diharuskan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPKD) sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Tahun 2017, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mengacu pada Permendagri tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan perubahan/penyesuaian terhadap RPJMD dikarenakan beberapa hal yakni: a) adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan sehingga diperlukan perubahan terhadap perangkat daerah dan target indikator kinerja; b) perubahan substansi dan sistematika RPJMD sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017; c) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator yang telah ditetapkan.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama tahun 2019 – 2021. Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul 2016-2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang antara lain meliputi kesehatan, pendidikan dan rohani.
2. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal.
3. Pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing.
4. Mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan dan daya saing daerah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.
6. Pengembangan sarana dan prasarana dasar dan yang menunjang aktivitas perekonomian.
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
8. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial.
9. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan.

Beberapa keterangan tambahan terkait rumusan isu strategis di atas dan sejalan dengan isu strategis DIY adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan Kawasan Pantai Akibat Abrasi.

Kawasan pantai selatan yang berada di Kabupaten Bantul terutama di Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek dengan garis pantai kurang lebih 12 Km. Rusaknya ekosistem pantai dikhawatirkan mendorong terjadinya abrasi pantai. Dari ketiga kawasan pantai tersebut, saat ini telah mengalami abrasi walaupun tingkat kerusakannya berbeda-beda. Pantai Parangtritis tingkat abrasinya lebih kecil dibandingkan dengan Pantai Samas,

Pandansimo, dan Kuwaru. Hal ini disebabkan adanya material gumuk pasir yang lebih banyak dibandingkan dengan pantai lainnya sehingga dapat menghalangi abrasi pantai.

2. Alih Fungsi Lahan

Peningkatan kebutuhan penduduk akan penyediaan perumahan, fasilitas pendidikan, kegiatan usaha menyebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan terutama dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan banyak terjadi terutama di kawasan perkotaan, sedangkan dari sisi fungsinya wilayah Kabupaten Bantul sebagai daerah produksi pertanian yang produktif untuk DIY

3. Kaawasan Pantai Selatan

Kegiatan yang melebihi daya dukung di pantai selatan berpotensi menimbulkan ancaman lingkungan berupa abrasi dan hilangnya potensi gumuk pasir. Kegiatan tersebut seperti tambak udang, perkembangan bangunan akibat kegiatan wisata, dan lainnya

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Sehat**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong
5. **Nasionalisme**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Religius**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan

pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, aman, harmonis, dan bersatu serta berbudaya istimewa.

c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) periode RPJMD ke depan (RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021).

Dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021, merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul beserta Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai tujuan dan merupakan Ikhtisar Hasil (Outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Uraian prioritas pembangunan daerah, kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Berpijak dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah, berikut disajikan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama serta Target Tahunan beserta realisasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya dalam 1 (satu) periode RPJMD tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 1.1.7 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Sasaran Daerah dan Indikator Sasaran Daerah beserta target Indikator Sasaran Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)																							
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET dan REALISASI CAPAIAN						KONDISI AKHIR								
									2016	2017	2018	2019	2020	2021									
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	RPJMD 11/2016	T		60 (Baik)	65 (Baik)	70 (Baik)	75	80 (Baik)	85 (Sangat Baik)								
								R	N/A	74,5 (Baik)	75 (Baik)	79,6 (Baik)											
							RPJMD 19/2018	T				7,5 (Baik)	8,0 (Baik)	8,5 (Sangat Baik)	8,5 (Sangat Baik)								
								R				7,72 (Baik)	7,7 (Baik)	-	-								
							2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	RPJMD 11/2016	T		73,26	73,28	73,3	73,31	73,32	73,33	
															R	73,24	73,44	73,47	73,56				
RPJMD 19/2018	T				73,6	73,65								73,70	73,70								
	R				73,77	73,86								-	-								
RPJMD 11/2016	T			15	15,2	15,4								15,6	15,8	15,9							
	R	15	13,55	14,73	14,74																		
RPJMD 19/2018	T				15,23	15,38	15,54	15,54															
	R				15,15	15,17	-	-															
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persen	RPJMD 11/2016	T		14,41	13,66	12,91	12,16	11,41	10,66								
								R	15,16	14,55	14,07	13,43											
							RPJMD 19/2018	T				12,13	10,86	9,59	8,32	8,32							
								R				12,92	13,5										
							Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	RPJMD 11/2016	T		5,25	5,3	5,4	5,45	5,5	5,6				
												R	5,1	5,06	5,1	5,02							
				RPJMD 19/2018	T								5,45	5,5	5,6	5,6							
					R								5,53	0,49									
				Gini Ratio		Angka						RPJMD 11/2016	T		0,3149	0,3121	0,3093	0,3065	0,305	0,3025			
													R	0,3177	0,3967	0,41	0,4126						
							RPJMD 19/2018	T					0,39	0,38	0,37	0,37							
								R					0,448	0,38									
			Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persen	RPJMD 11/2016	T		5	6	7	8	9	10	10							
								R	4,85	12,03	21,59	13,28											
							RPJMD 19/2018	T				22	23	24	24								
								R				22,89	-54,55										
							Cakupan industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif yang berkualitas	Persen	RPJMD 11/2016	T		25	30	35	40	45	50					
											R	22	39	41,11	42,9								
			RPJMD 19/2018	T							45	47	50	50									
				R							46,2	46,2											
			Pertumbuhan produksi	Pertumbuhan produksi	Persen	RPJMD 11/2016	T		0,1005	0,1010	0,1015	0,102	0,1025	0,103									
							R	0,1001	9,94	0,1133	0,130												

				masyarakat	tanaman pangan		RPJMD 19/2018	T				0,1020	0,1025	0,1030	0,1030	
								R				3,54	0,71			
					Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	RPJMD 11/2016	T		1,00	1,025	1,05	1,08	1,10	1,125	
								R	0,75	14,09	7,94	0,85				
							RPJMD 19/2018	T					1,08	1,10	1,125	1,125
								R					5,72	2,91		
					Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	RPJMD 11/2016	T		0,10	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	
								R	0,09	7,8	0,17	0,24				
							RPJMD 19/2018	T					0,25	0,3	0,35	0,35
								R					0,57	2,8		
					Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	RPJMD 11/2016	T		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
								R	0,45	4,24	20,52	0,71				
							RPJMD 19/2018	T					0,8	0,9	1	1
								R					1,57	0,93		
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	RPJMD 11/2016	T		1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	
								R	1,20	0,35	5,92	1,14				
							RPJMD 19/2018	T					1,40	1,45	1,50	1,50
								R					1,41	1,59		
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	RPJMD 11/2016	T		N/A	72	74	76	78	80	
								R	N/A	N/A	71,57	74,36				
							RPJMD 19/2018	T					76	78	80	80
								R					76,7	74,98		
				Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	RPJMD 11/2016	T		39	45	50	56	63	72	
								R	38	31,35	45,1	53,36				
							RPJMD 19/2018	T					56	63	72	72
								R					60,4	63,02		
				Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Persen	RPJMD 11/2016	T		20	22,66	25,34	28	30,66	33,34	
								R	18	15	29,33	37,33				
							RPJMD 19/2018	T					38,66	45,33	52	52
								R					46,67	46,66		
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	RPJMD 11/2016	T		80	81	70,35	83	84	85	
								R	79	70	70,24	70,45				
							RPJMD 19/2018	T					72,5	75	80	80
								R					72,5	75,01		
5		Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Persen	RPJMD 11/2016	T		0,040	0,038	0,035	0,03	0,028	0,027	
								R	0,04	0,061	0,074	0,055				
							RPJMD 19/2018	T					0,070	0,065	0,060	0,060
								R					0,074	0,076		
		Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	RPJMD 11/2016	T		40	50	60	70	80	90	
								R	35	54,8	57,01	68,4				
							RPJMD 19/2018	T					65	70	75	75
								R					69,7	67,52		

Sumber : RPJMD Perubahan Perda 19/2018 Tabel 5.1; Realisasi tahun 2018-2020 pada Laporan Kinerja Kab. Bantul tahun 2018-2020; R= Realisasi; T=Target

d. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2020 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 merebak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi seluruh kehidupan di dunia. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Meningkat sangat signifikan, sampai dengan 27 Juli 2020 secara kumulatif telah terkonfirmasi sebanyak 108.376 orang terinfeksi. Pasien positif Covid-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat. Kasus pertama di Kabupaten Bantul terkonfirmasi sejumlah satu orang positif pada tanggal 18 Maret 2020, dan terus terjadi peningkatan menjadi 225 kasus pada tanggal 31 Juli 2020.

Berdasarkan pertimbangan kondisi darurat akibat peningkatan angka kesakitan Covid-19, korban jiwa dan kerugian materiil, serta berimplikasi pada aspek sosial ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka diterbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Penjelasan tentang mekanisme ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) dan seterusnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adanya Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini menyebabkan adanya perubahan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 yang

sebelumnya telah disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021, RKPD tahun 2020, IKU dan APBD tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Perubahan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1.8 Kinerja Awal Tahun 2020 dan Perubahan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2020	
				Awal	Perubahan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	klasifikasi	8,0	8,0 (Baik)
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	tahun	73,65	73,65
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	tahun	15,38	15,38
4	Turunnya Masyarakat Yang Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	persen	9,59	13,94
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,5	-0,13
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	persen/ angka	0,38	0,38
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan	persen	23	-67
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	persen	47	47
8	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan.	persen	0,1025	0,1025
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	1,10	1,10
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0,3	0,30
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	persen	0,90	0,90
9	Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	Pertumbuhan Produksi Perikanan	persen	1,45	1,45
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	klasifikasi	78	78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2020	
				Awal	Perubahan
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	63	63
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	persen	45,33	45,33
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	75	75
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	persen	0,065	0,065
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	70	70

Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2020; Bappeda, 2021

e. Program Pembangunan Pemerintah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Adapun penentuan program prioritas daerah Kabupaten Bantul periode Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.9 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul pada Tabel 6.8 RPJMD Perubahan 2016-2021 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.19 Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Nilai Maturitas SPIP	Level 1 (1,92)	Level 3 (3,3)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Pengawasan)	INSPEKTORAT
		Persentase pemenuhan kompetensi Aparatur	84%	91,30%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPP
		Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	57,3	75	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78.13%	84%	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
					Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,2 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
					Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
					Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah		
					Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
		Persentase SKPD yang menyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	27%	70%	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		Indeks Kepuasan Aparatur	73%	82%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Fungsi Penunjang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPP
		Persentase Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tepat Waktu	56,88%	85%	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penanaman Modal	DPMPT
				Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77	80,5	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Penanaman Modal	DPMPT
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	60%	90%	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
		Prosentase SKPD yang menerapkan layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	60%	90%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			
				Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi			
		Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan	N/A	92%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Instansi yang	N/A	95%	Proram Keserasian		

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil			Kebijakan Kependudukan		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79%	81%	Program Pengelolaan Data Kependudukan		
		Persentase Penegakan Perda	100%	72%	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakan Perda	Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
		Persentase pemilih yang berpartisipasi	70,5%	75%	Program pendidikan politik masyarakat	Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase pencapaian prolegda	22%	22%	Program Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SEKRETARIAT DPRD
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	79 (BB)	82 (A)	Program peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Program Penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
		Persentase Ratarata capaian Sasaran Daerah	N/A	95%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Perencanaan Sosial dan	Fungsi Penunjang Perencanaan	BAPPEDA

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Budaya		
		Persentase Rata-rata capaian target kinerja program OPD	N/A	91,50%	Program pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang Perencanaan	BAPPEDA
		Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80%	100%	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	70%	90%	Program pemberdayaan masyarakat	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	60%	100%	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
		Persentase Belanja Pegawai	58,90%	45%	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
		Opini Pemeriksaan BPK	1 (WTP)	1 (WTP)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Keuangan)	BKAD
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	20,21%	26%	Program Peningkatan dan Pengembangan	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Keuangan)	BKAD
		Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	16,18%	21,00%	Pengelolaan Keuangan Daerah		
2	Umur Harapan Hidup	AKI	87.5/ 100.000 KH	85/ 100.000 KH	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	DINAS KESEHATAN

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Program Upaya kesehatan masyarakat		
		AKB	8,35/ 1.000 KH	8,0/ 1.000 KH	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Net Death Rate	18,98/ 1 pasien	16,5/ 1 pasien	Program Peningkatan pelayanan rumah sakit Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
		Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3.34 jiwa	3,04 jiwa	Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,38%	0,37%	Program Perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Ketersediaan Energi	3.072 kkal/ kapita/ hari	3.1 kkal/ kapita/ hari	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian /Perkebunan)	Ketahanan Pangan	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Ketersediaan Protein	77,80 kkal/ kapita/ hari	78,36 kkal/ kapita/ hari			
		Skor Pola Pangan Harapan	93,1	93,16			
		Angka Kesakitan/ Insiden Rate (IR) DBD	150/ 100	110/ 100	Program Pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	DINAS KESEHATAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
			penduduk	penduduk				
		Prevalensi Penderita HIV	<0,5	0,1	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	
		Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/ Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	24%	30%	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga. Program peningkatan sarpras olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3	Angka Harapan Lama sekolah	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	APK SD:94,5%	APK SD: 96,5%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			APK SMP:91,5%	SMP: 96%				
			APM SD:84,65%	APM SD: 84,65%				
				SMP:83,02%	SMP: 68,20%	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		
				SMP:67,64%	68,20%	Program manajemen pelayanan pendidikan		
			Angka Melanjutkan (Ke SMP/ SLTA)	ke SMP 100%	Ke SMP: 100%, ke SMA: 100%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (jenjang SMP)	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.74 tahun	9 tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		
			Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	Ranking IV DIY (SD)	Ranking I DIY (SD)	Program Peningkatan Prestasi Akademik		
	Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Ranking III DIY (SMP)	Ranking I DIY (SMP)					
	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	5 Buah	26 Buah					
	Persentase Peningkatan	28%	33%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN		

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan			Perpustakaan,		DAN KEARSIPAN
		Persentase kelulusan	SD:99.9% SMP:100%	SD: 100 SMP:100	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Putus Sekolah	SD 0.02% SMP: 0,02%	SD:0,02% SMP: 0,02%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		
		APK PAUD	APK PAUD: 98,78%	APK PAUD: 98,95%	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
4	Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	4,1%	2,8%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja		
		Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	13,9%	12,49%	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PMD
		Nilai Tukar Petani	101,1	102	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PKP
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	14%	12,50%	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya	Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Indeks Desa	85	24	Program Peningkatan Partisipasi	Pemberdayaan	DINAS

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Membangun			Masyarakat Dalam Membangun Desa	Masyarakat dan Desa	PENGENDALIAN
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		PENDUDUK, KB, PMD
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekspor	6,85%	7%	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah Pasar Tipe A,	0	4 unit	Program Penataan Pasar Rakyat	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
					Program Pemberdayaan Pedagang		
		Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	N/A	5,95 %	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
					Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		
		Pertumbuhan Investasi	8,43 %	9,5 %	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
			Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi				
		Percepatan Belanja Pemerintah	51%	75%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Keuangan)	BKAD
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 1.163.800	Rp.1.773.479	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS
					Program Penempatan Tenaga Kerja		
		Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	N/A	180 unit	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
			Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	N/A	10 unit	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
7	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.500.114 orang	6.780.706 orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	DINAS PARIWISATA
		Lama Tinggal Wisatawan	1,1 hari	2,2hari	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
					Program Pengembangan Kemitraan		
8	Cakupan Industri Kreatif	Pertumbuhan Industri	1,56%	2%	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
		Cakupan Pengembangan Potensi Ketersediaan Energi	0%	75%	Program Potensi Energi		
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan.	Produksi Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	230.860 ton	232.272,99 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Produksi Tanaman Hortikultura	14.363,65 ton	15.502,70 ton			
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman Perkebunan	14.458,93 ton	14.655,19 ton			
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	Peningkatan Produksi daging	14.142,37 ton	14.790,70 ton			
13	Pertumbuhan Produksi Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	12.106 ton	13.577 ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap		
					Program Optimalisasi		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	84,01%	76,08 %	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	76%	84%	Program Pembangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	42%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		Persentase kecukupan air irigasi	78%	83,16%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	5%	1,83%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ							
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	30,69	56	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks Kualitas Udara (IKUd)	46,47	90	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup		
		Indeks Tutupan Lahan	24,29	61,2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Volume sampah yang tertangani	410.000 m ³	470.000 m ³	Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan		
16	Desa Tangguh Bencana	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	90%	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	BPBD
		Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,19%	5,20%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		
		Persentase Relokasi Warga	N/A	100%			
		Persentase penanganan banjir	13,52%	47,68%	Program pengendalian banjir	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM P,K, dan P
17	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	N/A	4	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		Persentase cakupan pengendalian tata ruang	70%	80%	Program pemanfaatan ruang	Penataan Ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		Cakupan Sertifikasi Tanah	N/A	100%	Program Peningkatan Pelayanan Pertanahan		
18	Angka Kriminalitas	Jumlah intoleransi di masyarakat	N/A	0 Kasus	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	0%	100%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP
					Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		
Program Peningkatan Ketertiban							

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					dan Keamanan		
		Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	0,38	0,38	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Jumlah Pemuda Pelopor	4 Orang	4 Orang	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Cakupan Pelestarian adat dan tradisi	N/A	30%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN
		Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	N/A	24%	Program Pengembangan Nilai Budaya		
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		

f. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Tabel 1.1.10 Matriks Kegiatan tahun Anggaran 2020 pada RKPD Perubahan tahun 2020 Peraturan Bupati Bantul No 99 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	PENDIDIKAN	198,500,225,730.00	188,496,397,487.00	94.96%
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	198,500,225,730.00	188,496,397,487.00	94.96%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,420,727,206.00	4,169,009,736.00	94.31%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2,736,706,206.00	2,519,232,963.00	92.05%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	253,490,000.00	233,426,733.00	92.09%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,430,531,000.00	1,416,350,040.00	99.01%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,135,645,324.00	2,037,874,037.00	95.42%
	Pengadaan barang bercorak kesenian	161,250,000.00	161,245,000.00	100.00%
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	245,800,000.00	243,436,500.00	99.04%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	955,095,324.00	941,526,500.00	98.58%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	272,880,000.00	268,010,032.00	98.22%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	500,620,000.00	423,656,005.00	84.63%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	455,164,500.00	418,970,500.00	92.05%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	455,164,500.00	418,970,500.00	92.05%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	269,825,000.00	264,835,000.00	98.15%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	222,700,000.00	219,600,000.00	98.61%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	47,125,000.00	45,235,000.00	95.99%
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,371,351,000.00	2,308,567,000.00	97.35%
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	83,295,000.00	83,045,000.00	99.70%
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	86,425,000.00	81,025,000.00	93.75%
	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	1,672,181,000.00	1,656,747,000.00	99.08%
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	529,450,000.00	487,750,000.00	92.12%
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	138,067,807,700.00	130,171,845,714.00	94.28%
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	47,649,340,551.00	42,793,290,766.00	89.81%
	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	36,000,000.00	36,000,000.00	100.00%
	Perijinan SD dan SMP Baru	5,000,000.00	3,350,000.00	67.00%
	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	0.00	0.00	

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	113,690,000.00	91,510,000.00	80.49%
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	100,000,000.00	99,550,000.00	99.55%
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	49,625,000.00	48,400,000.00	97.53%
	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	0.00	0.00	
	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	245,400,000.00	245,400,000.00	100.00%
	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	225,225,000.00	223,896,000.00	99.41%
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	4,587,648,000.00	4,587,568,000.00	100.00%
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	432,315,630.00	398,798,383.00	92.25%
	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	81,652,836,519.00	78,737,098,565.00	96.43%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	73,125,000.00	68,650,000.00	93.88%
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	118,130,000.00	112,870,000.00	95.55%
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	2,766,347,000.00	2,715,489,000.00	98.16%
	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	13,125,000.00	9,975,000.00	76.00%
	Program Pendidikan Non Formal	1,116,084,000.00	905,059,000.00	81.09%
	Penyelenggaraan pendidikan non formal	858,140,000.00	647,990,000.00	75.51%
	Pengembangan Pendidikan non formal	210,344,000.00	210,344,000.00	100.00%
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	23,750,000.00	23,750,000.00	100.00%
	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	23,850,000.00	22,975,000.00	96.33%
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	49,347,541,000.00	47,910,096,500.00	97.09%
	Evaluasi standar pelayanan minimal	37,841,000.00	37,650,000.00	99.50%
	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	48,511,880,000.00	47,084,164,000.00	97.06%
	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	177,300,000.00	169,725,000.00	95.73%
	Pembinaan Muatan Lokal	620,520,000.00	618,557,500.00	99.68%
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	316,080,000.00	310,140,000.00	98.12%
	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	242,575,000.00	239,040,000.00	98.54%
	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	58,200,000.00	56,300,000.00	96.74%
	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	15,305,000.00	14,800,000.00	96.70%
	Program Peningkatan Nilai Akademik	0.00	0.00	
	Peningkatan Metode Pengajaran	0.00	0.00	
2	KESEHATAN	356,994,045,804.00	330,576,810,571.42	92.60%
	Dinas Kesehatan	174,296,979,703.00	150,966,457,237.42	86.61%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,892,313,630.00	5,585,128,989.00	94.79%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	949,034,410.00	915,634,937.00	96.48%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	530,682,480.00	374,906,406.00	70.65%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4,412,596,740.00	4,294,587,646.00	97.33%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	783,800,000.00	737,973,000.00	94.15%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	0.00	0.00	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	135,675,000.00	134,677,500.00	99.26%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	648,125,000.00	603,295,500.00	93.08%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	106,217,500.00	106,217,500.00	100.00%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	106,217,500.00	106,217,500.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	122,139,000.00	121,234,000.00	99.26%
	Penyusunan sistem manajemen mutu	84,375,000.00	83,475,000.00	98.93%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	37,764,000.00	37,759,000.00	99.99%
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6,417,225,000.00	5,109,341,316.80	79.62%
	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	6,417,225,000.00	5,109,341,316.80	79.62%
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	104,256,025,202.00	96,845,275,943.62	92.89%
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	612,252,500.00	593,874,100.00	97.00%
	Peningkatan kesehatan masyarakat	23,833,482,885.00	23,780,609,914.00	99.78%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	58,875,000.00	52,312,000.00	88.85%
	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	69,917,500.00	59,368,500.00	84.91%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	2,289,556,414.00	1,930,524,479.00	84.32%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	2,098,602,786.00	2,045,474,105.00	97.47%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	1,997,109,136.00	1,816,114,763.00	90.94%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	2,450,482,462.00	2,242,880,191.00	91.53%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	2,756,077,372.00	2,646,433,282.00	96.02%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	1,864,134,833.00	1,610,674,933.00	86.40%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	1,411,615,268.00	1,347,662,466.00	95.47%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I	2,155,916,901.00	1,949,324,512.70	90.42%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	1,461,728,851.00	1,374,450,709.00	94.03%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	1,890,459,509.00	1,789,247,158.92	94.65%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	1,411,860,150.00	1,293,870,233.00	91.64%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	2,203,736,715.00	2,169,231,689.00	98.43%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	2,002,896,600.00	1,720,541,749.00	85.90%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	1,831,332,435.00	1,414,547,024.00	77.24%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	1,276,267,324.00	1,199,668,490.00	94.00%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	2,930,619,207.00	2,351,256,922.00	80.23%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	2,643,386,695.00	2,434,403,546.00	92.09%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	2,008,475,887.00	1,904,995,931.00	94.85%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	1,502,262,060.00	1,406,760,371.00	93.64%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	781,773,541.00	728,793,906.00	93.22%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	2,652,341,493.00	2,514,805,040.00	94.81%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	1,992,947,744.00	1,929,483,086.00	96.82%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	2,644,282,817.00	2,451,606,000.00	92.71%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	1,849,162,834.00	1,744,525,060.00	94.34%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan	2,823,383,631.00	2,226,617,101.00	78.86%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	1,526,490,455.00	1,369,708,535.00	89.73%
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	1,350,000,000.00	1,300,443,842.00	96.33%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	645,000,000.00	628,390,032.00	97.42%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	645,000,000.00	631,429,780.00	97.90%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	845,000,000.00	658,483,808.00	77.93%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	645,000,000.00	643,966,072.00	99.84%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	675,000,000.00	619,280,284.00	91.75%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	635,000,000.00	629,139,902.00	99.08%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	635,000,000.00	600,374,113.00	94.55%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	650,000,000.00	554,307,365.00	85.28%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	660,000,000.00	580,444,513.00	87.95%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	860,000,000.00	854,562,964.00	99.37%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	675,302,000.00	650,212,749.00	96.28%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I	885,000,000.00	883,984,240.00	99.89%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	645,000,000.00	513,464,887.00	79.61%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	650,000,000.00	515,207,429.00	79.26%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	670,000,000.00	567,146,089.00	84.65%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret	725,000,000.00	684,556,425.00	94.42%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	710,000,000.00	683,655,373.00	96.29%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	680,000,000.00	535,063,084.00	78.69%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	680,000,000.00	669,908,049.00	98.52%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	740,000,000.00	655,844,875.00	88.63%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	740,000,000.00	738,490,350.00	99.80%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	840,000,000.00	834,842,570.00	99.39%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	710,000,000.00	616,178,524.00	86.79%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	840,000,000.00	838,870,799.00	99.87%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	645,000,000.00	513,430,041.00	79.60%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	645,000,000.00	580,749,179.00	90.04%
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II	635,000,000.00	621,907,501.00	97.94%
	Operasional Rumah Sakit	6,439,292,197.00	5,516,175,308.00	85.66%
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	425,000,000.00	425,000,000.00	100.00%
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	324,015,000.00	176,639,000.00	54.52%
	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	324,015,000.00	176,639,000.00	54.52%
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	588,941,500.00	551,648,500.00	93.67%
	Promosi Kesehatan	532,979,000.00	512,223,500.00	96.11%
	Pemberdayaan masyarakat sehat	55,962,500.00	39,425,000.00	70.45%
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2,191,181,000.00	1,820,126,074.00	83.07%
	Peningkatan status gizi	2,191,181,000.00	1,820,126,074.00	83.07%
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	672,822,500.00	662,755,760.00	98.50%
	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	672,822,500.00	662,755,760.00	98.50%
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5,349,119,000.00	2,935,333,210.00	54.88%
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	267,183,000.00	214,927,755.00	80.44%
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	2,517,498,500.00	2,425,780,302.00	96.36%
	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	2,564,437,500.00	294,625,153.00	11.49%
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,432,949,500.00	788,182,100.00	55.00%
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	990,647,500.00	358,837,500.00	36.22%
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	44,235,500.00	44,198,000.00	99.92%
	Pelayanan Kesehatan Rujukan	398,066,500.00	385,146,600.00	96.75%
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	35,035,515,371.00	25,607,177,343.00	73.09%
	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	35,035,515,371.00	25,607,177,343.00	73.09%
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	5,676,408,000.00	4,963,536,926.00	87.44%
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	2,419,350,000.00	2,334,249,378.00	96.48%
	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	1,046,842,000.00	1,043,664,790.00	99.70%
	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	2,210,216,000.00	1,585,622,758.00	71.74%
	Program kemitraan peningkatan	244,436,500.00	242,454,206.00	99.19%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	pelayanan kesehatan			
	Pendampingan Jamkesda	137,562,500.00	136,080,206.00	98.92%
	Kemitraan pelayanan kesehatan	106,874,000.00	106,374,000.00	99.53%
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	9,950,000.00	8,950,000.00	89.95%
	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	9,950,000.00	8,950,000.00	89.95%
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25,950,000.00	25,950,000.00	100.00%
	Pelayanan kesehatan Lansia	25,950,000.00	25,950,000.00	100.00%
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4,963,663,000.00	4,491,703,369.00	90.49%
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	4,963,663,000.00	4,491,703,369.00	90.49%
	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	204,308,000.00	186,830,000.00	91.45%
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	204,308,000.00	186,830,000.00	91.45%
	RSUD Panembahan Senopati	182,697,066,101.00	179,610,353,334.00	98.31%
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	37,268,752,100.00	35,839,692,366.00	96.17%
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	20,138,395,200.00	19,722,431,551.00	97.93%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya	7,171,988,600.00	6,951,048,815.00	96.92%
	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok	0.00	0.00	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit	9,958,368,300.00	9,166,212,000.00	92.05%
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	145,428,314,001.00	143,770,660,968.00	98.86%
	Pengelolaan BLUD RSUD	145,428,314,001.00	143,770,660,968.00	98.86%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86,929,726,978.00	78,940,991,898.00	90.81%
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	85,096,853,478.00	77,249,969,912.00	90.78%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,530,878,000.00	3,986,561,867.00	87.99%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	707,795,000.00	595,974,495.00	84.20%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	512,115,000.00	296,325,275.00	57.86%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3,310,968,000.00	3,094,262,097.00	93.45%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,322,200,000.00	1,268,083,849.00	95.91%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	203,275,000.00	198,040,000.00	97.42%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	497,625,000.00	483,608,500.00	97.18%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	522,850,000.00	490,606,349.00	93.83%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	98,450,000.00	95,829,000.00	97.34%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	437,175,000.00	406,921,730.00	93.08%
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	46,225,000.00	41,683,000.00	90.17%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan	390,950,000.00	365,238,730.00	93.42%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	ketatausahaan			
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	293,696,000.00	287,323,500.00	97.83%
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	293,696,000.00	287,323,500.00	97.83%
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	9,687,210,000.00	8,412,225,826.00	86.84%
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	433,255,000.00	390,319,000.00	90.09%
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	8,899,495,000.00	7,674,614,726.00	86.24%
	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	354,460,000.00	347,292,100.00	97.98%
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	55,125,000.00	50,657,000.00	91.89%
	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	55,125,000.00	50,657,000.00	91.89%
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1,071,455,000.00	1,047,505,500.00	97.76%
	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	1,037,825,000.00	1,015,097,500.00	97.81%
	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	33,630,000.00	32,408,000.00	96.37%
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	15,900,248,000.00	15,461,259,950.00	97.24%
	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	7,982,890,000.00	7,846,654,500.00	98.29%
	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	0.00	0.00	
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	7,917,358,000.00	7,614,605,450.00	96.18%
	Program Pengendalian Banjir	7,836,875,000.00	7,622,246,497.00	97.26%
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	7,836,875,000.00	7,622,246,497.00	97.26%
	Program Pembangunan Gedung	3,238,900,000.00	3,042,859,800.00	93.95%
	Pembangunan Gedung	3,238,900,000.00	3,042,859,800.00	93.95%
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	25,546,023,978.00	20,801,575,843.00	81.43%
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	3,846,720,000.00	3,799,500,450.00	98.77%
	Peningkatan Jalan dan Jembatan	21,699,303,978.00	17,002,075,393.00	78.35%
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	4,181,050,000.00	4,107,190,950.00	98.23%
	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	4,181,050,000.00	4,107,190,950.00	98.23%
	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	10,311,740,000.00	10,189,201,100.00	98.81%
	Pembangunan infrastruktur perdesaan	10,311,740,000.00	10,189,201,100.00	98.81%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	684,277,500.00	566,356,500.00	82.77%
	Pengembangan Jasa Konstruksi	562,027,500.00	444,776,500.00	79.14%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Peningkatan Teknologi Informasi	122,250,000.00	121,580,000.00	99.45%
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1,832,873,500.00	1,691,021,986.00	92.26%
	Program Perencanaan Tata Ruang	1,211,635,500.00	1,205,462,600.00	99.49%
	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	198,775,000.00	198,332,000.00	99.78%
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	170,700,000.00	170,700,000.00	100.00%
	Studi tentang Tata Ruang	9,450,000.00	9,450,000.00	100.00%
	Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	0.00	0.00	
	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	832,710,500.00	826,980,600.00	99.31%
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	621,238,000.00	485,559,386.00	78.16%
	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	423,538,000.00	287,869,386.00	67.97%
	Pengembangan data pemanfaatan ruang	149,300,000.00	149,290,000.00	99.99%
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	48,400,000.00	48,400,000.00	100.00%
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	4,173,349,022.00	4,077,930,822.25	97.71%
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4,173,349,022.00	4,077,930,822.25	97.71%
	Program Pengembangan Perumahan	4,039,249,022.00	3,945,725,822.25	97.68%
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	207,380,000.00	206,025,000.00	99.35%
	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	10,750,000.00	10,330,800.00	96.10%
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	2,711,232,000.00	2,663,571,250.00	98.24%
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1,109,887,022.00	1,065,798,772.25	96.03%
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	78,300,000.00	77,725,000.00	99.27%
	Penanganan Kawasan Kumuh	78,300,000.00	77,725,000.00	99.27%
	Program pengelolaan areal pemakaman	55,800,000.00	54,480,000.00	97.63%
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	55,800,000.00	54,480,000.00	97.63%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	82,833,751,289.00	77,258,391,172.60	93.27%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,251,183,412.00	1,226,709,608.00	98.04%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	142,803,237.00	142,094,858.00	99.50%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	64,478,237.00	64,055,756.00	99.34%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	36,425,000.00	36,405,000.00	99.95%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	41,900,000.00	41,634,102.00	99.37%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115,860,000.00	115,835,000.00	99.98%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	33,600,000.00	33,600,000.00	100.00%
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	15,000,000.00	14,975,000.00	99.83%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	67,260,000.00	67,260,000.00	100.00%
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	150,489,825.00	148,489,825.00	98.67%
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	150,489,825.00	148,489,825.00	98.67%
	Program kemitraan pengembangan	75,907,425.00	75,797,000.00	99.85%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	wawasan kebangsaan			
	Pemantauan orang asing	492,500.00	492,000.00	99.90%
	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	75,414,925.00	75,305,000.00	99.85%
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	421,113,000.00	420,250,000.00	99.80%
	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	57,877,500.00	57,877,500.00	100.00%
	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	83,310,500.00	82,447,500.00	98.96%
	Pembinaan Jaga Warga	279,925,000.00	279,925,000.00	100.00%
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	25,350,000.00	25,350,000.00	100.00%
	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	0.00	0.00	
	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	25,350,000.00	25,350,000.00	100.00%
	Program pendidikan politik masyarakat	319,659,925.00	298,892,925.00	93.50%
	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	17,260,000.00	17,255,500.00	99.97%
	Pendidikan politik di masyarakat	302,399,925.00	281,637,425.00	93.13%
	Satuan Polisi Pamong Praja	9,286,281,174.00	9,104,651,756.60	98.04%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,577,101,180.00	3,540,559,756.60	98.98%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	147,942,180.00	145,212,002.00	98.15%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	179,267,000.00	177,835,958.00	99.20%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3,249,892,000.00	3,217,511,796.60	99.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	776,885,744.00	775,231,200.00	99.79%
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	60,875,000.00	60,668,800.00	99.66%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	142,255,040.00	141,654,700.00	99.58%
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	87,005,704.00	86,195,200.00	99.07%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	440,500,000.00	440,500,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	46,250,000.00	46,212,500.00	99.92%
	Program peningkatan disiplin aparatur	177,125,000.00	176,890,000.00	99.87%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	177,125,000.00	176,890,000.00	99.87%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67,060,000.00	66,835,000.00	99.66%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	67,060,000.00	66,835,000.00	99.66%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17,150,000.00	17,000,000.00	99.13%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8,700,000.00	8,600,000.00	98.85%
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	8,450,000.00	8,400,000.00	99.41%
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	522,030,000.00	519,348,800.00	99.49%
	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	270,900,000.00	269,926,500.00	99.64%
	Pemberdayaan Linmas	251,130,000.00	249,422,300.00	99.32%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	3,405,918,750.00	3,276,201,000.00	96.19%
	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	3,405,918,750.00	3,276,201,000.00	96.19%
	Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	226,136,000.00	223,767,000.00	98.95%
	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	226,136,000.00	223,767,000.00	98.95%
	Program Penegakan Perda	516,874,500.00	508,819,000.00	98.44%
	Operasi Penegakan Perda	487,844,500.00	479,789,000.00	98.35%
	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	29,030,000.00	29,030,000.00	100.00%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72,296,286,703.00	66,927,029,808.00	92.57%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,163,216,435.00	3,948,835,313.00	94.85%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	384,335,475.00	309,978,077.00	80.65%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	192,650,000.00	158,250,087.00	82.14%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3,586,230,960.00	3,480,607,149.00	97.05%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,538,287,650.00	1,474,951,242.00	95.88%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	780,103,500.00	760,839,065.00	97.53%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	313,014,150.00	311,213,150.00	99.42%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	332,220,000.00	304,003,427.00	91.51%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	112,950,000.00	98,895,600.00	87.56%
	Program peningkatan disiplin aparatur	329,340,000.00	328,780,000.00	99.83%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	329,340,000.00	328,780,000.00	99.83%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,650,000.00	4,050,000.00	87.10%
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	930,000.00	930,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	3,720,000.00	3,120,000.00	83.87%
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	2,171,812,500.00	2,095,495,945.00	96.49%
	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	1,016,700,000.00	972,354,205.00	95.64%
	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	1,155,112,500.00	1,123,141,740.00	97.23%
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1,505,042,400.00	1,483,021,995.00	98.54%
	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	1,505,042,400.00	1,483,021,995.00	98.54%
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	61,643,889,434.00	56,666,769,503.00	91.93%
	Rehabilitasi Pasca Bencana	289,700,000.00	284,312,000.00	98.14%
	Rekonstruksi Pasca Bencana	61,354,189,434.00	56,382,457,503.00	91.90%
	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	940,048,284.00	925,125,810.00	98.41%
	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	718,409,000.00	705,479,500.00	98.20%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	221,639,284.00	219,646,310.00	99.10%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Logistik dan Perbekalan			
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan	0.00	0.00	
	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	0.00	0.00	
6	SOSIAL	11,812,909,326.00	11,673,912,511.00	98.82%
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11,812,909,326.00	11,673,912,511.00	98.82%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,814,690,979.00	1,736,993,063.00	95.72%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	304,515,104.00	287,636,127.00	94.46%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	188,894,875.00	167,676,686.00	88.77%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,321,281,000.00	1,281,680,250.00	97.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	762,876,000.00	758,721,948.00	99.46%
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	148,496,000.00	148,496,000.00	100.00%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	217,969,000.00	217,094,000.00	99.60%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	196,648,000.00	196,648,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	185,513,000.00	182,257,948.00	98.25%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	14,250,000.00	14,226,000.00	99.83%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9,100,000.00	9,100,000.00	100.00%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	9,100,000.00	9,100,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66,090,347.00	62,362,000.00	94.36%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	66,090,347.00	62,362,000.00	94.36%
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	802,394,500.00	801,852,000.00	99.93%
	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	757,000.00	757,000.00	100.00%
	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	174,047,500.00	173,717,500.00	99.81%
	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	627,590,000.00	627,377,500.00	99.97%
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6,678,869,000.00	6,627,159,000.00	99.23%
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	27,320,000.00	19,065,000.00	69.78%
	Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	150,548,000.00	111,903,000.00	74.33%
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	20,590,000.00	19,090,000.00	92.71%
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba serta	23,200,000.00	20,800,000.00	89.66%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Berkembangnya Praktek Protistusi			
	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	6,457,211,000.00	6,456,301,000.00	99.99%
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	444,206,000.00	444,051,000.00	99.97%
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	343,564,350.00	343,409,350.00	99.95%
	Pendampingan Kegiatan Karang taruna	41,355,000.00	41,355,000.00	100.00%
	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	59,286,650.00	59,286,650.00	100.00%
	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	1,234,682,500.00	1,233,673,500.00	99.92%
	Updating Keluarga Miskin	303,490,500.00	303,120,500.00	99.88%
	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	931,192,000.00	930,553,000.00	99.93%
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	117,127,460,932.10	113,546,860,111.92	96.94%
1	TENAGA KERJA	23,784,900,855.00	22,912,205,761.00	96.33%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23,784,900,855.00	22,912,205,761.00	96.33%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,671,683,855.00	1,523,489,839.00	91.14%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	415,158,025.00	374,385,935.00	90.18%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	521,006,950.00	471,841,772.00	90.56%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	735,518,880.00	677,262,132.00	92.08%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,305,745,800.00	1,235,961,480.00	94.66%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	575,850,000.00	563,480,000.00	97.85%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	344,095,800.00	341,061,000.00	99.12%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	358,300,000.00	304,885,480.00	85.09%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	27,500,000.00	26,535,000.00	96.49%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45,960,000.00	25,097,500.00	54.61%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	45,960,000.00	25,097,500.00	54.61%
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	961,421,000.00	935,102,150.00	97.26%
	Kegiatan Pembinaan LPK	267,735,500.00	256,610,500.00	95.84%
	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	0.00	0.00	
	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	118,275,000.00	118,275,000.00	100.00%
	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	32,580,000.00	30,277,550.00	92.93%
	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	95,200,000.00	91,185,000.00	95.78%
	Pelatihan Menjahit	133,749,400.00	129,375,400.00	96.73%
	Pelatihan Mekanik	123,787,500.00	121,673,700.00	98.29%
	Pelatihan Teknisi	32,258,600.00	32,240,000.00	99.94%
	Pelatihan Meubelair	46,700,000.00	46,400,000.00	99.36%
	Pelatihan Juru Las	73,090,000.00	71,470,000.00	97.78%
	Pelatihan Software	0.00	0.00	
	Pelatihan Tata Boga	38,045,000.00	37,595,000.00	98.82%
	Pelatihan Batik Tulis	0.00	0.00	

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pelatihan Bahasa Inggris	0.00	0.00	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	379,825,000.00	362,625,000.00	95.47%
	Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan	13,900,000.00	12,300,000.00	88.49%
	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	365,925,000.00	350,325,000.00	95.74%
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	551,125,200.00	533,217,800.00	96.75%
	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	194,177,500.00	188,637,500.00	97.15%
	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	66,362,500.00	66,362,500.00	100.00%
	Pendampingan dewan pengupahan	63,135,200.00	58,326,800.00	92.38%
	Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	27,107,500.00	25,482,500.00	94.01%
	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	86,700,000.00	86,700,000.00	100.00%
	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	10,460,000.00	8,937,500.00	85.44%
	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	68,607,500.00	65,975,000.00	96.16%
	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	34,575,000.00	32,796,000.00	94.85%
	Program Penempatan Tenaga Kerja	201,176,000.00	187,875,500.00	93.39%
	Penyuluhan ketenagakerjaan	171,095,000.00	160,769,500.00	93.97%
	Penempatan pencari kerja	30,081,000.00	27,106,000.00	90.11%
	Program Perluasan Kerja	18,667,964,000.00	18,108,836,492.00	97.00%
	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	91,070,000.00	90,670,000.00	99.56%
	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	18,448,287,000.00	17,889,559,492.00	96.97%
	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	54,550,000.00	54,550,000.00	100.00%
	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	74,057,000.00	74,057,000.00	100.00%
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	422,178,911.00	420,193,468.00	99.53%
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	422,178,911.00	420,193,468.00	99.53%
	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	50,192,825.00	50,192,825.00	100.00%
	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak	2,361,500.00	2,361,500.00	100.00%
	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	27,568,683.00	27,568,683.00	100.00%
	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	20,262,642.00	20,262,642.00	100.00%
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	58,694,643.00	58,694,643.00	100.00%
	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	16,950,393.00	16,950,393.00	100.00%
	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	20,835,500.00	20,835,500.00	100.00%
	Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	9,063,750.00	9,063,750.00	100.00%
	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)	11,845,000.00	11,845,000.00	100.00%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	313,291,443.00	311,306,000.00	99.37%
	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	233,370,000.00	231,385,000.00	99.15%
	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	29,080,750.00	29,080,750.00	100.00%
	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	50,840,693.00	50,840,250.00	100.00%
3	PANGAN	600,175,000.00	597,996,000.00	99.64%
	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	600,175,000.00	597,996,000.00	99.64%
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	600,175,000.00	597,996,000.00	99.64%
	Peningkatan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	280,030,500.00	277,851,500.00	99.22%
	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	42,363,000.00	42,363,000.00	100.00%
	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	69,400,000.00	69,400,000.00	100.00%
	Pengembangan Lumbung Mataraman	208,381,500.00	208,381,500.00	100.00%
4	PERTANAHAN	4,757,492,512.00	4,245,802,709.00	89.24%
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4,757,492,512.00	4,245,802,709.00	89.24%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	615,736,112.00	561,495,413.00	91.19%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	173,947,000.00	162,609,427.00	93.48%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	122,189,272.00	79,969,100.00	65.45%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	319,599,840.00	318,916,886.00	99.79%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	144,112,000.00	143,379,101.00	99.49%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31,254,000.00	31,242,000.00	99.96%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	93,858,000.00	93,137,101.00	99.23%
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,000,000.00	19,000,000.00	100.00%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	0.00	0.00	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	51,720,000.00	44,360,000.00	85.77%
	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	51,720,000.00	44,360,000.00	85.77%
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	3,759,761,900.00	3,310,630,695.00	88.05%
	Inventarisasi tanah kas desa	5,300,000.00	5,300,000.00	100.00%
	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	7,225,000.00	6,554,120.00	90.71%
	Pemanfaatan Tanah SG	62,148,000.00	62,148,000.00	100.00%
	Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	3,453,156,900.00	3,004,697,075.00	87.01%
	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	214,107,000.00	214,106,500.00	100.00%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	17,825,000.00	17,825,000.00	100.00%
	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	186,162,500.00	185,937,500.00	99.88%
	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	13,550,000.00	13,550,000.00	100.00%
	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	172,612,500.00	172,387,500.00	99.87%
5	LINGKUNGAN HIDUP	21,734,811,710.00	21,515,651,936.67	98.99%
	Dinas Lingkungan Hidup	21,734,811,710.00	21,515,651,936.67	98.99%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,344,958,746.00	6,291,203,116.00	99.15%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	6,188,062,746.00	6,157,644,416.00	99.51%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	156,896,000.00	133,558,700.00	85.13%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,893,365,000.00	2,857,614,289.00	98.76%
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	358,234,000.00	357,595,000.00	99.82%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	557,071,000.00	539,441,685.00	96.84%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	95,000,000.00	95,000,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,883,060,000.00	1,865,577,604.00	99.07%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17,250,000.00	17,250,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	17,250,000.00	17,250,000.00	100.00%
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,048,223,200.00	4,996,717,809.09	98.98%
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1,414,321,000.00	1,406,363,500.00	99.44%
	Kerjasama pengelolaan persampahan	963,710,000.00	958,317,875.00	99.44%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14,430,000.00	13,550,000.00	93.90%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	261,180,000.00	259,770,000.00	99.46%
	Evaluasi Adipura	156,855,000.00	155,360,000.00	99.05%
	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan	2,237,727,200.00	2,203,356,434.09	98.46%
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,720,359,500.00	1,697,705,555.00	98.68%
	Pengkajian dampak lingkungan	666,006,500.00	645,067,300.00	96.86%
	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	291,564,000.00	289,919,755.00	99.44%
	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	762,789,000.00	762,718,500.00	99.99%
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5,455,810,264.00	5,408,049,167.58	99.12%
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	1,087,874,600.00	1,087,532,883.33	99.97%
	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	1,470,755,000.00	1,467,958,000.00	99.81%
	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	2,897,180,664.00	2,852,558,284.25	98.46%
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses	254,845,000.00	247,112,000.00	96.97%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	133,240,000.00	131,937,000.00	99.02%
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	71,775,000.00	71,025,000.00	98.96%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%
	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	31,250,000.00	30,250,000.00	96.80%
	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	15,080,000.00	10,400,000.00	68.97%
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,884,984,200.00	6,837,904,124.00	99.32%
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,884,984,200.00	6,837,904,124.00	99.32%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,671,679,700.00	1,663,125,416.00	99.49%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	584,290,260.00	578,458,701.00	99.00%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	157,550,000.00	156,987,500.00	99.64%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	929,839,440.00	927,679,215.00	99.77%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	425,906,000.00	425,612,274.00	99.93%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	91,050,000.00	90,758,000.00	99.68%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	234,492,000.00	234,490,274.00	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	100,364,000.00	100,364,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	43,500,000.00	43,500,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	43,500,000.00	43,500,000.00	100.00%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,611,703,500.00	3,581,347,434.00	99.16%
	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	405,209,000.00	385,734,000.00	95.19%
	Pelayanan Mutasi Penduduk	47,288,000.00	47,288,000.00	100.00%
	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	112,206,000.00	112,206,000.00	100.00%
	Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan	66,091,500.00	66,091,500.00	100.00%
	Pelayanan Administrasi Kependudukan	2,980,909,000.00	2,970,027,934.00	99.63%
	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	843,632,500.00	836,448,500.00	99.15%
	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	188,382,500.00	188,382,500.00	100.00%
	Sinkronisasi Kebijakan	20,350,000.00	20,316,000.00	99.83%
	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	634,900,000.00	627,750,000.00	98.87%
	Program Pengelolaan Data Kependudukan	288,562,500.00	287,870,500.00	99.76%
	Pemutakhiran Data Kependudukan	65,063,500.00	64,630,000.00	99.33%
	Publikasi Kebijakan Kependudukan	85,686,000.00	85,678,000.00	99.99%
	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	38,762,500.00	38,762,500.00	100.00%
	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	11,750,500.00	11,750,000.00	100.00%
	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	87,300,000.00	87,050,000.00	99.71%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	3,705,634,500.00	3,698,154,500.00	99.80%
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	3,705,634,500.00	3,698,154,500.00	99.80%
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	350,196,000.00	350,166,000.00	99.99%
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	270,590,000.00	270,560,000.00	99.99%
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00%
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	35,500,000.00	35,500,000.00	100.00%
	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	36,606,000.00	36,606,000.00	100.00%
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	821,240,250.00	820,790,250.00	99.95%
	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	671,712,750.00	671,262,750.00	99.93%
	Pemberdayaan usaha EKONOMI pedesaan	41,180,000.00	41,180,000.00	100.00%
	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	108,347,500.00	108,347,500.00	100.00%
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	855,196,500.00	855,196,500.00	100.00%
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	5,333,000.00	5,333,000.00	100.00%
	Penyelenggaraan lomba desa	417,565,000.00	417,565,000.00	100.00%
	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	33,111,750.00	33,111,750.00	100.00%
	Pendampingan kegiatan TMMD	371,466,750.00	371,466,750.00	100.00%
	Bantul Ekspo dan karnaval	0.00	0.00	
	Pengembangan desa siaga	0.00	0.00	
	Pengembangan Kerjasama Desa	27,720,000.00	27,720,000.00	100.00%
	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	81,850,000.00	81,850,000.00	100.00%
	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	81,850,000.00	81,850,000.00	100.00%
	Program pemberdayaan masyarakat	1,597,151,750.00	1,590,151,750.00	99.56%
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	350,106,750.00	343,106,750.00	98.00%
	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	1,247,045,000.00	1,247,045,000.00	100.00%
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10,352,176,750.00	10,243,245,732.00	98.95%
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	10,352,176,750.00	10,243,245,732.00	98.95%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,733,757,750.00	1,709,078,909.00	98.58%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1,416,527,750.00	1,392,064,210.00	98.27%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	317,230,000.00	317,014,699.00	99.93%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,753,748,000.00	1,739,828,311.00	99.21%
	Pembangunan gedung kantor	27,125,000.00	27,125,000.00	100.00%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	899,640,000.00	887,475,000.00	98.65%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	252,000,000.00	250,589,266.00	99.44%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	538,783,000.00	538,663,245.00	99.98%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	36,200,000.00	35,975,800.00	99.38%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00%
	Program Keluarga Berencana	5,697,059,000.00	5,652,661,312.00	99.22%
	Pelayanan KIE	5,308,034,000.00	5,264,706,312.00	99.18%
	Pembinaan Keluarga Berencana	351,675,000.00	351,355,000.00	99.91%
	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	0.00	0.00	
	Pemantapan mekanisme operasional	3,250,000.00	3,250,000.00	100.00%
	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	0.00	0.00	
	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	0.00	0.00	
	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	34,100,000.00	33,350,000.00	97.80%
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	501,750,000.00	500,464,000.00	99.74%
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	490,500,000.00	489,214,000.00	99.74%
	Lomba forum PIK remaja	0.00	0.00	
	KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	11,250,000.00	11,250,000.00	100.00%
	Program pelayanan kontrasepsi	401,775,000.00	378,506,200.00	94.21%
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	401,775,000.00	378,506,200.00	94.21%
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	6,340,000.00	6,340,000.00	100.00%
	Pendampingan Forum IMP	6,340,000.00	6,340,000.00	100.00%
	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	128,847,000.00	127,467,000.00	98.93%
	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	0.00	0.00	
	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	0.00	0.00	
	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	2,830,000.00	2,830,000.00	100.00%
	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	34,017,000.00	33,237,000.00	97.71%
	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	92,000,000.00	91,400,000.00	99.35%
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0.00	0.00	
	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	0.00	0.00	
	Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	112,900,000.00	112,900,000.00	100.00%
	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	106,350,000.00	106,350,000.00	100.00%
	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	3,750,000.00	3,750,000.00	100.00%
	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00%
9	PERHUBUNGAN	8,860,394,900.00	8,743,045,909.00	98.68%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Dinas Perhubungan	8,860,394,900.00	8,743,045,909.00	98.68%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,677,182,400.00	1,659,317,251.00	98.93%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	223,649,400.00	213,495,170.00	95.46%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	101,163,000.00	97,809,935.00	96.69%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,352,370,000.00	1,348,012,146.00	99.68%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	442,802,500.00	434,934,510.00	98.22%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	68,812,500.00	61,149,960.00	88.86%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	63,950,000.00	63,914,000.00	99.94%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	250,040,000.00	249,942,550.00	99.96%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	60,000,000.00	59,928,000.00	99.88%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	111,700,000.00	110,615,000.00	99.03%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	111,700,000.00	110,615,000.00	99.03%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13,650,000.00	12,950,000.00	94.87%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	13,650,000.00	12,950,000.00	94.87%
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2,035,270,000.00	2,016,047,950.00	99.06%
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	176,175,000.00	175,196,000.00	99.44%
	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	297,775,000.00	296,595,400.00	99.60%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	1,561,320,000.00	1,544,256,550.00	98.91%
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	501,225,000.00	499,115,458.00	99.58%
	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	291,650,000.00	290,505,458.00	99.61%
	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	126,675,000.00	125,710,000.00	99.24%
	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	6,825,000.00	6,825,000.00	100.00%
	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	76,075,000.00	76,075,000.00	100.00%
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	164,075,000.00	136,272,600.00	83.06%
	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	164,075,000.00	136,272,600.00	83.06%
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1,471,537,000.00	1,460,697,100.00	99.26%
	Pengadaan pagar pengaman jalan	569,410,000.00	564,592,100.00	99.15%
	Pengadaan Flashing Lamp	50,000,000.00	49,982,000.00	99.96%
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	852,127,000.00	846,123,000.00	99.30%
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	822,595,000.00	815,218,200.00	99.10%
	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	822,595,000.00	815,218,200.00	99.10%
	Pengembangan Kelalu-lintasan	1,620,358,000.00	1,597,877,840.00	98.61%
	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam	330,076,000.00	318,940,000.00	96.63%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Berlalu-lintas			
	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	11,135,000.00	11,000,000.00	98.79%
	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas	1,279,147,000.00	1,267,937,840.00	99.12%
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12,910,854,741.00	12,562,336,621.25	97.30%
	Dinas Komunikasi dan Informatika	12,910,854,741.00	12,562,336,621.25	97.30%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,017,948,220.00	1,008,224,326.00	99.04%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	800,248,260.00	790,582,226.00	98.79%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	217,699,960.00	217,642,100.00	99.97%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	759,099,021.00	708,121,345.00	93.28%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	560,125,021.00	535,590,300.00	95.62%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	198,974,000.00	172,531,045.00	86.71%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65,880,000.00	65,861,000.00	99.97%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	65,880,000.00	65,861,000.00	99.97%
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9,363,150,000.00	9,099,096,126.25	97.18%
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	7,124,925,000.00	6,922,798,188.25	97.16%
	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	272,275,000.00	270,641,288.00	99.40%
	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	874,865,000.00	826,981,400.00	94.53%
	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	23,310,000.00	17,885,600.00	76.73%
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital	1,067,775,000.00	1,060,789,650.00	99.35%
	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	156,790,000.00	155,436,000.00	99.14%
	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	85,625,000.00	84,478,000.00	98.66%
	Pemberdayaan KID dan PPID	17,800,000.00	17,643,000.00	99.12%
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	53,365,000.00	53,315,000.00	99.91%
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	45,750,000.00	45,519,800.00	99.50%
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	45,750,000.00	45,519,800.00	99.50%
	Program kerjasama informasi dengan mas media	1,502,237,500.00	1,480,078,024.00	98.52%
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	571,680,000.00	557,049,000.00	97.44%
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	310,837,500.00	304,130,000.00	97.84%
	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	619,720,000.00	618,899,024.00	99.87%
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3,418,850,691.10	3,233,054,298.00	94.57%
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3,418,850,691.10	3,233,054,298.00	94.57%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,168,990,991.10	1,026,419,906.00	87.80%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	840,871,991.10	822,231,706.00	97.78%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	328,119,000.00	204,188,200.00	62.23%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	299,406,500.00	298,419,712.00	99.67%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	85,171,000.00	84,978,000.00	99.77%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	23,734,500.00	23,734,500.00	100.00%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	27,001,000.00	26,874,000.00	99.53%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	130,000,000.00	129,481,212.00	99.60%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	33,500,000.00	33,352,000.00	99.56%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11,500,000.00	11,100,000.00	96.52%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	11,500,000.00	11,100,000.00	96.52%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12,875,000.00	12,848,900.00	99.80%
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	12,875,000.00	12,848,900.00	99.80%
	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	432,855,000.00	421,552,500.00	97.39%
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	432,855,000.00	421,552,500.00	97.39%
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	842,458,000.00	821,404,040.00	97.50%
	Pengembangan Kewirausahaan	842,458,000.00	821,404,040.00	97.50%
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	0.00	0.00	
	Peningkatan Promosi UMKM	0.00	0.00	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	650,765,200.00	641,309,240.00	98.55%
	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	69,900,000.00	69,900,000.00	100.00%
	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	358,550,200.00	350,189,240.00	97.67%
	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	213,715,000.00	213,070,000.00	99.70%
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA	8,600,000.00	8,150,000.00	94.77%
12	PENANAMAN MODAL	1,643,770,766.00	1,631,911,452.00	99.28%
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1,643,770,766.00	1,631,911,452.00	99.28%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,157,915,168.00	1,149,065,892.00	99.24%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	333,369,032.00	330,890,905.00	99.26%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	220,869,436.00	220,816,934.00	99.98%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	603,676,700.00	597,358,053.00	98.95%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	417,168,098.00	414,433,060.00	99.34%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	40,875,000.00	40,630,000.00	99.40%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	126,050,000.00	125,746,500.00	99.76%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	40,463,104.00	40,462,985.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	189,799,994.00	187,616,577.00	98.85%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	19,980,000.00	19,976,998.00	99.98%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	0.00	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	0.00	0.00	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,300,000.00	9,300,000.00	100.00%
	Penyusunan sistem manajemen mutu	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00%
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	2,850,000.00	2,850,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00%
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	58,262,500.00	57,987,500.00	99.53%
	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	200,000.00	200,000.00	100.00%
	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	187,500.00	187,500.00	100.00%
	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	57,875,000.00	57,600,000.00	99.52%
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1,125,000.00	1,125,000.00	100.00%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1,125,000.00	1,125,000.00	100.00%
	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	0.00	0.00	
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4,059,500,095.00	3,923,555,725.00	96.65%
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4,059,500,095.00	3,923,555,725.00	96.65%
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	263,245,000.00	263,245,000.00	100.00%
	Pengembangan potensi pemuda	263,245,000.00	263,245,000.00	100.00%
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	820,027,500.00	782,692,500.00	95.45%
	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	36,125,000.00	36,125,000.00	100.00%
	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	783,902,500.00	746,567,500.00	95.24%
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	59,280,000.00	59,280,000.00	100.00%
	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	59,280,000.00	59,280,000.00	100.00%
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	319,489,000.00	290,689,000.00	90.99%
	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	319,489,000.00	290,689,000.00	90.99%
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1,711,925,315.00	1,677,333,800.00	97.98%
	Pengembangan olahraga rekreasi	124,137,800.00	111,962,800.00	90.19%
	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1,587,787,515.00	1,565,371,000.00	98.59%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	885,533,280.00	850,315,425.00	96.02%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	885,533,280.00	850,315,425.00	96.02%
14	STATISTIK	85,600,000.00	85,527,500.00	99.92%
	Dinas Komunikasi dan Informatika	85,600,000.00	85,527,500.00	99.92%
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	85,600,000.00	85,527,500.00	99.92%
	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	85,600,000.00	85,527,500.00	99.92%
15	PERSANDIAN	883,529,000.00	857,907,654.00	97.10%
	Dinas Komunikasi dan Informatika	883,529,000.00	857,907,654.00	97.10%
	Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	883,529,000.00	857,907,654.00	97.10%
	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	323,900,000.00	310,409,977.00	95.84%
	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	559,629,000.00	547,497,677.00	97.83%
16	KEBUDAYAAN	11,243,182,401.00	10,272,089,728.00	91.36%
	Dinas Kebudayaan	11,243,182,401.00	10,272,089,728.00	91.36%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	475,821,795.00	416,038,586.00	87.44%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	339,826,795.00	322,383,818.00	94.87%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	135,995,000.00	93,654,768.00	68.87%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	326,643,716.00	305,184,610.00	93.43%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	52,370,000.00	47,933,500.00	91.53%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	57,230,000.00	56,997,390.00	99.59%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	197,043,716.00	181,078,720.00	91.90%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	20,000,000.00	19,175,000.00	95.88%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22,825,000.00	20,057,800.00	87.88%
	Pemutakhiran Data	500,000.00	500,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	22,325,000.00	19,557,800.00	87.60%
	Program Pengembangan Nilai Budaya	3,975,180,180.00	3,770,692,923.00	94.86%
	Pembinaan dan pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	302,047,500.00	301,822,500.00	99.93%
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	229,448,000.00	221,748,000.00	96.64%
	Penghargaan seniman dan budayawan	338,376,000.00	335,373,273.00	99.11%
	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	48,800,000.00	44,782,500.00	91.77%
	Festival kebudayaan yogyakarta	170,862,500.00	161,642,500.00	94.60%
	Gelar budaya Jogja	344,083,000.00	339,484,000.00	98.66%
	Publikasi seni dan budaya daerah	228,949,180.00	202,870,850.00	88.61%
	Penyelenggaraan event penggiat seni	1,340,506,500.00	1,286,856,000.00	96.00%
	Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan Tradisi	972,107,500.00	876,113,300.00	90.13%
	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	3,681,045,000.00	3,237,544,646.00	87.95%
	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan	532,000,000.00	529,761,200.00	99.58%
	Pembinaan, pengembangan bahasa dan	1,112,773,000.00	885,320,000.00	79.56%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	sastra			
	Pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi	225,178,000.00	213,328,000.00	94.74%
	Pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	1,811,094,000.00	1,609,135,446.00	88.85%
	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	2,761,666,710.00	2,522,571,163.00	91.34%
	Pembinaan dan pengelolaan permusiuman	845,000,000.00	645,334,960.00	76.37%
	Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya	1,317,121,710.00	1,287,522,703.00	97.75%
	Pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya	397,445,000.00	397,445,000.00	100.00%
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya	202,100,000.00	192,268,500.00	95.14%
17	PERPUSTAKAAN	1,489,610,600.00	1,476,704,694.00	99.13%
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,489,610,600.00	1,476,704,694.00	99.13%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	840,214,443.00	828,332,394.00	98.59%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	169,967,000.00	166,302,672.00	97.84%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	84,411,443.00	84,391,443.00	99.98%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	585,836,000.00	577,638,279.00	98.60%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	462,207,257.00	461,973,300.00	99.95%
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	233,668,257.00	233,619,000.00	99.98%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	12,475,000.00	12,315,000.00	98.72%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	194,854,000.00	194,832,500.00	99.99%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	21,210,000.00	21,206,800.00	99.98%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	0.00	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	0.00	0.00	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,454,500.00	3,454,500.00	100.00%
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	3,454,500.00	3,454,500.00	100.00%
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	61,684,500.00	60,900,000.00	98.73%
	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00%
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00%
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	42,729,500.00	41,945,000.00	98.16%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15,525,000.00	15,525,000.00	100.00%
	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	0.00	0.00	
	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	122,049,900.00	122,044,500.00	100.00%
	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	63,009,900.00	63,009,500.00	100.00%
	Peningkatan Promosi Perpustakaan	59,040,000.00	59,035,000.00	99.99%
18	ARSIP	289,813,300.00	289,572,300.00	99.92%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	289,813,300.00	289,572,300.00	99.92%
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	37,520,000.00	37,519,000.00	100.00%
	Pengklasifikasian data	23,000,000.00	23,000,000.00	100.00%
	Pengawasan Kearsipan	14,520,000.00	14,519,000.00	99.99%
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	219,188,300.00	218,948,300.00	99.89%
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	17,450,000.00	17,400,000.00	99.71%
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	122,721,800.00	122,706,800.00	99.99%
	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	79,016,500.00	78,841,500.00	99.78%
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	33,105,000.00	33,105,000.00	100.00%
	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	0.00	0.00	
	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	33,105,000.00	33,105,000.00	100.00%
	URUSAN PILIHAN	32,575,399,576.00	31,569,206,423.00	96.91%
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,611,591,000.00	1,416,585,844.00	87.90%
	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1,611,591,000.00	1,416,585,844.00	87.90%
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	1,611,591,000.00	1,416,585,844.00	87.90%
	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	32,385,000.00	30,885,000.00	95.37%
	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya	1,033,354,000.00	853,019,444.00	82.55%
	Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap	154,960,000.00	144,960,000.00	93.55%
	Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan	390,892,000.00	387,721,400.00	99.19%
2	PARIWISATA	9,953,913,650.00	9,629,884,041.00	96.74%
	Dinas Pariwisata	9,953,913,650.00	9,629,884,041.00	96.74%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,517,909,950.00	2,425,758,212.00	96.34%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	392,509,150.00	369,729,653.00	94.20%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	296,360,000.00	230,145,999.00	77.66%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,829,040,800.00	1,825,882,560.00	99.83%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	604,258,400.00	561,920,421.00	92.99%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	264,600,000.00	246,244,000.00	93.06%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	61,524,400.00	54,622,120.00	88.78%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	278,134,000.00	261,054,301.00	93.86%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,395,500.00	3,395,500.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	3,395,500.00	3,395,500.00	100.00%
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	803,807,000.00	800,951,500.00	99.64%
	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	181,250,000.00	181,250,000.00	100.00%
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	622,557,000.00	619,701,500.00	99.54%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	0.00	0.00	
	Program pengembangan destinasi pariwisata	5,279,782,800.00	5,095,305,908.00	96.51%
	Pengembangan daerah tujuan wisata	3,616,920,000.00	3,586,140,208.00	99.15%
	Peningkatan daya tarik Wisata	1,186,543,600.00	1,033,675,600.00	87.12%
	Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	3,050,000.00	3,050,000.00	100.00%
	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	473,269,200.00	472,440,100.00	99.82%
	Program pengembangan Kemitraan	744,760,000.00	742,552,500.00	99.70%
	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	437,135,000.00	435,827,500.00	99.70%
	Pemberdayaan Desa Wisata	78,925,000.00	78,925,000.00	100.00%
	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	228,700,000.00	227,800,000.00	99.61%
3	PERTANIAN	7,341,963,005.00	7,160,567,678.00	97.53%
	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	7,341,963,005.00	7,160,567,678.00	97.53%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,283,920,315.00	2,231,843,894.00	97.72%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	385,234,500.00	355,714,379.00	92.34%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	130,084,000.00	118,549,700.00	91.13%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,768,601,815.00	1,757,579,815.00	99.38%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	421,758,000.00	418,631,678.00	99.26%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	251,275,000.00	249,291,244.00	99.21%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	127,387,000.00	126,285,434.00	99.14%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	43,096,000.00	43,055,000.00	99.90%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7,160,000.00	7,160,000.00	100.00%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	7,160,000.00	7,160,000.00	100.00%
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1,259,652,590.00	1,211,862,656.00	96.21%
	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	18,400,000.00	18,400,000.00	100.00%
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	35,040,000.00	32,035,000.00	91.42%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	754,611,190.00	751,018,791.00	99.52%
	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	206,250,000.00	202,445,000.00	98.16%
	Pengembangan Agribisnis Pertanian	160,875,000.00	160,563,465.00	99.81%
	Pengembangan Agribisnis Tembakau	84,476,400.00	47,400,400.00	56.11%
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	147,224,000.00	147,194,000.00	99.98%
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	38,975,000.00	38,975,000.00	100.00%
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	108,249,000.00	108,219,000.00	99.97%
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	524,326,100.00	500,223,200.00	95.40%
	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	189,663,000.00	183,510,100.00	96.76%
	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pematangan Hewan	218,363,100.00	209,563,100.00	95.97%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Peningkatan Kesehatan Ternak	116,300,000.00	107,150,000.00	92.13%
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	536,397,000.00	520,299,750.00	97.00%
	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	536,397,000.00	520,299,750.00	97.00%
	Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	109,940,000.00	107,515,000.00	97.79%
	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	109,940,000.00	107,515,000.00	97.79%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	2,051,585,000.00	2,015,837,500.00	98.26%
	Peningkatan Prasarana Pertanian	1,782,845,000.00	1,769,085,000.00	99.23%
	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	268,740,000.00	246,752,500.00	91.82%
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	700,000.00	700,000.00	100.00%
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	700,000.00	700,000.00	100.00%
	Program Potensi Energi	700,000.00	700,000.00	100.00%
	Pendataan Potensi Energi	700,000.00	700,000.00	100.00%
5	PERDAGANGAN	7,457,307,421.00	7,367,608,050.00	98.80%
	Dinas Perdagangan	7,457,307,421.00	7,367,608,050.00	98.80%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,368,296,421.00	5,306,752,462.00	98.85%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	341,432,404.00	338,373,680.00	99.10%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	236,050,000.00	225,018,435.00	95.33%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4,790,814,017.00	4,743,360,347.00	99.01%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	903,125,000.00	896,433,875.00	99.26%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	510,850,000.00	505,867,800.00	99.02%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	61,175,000.00	60,940,500.00	99.62%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	303,100,000.00	301,720,575.00	99.54%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	28,000,000.00	27,905,000.00	99.66%
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	65,000,000.00	64,716,913.00	99.56%
	Pelayanan Kemetrologian Daerah	65,000,000.00	64,716,913.00	99.56%
	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	245,655,000.00	242,505,000.00	98.72%
	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00%
	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	233,155,000.00	230,005,000.00	98.65%
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	69,230,000.00	68,980,000.00	99.64%
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	37,780,000.00	37,750,000.00	99.92%
	Peningkatan pelayanan perdagangan	31,450,000.00	31,230,000.00	99.30%
	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	119,375,000.00	115,325,000.00	96.61%
	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	0.00	0.00	
	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	119,375,000.00	115,325,000.00	96.61%
	Program Pemberdayaan Pedagang	260,625,000.00	254,704,500.00	97.73%
	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	260,625,000.00	254,704,500.00	97.73%
	Program Penataan Pasar Rakyat	426,001,000.00	418,190,300.00	98.17%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	265,475,000.00	263,796,500.00	99.37%
	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	40,026,000.00	36,503,800.00	91.20%
	Revitalisasi Pasar Rakyat	80,875,000.00	80,515,000.00	99.55%
	Intensifikasi Pendapatan Pasar	39,625,000.00	37,375,000.00	94.32%
6	PERINDUSTRIAN	6,047,112,000.00	5,840,329,560.00	96.58%
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	6,047,112,000.00	5,840,329,560.00	96.58%
	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	134,200,000.00	134,200,000.00	100.00%
	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	134,200,000.00	134,200,000.00	100.00%
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	949,730,000.00	932,433,200.00	98.18%
	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul	176,730,000.00	176,145,500.00	99.67%
	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	515,500,000.00	510,017,700.00	98.94%
	Pengembangan Pemasaran IKM	0.00	0.00	
	Pengembangan Industri Kreatif	257,500,000.00	246,270,000.00	95.64%
	Program penataan struktur industri	4,443,182,000.00	4,428,477,860.00	99.67%
	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	4,443,182,000.00	4,428,477,860.00	99.67%
	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	520,000,000.00	345,218,500.00	66.39%
	Pemberdayaan IKM Sentra	475,200,000.00	301,723,500.00	63.49%
	Pemetaan Industri Hasil Tembakau	44,800,000.00	43,495,000.00	97.09%
7	TRANSMIGRASI	162,812,500.00	153,531,250.00	94.30%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	162,812,500.00	153,531,250.00	94.30%
	Program Transmigrasi Umum	162,812,500.00	153,531,250.00	94.30%
	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	162,812,500.00	153,531,250.00	94.30%
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	103,461,522,674.00	87,127,824,428.80	84.21%
1	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	38,020,479,114.00	27,087,188,920.00	71.24%
	Sekretariat Daerah	16,826,635,864.00	14,816,242,837.00	88.05%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,542,931,476.00	4,633,830,251.00	83.60%
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	924,536,293.00	887,910,356.00	96.04%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1,926,199,500.00	1,724,152,511.00	89.51%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	2,376,359,523.00	1,712,014,904.00	72.04%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	315,836,160.00	309,752,480.00	98.07%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,225,581,375.00	3,010,235,898.00	93.32%
	Pengadaan barang bercorak kesenian	0.00	0.00	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,000,000.00	24,941,100.00	99.76%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	354,460,160.00	344,449,898.00	97.18%
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127,050,895.00	126,633,895.00	99.67%
	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	77,475,000.00	73,092,000.00	94.34%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	441,231,500.00	434,407,100.00	98.45%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1,033,617,420.00	974,803,260.00	94.31%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	924,771,400.00	794,516,145.00	85.91%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	236,375,000.00	231,792,500.00	98.06%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,410,000.00	7,686,000.00	81.68%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	9,410,000.00	7,686,000.00	81.68%
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	623,295,000.00	598,210,500.00	95.98%
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	176,435,000.00	173,642,500.00	98.42%
	Publikasi peraturan perundang-undangan	20,615,000.00	20,415,000.00	99.03%
	Pemberian bantuan hukum	208,325,000.00	191,493,000.00	91.92%
	Pengawasan produk hukum pemerintah desa	0.00	0.00	
	Penyuluhan Hukum	0.00	0.00	
	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	400,000.00	400,000.00	100.00%
	Penyusunan Produk Hukum Daerah	6,520,000.00	6,520,000.00	100.00%
	Pengawasan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	211,000,000.00	205,740,000.00	97.51%
	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	68,435,000.00	67,940,000.00	99.28%
	Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	44,655,000.00	44,515,000.00	99.69%
	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	8,340,000.00	8,115,000.00	97.30%
	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	15,440,000.00	15,310,000.00	99.16%
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	355,983,000.00	317,703,400.00	89.25%
	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	55,205,000.00	53,040,000.00	96.08%
	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	0.00	0.00	
	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19,088,000.00	15,288,000.00	80.09%
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul	281,690,000.00	249,375,400.00	88.53%
	Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah	9,947,000.00	9,947,000.00	100.00%
	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	9,947,000.00	9,947,000.00	100.00%
	Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	254,600,000.00	253,530,000.00	99.58%
	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	2,625,000.00	2,625,000.00	100.00%
	Analisis Kebijakan Pembangunan	33,750,000.00	33,750,000.00	100.00%
	Pelaporan Pembangunan	8,500,000.00	8,500,000.00	100.00%
	Penyusunan Standard Satuan Harga	186,500,000.00	185,430,000.00	99.43%
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	23,225,000.00	23,225,000.00	100.00%
	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	150,438,000.00	147,178,000.00	97.83%
	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan	16,468,000.00	14,968,000.00	90.89%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik			
	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	5,440,000.00	5,430,000.00	99.82%
	Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	33,050,000.00	32,900,000.00	99.55%
	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	10,890,000.00	10,890,000.00	100.00%
	Penyusunan dan Evaluasi Standard Opeerating Procedure dan Ketatalaksanaan	12,720,000.00	12,330,000.00	96.93%
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	71,870,000.00	70,660,000.00	98.32%
	Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan	355,574,000.00	310,994,000.00	87.46%
	Penerimaan Kunjungan Kerja	25,000,000.00	24,200,000.00	96.80%
	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten	101,324,000.00	63,824,000.00	62.99%
	Pengelolaan Informasi Media Massa	229,250,000.00	222,970,000.00	97.26%
	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	987,913,750.00	976,392,550.00	98.83%
	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	140,815,000.00	140,793,800.00	99.98%
	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	847,098,750.00	835,598,750.00	98.64%
	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	841,365,500.00	739,624,500.00	87.91%
	Pemberdayaan lembaga desa	270,000.00	270,000.00	100.00%
	Update Data Monografi Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	0.00	0.00	
	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa	96,539,000.00	52,837,500.00	54.73%
	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	0.00	0.00	
	Pedampingan Administrasi Desa	0.00	0.00	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	0.00	0.00	
	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa	17,412,500.00	11,862,500.00	68.13%
	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	16,635,000.00	11,397,500.00	68.52%
	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	3,750,000.00	3,000,000.00	80.00%
	Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kapanewonan dan Kalurahan	705,759,000.00	659,257,000.00	93.41%
	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	778,760,000.00	759,356,500.00	97.51%
	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0.00	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	751,995,500.00	732,592,000.00	97.42%
	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	26,764,500.00	26,764,500.00	100.00%
	Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3,253,646,380.00	2,696,978,855.00	82.89%
	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	0.00	0.00	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan	0.00	0.00	

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Ketenagakerjaan			
	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	54,950,000.00	6,450,000.00	11.74%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	66,425,000.00	66,381,000.00	99.93%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	0.00	0.00	
	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu	1,055,212,000.00	907,508,480.00	86.00%
	Pendamping Kegiatan Keagamaan	846,053,505.00	570,812,500.00	67.47%
	Pemberdayaan Kaum Rois	1,192,373,875.00	1,107,194,875.00	92.86%
	Pendampingan Kajian Kitab Keislaman	29,632,000.00	29,632,000.00	100.00%
	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	368,755,383.00	286,635,383.00	77.73%
	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	17,725,000.00	17,725,000.00	100.00%
	Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat	52,100,000.00	52,095,000.00	99.99%
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5,775,000.00	5,775,000.00	100.00%
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	10,657,500.00	10,657,500.00	100.00%
	Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	0.00	0.00	
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	5,200,000.00	5,200,000.00	100.00%
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	204,572,883.00	122,487,883.00	59.87%
	Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	52,100,000.00	52,095,000.00	99.99%
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah	20,625,000.00	20,600,000.00	99.88%
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21,193,843,250.00	12,270,946,083.00	57.90%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,926,586,250.00	2,012,546,311.00	68.77%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	548,188,250.00	414,022,891.00	75.53%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	858,098,000.00	285,159,300.00	33.23%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,520,300,000.00	1,313,364,120.00	86.39%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,353,614,600.00	1,081,030,188.00	79.86%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	718,589,600.00	642,477,000.00	89.41%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	121,095,000.00	62,286,500.00	51.44%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	399,530,000.00	312,225,988.00	78.15%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	114,400,000.00	64,040,700.00	55.98%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	161,500,000.00	102,584,500.00	63.52%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	161,500,000.00	102,584,500.00	63.52%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7,600,000.00	7,595,000.00	99.93%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	7,600,000.00	7,595,000.00	99.93%
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	16,744,542,400.00	9,067,190,084.00	54.15%
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1,675,051,500.00	839,322,686.00	50.11%
	Rapat-rapat paripurna	28,647,500.00	10,970,000.00	38.29%
	Reses	1,550,424,500.00	931,166,500.00	60.06%
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	4,267,571,400.00	1,910,394,852.00	44.77%
	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	5,470,911,000.00	2,927,356,514.00	53.51%
	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	670,225,000.00	596,982,000.00	89.07%
	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	2,846,184,000.00	1,678,491,032.00	58.97%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	235,527,500.00	172,506,500.00	73.24%
2	PENGAWASAN	1,949,138,335.00	1,924,332,922.00	98.73%
	Inspektorat Daerah	1,949,138,335.00	1,924,332,922.00	98.73%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	942,721,835.00	935,967,222.00	99.28%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	376,031,835.00	375,122,609.00	99.76%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	566,690,000.00	560,844,613.00	98.97%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	139,360,300.00	137,786,300.00	98.87%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,264,300.00	25,264,300.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	114,096,000.00	112,522,000.00	98.62%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97,300,000.00	87,805,200.00	90.24%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	97,300,000.00	87,805,200.00	90.24%
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	769,756,200.00	762,774,200.00	99.09%
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	47,295,000.00	47,265,000.00	99.94%
	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%
	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	9,750,000.00	9,750,000.00	100.00%
	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online	709,211,200.00	702,259,200.00	99.02%
3	PERENCANAAN	3,633,922,635.00	3,429,052,456.30	94.36%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,633,922,635.00	3,429,052,456.30	94.36%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	848,273,575.00	784,296,083.30	92.46%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	660,013,575.00	633,030,183.30	95.91%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	188,260,000.00	151,265,900.00	80.35%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	358,079,060.00	319,083,198.00	89.11%
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	13,500,000.00	11,806,245.00	87.45%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	166,429,060.00	165,504,060.00	99.44%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	153,150,000.00	117,944,893.00	77.01%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	25,000,000.00	23,828,000.00	95.31%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,950,000.00	20,950,000.00	80.73%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	25,950,000.00	20,950,000.00	80.73%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,300,000.00	8,072,500.00	97.26%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	8,300,000.00	8,072,500.00	97.26%
	Program pengembangan data/informasi	301,322,500.00	300,750,000.00	99.81%
	Penyusunan dan pengelolaan data daerah	141,607,500.00	141,402,500.00	99.86%
	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	159,715,000.00	159,347,500.00	99.77%
	Program perencanaan pembangunan daerah	778,560,000.00	740,437,500.00	95.10%
	Perencanaan penganggaran	632,010,000.00	622,710,000.00	98.53%
	Perencanaan pembangunan sektoral	74,500,000.00	62,850,000.00	84.36%
	Perencanaan pembangunan kewilayahan	72,050,000.00	54,877,500.00	76.17%
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	226,675,000.00	224,714,175.00	99.13%
	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	57,175,000.00	55,723,875.00	97.46%
	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam	169,500,000.00	168,990,300.00	99.70%
	Program perencanaan sosial dan budaya	425,685,000.00	378,596,500.00	88.94%
	Perencanaan pembangunan pemerintahan	77,950,000.00	70,775,000.00	90.80%
	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	251,380,000.00	225,678,500.00	89.78%
	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	96,355,000.00	82,143,000.00	85.25%
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	166,200,000.00	159,895,000.00	96.21%
	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	166,200,000.00	159,895,000.00	96.21%
	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	65,750,000.00	63,752,500.00	96.96%
	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	65,750,000.00	63,752,500.00	96.96%
	Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah	429,127,500.00	428,505,000.00	99.85%
	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	429,127,500.00	428,505,000.00	99.85%
4	KEUANGAN	43,775,784,790.00	39,798,668,397.50	90.91%
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	43,775,784,790.00	39,798,668,397.50	90.91%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	34,732,945,000.00	32,134,232,988.50	92.52%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	33,395,338,000.00	30,923,132,433.50	92.60%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	286,695,000.00	193,615,990.00	67.53%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,050,912,000.00	1,017,484,565.00	96.82%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	986,029,900.00	852,469,409.00	86.45%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	538,414,400.00	506,708,750.00	94.11%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	408,097,500.00	323,125,659.00	79.18%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	39,518,000.00	22,635,000.00	57.28%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	0.00	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	0.00	0.00	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	59,737,500.00	58,099,000.00	97.26%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	3,500,000.00	3,450,000.00	98.57%
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah	33,500,000.00	33,150,000.00	98.96%
	Penyaluran Belanja PPKD	5,250,000.00	5,245,000.00	99.90%
	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	2,487,500.00	1,260,000.00	50.65%
	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	15,000,000.00	14,994,000.00	99.96%
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7,235,694,890.00	6,123,066,900.00	84.62%
	Penyusunan KUA PPAS	101,035,000.00	89,117,500.00	88.20%
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	74,156,250.00	58,747,500.00	79.22%
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	74,902,500.00	55,660,300.00	74.31%
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	37,513,750.00	30,827,500.00	82.18%
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	40,870,000.00	33,200,000.00	81.23%
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	96,550,000.00	91,275,000.00	94.54%
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	50,745,000.00	50,152,500.00	98.83%
	Peningkatan manajemen investasi daerah	11,112,500.00	10,742,500.00	96.67%
	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	4,990,000.00	1,239,000.00	24.83%
	Penyusunan anggaran kas	2,000,000.00	325,000.00	16.25%
	Penerbitan SPD	1,312,500.00	680,000.00	51.81%
	Penerbitan SP2D	72,712,500.00	72,277,500.00	99.40%
	TPTGR	6,762,500.00	1,000,000.00	14.79%
	Penyusunan neraca dinas / instansi	5,637,500.00	4,872,500.00	86.43%
	Penyusunan SPT Tahunan	70,305,000.00	70,305,000.00	100.00%
	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	1,500,000.00	0.00	0.00%
	Operasional pajak daerah	72,432,500.00	62,453,500.00	86.22%
	Penyusunan laporan semesteran	2,400,000.00	2,200,000.00	91.67%
	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	4,650,000.00	4,650,000.00	100.00%
	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan	12,692,500.00	7,825,000.00	61.65%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	keuangan daerah			
	Pengendalian PAD	9,987,500.00	4,800,000.00	48.06%
	Optimalisasi pendapatan daerah	17,165,000.00	16,990,000.00	98.98%
	Pelayanan pajak daerah	317,174,000.00	309,545,500.00	97.59%
	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	290,825,000.00	178,469,000.00	61.37%
	Pendataan dan penetapan wajib pajak	4,750,000.00	2,650,000.00	55.79%
	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	3,842,420,000.00	2,974,907,600.00	77.42%
	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	1,723,578,000.00	1,721,942,500.00	99.91%
	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	205,340,390.00	193,632,000.00	94.30%
	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	0.00	0.00	
	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
	Pengelolaan Belanja ASN	4,267,500.00	3,012,500.00	70.59%
	Rekonsiliasi data laporan	17,325,000.00	14,117,500.00	81.49%
	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	5,895,000.00	3,545,000.00	60.14%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	42,687,500.00	41,905,000.00	98.17%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	761,377,500.00	630,800,100.00	82.85%
	Peningkatan SDM aparatur Pemda	0.00	0.00	
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	14,977,500.00	6,070,000.00	40.53%
	Penataan aset	25,500,000.00	12,372,500.00	48.52%
	Penghapusan barang daerah	142,250,000.00	78,880,600.00	55.45%
	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	407,700,000.00	387,137,000.00	94.96%
	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	163,470,000.00	146,090,000.00	89.37%
	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	7,480,000.00	250,000.00	3.34%
	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	0.00	0.00	
5	KEPEGAWAIAN	4,730,937,800.00	3,786,395,586.00	80.03%
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4,730,937,800.00	3,786,395,586.00	80.03%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	870,878,500.00	608,008,633.00	69.82%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	466,825,000.00	391,264,533.00	83.81%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	404,053,500.00	216,744,100.00	53.64%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,560,629,500.00	1,475,454,934.00	94.54%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1,292,209,500.00	1,244,192,760.00	96.28%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	220,120,000.00	197,365,074.00	89.66%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	48,300,000.00	33,897,100.00	70.18%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11,500,000.00	8,207,900.00	71.37%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	11,500,000.00	8,207,900.00	71.37%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1,811,710,800.00	1,331,242,119.00	73.48%
	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah	39,410,000.00	36,270,000.00	92.03%
	Uji Kompetensi dan psikologi	5,100,000.00	4,040,000.00	79.22%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pendidikan dan Pelatihan PNS	829,360,800.00	587,902,719.00	70.89%
	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	39,430,000.00	39,050,000.00	99.04%
	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	898,410,000.00	663,979,400.00	73.91%
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	145,357,500.00	112,053,000.00	77.09%
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	6,700,000.00	3,400,000.00	50.75%
	Pelaporan LP2P dan LHKPN	26,065,000.00	23,470,500.00	90.05%
	Penilaian PNS	29,500,000.00	27,975,000.00	94.83%
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	34,865,000.00	19,884,000.00	57.03%
	Pembinaan Aparatur Berprestasi	32,437,500.00	24,617,500.00	75.89%
	Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur	15,790,000.00	12,706,000.00	80.47%
	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	330,861,500.00	251,429,000.00	75.99%
	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	110,930,000.00	81,893,000.00	73.82%
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	26,122,250.00	17,276,250.00	66.14%
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	193,809,250.00	152,259,750.00	78.56%
6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	81,320,000.00	80,912,500.00	99.50%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	81,320,000.00	80,912,500.00	99.50%
	Program Kerjasama Pembangunan	34,412,500.00	34,097,500.00	99.08%
	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah	34,412,500.00	34,097,500.00	99.08%
	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	46,907,500.00	46,815,000.00	99.80%
	Pengembangan sistem inovasi daerah	46,907,500.00	46,815,000.00	99.80%
7	FUNGSI LAINNYA	11,269,940,000.00	11,021,273,647.00	97.79%
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	244,550,000.00	238,656,500.00	97.59%
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	107,175,000.00	105,753,500.00	98.67%
	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	107,175,000.00	105,753,500.00	98.67%
	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	137,375,000.00	132,903,000.00	96.74%
	Sosialisasi pengelolaan perijinan	54,750,000.00	54,625,000.00	99.77%
	Operasional pelayanan perijinan	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00%
	Pendataan dan penetapan perijinan	10,325,000.00	10,320,000.00	99.95%
	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	4,225,000.00	4,225,000.00	100.00%
	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	51,300,000.00	47,008,000.00	91.63%
	Pengelolaan perijinan online	4,425,000.00	4,375,000.00	98.87%
	Survei kepuasan masyarakat	2,450,000.00	2,450,000.00	100.00%
	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantu ekspe	0.00	0.00	
	Lokakarya penanganan pengaduan	700,000.00	700,000.00	100.00%
	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%
	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	0.00	0.00	
	Kecamatan Banguntapan	680,000,000.00	599,770,230.00	88.20%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	386,490,100.00	307,329,194.00	79.52%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	196,317,900.00	189,369,494.00	96.46%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan	190,172,200.00	117,959,700.00	62.03%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Konsultasi			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	195,056,500.00	193,987,636.00	99.45%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	31,964,000.00	31,963,636.00	100.00%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	47,492,500.00	47,301,000.00	99.60%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	106,800,000.00	105,923,000.00	99.18%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	11,583,400.00	11,583,400.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	11,583,400.00	11,583,400.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	37,200,000.00	37,200,000.00	100.00%
	Meningkatkan wawasan kebangsaan	0.00	0.00	
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	30,187,500.00	30,187,500.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	7,012,500.00	7,012,500.00	100.00%
	Program pembinaan sosial masyarakat kecamatan	29,020,000.00	29,020,000.00	100.00%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	16,550,000.00	16,550,000.00	100.00%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	12,470,000.00	12,470,000.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	18,950,000.00	18,950,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	3,400,000.00	3,400,000.00	100.00%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	15,550,000.00	15,550,000.00	100.00%
	Kecamatan Piyungan	680,000,000.00	676,786,134.00	99.53%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	285,790,400.00	283,972,034.00	99.36%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	181,982,000.00	180,163,634.00	99.00%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	103,808,400.00	103,808,400.00	100.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151,276,600.00	149,881,100.00	99.08%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	31,500,000.00	31,500,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	8,756,600.00	8,756,600.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	101,020,000.00	99,624,500.00	98.62%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6,445,000.00	6,445,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	6,445,000.00	6,445,000.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	12,020,000.00	12,020,000.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	12,020,000.00	12,020,000.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	81,820,000.00	81,820,000.00	100.00%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	31,030,000.00	31,030,000.00	100.00%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	26,240,000.00	26,240,000.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	24,550,000.00	24,550,000.00	100.00%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	99,289,000.00	99,289,000.00	100.00%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	81,889,000.00	81,889,000.00	100.00%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	17,400,000.00	17,400,000.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	43,359,000.00	43,359,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	24,810,000.00	24,810,000.00	100.00%
	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	18,549,000.00	18,549,000.00	100.00%
	Kecamatan Dlingo	680,000,000.00	673,020,099.00	98.97%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292,994,833.00	286,129,932.00	97.66%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	226,768,733.00	219,903,832.00	96.97%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	64,143,600.00	64,143,600.00	100.00%
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	2,082,500.00	2,082,500.00	100.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	241,392,667.00	241,392,667.00	100.00%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	38,350,000.00	38,350,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	71,522,667.00	71,522,667.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	122,520,000.00	122,520,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6,587,500.00	6,587,500.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	6,587,500.00	6,587,500.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	74,875,000.00	74,760,000.00	99.85%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	31,387,500.00	31,272,500.00	99.63%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	15,985,000.00	15,985,000.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	27,502,500.00	27,502,500.00	100.00%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	38,325,000.00	38,325,000.00	100.00%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	32,700,000.00	32,700,000.00	100.00%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	5,625,000.00	5,625,000.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	19,325,000.00	19,325,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	6,325,000.00	6,325,000.00	100.00%
	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00%
	Kecamatan Imogiri	680,000,000.00	678,604,635.00	99.79%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	264,846,100.00	263,489,635.00	99.49%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	173,480,000.00	172,141,035.00	99.23%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan	91,366,100.00	91,348,600.00	99.98%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Konsultasi			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	227,378,900.00	227,340,000.00	99.98%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	66,453,900.00	66,425,000.00	99.96%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	49,000,000.00	48,990,000.00	99.98%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	97,725,000.00	97,725,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	14,200,000.00	14,200,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	7,550,000.00	7,550,000.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	7,550,000.00	7,550,000.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	53,250,000.00	53,250,000.00	100.00%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	10,425,000.00	10,425,000.00	100.00%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	17,700,000.00	17,700,000.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	25,125,000.00	25,125,000.00	100.00%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	71,550,000.00	71,550,000.00	100.00%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	59,400,000.00	59,400,000.00	100.00%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	12,150,000.00	12,150,000.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	50,325,000.00	50,325,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	29,325,000.00	29,325,000.00	100.00%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00%
	Kecamatan Pandak	612,500,000.00	588,756,786.00	96.12%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	198,539,000.00	191,314,786.00	96.36%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	169,157,900.00	161,933,686.00	95.73%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	29,381,100.00	29,381,100.00	100.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	196,825,000.00	190,430,000.00	96.75%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	55,665,000.00	55,640,000.00	99.96%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	39,140,000.00	39,140,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	90,520,000.00	84,150,000.00	92.96%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	11,500,000.00	11,500,000.00	100.00%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,750,000.00	10,622,000.00	98.81%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	10,750,000.00	10,622,000.00	98.81%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	450,000.00	300,000.00	66.67%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	450,000.00	300,000.00	66.67%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	12,230,000.00	12,230,000.00	100.00%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Peningkatan pelayanan masyarakat	12,230,000.00	12,230,000.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	74,706,000.00	71,285,000.00	95.42%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	22,625,000.00	22,595,000.00	99.87%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	31,231,000.00	29,440,000.00	94.27%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	20,850,000.00	19,250,000.00	92.33%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	76,175,000.00	69,750,000.00	91.57%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	71,175,000.00	64,750,000.00	90.97%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	42,825,000.00	42,825,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	26,850,000.00	26,850,000.00	100.00%
	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	15,975,000.00	15,975,000.00	100.00%
	Kecamatan Bantul	680,000,000.00	651,675,136.00	95.83%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	271,667,000.00	264,871,156.00	97.50%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	220,450,750.00	213,695,056.00	96.94%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	51,216,250.00	51,176,100.00	99.92%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	229,615,000.00	228,615,980.00	99.56%
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	41,000,000.00	41,000,000.00	100.00%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	84,000,000.00	83,004,980.00	98.82%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	91,615,000.00	91,611,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	750,000.00	750,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	750,000.00	750,000.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	4,300,000.00	4,300,000.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	4,300,000.00	4,300,000.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	73,820,000.00	68,490,000.00	92.78%
	Meningkatkan wawasan kebangsaan	9,480,000.00	9,480,000.00	100.00%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	36,000,000.00	34,120,000.00	94.78%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	28,340,000.00	24,890,000.00	87.83%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	78,548,000.00	63,348,000.00	80.65%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	65,150,000.00	49,950,000.00	76.67%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	13,398,000.00	13,398,000.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	21,300,000.00	21,300,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00%
	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	15,900,000.00	15,900,000.00	100.00%
	Kecamatan Kretek	680,000,000.00	671,774,525.00	98.79%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	333,844,200.00	325,856,425.00	97.61%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan	250,522,000.00	242,546,725.00	96.82%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Perlengkapan Perkantoran			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	83,322,200.00	83,309,700.00	99.98%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	203,375,000.00	203,375,000.00	100.00%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	41,750,000.00	41,750,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	40,825,000.00	40,825,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100,800,000.00	100,800,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,000,000.00	9,997,500.00	99.98%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000.00	9,997,500.00	99.98%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	17,662,000.00	17,662,000.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	17,662,000.00	17,662,000.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	47,485,800.00	47,473,600.00	99.97%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	7,722,000.00	7,722,000.00	100.00%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	10,321,600.00	10,321,600.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	29,442,200.00	29,430,000.00	99.96%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	45,331,500.00	45,109,000.00	99.51%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	36,669,000.00	36,466,500.00	99.45%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	8,662,500.00	8,642,500.00	99.77%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	22,301,500.00	22,301,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	5,250,000.00	5,250,000.00	100.00%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	17,051,500.00	17,051,000.00	100.00%
	Kecamatan Banglilipuro	612,290,000.00	609,348,947.00	99.52%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	248,891,393.00	245,950,340.00	98.82%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	192,800,293.00	189,859,240.00	98.47%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	56,091,100.00	56,091,100.00	100.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	211,280,650.00	211,280,650.00	100.00%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	35,900,000.00	35,900,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	50,296,400.00	50,296,400.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	105,084,250.00	105,084,250.00	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,656,700.00	3,656,700.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	3,656,700.00	3,656,700.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	4,074,650.00	4,074,650.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	4,074,650.00	4,074,650.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	73,584,207.00	73,584,207.00	100.00%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Peningkatan wawasan kebangsaan	21,500,000.00	21,500,000.00	100.00%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	11,700,000.00	11,700,000.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	40,384,207.00	40,384,207.00	100.00%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	41,940,000.00	41,940,000.00	100.00%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	36,100,000.00	36,100,000.00	100.00%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	5,840,000.00	5,840,000.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	28,862,400.00	28,862,400.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	10,825,000.00	10,825,000.00	100.00%
	Musyawahar Perencanaan Pembangunan	18,037,400.00	18,037,400.00	100.00%
	Kecamatan Jetis	612,500,000.00	610,904,196.00	99.74%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	240,020,000.00	238,434,196.00	99.34%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	197,443,900.00	195,858,096.00	99.20%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	42,576,100.00	42,576,100.00	100.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	259,145,000.00	259,135,000.00	100.00%
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	75,000,000.00	74,990,000.00	99.99%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	63,825,000.00	63,825,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	110,320,000.00	110,320,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	56,000,000.00	56,000,000.00	100.00%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	28,600,000.00	28,600,000.00	100.00%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	6,200,000.00	6,200,000.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	21,200,000.00	21,200,000.00	100.00%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	12,785,000.00	12,785,000.00	100.00%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	12,785,000.00	12,785,000.00	100.00%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	0.00	0.00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	28,350,000.00	28,350,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%
	Musyawahar Perencanaan Pembangunan	26,600,000.00	26,600,000.00	100.00%
	Kecamatan Kasihan	680,000,000.00	660,335,242.00	97.11%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	344,422,150.00	330,162,592.00	95.86%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	200,574,950.00	186,315,392.00	92.89%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	143,847,200.00	143,847,200.00	100.00%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	243,408,650.00	238,086,650.00	97.81%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	66,590,000.00	66,590,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	42,478,650.00	42,478,650.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	115,590,000.00	110,268,000.00	95.40%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	18,750,000.00	18,750,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	12,499,200.00	12,416,000.00	99.33%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	12,499,200.00	12,416,000.00	99.33%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	35,390,000.00	35,390,000.00	100.00%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	20,490,000.00	20,490,000.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	9,900,000.00	9,900,000.00	100.00%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	22,180,000.00	22,180,000.00	100.00%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	12,700,000.00	12,700,000.00	100.00%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	9,480,000.00	9,480,000.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	18,100,000.00	18,100,000.00	100.00%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	18,100,000.00	18,100,000.00	100.00%
	Kecamatan Pleret	612,500,000.00	603,887,934.00	98.59%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	287,287,750.00	279,704,909.00	97.36%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	192,687,750.00	185,148,809.00	96.09%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	94,600,000.00	94,556,100.00	99.95%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	199,057,025.00	198,027,800.00	99.48%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	62,800,000.00	62,800,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	25,300,000.00	25,300,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	102,457,025.00	101,535,800.00	99.10%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	8,500,000.00	8,392,000.00	98.73%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,460,000.00	1,460,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1,460,000.00	1,460,000.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	9,717,025.00	9,717,025.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	9,717,025.00	9,717,025.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	47,850,000.00	47,850,000.00	100.00%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	13,300,000.00	13,300,000.00	100.00%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	24,775,000.00	24,775,000.00	100.00%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	9,775,000.00	9,775,000.00	100.00%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	39,675,000.00	39,675,000.00	100.00%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	34,575,000.00	34,575,000.00	100.00%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	27,453,200.00	27,453,200.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	11,925,000.00	11,925,000.00	100.00%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	15,528,200.00	15,528,200.00	100.00%
	Kecamatan Pajangan	612,500,000.00	600,279,475.00	98.00%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326,063,625.00	320,201,838.00	98.20%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	212,437,525.00	208,780,238.00	98.28%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	113,626,100.00	111,421,600.00	98.06%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	203,469,738.00	198,871,000.00	97.74%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	28,072,800.00	27,672,800.00	98.58%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	54,346,938.00	54,346,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	110,000,000.00	105,802,200.00	96.18%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	11,050,000.00	11,050,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,374,637.00	3,304,637.00	97.93%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	3,374,637.00	3,304,637.00	97.93%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	8,590,000.00	8,590,000.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	8,590,000.00	8,590,000.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	29,520,000.00	28,710,000.00	97.26%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	16,025,000.00	16,025,000.00	100.00%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	9,695,000.00	8,885,000.00	91.65%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	25,542,000.00	24,662,000.00	96.55%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	25,542,000.00	24,662,000.00	96.55%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	15,940,000.00	15,940,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	2,590,000.00	2,590,000.00	100.00%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	13,350,000.00	13,350,000.00	100.00%
	Kecamatan Sanden	612,500,000.00	598,484,302.00	97.71%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	244,269,800.00	235,515,902.00	96.42%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	190,176,200.00	184,347,302.00	96.94%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	54,093,600.00	51,168,600.00	94.59%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	249,895,000.00	246,340,000.00	98.58%
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	89,430,000.00	89,241,000.00	99.79%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	44,250,000.00	41,700,000.00	94.24%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	103,650,000.00	103,200,000.00	99.57%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	12,565,000.00	12,199,000.00	97.09%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	205,000.00	200,000.00	97.56%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	205,000.00	200,000.00	97.56%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	15,857,600.00	14,977,500.00	94.45%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	15,857,600.00	14,977,500.00	94.45%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	46,300,300.00	46,237,500.00	99.86%
	Pengendalian keamanan lingkungan	8,590,000.00	8,590,000.00	100.00%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	377,900.00	377,500.00	99.89%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	37,332,400.00	37,270,000.00	99.83%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	11,958,800.00	11,700,000.00	97.84%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	9,721,800.00	9,463,000.00	97.34%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	2,237,000.00	2,237,000.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	44,013,500.00	43,513,400.00	98.86%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	12,287,500.00	11,787,400.00	95.93%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	31,726,000.00	31,726,000.00	100.00%
	Kecamatan Sedayu	680,600,000.00	668,793,200.00	98.27%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	302,168,000.00	293,383,200.00	97.09%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	189,975,800.00	188,141,000.00	99.03%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	112,192,200.00	105,242,200.00	93.81%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	216,775,000.00	213,753,000.00	98.61%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	106,775,000.00	103,753,000.00	97.17%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,507,000.00	2,507,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	2,507,000.00	2,507,000.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	15,300,000.00	15,300,000.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	15,300,000.00	15,300,000.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	78,500,000.00	78,500,000.00	100.00%
	Meningkatkan wawasan kebangsaan	40,800,000.00	40,800,000.00	100.00%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	16,700,000.00	16,700,000.00	100.00%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	16,500,000.00	16,500,000.00	100.00%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	15,500,000.00	15,500,000.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	33,350,000.00	33,350,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	16,350,000.00	16,350,000.00	100.00%
	Kecamatan Sewon	680,000,000.00	676,922,056.00	99.55%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	345,755,304.00	343,327,556.00	99.30%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	247,241,904.00	244,814,156.00	99.02%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	98,513,400.00	98,513,400.00	100.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	279,409,696.00	278,759,500.00	99.77%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	50,639,500.00	50,639,500.00	100.00%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	108,734,196.00	108,084,000.00	99.40%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100,376,000.00	100,376,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	19,660,000.00	19,660,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	1,510,000.00	1,510,000.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	1,510,000.00	1,510,000.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	7,975,000.00	7,975,000.00	100.00%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	350,000.00	350,000.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	2,625,000.00	2,625,000.00	100.00%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	20,700,000.00	20,700,000.00	100.00%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	20,700,000.00	20,700,000.00	100.00%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	0.00	0.00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	23,550,000.00	23,550,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	20,050,000.00	20,050,000.00	100.00%
	Kecamatan Srandakan	617,500,000.00	607,070,315.00	98.31%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	205,344,000.00	197,518,315.00	96.19%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	170,831,800.00	163,006,115.00	95.42%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	34,512,200.00	34,512,200.00	100.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	189,216,000.00	186,812,000.00	98.73%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	18,500,000.00	18,500,000.00	100.00%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	63,216,000.00	62,916,000.00	99.53%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	95,500,000.00	93,396,000.00	97.80%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Daya Aparatur			
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,880,000.00	4,880,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,880,000.00	4,880,000.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	32,025,000.00	32,025,000.00	100.00%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	32,025,000.00	32,025,000.00	100.00%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	94,350,000.00	94,150,000.00	99.79%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	21,800,000.00	21,600,000.00	99.08%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	52,200,000.00	52,200,000.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	20,350,000.00	20,350,000.00	100.00%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	59,160,000.00	59,160,000.00	100.00%
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	59,160,000.00	59,160,000.00	100.00%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	0.00	0.00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	29,825,000.00	29,825,000.00	100.00%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	9,250,000.00	9,250,000.00	100.00%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	20,575,000.00	20,575,000.00	100.00%
	Kecamatan Pundong	612,500,000.00	606,203,935.00	98.97%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	286,167,500.00	281,871,535.00	98.50%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	231,902,500.00	227,620,335.00	98.15%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	54,265,000.00	54,251,200.00	99.97%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210,712,500.00	209,119,900.00	99.24%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	69,500,000.00	68,217,000.00	98.15%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	33,267,500.00	33,258,900.00	99.97%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	94,240,000.00	93,939,500.00	99.68%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	13,705,000.00	13,704,500.00	100.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	11,800,000.00	11,790,000.00	99.92%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	11,800,000.00	11,790,000.00	99.92%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	44,360,000.00	44,360,000.00	100.00%
	Peningkatan wawasan kebangsaan	12,310,000.00	12,310,000.00	100.00%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	12,687,500.00	12,687,500.00	100.00%
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	19,362,500.00	19,362,500.00	100.00%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	31,275,000.00	31,190,000.00	99.73%

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	29,212,500.00	29,127,500.00	99.71%
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	2,062,500.00	2,062,500.00	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	26,185,000.00	25,872,500.00	98.81%
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	10,875,000.00	10,562,500.00	97.13%
	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	15,310,000.00	15,310,000.00	100.00%
	Jumlah	994,408,391,331.10	923,268,325,425.99	92.85%

Sumber : RKPDP Perubahan Kab. Bantul Peraturan Bupati Bantul No 99 tahun 2020; Target dan Realisasi pada simral.bppt.go.id/bantulkab akses tanggal 10 Maret 2021

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam peraturan pemerintah dan tidak didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis layanan SPM. Pengaturan oleh kementerian terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan serta merupakan barang dan/atau jasa yang berhak diperoleh oleh

setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Mekanisme penerapan SPM dilaksanakan melalui: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang seluruhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan teknis kementerian terkait. Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Penetapan prioritas tersebut, diikuti dengan implementasi penerapan layanan SPM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan merupakan wujud atas penjaminan hak konstitusional warga negara. Sehingga, terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sesuai dengan ketentuan penerapan SPM merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menjabarkan secara rinci perihal penerapan SPM yang wajib dilaksanakan di daerah, meliputi daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan di masing-masing tingkatan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki kemampuan keuangan daerah, SDM, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, maka tiap daerah memiliki tantangan masing-masing didalam melaksanakan penerapan SPM. Merujuk pada hakikat dari penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara akan pemenuhan hak dasarnya agar terpenuhi supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri kedepannya, maka menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat didalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.).

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 292 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul.

c. Kebijakan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

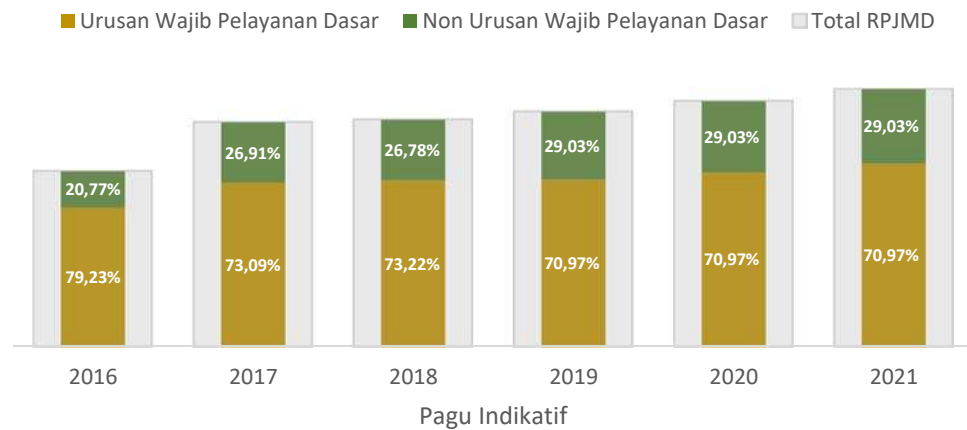
Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan perubahan terhadap dokumen RPJMD dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Perubahan terhadap RPJMD dilakukan sebagai implikasi dari adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan penyesuaian melalui perubahan perangkat daerah dan berimbas pada perubahan/penyesuaian indikator maupun target kinerja. Kebijakan nasional berikutnya adalah terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga diperlukan adanya perubahan substansi dan sistematika RPJMD dikarenakan adanya perbedaan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kebijakan umum daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 belum sepenuhnya menggambarkan bahwa penerapan SPM menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah yang tercermin dalam target kinerja indikator kinerja program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan terhadap RPJMD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebenarnya merupakan momentum yang tepat untuk merumuskan indikator dan target penerapan SPM ke dalam RPJMD perubahan sebagai wujud penerapan SPM sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut belum dapat dilakukan karena pada saat penyusunan RPJMD perubahan, belum ada ketentuan mengenai standar teknis penerapan SPM yang bisa dijadikan panduan. Namun Kabupaten Bantul di Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan penyandingan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan maupun RKPD yang mendukung pelaksanaan penerapan SPM.

Urusan pemerintahan yang menjadi ruang lingkup SPM berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 adalah urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Urusan pemerintahan ini menjadi urusan yang bersifat mandatory dan menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjadikan urusan wajib pelayanan dasar sebagai prioritas daerah didalam perencanaan daerah dan ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan RPJMD

Perubahan tahun 2016-2021, dimana urusan wajib pelayanan dasar menjadi prioritas daerah. Hal ini dapat terlihat dari pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk tahun 2016-2021 yang berkisar antara 70-80% tiap tahunnya, sebagaimana ditampilkan pada Grafik 1.1.1



Grafik 1.1.1 Pagu Indikatif urusan wajib pelayanan dasar dan urusan non wajib pelayanan dasar dalam RPJMD perubahan 2016-2021

d. Arah Kebijakan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) merupakan suatu dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. Penyusunan rancangan KUA tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.

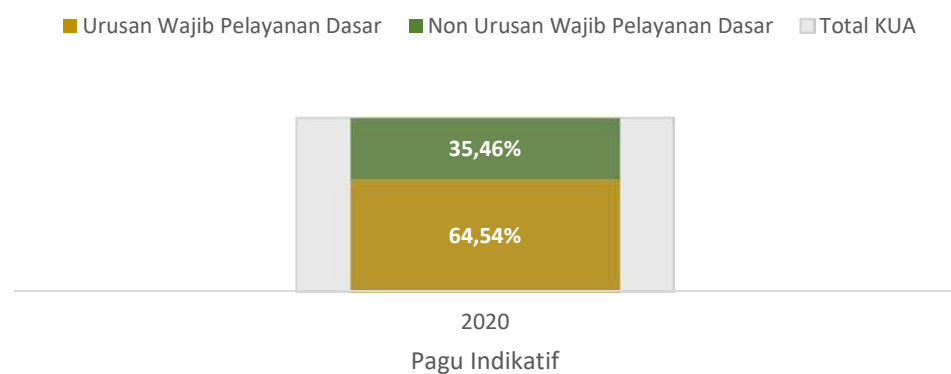
Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai kondisi keuangan pemerintah daerah meliputi proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dan kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang harus menjadi

acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinergi yang harmonis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal menjamin sinkronisasi program dan kegiatan maka Penyusunan KUA tahun 2020 juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

KUA disusun dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah. KUA tahun anggaran 2020 memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada setiap urusan pemerintahan daerah disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Program dan kegiatan dikelompokkan kedalam 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 8 Urusan Pilihan, dan 5 Urusan Penunjang.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Salah satu kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bantul adalah memprioritaskan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sebagai suatu upaya memenuhi kewajiban dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta pengentasan kemiskinan.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai prioritas daerah didalam rancangan KUA belum seluruhnya tercermin dalam target kinerja indikator program kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini dikarenakan penyusunan rancangan KUA mengacu pada RKPD yang disusun berdasarkan RPJMD Perubahan tahun 2016-2021 dimana pada saat penyusunannya belum ada petunjuk teknis penyusunan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018. Namun demikian, urusan wajib pelayanan dasar sebagai ruang lingkup layanan SPM menjadi prioritas daerah didalam penyusunan Dokumen KUA tahun 2020 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukkan dengan besaran plafon anggaran urusan wajib pelayanan dasar pada Dokumen KUA sebesar Rp630.477.697.598,00 atau 64,54% dari total plafon anggaran sebesar Rp976.825.481.534,00. Perbandingan plafon anggaran urusan wajib pelayanan dasar terhadap total plafon anggaran tersaji pada **Grafik 1.1.2**



Grafik 1.1.2 Plafon Indikatif urusan wajib pelayanan dasar dan urusan non wajib pelayanan dasar dalam KUA tahun 2020

BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80.01	80.01	0.00%
2.	Angka Kemiskinan	12.92	13.5	4.49%
3.	Angka Pengangguran	3.06	4.06	32.68%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5.53	0.49	-91.14%
5.	Pendapatan per Kapita	25,8	25,4	-1,55%
	- Pendapatan per Kapita Nominal	Rp 27,78 juta	Rp 27,40 juta	-1.35%
	- Pendapatan per Kapita Riil	Rp 20,11 juta	Rp 19,73 juta	-1.88%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.448	0.381	-14.96%

Sumber : *BPS, 2021; data diolah

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (growth oriented), namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (people need oriented). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan terhadap masyarakat adalah indikator indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Pencapaian IPM Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebesar 80,01 atau berada pada capaian sangat tinggi. Nilai ini sama dengan capaian IPM Kabupaten Bantul di tahun 2019. Hal ini terjadi karena terjadi peningkatan pada nilai Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masing-masing sebesar 0,09; 0,02; dan 0,01. Namun terjadi penurunan nilai pada Pengeluaran per Kapita sebesar Rp119.000,- pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam proses pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat memberikan permasalahan serius yang berdampak kepada berbagai aspek mulai ekonomi, kesehatan bahkan sampai masalah kerawanan sosial. Pemerintah Kabupaten Bantul sangat serius dalam menangani permasalahan kemiskinan di daerah.

Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami kenaikan sebesar 0,58 dibandingkan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul adalah dengan melakukan persiapan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2021. Selain itu konsentrasi pada perbaikan data pada program :

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD
2. Perbaikan NIK penerima Bantuan Sosial Pangan dan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Konsentrasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan selama Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Bantul adalah :

1. Pemberian Tambahan Makanan Boga Sehat
2. Pendampingan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020

NO	Nama Bantuan Sosial	Jumlah (KK)	Sumber Anggaran
1	Bantuan Sosial (BST)	17.328	Kementerian Sosial RI
2	Sembako (BPNT)	106.419	Kementerian Sosial RI
3	Top Up DIY	36.858	APBD DIY
4	BLT APBD	5.340	APBD Bantul
5	BLT DD	17.886	APBDES

Sumber : Bappeda, 2021

Data dari penerima bantuan sosial merupakan data sasaran yang sudah melewati proses Musyawarah Desa (Musdes). Untuk pendampingan dan penyaluran Bansos dilaksanakan oleh semua lini dari tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa. Pendampingan dan distribusi dilaksanakan oleh pendamping TKPK, PKH, TKSK dan Pendamping Desa.

2.1.3. Angka Pengangguran

Pada tahun 2020, angka pengangguran Kabupaten Bantul sebesar 4,06% (Grafik 2.1.1; Sumber: BPS Sakernas 2020) sedangkan pada tahun 2019, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bantul adalah sebesar 3,06%. Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori penganggur pada TPT meliputi: (1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, (4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



Grafik 2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 (Sumber : BPS; data diolah)

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan pengamatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2020 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai sebesar Rp.18.838,13 miliar sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai sebesar Rp.26.162,54 miliar

Tabel 2.1.3 PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

No.	Tahun	Harga Berlaku		Perubahan (%)	Harga Konstan		Perubahan (%)
		Nilai (miliar Rp)	Pertumbuhan		Nilai (miliar Rp)	Pertumbuhan	
1	2019	26 311,58	7.78*)	-88,17*)	19 155,27	5.53	-120,98
2	2020*)	26 162,54	0.92*)		18 838,13	-1,16	

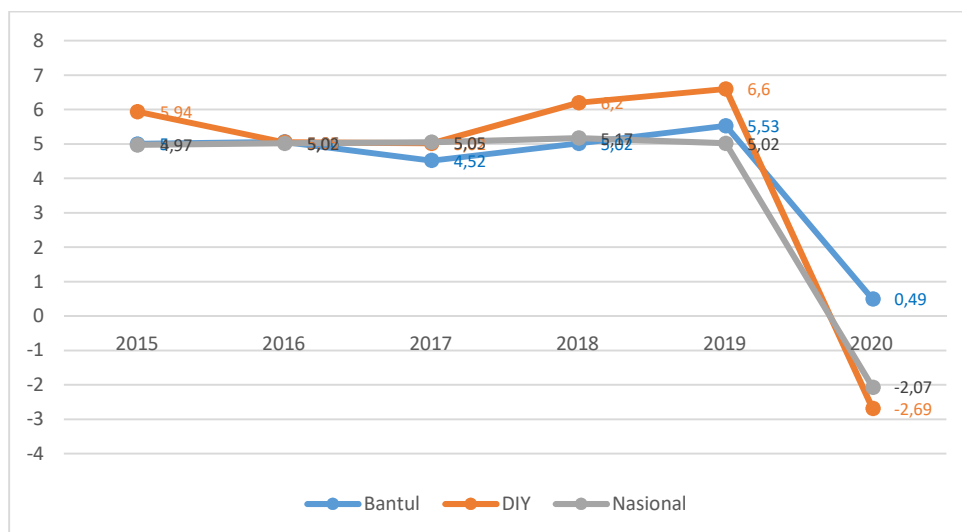
Sumber : BPS, 2021; *) proyeksi Bappeda, 2020

Tabel 2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan 2020

Kategori	Uraian	2019	2020	Perubahan (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,13	4,86	3.638,46
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,27	-11,32	4092,6
C	Industri Pengolahan	5,38	-4,80	-189,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,73	-1,77	-137,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,25	0,61	-92,6
F	Konstruksi	5,17	-13,78	-366,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,19	-4,2	-180,92
H	Transportasi dan Pergudangan	6,46	-12,58	-294,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,68	-11,55	-232,49
J	Informasi dan Komunikasi	7,29	19,94	173,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,97	-2,41	-124,17
L	Real Estate	6,43	0,23	-96,42
M,N	Jasa Perusahaan	7,38	-14,40	-295,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,42	-1,96	-157,31
P	Jasa Pendidikan	6,65	3,79	-43,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,02	18,59	164,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,09	-11,21	-284,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,53	-1,66	-112,32

Sumber : BPS, Bantul Dalam Angka 2021, data diolah

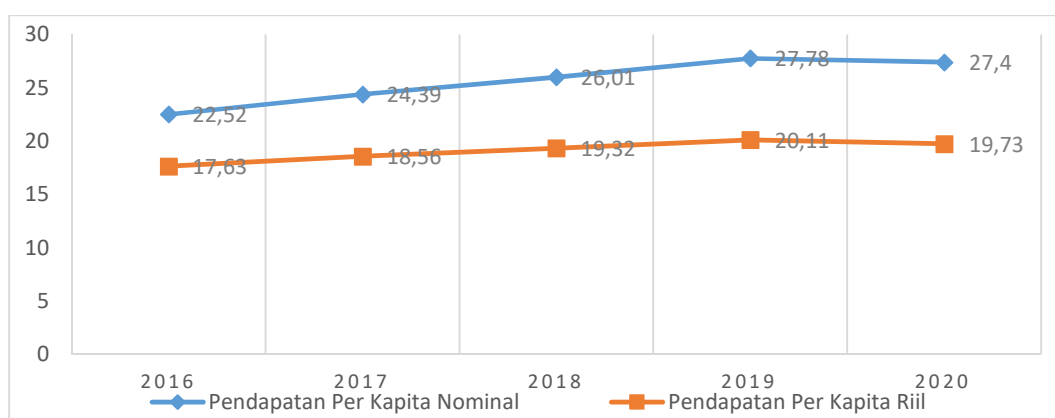
Kondisi tingkat inflasi di Kabupaten Bantul (Tabel 2.1.4) pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 2,71 (Grafik 2.2). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan angka Nasional. Pencapaian inflasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2019 menunjukkan angka yang selalu lebih rendah dari inflasi DIY dan nasional, hal ini menandakan tingkat tingkat keberhasilan Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya penengendalian inflasi daerah.



Grafik 2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta dan Nasional pada tahun 2015-2020.

2.1.5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan penduduk merupakan salah satu indikator dalam pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan. Pendapatan penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu ditunjukkan oleh nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan, yang menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk di suatu wilayah. Salah satu komponen dalam nilai tambah tersebut adalah upah dan gaji yang diterima masyarakat sebagai balas jasa tenaga kerja.

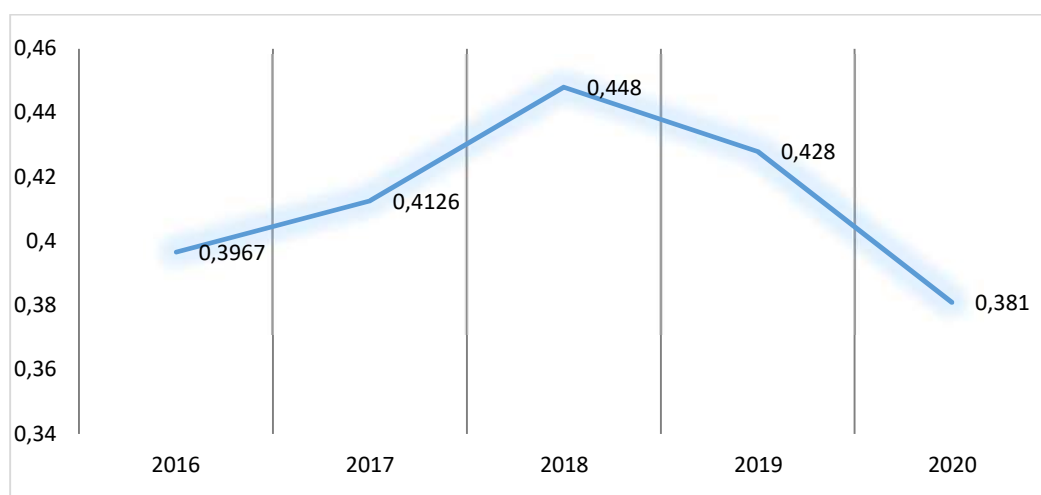


Grafik 2.1.3 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bantul (juta rupiah) tahun 2016 – 2021 (Sumber BPS; Kabupaten Bantul dalam Angka 2021; data diolah)

Pendapatan per kapita nominal pada tahun 2020 sebesar 27.40 juta rupiah dan pendapatan riil sebesar 19.73 juta rupiah.. Pendapatan ini lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan di tahun 2019 sebesar 27,78 juta rupiah dan pendapatan riil sebesar 20,11 juta rupiah. Penurunan pendapatan per kapita ini dapat diasumsikan bahwa terjadi penurunan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di Kabupaten Bantul sehingga daya beli masyarakat menurun.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 merencanakan pencapaian pembangunan inklusif yaitu pembangunan dengan pemerataan dan manfaat pembangunan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan pendapatan dan kecilnya kesenjangan tingkat pendapatan. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakat adalah penghitungan gini rasio. Pada tahun 2019 Gini Ratio Kabupaten Bantul menyentuh angka 0,4280 atau menurun 0,02 poin (ketimpangan menurun) dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, menurun lagi sebesar 0,047 poin yaitu sebesar 0,3810. Berdasarkan kriteria Oshima, angka gini ratio di Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori ketimpangan rendah (kurang dari 0,4). Angka gini ratio Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2020 tersaji pada Tabel 2.1.1 dan Grafik 2.1.4



Grafik 2.1.4 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 (Sumber : BPS; data diolah)

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2.1 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Bantul Tahun 2020

(1)	Usuran Pemerintahan (2)		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>) (3)	Capaian Kinerja (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
1	Pendidikan	1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{25.029}{26.653} \times 100\%$ = 93,91 %	-Buku Info Pendidikan -Data Dukcapil	
		2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{82.166}{86.597} \times 100\%$ = 94,88%	-Buku Info Pendidikan -Data Dukcapil	
		3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{41.006}{41.694} \times 100\%$ = 98,35 %	-Buku Info Pendidikan -Data Dukcapil	
		4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{2.046}{15.076} \times 100\%$ = 13,57%	-Buku Info Pendidikan -Data Dukcapil	
2	Usuran Kesehatan	1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{1.390}{954.706} \times 100\%$ 0,0015 %	sirs.kemkes. go.id	
		2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{7}{16} \times 100\%$	sirs.kemkes. go.id	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
			= 43,75%		
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{12.088}{12.708} \times 100\%$ = 95,12 %	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{12.697}{12.708} \times 100\%$ = 99,91%	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{10.680}{12.624} \times 100\%$ = 84,60%	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{39.055}{53.647} \times 100\%$ = 72,80%	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{108.659}{113.650} \times 100\%$ = 95,61%	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{407.090}{584.084} \times 100\%$ = 69,70%	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{29.086}{132.562} \times 100\%$ = 21,94%	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{36.777}{60.204} \times 100\%$	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
				= 61,09%		
		11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{13.584}{21.138} \times 100\%$	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	
				= 64,26%		
		12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{2.178}{2.353} \times 100\%$	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	
				= 92,56%		
		13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{4.885}{4.885} \times 100\%$	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	
				= 100%		
		14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{12.011}{12.562} \times 100\%$	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan	
				= 95,62%		
3	Pekerjaan Umum	1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten /Kota	$\frac{297,58}{994,11} \times 100\%$ = 29,93%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten /Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan
		3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{7.080,67}{8.634} \times 100\%$ = 82,01%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	$\frac{329.616}{329.616} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
			perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten /kota			
		5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{329.616}{329.616} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		6.	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten /Kota	$\frac{129.391}{129.391} \times 100\%$ = 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
		7.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten /Kota	$\frac{471,00}{624,47} \times 100\%$ = 75,42%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		8.	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{1.131}{762} \times 100\%$ = 148,43%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{178}{178} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4	Perumahan Rakyat	1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{10}{10} \times 100\%$ = 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan rumah
		2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Surat Keterangan Tidak dilaksanakan Kegiatan tersebut
		3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{29,18}{35,16} \times 100\%$	Keputusan Bupati Bantul No. 220 Tahun 2016 Tentang	

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
				= 82,99%	Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul No. 364 Tahun 2014 Tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul	
		4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{4.666}{373.893} \times 100\%$ = 1,25%		<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul No. 056/PERKIM-648/2020 Tentang Penetapan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul Data resmi rumah dari DPTR DIY
		5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{17.791}{373.893} \times 100\%$ 4,76%		Data Berdasarkan Rekap Site Plan yang Masuk dari Tahun 2009-2020
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{139}{139} \times 100\%$ = 100%	Satpol PP	
		2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{32}{32} \times 100\%$ = 100%	Satpol PP	
		3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.377.636jiwa	BPBD Bantul	Asumsi: Semua sudah tercover layanan informasi rawan bencana non alam khususnya COVID-19

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	954.706 jiwa	BPBD Bantul	Semua warga negara tanpa batasan umur (Data Dukcapil Semester 2 Tahun 2020)
		5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3346 jiwa	BPBD Bantul	
		6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{(115 + 15)}{130} \times 100\%$ = 100%	BPBD Bantul	Data Rekap Kejadian dan Penanganan Kebakaran Tahun 2020
		7.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	10 Menit 32 Detik	BPBD Bantul	Data Rekap Kejadian dan Penanganan Kebakaran Tahun 2020
6	Urusan Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (<i>indikator SPM</i>)	$\frac{15.734}{15.734} \times 100\%$ = 100%	Dinsos P3A	Penanganan PMKS bekerjasama dengan relawan social dan mitra kerja Data Tersedia
		2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{405}{405} \times 100\%$ = 100%	Dinsos P3A	Sumber anggaran dari APBN dan APBD Data Tersedia
7	Ketenagakerjaan	1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{72}{1.090} \times 100\%$ = 6,61%	o Disnakertrans o RKPD Perubahan 2020	
		2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{625}{263.378} \times 100\%$ = 0,24 %	Disnakertrans	
		3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{18.838,13}{263.378} \times 100\%$ = 7,15 %	- Bantul dalam Angka 2021 - Disnakertrans	- PDRB Atas dasar Konstan menurut Lapangan Usaha

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{728}{1.020} \times 100\%$ = 71,37%	Disnakertrans	
		5.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{2.554}{4.816} \times 100\%$ = 53,03%	Disnakertrans	
8	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{719.550.719.999,76}{923.268.325.425,99} \times 100\%$ = 77,94 %	Dinas Sosial P3A	
		2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{108}{241.071} \times 100\%$ = 0,04 %	Dinas Sosial P3A	
		3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{108}{478.835} \times 100\%$ = 0,03 %	Dinas Sosial P3A	
9	Pangan	1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{5.036}{283.000} \times 100\%$ = 1,78 %	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan	
10	Pertanahan	1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{141.232}{141.232} \times 100\%$ = 100 %	DPMPPT	
		2.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{1904}{1904} \times 100\%$	Dinas Kesehatan Kab. Bantul	

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
				= 100 %		
		3.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{141.232}{141.232} \times 100\%$	DPMPPT	
				= 100 %		
		4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	NIHIL	BPN Bantul	Surat Keterangan
		5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	NIHIL		
		6.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{16 \text{ rekomendasi}}{18 \text{ pengaduan}} \times 100\%$ = 88,8 %	Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan	Tanah hasil tukar menukar tanah warga dengan tanah kas desa. Terverifikasi dengan data dukung sudah sesuai
11	Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH : 63,02 IKA : 51,80 IKUd : 85,18 IKTL : 54,82	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{460.032,08}{752.154,03} \times 100\%$ = 61,16%	Dinas Lingkungan Hidup	
		3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{7}{19} \times 100\%$ = 36,84%	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawasan / pemeriksaan adalah pengawasan yang dilakukan bersama dengan Tim Pengawas DLHK DIY
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{725.409}{726.830} \times 100$ = 99,80 %	DISDUKCAPIL 2020	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		2.	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{199.628}{227.876} \times 100\%$ = 87,60%	DISDUKCAPIL 2020	
		3.	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{237.988}{241.071} \times 100\%$ = 98,72 %	DISDUKCAPIL 2020	
		4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{32}{45} \times 100\%$ = 71,11 %	DISDUKCAPIL 2020	
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun DPPKBPM	Total Desa di Kabupaten Bantul sejumlah 75 Desa 48 Desa berkategori Maju dan 27 Desa berkategori Desa Mandiri
		2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun DPPKBPM	Total Desa di Kabupaten Bantul sejumlah 75 Desa 48 Desa berkategori Maju dan 27 Desa berkategori Desa Mandiri
14	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.67	DPPKBPM	
		2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{102.751}{140.324} \times 100\%$ = 73,22%	DATIN Bulan Desember 2020	
		3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{13.975}{140.324} \times 100\%$ = 9,96%	DATIN Bulan Desember 2020	
15	Perhubungan	1.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	$\frac{(7x1)}{23} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Terverifikasi dengan data pendukung sesuai

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
				= 30,43		
		2.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	= 0,2795	Dinas Perhubungan	Rerata dari 2 V/C Ratio di : 1) Jl Jend Sudirman = 0,389; 2) Jl Dr. Wahidin Sudiro Husodo = 0.17
16	Komunikasi Dan Informatika	1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Diskominfo	
		2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{11}{19} \times 100\%$ = 57,89%	Diskominfo	
		3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{414.293}{954.706} \times 100\%$ =43,4%	Diskominfo Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{121}{261} \times 100\%$ = 46,36%	Dinas Koperasi UKMP	
		2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{23.814}{30.486} \times 100\%$ = 78.11%	Dinas Koperasi UKMP	Pembilang adalah data UKM yang berizin non OSS, untuk OSS tidak dapat mengakses jumlahnya
18	Penanaman Modal	1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{1.594.746.877.696,05 - 1.537.245.937.696,05}{1.537.245.937.696,05} \times 100\%$ = 3,74%		
				→ Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu; Jumlah Proyek Investasi di Kabupaten/ Kota baik PMDN dan PMA secara terperinci dalam satuan rupiah		

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
19	Kepemudaan Dan Olahraga	1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{44.211}{200.411} \times 100\%$ = 22,06 %	- Seksi Pemuda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga - Disdukcapil	
		2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{6.869}{200.411} \times 100\%$ = 3,42 %	KNPI Bantul dan Disdukcapil	
		3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	8 medali	KONI Bantul & NPC Bantul	Bulutangkis, Gateball, Pencak Silat, Tenis Kursi Roda
20	Statistik	1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
21	Persandian	1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{2,86}{5} \times 100\%$ = 57,2 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22	Kebudayaan	1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{126}{126} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Kebudayaan	Daftar Cagar Budaya di Kabupaten Bantul
23	Perpustakaan	1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	48,03%	Kajian Kegemaran Membaca	Bukti Perpustakaan 1 (BP 1)

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0		Belum ada survey tentang Indeks Pembangunan literasi Masyarakat
24	Kearsipan	1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$\frac{(77,99\% + 77,49\% + 70,90\% + 9,21\%)}{4} \times 100\%$ = 58,9% → Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bantul		
		2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$\frac{(100\% + 100\% + 100 + 100 + 100\% + 100\%)}{6} \times 100\%$ = 100% → Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bantul		
25	Kelautan Dan Perikanan	1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	13.453.920,66 Kg	DPPKP Kab. Bantul	
26	Pariwisata	1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{(405 - 4.744)}{4.733} \times 100\%$ = - 91,44%	Dinas Pariwisata	Penurunan jumlah kunjungan wisatawan karena pandemi covid-19
		2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{(2.348.313 - 5.166.615)}{5.166.615} \times 100\%$ = - 54,55%	Dinas Pariwisata	Penurunan jumlah kunjungan wisatawan karena pandemi covid-19
		3.	Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{28810}{103944} \times 100\%$ = 27.717 %	Dinas Pariwisata	Data 3 Hotel berbintang

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp. 16.874.969.250,-	Dinas Pariwisata	Jumlah pendapatan retribusi obyek wisata
		5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp. 16.874.969.250,-	Dinas Pariwisata	Jumlah pendapatan retribusi obyek wisata
27	Pertanian	1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{226.033,2}{34.145} \times 100\%$ = 6,62 Ha/tahun	DPPKP	
		2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	= 0 %	DPPKP	
28	Kehutanan	1.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi			
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Dasar hukum tidak melaksanakan urusan USDM: Perda Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan astas peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul, akan tetapi ada Program Potensi Energi dengan anggaran Rp 54.575.000,- pada Perjanjian Kinerja Bupati di tahun 2020			
30	Perdagangan	1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{157}{234} \times 100\%$ = 67,09 %	- OSS - Disdag - DPMPT	Pelaku usaha dibatasi pada SIUP Toko Swalayan. Di Bantul tidak ada Pusat Perbelanjaan
		2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{19.910.000}{42.834.293} \times 100\%$ = 46,48%	- DPKPKP	
		3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{9.907}{23.154} \times 100\%$ = 42,79 %	- UPTD Metrologi	

	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
31	Perindustrian	1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{24812 - 24.359}{24359} \times 100\%$ = 1.86%	Dinas Koperasi UKM Perindustrian	
		2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	Dinas Koperasi UKM Perindustrian	Dokumen RPIK belum disahkan, masih dalam bentuk draft
		3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{35}{35} \times 100\%$ = 100%	Dinas Koperasi UKM Perindustrian	
		4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %	Dinas Koperasi UKM Perindustrian	Tidak ada Industri Kecil dan Menengah yang mengajukan izin perluasan
		5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %	Dinas Koperasi UKM Perindustrian	PT. YIP adalah satu-satunya Perusahaan di Kabupaten Bantul yang memiliki IUKI tahun 2018, sampai dengan tahun 2020 PT. YIP belum pernah mengajukan permohonan izin perluasan kawasan industri Data dukung berupa Surat Keterangan
		6.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) • Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) 	Dinas Koperasi UKM Perindustrian	Informasi yang tersedia adalah nilai produksi

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
			Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Total 70%		
32	Transmigrasi	Tidak ada Indikator Outcome untuk Urusan Transmigrasi pada Permendagri 18/2020			

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2.2 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			
		1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	560	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	25.029	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	304	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jmlh siswa TK Negeri usia 5-6
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1.654	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jumlah Rombel TK/Ra = 1654 (guru kelas PAUD)
		5. Jumlah pendidik pada PAUD	2.326	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	482	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	422	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	= 281 + 47 = 328	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	SD terakreditasi = 281 SMP terakreditasi 47
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	82.166	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jlmh siswa SD/MI usia 7-12
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan	41.006	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jmlh Siswa SMP/MTs usia 11-12

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	51.803	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jlmlh siswa SD/MI Negeri usia 7-12
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5018	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jmlh Siswa SMP/MTS N usia 11-12
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3623	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jumlah rombel 3623 (Guru Kelas, Agama, Penjas)
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1387	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Rombel SMP/Mts = 1387 (ada 12 guru maple)
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5135	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2885	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada	397	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jumlah SD/MI =397

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			
		11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	472	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jumlah SMP/Mts = $118 \times 4 (TU, Perps, Lab, PNjaga) = 472$
		12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	266	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Penjaga sekolah
		13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	525	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	TU, Perps, Lab, PNjaga
		14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1696	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1197	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar	317	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	317 → SD = kepek s1/d4

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	69	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	69 → SMP = kepek s1/d4
		18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	254	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Penjaga ijazah SMA
		19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	352	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	TU,Perps,Lab,PNjaga ijazah SMA
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama					
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	= 281 + 47 = 328	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	SD terakreditasi = 281 SMP terakreditasi 47

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	82.166	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Siswa SD/MI \geq 13 th
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	41.006	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Siswa SMP/Mts Usia 13-15
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	51.803	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Siswa SD/MI Negeri \geq 13 th
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5.018	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Siswa SMP/Mts Negeri Usia 13-15
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3623	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jumlah rombel 3623 (Guru Kelas, Agama, Penjas)
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1387	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Rombel SMP/Mts = 1387 (ada 12 guru maple)
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5135	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2885	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	397	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jumlah SD/MI =397
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	472	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Jumlah SMP/Mts = 118x4(TU,Perps,Lab,PNjaga)=472
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	266	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Penjaga sekolah
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	525	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	TU,Perps,Lab,PNjaga
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.566	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.098	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat	317	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	317 → SD = kepek s1/d4

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	69	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	69 → SMP = kepek s1/d4
		18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	254	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	Penjaga ijazah SMA
		19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	352	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	TU,Perps,Lab,PNjaga ijazah SMA
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	15	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan	2.046	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	245	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	207	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	431	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	361	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	317	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan	17	Buku Info Pendidikan atau Dapodik	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1			
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan			
		1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	16	sirs.kemkes.go.id Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			
		1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	16	sirs.kemkes.go.id	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Vaksin Tetanus Difteri (TD)	8.600	Dinas Kesehatan	
		- Tablet Tambah Darah	732.698	Dinas Kesehatan	
		- Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin)	22.506	Dinas Kesehatan	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		- Kartu Ibu / Rekam Medis Ibu	14.000	Dinas Kesehatan	
		- Buku KIA	16.675	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	4.292	Profil SDMK	
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan					
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Formulir Patograf	6.866	Dinas Kesehatan	
		- Kartu Ibu / Rekam Medis Ibu	24.068	Dinas Kesehatan	
		- Buku KIA	14.675	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	4.292	Profil SDMK	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Vaksin Hepatitis BO	10.955	Dinas Kesehatan	
		- Vitamin K1 injeksi	2.864	Dinas Kesehatan	
		- Salep / tetes Mata Antibiotik	3.129	Dinas Kesehatan	
		- Formulir Bayi Baru Lahir	7.670	Dinas Kesehatan	
		- Formulir MTBM	10.388	Dinas Kesehatan	
		- Buku KIA	14.675	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	4.292	Profil SDM	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen standart lain yang berlaku	26.674	Dinas Kesehatan	
		- Formulir DDTK	36.558	Dinas Kesehatan	
		- Buku KIA	14.675	Dinas Kesehatan	
		- Vitamin A Biru	19.746	Dinas Kesehatan	
		- Vitamin A Merah	83.065	Dinas Kesehatan	
		- Vaksin Imunisasi Dasar HBO, BCG, IPV, DPT - HB Hib, Campak Rubell	74.049	Dinas Kesehatan	
		- Vaksin Imunisasi lanjutan DPT, -HB, - Hib, Campak, Rubella	53.048	Dinas Kesehatan	
		- Jarum Suntik dan BHP	77.998	Dinas Kesehatan	
		- Peralatan Anafilaktik	104	Dinas Kesehatan	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	4292	Profil SDMK	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Buku Raport Kesehatanku	5.637	Dinas Kesehatan	
		- Buku Pemantauan Kesehatan	4.713	Dinas Kesehatan	
		- Kuesioner Skrining Kesehatan	36.764	Dinas Kesehatan	
		- Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	532	Dinas Kesehatan	
		- Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	0	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	4292	Profil SDMK	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		- Tes strip Gula darah	67.447	SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4.590		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4.292	Profil SDM	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		- Strip uji pemeriksaan Gula Darah dan Kolesterol	14.494	SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	29.346		
		- Buku Kesehatan Lansia	3.095		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4292	Profil SDM	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			
		- Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	6.107	SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Tensimeter	60	Dinas Kesehatan	
		- Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	27	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4.292	Profil SDM	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			
		- Strip Gula darah	44.282	SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	2.476		
		- Pedoman dan Media KIE	2.743		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4.292	Profil SDM	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			
		- Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	4	SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	2	Dinas Kesehatan	
		- Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	955	Dinas Kesehatan	
		- Media KIE, Poster, Lembar Balik, Leaflet, Buku Saku	1.202	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4292	Profil SDM	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.243	Dinas Kesehatan	
		- Reagen Zn TB	197	Dinas Kesehatan	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		- Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	21.997	Dinas Kesehatan	
		- Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng	4.723	Dinas Kesehatan	
		- Catridge Tes Cepat Molekuler	8100	Dinas Kesehatan	
		- Formulir Pencatatan dan Pelaporan	27	Dinas Kesehatan	
		- Pedoman/Standar Operasional Prosedur	27	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4.292	Profil SDMK	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		- Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	2.802	SPM.Bangda.Kemendagri.go.id	
		- Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	758	Dinas Kesehatan	
		- Bahan Medis Habis Pakai Handschoen, Alkohol Swab, Plester,	11.000	Dinas Kesehatan	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Lancet/ Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai			
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4292	Profil SDM	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten /Kota			
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten /kota (ha)	297,58	Presentase Penanganan banjir 2020	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	65.909	Data Panjang sungai di Kawasan Permukiman yang rawan banjir	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	Tidak mempunyai kewenangan Wilayah Sungai
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten /kota (m)	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	Tidak mempunyai kewenangan Wilayah Pantai

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten /kota	Ada	Keputusan Bupati Bantul Nomor 388 Tahun 2019 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Global Detail Pada Musim Hujan Tahun 2019/2020 Dan Musim Kemarau Tahun 2020	
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten /kota	Ada	Keputusan Bupati Bantul Nomor 388 Tahun 2019 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Global Detail Pada Musim Hujan Tahun 2019/2020 Dan Musim Kemarau Tahun 2020	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten /kota	Tidak		Tidak mempunyai kewenangan Wilayah Sungai
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten /Kota			
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	297,58	Presentase Penanganan banjir 2020	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	65.909	Data Panjang sungai di Kawasan Permukiman yang rawan banjir	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan	-	Surat Keterangan	Tidak mempunyai kewenangan Wilayah Sungai

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	Surat Keterangan	Tidak mempunyai kewenangan Wilayah Sungai
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Keputusan Bupati Bantul Nomor 388 Tahun 2019 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Global Detail Pada Musim Hujan Tahun 2019/2020 Dan Musim Kemarau Tahun 2020	
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	Keputusan Bupati Bantul Nomor 388 Tahun 2019 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Global Detail Pada Musim Hujan Tahun 2019/2020 Dan Musim Kemarau Tahun 2020	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Tidak	Surat Keterangan	Tidak mempunyai kewenangan Wilayah Sungai
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
		1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{79.724,5}{96.724} \times 100\%$	Data Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2020	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
			= 82,42		
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{115.096}{140.877} \times 100\%$ = 81,70	Data Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2020	
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{185.803}{1.246.900} \times 100\%$ = 14,90	Data Rekap Penelusuran Jaringan Irigasi sumber Dinas Pertanian	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten /kota			
		1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten /kota	Ada	Peraturan Bupati Bantul Nomor 063 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Bantul	
		2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten /Kota	Tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	Surat keterangan belum ditetapkannya jakstrada
		3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten /Kota penyelenggara SPAM	1	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta ProjoTamansari	
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	Surat keterangan tidak ada ijin spam
		5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat	1	Perjanjian Kerjasama SPAM Regional Kartamantul	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dan Pemerintah daerah lain.			
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
		1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	314.867	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	14.749	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	329.616		
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	112		
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	112		

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	14.749		
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{314.755}{314.755} \times 100\%$ = 100%		
		8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{112}{112} \times 100\%$ = 100%		
		9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{2.899}{50.654} \times 100\%$ = 5,72 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{314.867}{314.867} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{1}{3} \times 100\%$ = 33,33%	Surat Keterangan	
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{60}{1.050} \times 100\%$ = 5,72%	Surat Keterangan	
		13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{14.749}{14.749} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{112}{314.867} \times 100\%$ = 0,04%	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	Hanya rumah yang disedot oleh DPUPKP
		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten /Kota			
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{48}{14.948} \times 100\%$ = 0,41%	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota dalam tahun eksisting	1.783	DPMPT	
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan /Gedung	Ada	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung,	
		4. Penetapan Keputusan Bupati /Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2020	
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati /Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	37	- Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	4	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039	1. Makam Raja-raja Mataram di Imogiri 2. Panggung Krpyak 3. Masjid Pathok Nagoro (2)

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten /Kota	53	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kabupaten /kota yang dipelihara /dirawat	53	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten /Kota					
		1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kabupaten /Kota	624,47	Softkopi SK Bupati	
		2. Panjang jalan yang dibangun	0	Surat Keterangan tidak ada pembangunan jalan baru	
		3. Panjang jembatan yg dibangun	342	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur /fungsi)	1,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		5. Panjang jembatan yang diganti /dilebarkan	190	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Surat keterangan tidak ada rehab jembatan karena refocusing, dan fotokopi DPA yang mencantumkan Anggaran Rehab Jembatan	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		8. Panjang jalan yang dipelihara	124,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	192,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
		1. Jumlah Pelatihan Tenaga operator /teknisi /analisis di wilayah Kabupaten /Kota	8	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		2. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	1.136	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1.131	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada	RUP	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang	
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Data CSR (Fisik Konstruksi) dari BAPPEDA	
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	lpse.bantulkab.go.id	
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
		11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	Sampel sertifikat pelatihan
		12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	Sampel sertifikat tenaga terampil
		13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada	Surat dari DPMPT	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	460	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Surat keterangan	
		20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	87 Badan Usaha

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dalam proyek di wilayah Kab/Kota			
		21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	57	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	SURAT DARI DPMPPT
		23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	178	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		25 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	178	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				
1.		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	1.319	Kajian Resiko Longsor BPBD	Selopamioro:477; Sriharjo:112; Karangtengah:55; Wukirsari:220 Girirejo:21; Muntuk:114; Mangunan:88; Guwosari:17 Triwidadi:172; Sendangsari:43	
2.		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	10	BPBD Kab. Bantul		
3.		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	10	BPBD Kab. Bantul		
4.		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	10	BPBD Kab. Bantul		
5.		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	10	BPBD Kab. Bantul		
6.		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	10	BPBD Kab. Bantul		
7.		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	BPBD Kab. Bantul		
8.		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	10	BPBD Kab. Bantul		
9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	1	BPBD Kab. Bantul			

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			
		1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	BPBD Kab. Bantul	
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	BPBD Kab. Bantul	
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	BPBD Kab. Bantul	
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	BPBD Kab. Bantul	
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak	0	BPBD Kab. Bantul	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	BPBD Kab. Bantul	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani			
		1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	35,16 Ha	Ada DPUPKP	
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1.715 Unit	Ada DPUPKP	138 unit sumber dana DAK 1577 unit sumber dana BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya – APBN)
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	Tidak Ada DPUPKP	Surat keterangan tidak ada penanganan karena refocussing
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
		1. Jumlah rumah di kab/kota	373.893 Unit	Ada DPUPKP	Sumber Data dari Bappeda dengan Citra Satelit
		2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	1.715 Unit	Ada DPUPKP	
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	4.666 Unit	Ada DPUPKP	Data Terupdate Akhir Tahun 2020
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Tidak Ada DPUPKP	Surat keterangan
		5. Rasio rumah dan KK	$\frac{329.616}{373.893}$ = 0,88	Ada DPUPKP	Data Berdasarkan dari Bappeda dan Dukupil

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	0	Tidak Ada DPUPKP	Surat Keterangan (Belum Ada Program Pembangunan Baru)
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
		1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	265 Perumahan	Ada DPUPKP	Data Berdasarkan Rekap Site Plan yang Masuk dari Tahun 2009-2020
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	17.791 unit	Ada DPUPKP	Data Berdasarkan Rekap Site Plan yang Masuk dari Tahun 2009-2020
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	17.791 unit	DPUPKP	Data Berdasarkan Rekap Site Plan yang Masuk dari Tahun 2009-2020
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	17.791 unit	DPUPKP	Data Berdasarkan Rekap Site Plan yang Masuk dari Tahun 2009-2020
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	14 Perumahan	DPUPKP	Data Berdasarkan Rekap Site Plan yang Masuk dari Tahun 2009-2020
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	17.791 unit	DPUPKP	Data Berdasarkan Rekap Site Plan yang Masuk dari Tahun 2009-2020
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	-	Tidak Ada Data	
		8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	21 Pengembang	DPUPKP	Data dari Keanggotaan REI DIY Tahun 2020
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	12	Data pengembang yg mendapat penyuluhan th 2020	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)		
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					
		1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	361 pelanggar; 139 Aduan	Satpol PP		
		2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	99 personil	Satpol PP		
		3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	32 Perda	Satpol PP		
		4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6 PPNS	Satpol PP		
		5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	36 SOP	Satpol PP		
		6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada (100%)	Satpol PP	Gedung, Kendaraan, Ruang kerja, dll	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					
		1.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{0,4}{1} \times 100\%$ = 40%	BPBD	KRB Sudah disusun tapi masih dalam 1 dokumen dalam RPB dan belum disahkan secara legal dalam bentuk Peraturan Bupati	
		2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang	$\frac{826.056}{954.706} \times 100\%$	BPBD	Bencana Non Alam	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	= 86,52%		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{0,6}{1} \times 100\%$ = 40%	BPBD	Sudah ada Dokumen RPB namun masih bergabung dengan Dokumen KRB dan belum disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{4}{9} \times 100\%$ = 44,44%	BPBD	3 Dokumen yang sudah disusun: Renkon Banjir, Longsor, Tsunami, Epidemii Penyakit Yang Belum disusun: Cuaca Ekstrim, Gelombang ekstrim dan Abrasi, Gempa Bumi Kekeringan, Kebakaran,
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0	BPBD	
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{2.300}{826.056} \times 100\%$ = 0,28%	BPBD	Sumber: Rekap pelatihan Tahun 2020
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana	$\frac{2.300}{826.056} \times 100\%$ = 0,28%	BPBD	Semua warga mendapat fasilitas layanan Pusdalops

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		prasarana penanggulangan bencana			
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		BPBD	Tsunami Terdapat 29 titik EWS tsunami; 1 bangunan TES di pantai baru Longsor: 3 EWS longsor di Imogiri; 5 EWS di Piyungan Banjir: 4 titik EWS banjir
		Tsunami	$\frac{20.000}{34.735} \times 100\%$ = 57,58%		
		Longsor	$\frac{22.100}{63.369} \times 100\%$ = 34,88%		
		Banjir	$\frac{19.500}{24.558} \times 100\%$ = 79,40%		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	NIHIL	BPBD	Tahun 2020 tanpa KLB
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{4}{4} \times 100\%$ = 100%	BPBD	4 Kejadian yaitu: • Banjir dan Longsor bulan Januari-Februari • COVID-19 • Kekeringan Banjir dan Longsor Bulan Desember
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam	$\frac{268}{268} \times 100\%$	BPBD	sk gustug/sk satgas covid-19, peta air bersih, peserta rapat lintas sektor

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		penanganan darurat bencana	= 100%		
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{3.159}{3.159} \times 100\%$ = 100%	BPBD	Data Rekap Kejadian Bencana Tahun 2020
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	2 Jenis, 453 Kejadian	BPBD	Data Rekap Kejadian Tahun 2020 Evakuasi sarang tawon & animal rescue:338 kali Penanganan pohon tumbang: 115 kali
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	BPBD	5 pos : Pos Induk, Pos Kasihan, Pos Banguntapan, Pos Imogiri, Pos Sedayu Lokasi pos tidak berada di lokasi kantor kecamatan
		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	BPBD	5 pos: 24 orang per 24 jam (4-5 orang per pos selama 24 jam) Lokasi pos tidak berada di lokasi kantor kecamatan
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana	Tidak Ada	BPBD	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa			
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Terlampir	BPBD	
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sertifikat Pemadam I Kemendagri : 47 orang Sertifikat Pemadam II Kemendagri: 4 orang Belum Bersertifikat: 29 orang	BPBD	
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	43 Satuan Relawan	BPBD	
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	3 Kali Latihan Pataka persiapan HUT Damkar Nasional ke-10; Latihan Skill Competition Nasional; Latihan Water Dance	BPBD	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			
		1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3 Layanan 4 jenis data	Dinas Sosial P3A	Layanan : 1. layanan SLRT 2. Layanan TRC PMKS 3. Layanan TRC Kebencanaan Data : 1. Data PMKS 2. Data PSKS 3. Data DTKS
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	7657 Data DTKS	Dinas Sosial P3A	
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2 Tim	Dinas Sosial P3A	Ada SK TRC Penjangkauan PMKS dan SK TAGANA
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	15.734 Jiwa	Dinas Sosial P3A	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	7 Unit (5 Mobil Kebencanaan, 1 mobil TRC ODGJ, 1 Motor Tril)	Dinas Sosial P3A	
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	3014 jiwa	Dinas Sosial P3A	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi			
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 Unit	Dinas Sosial P3A	Bekerjasama dengan Rumah Singgah HAMFARA (Milik Swasta)
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	1693 Orang	Dinas Sosial P3A	Dilaksanakan bekerjasama dengan LKS Cempaka
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	21 Jiwa	Dinas Sosial P3A	Data Terlampir merupakan APBD Kab. Bantul non bantuan LKS
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	4 Kursi Roda	Dinas Sosial P3A	Alat Bantu yang ada pada Panti Hafara
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	2020	Dinas Sosial P3A	Bekerjasama dengan LKS
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	2020	Dinas Sosial P3A	Bekerjasama dengan LKS

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	11 perawat di HAFARA	Dinas Sosial P3A	Bekerjasama dengan Panti HAFARA
		14 Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	4208	Dinas Sosial P3A	Jumlah PSKS di Kabupaten Bantul terdiri dari WKSBM, PSM, TKSK, TKPK, IPSM, LKS, LKSA, LK3, Karang Taruna, Pensosmas, dll (Data terlampir)
		15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	1990 Jiwa	Dinas Sosial P3A	bekerjasama dengan LKS
		16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1990 Jiwa	Dinas Sosial P3A	bekerjasama dengan LKS
		17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	46 Jiwa	Dinas Sosial P3A	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	9.334 Jiwa	Dinas Sosial P3A	Juml PMKS yang ditangani
		19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	78 Orang	Dinas Sosial P3A	
		20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	83 Jiwa	Dinas Sosial P3A	
		21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	44 jiwa	Dinas Sosial P3A	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	405 Jiwa	Dinsos P3A	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	21 Jiwa	Dinsos P3A	
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	75 Desa	Dinsos P3A	Tempat penampungan kebencanaan berupa tenda kebencanaan yang akan didirikan di desa yang mengalami bencana / desa terdekat
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	200 paket Logistik	Dinsos P3A	
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	12 orang	Dinsos P3A	Karantina covid oleh Dinsos p3a
		6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	117 TAGANA	Dinsos P3A	
7	Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			
		1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	sesuai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RTK Kab. Bantul disusun berdasarkan 6 peraturan perundangan.
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{(4 - 6)}{4} \times 100\%$ = 50%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disnakertrans Kab. Bantul pada tahun 2020 melaksanakan 4 Indikator.

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten /Kota	163	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			
		1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	$\frac{15}{20} \times 100\%$ = 0,75%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{9}{9} \times 100\%$ = 100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{9}{512} \times 100\%$ = 1,75%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{12}{36} \times 100\%$ = 33.33%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{36}{55} \times 100\%$ = 65,45%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	960	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{512}{512} \times 100\%$ = 100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		8. Persentase penyerapan lulusan	$\frac{154}{512} \times 100\%$ = 30.07%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{120}{512} \times 100\%$ = 23,44%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{0}{97} \times 100\%$ = 0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belum dilaksanakan di Tahun 2020
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belum dilaksanakan di Tahun 2020
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{18}{139.699} \times 100\%$ = 1,75%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program tidak dilaksanakan untuk penanganan covid19 TAHUN 2020
		2. Data tingkat produktivitas total		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi BPS; Bantul dalam Angka	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut jenis lapangan usaha tahun 2020
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{148}{163} \times 100\%$ = 90,80%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{8}{97} \times 100\%$ = 8,25%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	- KONFEDERASI = 0, - FEDERASI = 9 - SP/SB DIPERUSAHAAN = 83 - SP/SB DILUAR TERCATAT = 14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{148}{156} \times 100\%$ = 94,87%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	148 (SAMA DENGAN PP)/156(148 PP + 8 PKB)
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{1437}{1020} \times 100\%$ = 140.88%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{42}{156} \times 100\%$ = 4,11%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		7. Jumlah mogok kerja	4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		8. Jumlah penutupan perusahaan	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		11. Jumlah perselisihan PHK	8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	503	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	116	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{33}{42} \times 100\%$ = 78,6%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota			

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	2.554	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	4.816	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	2.554	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPMI yang mendapatkan sosialisasi = 0 Jumlah CPMI/CTKI tahun 2020 = 97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		11 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{1}{98} \times 100\%$ = 1,02%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		12 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yangmendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{0}{876} \times 100\%$ = 0%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PMI yang mendapat pelatihan =0 Jumlah PMI bantu = 876
		13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{0}{98} \times 100\%$ = 0%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PMI purn yang diberdayakan =0 PMI/TKI purna tahun 2020 = 98
		14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	LTSA = 0 Jumlah daerah kantong PMI=0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
8	Perlindungan Perempuan Dan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			
		1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah	64	Dinas Sosial P3A	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
	Perlindungan Anak	kabupaten/kota yang telah dilatih PUG				
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	6 Program	Dinsos P3A		
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota						
		1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3	Dinsos P3A	Radio persatuan, Bantul Radio, dan surat kabar Data Poto	
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	44	Dinsos P3A		
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{108}{108} \times 100\%$ = 100%	Dinsos P3A		
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	44	DP3AP2 DIY		
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2 UPTD dan FONABA	Dinsos P3A		
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)						

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	27	Dinsos P3A	
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	42	Dinsos P3A	Kader Puskesmas dan Kader Desa
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	52	Dinsos P3A	
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	5	Dinsos P3A	
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	5	Dinsos P3A	
		6. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	44	DP3AP2 DIY	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{180}{180} \times 100\%$ =100%	Dinsos P3A	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)			
		1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada	DPPKP Bantul	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ada	DPPKP Bantul	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	tidak ada	DPPKP Bantul	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada	DPPKP Bantul	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada	DPPKP Bantul	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	ada	DPPKP Bantul	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	tidak ada	DPPKP Bantul	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	ada	DPPKP Bantul	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
		1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{10}{10} \times 100\%$ = 100%	DPMPT	
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	NIHIL	BPN Bantul	
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	NIHIL	BPN Bantul	
		4. Dokumen Izin membuka tanah	NIHIL	Dispertaru	
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$\frac{12}{12} \times 100\%$ = 100%	DPUPKP Bantul	
11		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota			

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan Kabupaten/ Kota terhadap :		Dinas Lingkungan Hidup		
		a. Indeks kualitas air (IKA)	51,80	Dinas Lingkungan Hidup		
		- IKA Sungai Winongo	53,33	Dinas Lingkungan Hidup		
		- IKA S. Gajahwong	43,33	Dinas Lingkungan Hidup		
		- IKA S. Code	50,83	Dinas Lingkungan Hidup		
		- IKA S. Bedog	48,18	Dinas Lingkungan Hidup		
		- IKA S. Opak	63,33	Dinas Lingkungan Hidup		
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,18	Dinas Lingkungan Hidup		
		c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	54,82	Dinas Lingkungan Hidup		
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota				
		1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		Dinas Lingkungan Hidup		
		a. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	$\frac{(520 \times 365)}{752.154,03} \times 100\%$ = 25,23%	Dinas Lingkungan Hidup		
		b. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	$\frac{3.777.898,55}{2.700.000} \times 100\%$ = 139,93%	Dinas Lingkungan Hidup		
	c. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah	$\frac{219}{824.11} \times 100\%$ = 26,57 %	Dinas Lingkungan Hidup			

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		pada masing2 lingkungan			
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
		1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{87}{87} \times 100\%$ = 100%	Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{1156} \times 100\%$ = 0%	Dinas Lingkungan Hidup	DLH Belum Memiliki Pejabat Penga-was LH Daerah (PPLHD)
		3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Bantul tidak memiliki MHA (Masyarakat Hukum Adat)
		4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Bantul tidak memiliki MHA (Masyarakat Hukum Adat).
		5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{281}{281} \times 100\%$ =100%	Dinas Lingkungan Hidup	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{33}{33} \times 100\%$ =100%	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik			
		1. Penerbitan akta perkawinan	$\frac{231}{231} \times 100\%$ = 100 %	DISDUKCAPIL 2020	
		2. Penerbitan akta perceraian	$\frac{51}{51} \times 100\%$ = 100 %	DISDUKCAPIL 2020	
		3. Penerbitan akta kematian	$\frac{6.605}{6.605} \times 100\%$ = 100 %	DISDUKCAPIL 2020	
		4. Penyajian data kependudukan	$\frac{2}{2} \times 100\%$ = 100 %	DISDUKCAPIL 2020	Penerbitan data agregat kependudukan
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal			
		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	100 %	IDM tahun 2020	Dinas Pengendalian Pduduk KB PMD

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	100 %	IDM tahun 2020	Dinas Pengendalian Pduduk KB PMD
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100 %	IDM tahun 2020	Dinas Pengendalian Pduduk KB PMD
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	100 %	IDM tahun 2020	Dinas Pengendalian Pduduk KB PMD
		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	100 %	IDM tahun 2020	Dinas Pengendalian Pduduk KB PMD
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	100 %	IDM tahun 2020	Dinas Pengendalian Pduduk KB PMD

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100 %	IDM tahun 2020	Dinas Pengendalian Puduk KB PMD
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	100 %	IDM tahun 2020	Dinas Pengendalian Puduk KB PMD
14	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)			
		1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak	Dinas Pengendalian Puduk KB PMD	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	$\frac{105.471}{160.782} \times 100\%$ = 65.60%	Siga	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\frac{85}{32.212}$ = 0.002639	DPPKBPM	$\frac{85}{32.212} = 0.002639$
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan	$\frac{23.245}{27.541} \times 100\%$ = 84.40%	DPPKBPM DATIN Bulan Desember 2020	Jumlah masyarakat terpapar KKBPK: -BKB = 13.057

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Program KKBPK (advokasi dan KIE)			-BKR = 4.483 -BKL = 5.705 TOTAL = 23.245 Jumlah sasaran masyarakat terpapar KKBPK: -BKB = 14.887 -BKR = 5.432 -BKL = 7.222 TOTAL = 27.541 Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	65 stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja	DPPKBPM	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
		1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{181}{289} \times 100\%$ = 62.62%	Siga dan DINKES Dinas Pengendalian Pduduk KB PMD	
		2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{102.751}{140.324} \times 100\%$ = 73.22 %	DPPKBPM Datin	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPk yang efektif	57 Kelompok Kerja	DPPKBPMMD	
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{1.414}{5.506} \times 100\%$ = 55.68 %	Siga	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
		1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	8 kecamatan 37 Desa	DPPKBPMMD Datin	
		2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{31.388}{78.891} \times 100\%$ = 39.78%	Siga	
15	Urusan Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota			
		1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{4}{2} \times 100\%$ = 200 %	Dishub	
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{11.574}{12.903} \times 100\%$ = 89,70 %	Dishub	
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{0}{7} \times 100\%$ = 0 %	Dishub	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{14.378}{111.974} \times 100\%$ = 12,84 %	Dishub	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota			
		1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{14.378}{111.974} \times 100\%$ = 12,84 %	Dishub	
16	Urusan Komunikasi Dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Diskominfo 2020	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Diskominfo 2020	
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya)	ya	Diskominfo 2020	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			
		1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{30}{45} \times 100\%$ = 67,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam	$\frac{7}{14} \times 100\%$ = 50 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{5}{14} \times 100\%$ = 35,71 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{5}{14} \times 100\%$ = 35,71 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		11 Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{380}{398} \times 100\%$ = 95,48%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		12 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{42}{45} \times 100\%$ = 93,33%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		13 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{78}{78} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		14 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government (Ada atau Tidak ada):		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		a. Dokumen Master Plan - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		b. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): <ul style="list-style-type: none"> - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab 	Ada Perbup SOTK	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
		1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	$\frac{31}{31} \times 100\%$ = 100 %	Diskominfo 2020	Terdapat 51 Komunitas yang membantu pemerintah Kabupaten dalam melakukan publikasi. Terdiri dari 31 Kelompok Informasi Masyarakat dan 20 Grup Netizen Lokal Bantul.
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{7207}{7207} \times 100\%$ = 100 %	Diskominfo 2020	Terdapat 7207 konten yang dibuat untuk melakukan publikasi kebijakan pemerintah
		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi	$\frac{24}{24} \times 100\%$ = 100 %	Diskominfo 2020	Terdapat 24 macam diseminasi informasi kepada masyarakat yang semuanya dilaksanakan

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		(STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan			sesuai dengan strategi komunikasi.
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas			
		1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = ~ %	DKUKMP	Pada tahun 2020 tidak terdapat penerbitan ijin usaha simpan pinjam baru. Saat ini hanya sebatas proses pembaruan /penyesuaian Izin Usaha berdasarkan PP No 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%	DKUKMP	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{202}{299} \times 100\%$ = 67.55 %	DKUKMP	Penyebut adalah jumlah koperasi aktif
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk	$\frac{202}{336} \times 100\%$	DKUKMP	Penyebut adalah jumlah koperasi aktif

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 60,12 %		
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{177}{299} \times 100\%$ = 59,2 %	DKUKMP	Penyebut adalah jumlah koperasi aktif
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{785}{139.815} \times 100\%$ = 0.56 %	DKUKMP	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{14}{299} \times 100\%$ = 4.7%	DKUKMP	Penyebut adalah Jumlah koperasi aktif. Koperasi menunda pendidikan dan pelatihan karena Covid-19
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			Sesuai petunjuk tidak perlu diisi
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah	$\frac{261}{299} \times 100\%$ = 87.29 %	DKUKMP	Jumlah NIK adalah jumlah NIK yang diterbitkan s/d tahun 2020, dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun, untuk selanjutnya dilakukan perpanjangan melalui

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			Dinas KUKMP kemudian diteruskan ke Kemenkop dan UKM RI untuk dapat dicetak sertifikatnya. Penyebut adalah jumlah koperasi aktif
		10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{40}{299} \times 100\%$ = 13,38%	DKUKMP	Dukungan fasilitas pembiayaan dilakukan melalui temu mitra antara Koperasi dengan Bank BRI Penyebut adalah jumlah koperasi aktif
		11 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DKUKMP	Pada tahun 2020, fasilitasi pemasaran direncanakan melalui partisipasi Harkopnas Expo 2020, namun tidak dapat dilaksanakan karena adanya <i>refocusing</i> anggaran
		12 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{216}{351} \times 100\%$ = 61,54%	DKUKMP	Pendampingan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Koperasi lapangan (PPKL) Penyebut adalah jumlah koperasi seluruhnya termasuk yang tidak aktif karena diharapkan bisa aktif kembali.
		13 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah	$\frac{40}{299} \times 100\%$ = 13,38%	DKUKMP	Dukungan fasilitas kemitraan melalui workshop temu mitra antara Koperasi dengan Bank BRI, PT. Pegadaian, Universitas mercu

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			Buana (UMB) dan Universitas Janabadra (UJB)
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha			
		1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{1388}{30486} \times 100\%$ = 4.55%	DKUKMP	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru =jumlah usaha mikro tahun 2020 dikurangi jumlah usaha mikro tahun 2019
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{0}{30486} \times 100\%$ = 0%	DKUKMP	Dari hasil rapat koordinasi dengan KemenkopUKM dan Dinas UKM provinsi bahwa ODS untuk UKM memang belum aktif
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{100}{30486} \times 100\%$ = 0.32%	DKUKMP	Kemitraan pada tahun 2020
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0.52%	DKUKMP	Fasilitasi sertifikasi Halal 115 dan HKI 12 yang diberikan pada tahun 2016-2020 (data sementara)
		5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	4.64%	DKUKMP	Dukungan pemasaran melalui kemitraan, pelatihan pemasaran online, promosi, kampung digital, bantu event ,display barang di showroom dekranasda,kemitraan pemasaran

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	5,48%	DKUKMP	usaha mikro yang dilatih pada tahun 2020
		7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	54.21%	DKUKMP	Pendampingan melalui Pojok Konsultasi, Perizinan OSS, pemasaran via online, pelatihan bisnis online, promosi/pameran, fasilitasi IUI di SIINAS, dan display barang di showroom Dekranasda Kab Bantul
18	Urusan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota			
		1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Belum ada penentuan jumlah fasilitas / insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah / Kabupaten. Raperda Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul, baru dalam pembahasan, atas inisiatif Komisi A – DPRD Kab. Bantul.	draft Raperda Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul	Belum ada dokumen, baru ada draft Raperda yang sedang dibahas.
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	SOP Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal (PM) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA dimaksud, namun saat ini	draft Raperda Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul	Dokumen SOP dimaksud belum ada, bahkan Perbup Tentang Juklak Pemberian insentif / kemudahan PM belum ada.

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
			RAPERBUP tentang Juklak Pemberian Insentif / Kemudahan PM belum dibentuk.		
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan PM belum ada karena belum ada pelaksanaannya.	draft Raperda Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul	Dokumen laporan evaluasi belum ada.
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kegiatan Temu Bisnis th.2020 tidak jadi dilaksanakan karena realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA. 2020	Refocusing pagu anggaran kegiatan Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan Pameran PM th.2020 tidak jadi dilaksanakan karena realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA. 2020	Refocusing pagu anggaran kegiatan Peningkatan Promosi Penanaman Modal
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Belum ada	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA. 2020	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal tidak dilaksanakan secara khusus oleh Dinas PMPT Kab Bantul
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	657/657	Laporan Kegiatan PPID Tahun 2020	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2888	Rekapitulasi Kesesuaian SOP Tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	-		
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Kegiatan Bimtek/sosialisasi bagi aparatur dan penanam modal di tahun 2020 tidak dilaksanakan karena pandemi covid 19	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA. 2020	Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal (Perka BKPM No. 6 Tahun 2020)
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	115 perusahaan	Rekap Kegiatan Monev Perusahaan penanaman modal PMA dan PMDN Tahun 2020	Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		12 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	657/657	Rekapan permintaan data dan informasi TW I - IV tahun 2020	Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha (Perka BKPM No. 6 Tahun 2020)
19	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
		1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	405 pemuda	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pelatihan Kewirausahaan Dasar, Pelatihan Pemasaran Online, Pelatihan Pengembangan Ekonomi Pemuda
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	14 orang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pemuda Pelopor Kabupaten Bantul dan Witausaha Muda Berprestasi
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
		1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	310 pemuda	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pelatihan Pemuda Bela Negara, Penyuluhan Bahaya NAPZA (pengkaderan), Bhakti Pemuda Bantul
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	125 orang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pelatihan Pengembangan Ekonomi Pemuda
		Peningkatan Prestasi Olahraga			

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	540 orang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pelatihan Wasit Bulutangkis, Tenis Meja, Gateball, Woodball, Voli Indoor, Voli Pasir, Sepakbola, Bola Basket, Tenis Lapangan, Senam, Sepak Takraw
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	3 event	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	PEPARPEDA KABUPATEN, POR PELAJAR KABUPATEN, POPDA DIY
20	Urusan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	43	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan Penyelenggaraan SDI
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	37	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan Penyelenggaraan SDI
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{80}{80} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{80}{80} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
21	Urusan Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah				
		1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{20}{20} \times 100\%$ = 100 %	Kasie Persandian Diskominfo	Kegiatan Pam Sinyal di T.A 2020 pasif, kondisi pandemi Covid-19 sehingga mayoritas acara dilaks secara Online.
		2.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{109}{236} \times 100\%$ = 46,18 %	Kasie Persandian Diskominfo	-
		3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{10}{236} \times 100\%$ = 4,23 %	Kasie Persandian Diskominfo	-
		4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{36}{107} \times 100\%$ = 33,64 %	Kasie Persandian Diskominfo	Keterbatasan SDM dan sarpras, sehingga dalam prakteknya masih bekerjasama dengan Tim dari Forkoms Sandi Daerah, DIY.
22	Urusan Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya				
		1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Jumlah objek PK yang : - diinventaris 146 WB	Dinas Kebudayaan	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		(inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	- diamankan 28 CB - dipelihara 21 CB - diselamatkan 126 CB - dipublikasikan 3 CB Total : 324		
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan 3 CB + dikaji 5 CB + dikayakan keberagamannya 0) → Total : 8	Dinas Kebudayaan	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	58 CB	Dinas Kebudayaan	Untuk Sarana Publik
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	5 orang (Sertifikasi TACB)	Dinas Kebudayaan	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	126 Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, pemeliharaan dan pemugaran) zonasi	Jumlah CB : - diselamatkan 126 - diamankan 28 - dizonasi 1 - dipelihara 21 - dipugar 12 Total : 188	Dinas Kebudayaan	
		7. Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan	Ada aturan dalam pengelolaan koleksi museum sesuai aturan direktorat museum, Direktorat jendereal sejarah dan purbakala departemen kebudayaan dan pariwisata 6/11/2007
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan	Undang - undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	58	Dinas Kebudayaan	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	276	Dinas Kebudayaan	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan	Jumlah pengunjung museum : 165.150	Dinas Kebudayaan	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum : 4		
		12 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak perlu diisi	Dinas Kebudayaan	
		13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Ada	Dinas Kebudayaan	
		14 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	5 Orang	Dinas Kebudayaan	Ada data dukung SK Gub nomor 14/Tim/2020 tertanggal 30 Januari 2020
		15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 Orang	Dinas Kebudayaan	
		16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Tidak ada	Dinas Kebudayaan	
		17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	5 orang ahli CB	Dinas Kebudayaan	
		18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Ada	Dinas Kebudayaan	Surat Pernyataan
		19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1 WKM (wajib kunjung museum) 2 Lomba foto Musium	Dinas Kebudayaan	Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan permuseuman tahun 2020

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
23	Urusan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
		1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{5.532.760}{949.325} \times 100\%$ = 582,81 %	DPK Bantul (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	
		2.	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{701.252}{949.325} \times 100\%$ = 73.87 %	DPK Bantul	
		3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{832}{949.325}$ = 0,09	DPK Bantul	
		4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{24}{486} \times 100\%$ = 4,94 %	DPK Bantul	
		5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	385	DPK Bantul	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
		1.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	DPK Bantul	
		2.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	DPK Bantul	
		3.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan	4	DPK Bantul	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			
24	Urusan Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{358}{459} \times 100\%$ = 77,99	DPK Bantul	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{1167}{1506} \times 100\%$ = 77,49	DPK Bantul	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{936}{1320} \times 100\%$ = 70,90	DPK Bantul	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{300}{3257} \times 100\%$ = 9,30	DPK Bantul	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
		1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100%	DPK Bantul	Jumlah arsip dimusnahkan 3176 berkas
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100%	DPK Bantul	Tidak ada kasus /bencana NSPK Ada
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau	100% (2 OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pariwisata	DPK Bantul	- DPK (Penggabungan dari Kantor Perpustakaan dan Kantor Arsip)

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi			- Dinas Pariwisata (Pemekaran dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan)
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	100% (2 OPD)	DPK Bantul	- Dukcapil (tanda tangan elektronik pada KTP, KK, dll) - Dinas Perijinan (tanda tangan elektronik untuk semu perijinan yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan)
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100%	DPK Bantul	
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	100%	DPK Bantul	- SOP - Surat keterangan
25	Urusan Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)			
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	65	DPPKP Kab. Bantul (Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan)	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	DPPKP Kab. Bantul	
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	1	DPPKP Kab. Bantul	
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	6940 orang	DPPKP Kab. Bantul	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	62.439.000 ekor	DPPKP Kab. Bantul	
26	Urusan Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			
		1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	4 Kawasan Obyek Wisata	Dinas Pariwisata	Perda no. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas	Fasilitas Pariwisata sebanyak 6 unit	Dinas Pariwisata	Perda no. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		umum, dan fasilitas pariwisata			Usaha dan Perbup nomor 6 tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	17 Usaha Jasa Pariwisata	DPMPT melalui Dinas Pariwisata	Jasa Akomodasi : 3 Jasa RHU : 8 Jasa Biro Perjalanan Wisata : 5 Jasa Salon : 1
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	405	Dinas Pariwisata	Total jumlah pengunjung mancanegara (tidak bisa diidentifikasi per kebangsaan)
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Event wisata berupa pentas kecil 5 kali, pentas besar 3 kali, pentas desa wisata 2 kali dan event wisata secara virtual sebanyak 6 kali	Dinas Pariwisata	Diselenggarakan dengan anggaran APBD dan Danais
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	-	Dinas Pariwisata	Surat keterangan kegiatan promosi pariwisata baik di dalam dan di luar negeri pada Program Pemasaran tidak ada
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	-	Dinas Pariwisata	Surat keterangan kegiatan promosi pariwisata baik di dalam dan di luar negeri pada Program Pemasaran tidak ada
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{185}{185} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pariwisata	Pelatihan dan memperoleh sertifikat jadi bukan sertifikasi yang bersumber dari anggaran APBD dan DAK (kalau sertifikasi

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
					dilaksanakan oleh lembaga/pihak ketiga)
		9. Persentase SDM peserta pembekalan kepariwisataan sektor	$\frac{185}{185} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pariwisata	Pelatihan dan memperoleh sertifikat jadi bukan sertifikasi yang bersumber dari anggaran APBD dan DAK (kalau sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga/pihak ketiga)
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3 lokasi	Dinas Pariwisata	Pelatihan pembentukan Pokdarwis di Desa Sumbermulyo, dan Desa Wijirejo, Desa Gilangharjo. (Anggaran APBD)
27	Urusan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
		1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	16	DPPKP Kab. Bantul	
		2. Prasaran pertanian yang digunakan	16	DPPKP Kab. Bantul	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	45	DPPKP Kab. Bantul	
		4. Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{16}{16} \times 100\%$ = 100 %	DPPKP Kab. Bantul	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{16}{16} \times 100\%$ = 100 %	DPPKP Kab. Bantul	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular			

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{1.391,5}{1.391,5} \times 100\%$ = 100 %	DPPKP Kab. Bantul	
28	Urusan Kehutanan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi			
29	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dasar hukum tidak melaksanakan urusan USDM: Perda Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan astas peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul			
30	Urusan Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
		1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)	
		a. Pusat perbelanjaan	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %		
		b. Toko swalayan	$\frac{14}{14} \times 100\%$ = 100%		
		2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{7}{7} \times 100\%$ = 100%	Dinas Perdagangan	
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{7}{7} \times 100\%$	DPMPT; DISDAG	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
			= 46,72 %		
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk		Dinas Perdagangan	
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %		
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %		
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %		
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %	Dinas Perdagangan	
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan Kab. Bantul tidak ditetapkan sebagai daerah yang menerbitkan SKA
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$(0,5 + 0,5) \times 100\%$ = 100 %	Dinas Perdagangan	Rehabilitasi Pasar Bantul
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu		9 bahan pokok berdasarkan Permendag 27/2017	

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		a. Beras	1,27		
		b. Jagung	4,06		
		c. Kedelai	4,50		
		d. Gula pasir	13,42		
		e. Minyak goreng	2,30		
		f. Bawang Merah	22,40		
		g. Daging sapi	1,29		
		h. Daging ayam ras	8,97		
		i. Telur ayam ras	8,32		
		Persentase kinerja realisasi pupuk			
		1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{19.910 \text{ ton}}{90\% \times 42.834 \text{ ton}} \times 100\%$ = 51,65 %	Dinas Perdagangan	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
		1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{9634 \text{ unit}}{23.154 \text{ unit}} \times 100\%$ = 41,6 %	UPTD Metrologi Dinas Perdagangan	
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %	Dinas Perdagangan	
31	Urusan Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota			
		1. Persentase jumlah penetapan izin usaha	$\frac{0}{0} \times 100\%$	DKUKMP	PT. YIP adalah satu-satunya Perusahaan di Kabupaten Bantul

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	= 0 %		yang memiliki IUKI tahun 2018, sampai dengan tahun 2020 belum ada permohonan / pengajuan IUKI dan IPKI baru
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK			
		1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Tersusunnya naskah akademik dan Draft Raperda RPIK (50%	DKUKMP	Pengesahan RPIK menunggu revisi RTRW Kab. Bantul
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{35}{35} \times 100\%$ = 100%	DKUKMP	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %	DKUKMP	Tidak ada Industri Kecil dan Menengah yang mengajukan izin perluasan
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{51}{24812} \times 100\%$ = 0.20%	DKUKMP	
32	Urusan Transmigrasi				
		1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kab.Bantul merupakan pengirim transmigran
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2.3 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{325.998.991.751}{2.343.513.536.184,96} \times 100\%$ = 13.911%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		2. Rasio PAD	$\frac{479.604.971.572,42}{26.002.290.000.000} \times 100\%$ = 1.84%	Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul dalam Angka 2021 BPS	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{2.094.142.043.124,77 - 184.349.065.701,78}{2.094.142.043.124,77} \times 100\%$ = 91,20%	BKAD Kab. Bantul	
		6. Opini Laporan Keuangan	Ada	Inspektorat	
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{19}{81} \times 100\%$ = 23,46 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul	lpse.bantulkab.go.id
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang	$\frac{81}{1822} \times 100\%$	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul	lpse.bantulkab.go.id

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	= 4,45 %		
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{84.748.541.093}{994.408.391.331.1} \times 100\%$ = 8,522 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul	esakip.bantulkab.go.id
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1676}{1143} \times 100$ =146.63%	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Pend. SD : 28 Org; Pend. SMP : 125 Org; Pend. SMA : 990 Org; Pend. Diploma : 363 Org; Pend. S1 : 975 Org; Pend. S2 : 336 Org Pend. S3 : 2 Org
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{195}{2819} \times 100$ =6.92%	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Database SAPA ASN dan rekap data dari Subbid Mutasi JF
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{73}{195} \times 100$ = 37.43%	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Data dari Inpassing dan Kenaikan Pangkat Fungsional
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left\{ \left[\frac{2.094.142.043.124,77}{2.474.907.091.918,14} \right] - 1 \right\} \times 100\%$ 15,39%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left\{ \left[\frac{372.702.284.844,45}{420.780.615.321,87} \right] - 1 \right\} \times 100\%$ = 11,42%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		3. Assets Management			

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Apakah ada daftar asset tetap	Ya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	Ya (dengan aplikasi simas dan simpersada)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan	Ya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{123.178.585.087,3}{2.283.585.037.902,49} \times 100\%$ = 5,39 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi Dan Partisipasi Publik)	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	https://:ppid.bantulkab.go.id	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{12}{12} \times 100\%$ = 100 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, tertanggal 4 Maret 2021 disampaikan dalam nomor 1 (satu), huruf (a) maka, terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (Lkj) tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Uraian prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam BAB I Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2020 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 merebak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi seluruh kehidupan di dunia. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Meningkat sangat signifikan, sampai dengan 27 Juli 2020 secara kumulatif telah terkonfirmasi sebanyak 108.376 orang terinfeksi. Pasien positif Covid-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat. Kasus pertama di Kabupaten Bantul terkonfirmasi sejumlah satu orang positif pada tanggal 18 Maret 2020, dan terus terjadi peningkatan menjadi 225 kasus pada tanggal 31 Juli 2020.

Berdasarkan pertimbangan kondisi darurat akibat peningkatan angka kesakitan Covid-19, korban jiwa dan kerugian materiil, serta berimplikasi pada aspek sosial ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka diterbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Penjelasan tentang mekanisme ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) dan seterusnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adanya Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini menyebabkan adanya perubahan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 yang sebelumnya telah disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2016

tentang RPJMD 2016-2021, RKPD tahun 2020, IKU dan APBD tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Perubahan Tahun 2020 sebagaimana ditampilkan dalam berikut :

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2020
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	klasifikasi	8,0 (Baik)
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	tahun	73,65
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	tahun	15,38
4	Turunnya Masyarakat Yang Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	persen	13,94
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	persen persen/ angka	-0,13 0,38
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan	persen	-67
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	persen	47
8	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan. Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	persen persen persen persen	0,1025 1,10 0,30 0,90
9	Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	Pertumbuhan Produksi Perikanan	persen	1,45
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	klasifikasi	78
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	63
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	persen	45,33
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	75
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	persen	0,065

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2020
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	70

Sumber : Laporan Kinerja Kab. Bantul 2020; Bappeda, 2021

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Keberhasilan Visi dan Misi Pembangunan di Kabupaten Bantul selama lima tahun sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2016 – 2021 diukur dengan menggunakan tolok ukur beserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Potret kinerja daerah tercermin dari capaian lima belas sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, serta beberapa capaian pembangunan berupa Inovasi dan Pelayanan Publik.

Adanya perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai akibat dari merebaknya Pandemi Covid-19 juga menyebabkan target tahunan pada IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 berubah. Target IKU yang berubah yaitu :

1. Angka Kemiskinan yang semula ditargetkan 9.9% diturunkan menjadi 13.94% karena Pandemi Covid-19 secara logis membuat daya beli masyarakat (purchasing power), terutama kelas menengah dan bawah, diperkirakan menurun akibat hilangnya pekerjaan atau penurunan drastis penghasilan sehingga dikhawatirkan banyak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi untuk hidup layak/diatas garis.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang semula ditargetkan 5.5 % diturunkan menjadi - 0.13%, dikarenakan Pandemi Covid-19 membawa dampak pada penurunan/ pelambatan kegiatan lapangan usaha pembentuk PDRB, sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.
3. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata yang semula ditargetkan pada 23%

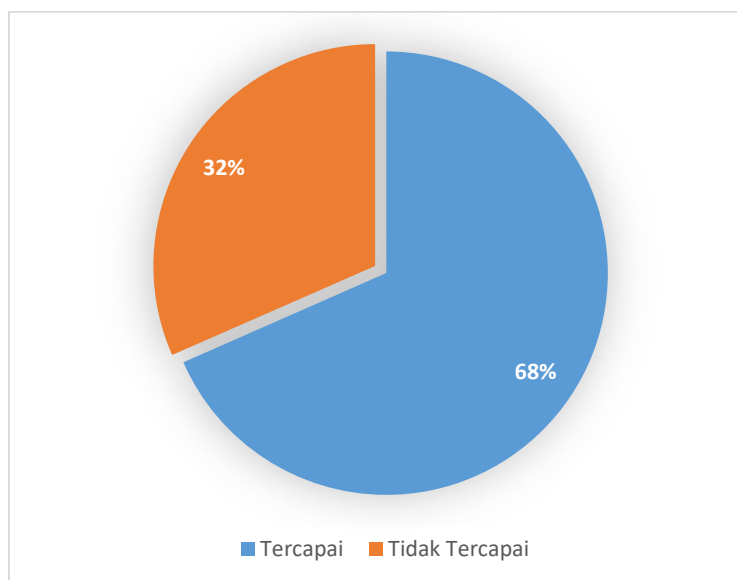
diturunkan menjadi -67% dikarenakan penutupan sebagian besar destinasi wisata merupakan dampak adanya pandemi Covid-19 di sektor pariwisata sehingga mengakibatkan turunnya jumlah kunjungan wisata secara signifikan.

Tabel 2.3.2 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul tahun 2020 terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020			Kriteria
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index/IGI</i>)	klasifikasi	8.0 (Baik)	7.7	96.25%	Sangat Tinggi
2	Umur Harapan Hidup	tahun	73.65	73.86	100.29%	Sangat Tinggi
3	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	15.38	15.17	98.63%	Sangat Tinggi
4	Angka Kemiskinan	persen	13.94	13.5	103.16%	Sangat Tinggi
5	Pertumbuhan Ekonomi	persen	-0.13	0.49	576.92%	Sangat Tinggi
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	persen/angka	0.38	0.38	100.00%	Sangat Tinggi
7	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan	persen	-67	-54.55	118.58%	Sangat Tinggi
8	Cakupan Industri Kreatif	persen	47	46.2	98.30%	Sangat Tinggi
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan.	persen	0.1025	0.71	692.68%	Sangat Tinggi
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	1.10	2.91	264.55%	Sangat Tinggi
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0.30	2.8	933.33%	Sangat Tinggi
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	persen	0.90	0.93	103.33%	Sangat Tinggi
13	Pertumbuhan Produksi Perikanan	persen	1.45	1.59	109.66%	Sangat Tinggi
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	klasifikasi	78	74.98	96.13%	Sangat Tinggi
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	63	63.02	100.03%	Sangat Tinggi
16	Desa Tangguh Bencana	persen	45.33	46.66	102.93%	Sangat Tinggi
17	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	75	75.01	100.01%	Sangat Tinggi
18	Angka Kriminalitas	persen	0.065	0.076	83.08%	Tinggi
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	70	67.52	96.46%	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2020; Bappeda 2021; data diolah

IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan realisasi capaian lebih dari 100% terhadap Perjanjian Kinerja yang ditetapkan (Tabel 2.3.2) ada 13 (tiga belas) indikator dan 6 (enam) indikator tercapai kurang dari 100% atau tidak tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan 5 (lima) indikator memiliki kriteria sangat tinggi dan 1 (satu) indikator berkriteria tinggi, dengan kata lain IKU Kabupaten Bantul pada tahun 2020 tercapai sebesar 68,42% (Grafik 2.3.1) atau 13 dari 19 indikator. Enam indikator kinerja yang terealisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan tersebut adalah Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI); Angka Harapan Lama Sekolah; Cakupan Industri Kreatif; Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur; Angka Kriminalitas; dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.



Grafik 2.3.1 Persentase Realisasi Capaian IKU Kabupaten Bantul terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2020

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.10 sebanyak 11 (sebelas) Indikator Kinerja mengalami penurunan capaian, 7 (tujuh) Indikator mengalami peningkatan capaian dan 1 (satu) Indikator memiliki capaian yang tetap.

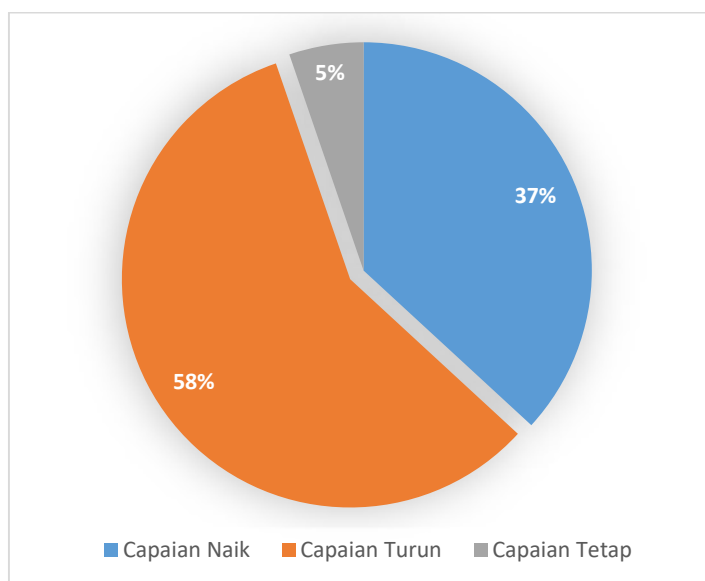
Tabel 2.3.3 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Selisih Peningkatan/ Penurunan	% Peningkatan/ Penurunan
			2019	2020		
1	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	klasifikasi	7.72	7.7	-0.02	-0.26%
2	Umur Harapan Hidup	tahun	73.77	73.86	0.09	0.12%
3	Angka Harapan Lama sekolah	tahun	15.15	15.17	0.02	0.13%
4	Angka Kemiskinan	persen	12.92	13.5	-0.58	-4.49%
5	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.53	0.49	-5.04	-91.14%
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	persen/ angka	0.448	0.38	0.068	15.18%
7	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisataan	persen	22.89	-54.55	-77.44	-338.31%
8	Cakupan Industri Kreatif	persen	46.2	46.2	0	0.00%
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan.	persen	3.54	0.71	-2.83	-79.94%
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	5.72	2.91	-2.81	-49.13%
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0.57	2.8	2.23	391.23%
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	persen	1.57	0.93	-0.64	-40.76%
13	Pertumbuhan Produksi Perikanan	persen	1.41	1.59	0.18	12.77%
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	klasifikasi	76.7	74.98	-1.72	-2.24%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	60.4	63.02	2.62	4.34%
16	Desa Tangguh Bencana	persen	46.67	46.66	-0.01	-0.02%
17	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	72.5	75.01	2.51	3.46%
18	Angka Kriminalitas	persen	0.074	0.076	-0.002	-2.70%
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	69.7	67.52	-2.18	-3.13%

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2020; Bappeda 2021; data diolah

Indikator yang mengalami penurunan capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3.3 sebesar 57,89% dari 19 Indikator Kinerja Utama (Grafik 2.3.2) adalah Indeks Tata Kelola Pemerintahan; Angka Kemiskinan; Pertumbuhan Ekonomi; Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisataan; Pertumbuhan produksi tanaman pangan; Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura; Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas); Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur; Desa Tangguh Bencana; Angka Kriminalitas; dan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indikator yang capaiannya

meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 36,84% atau 7 dari 19 indikator adalah Umur Harapan Hidup; Angka Harapan Lama sekolah; Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio); Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan; Pertumbuhan Produksi Perikanan; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, sedangkan 1 (satu) indikator yang tetap atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan capaian adalah Cakupan Industri Kreatif.



Grafik 2.3.2 Persentase Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2019

Realisasi dari Indikator Kinerja Utama selama 5(lima) tahun terakhir ditampilkan pada

Tabel 2.3.4, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 5 (lima) Indikator Kinerja mengalami peningkatan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Indikator yang mengalami kenaikan capaian kinerja tersebut adalah Umur Harapan Hidup; Angka Harapan Lama Sekolah; Cakupan Industri Kreatif; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Tiga Indikator hanya mengalami penurunan capaian pada tahun 2020 yaitu Angka Kemiskinan; Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur; dan Desa Tangguh Bencana, sedangkan 11 (sebelas) Indikator lainnya mengalami pertumbuhan fluktuatif setiap tahunnya.

Tabel 2.3.4 Matriks Indikator Kinerja Utama pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi					Target Akhir RPJMD 2021	% Realisasi tahun 2020 Terhadap Akhir RPJMD 2021
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	klasifikasi	74,5	75	79.6	7.72	7.7	8.5	90.59%
2	Umur Harapan Hidup	tahun	73,44	73,47	73,56	73.77	73.86	73.56	100.22%
3	Angka Harapan Lama sekolah	tahun	13,55	14,73	14,74	15.15	15.17	15.54	97.62%
4	Angka Kemiskinan	persen	14,55	14,07	13,43	12.92	13.5	8.32	37.74%
5	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,06	5,1	5,02	5.53	0.49	5.60	8.75%
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	persen/ angka	0,3967	0,41	0,4126	0.448	0.38	0.37	97.30%
7	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisataan	persen	12,03	21,59	13,28	22.89	-54.55	24	-227.29%
8	Cakupan Industri Kreatif	persen	39	41,11	42,9	46.2	46.2	50	92.40%
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan.	persen	9,94	0,1133	0,130	3.54	0.71	0.10	689.32%
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	14,09	7,94	0,85	5.72	2.91	1.25	232.80%
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	7,8	0,17	0,24	0.57	2.8	0.35	800.00%
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	persen	4,24	20,52	0,71	1.57	0.93	1.00	93.00%
13	Pertumbuhan Produksi Perikanan	persen	0,35	5,92	1,14	1.41	1.59	1.50	106.00%
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	klasifikasi	N/A	71,57	74,36	76.7	74.98	80	93.73%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	31,35	45,1	53,36	60.4	63.02	72	87.53%
16	Desa Tangguh Bencana	persen	15	29,33	37,33	46.67	46.66	52	89.73%
17	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	70	70,24	70,45	72.5	75.01	80	93.76%
18	Angka Kriminalitas	persen	0,061	0,074	0,055	0.074	0.076	0.06	73.33%
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	54,8	57,01	68,4	69.7	67.52	75	90.03%

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2016 s/d 2020;

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016-2021 telah mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam dokumen perubahan RPJMD ini berupa indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 (Sasaran Daerah) yang telah mengakomodir Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul. Capaian indikator kinerja daerah yang merupakan ukuran terhadap keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 ditampilkan dalam Tabel 2.3.5 sebagai berikut :

Tabel 2.3.5 Matriks Capaian Kinerja Indikator Utama tahun 2020 dibandingkan dengan Target RPJMD Perubahan 2016-2021

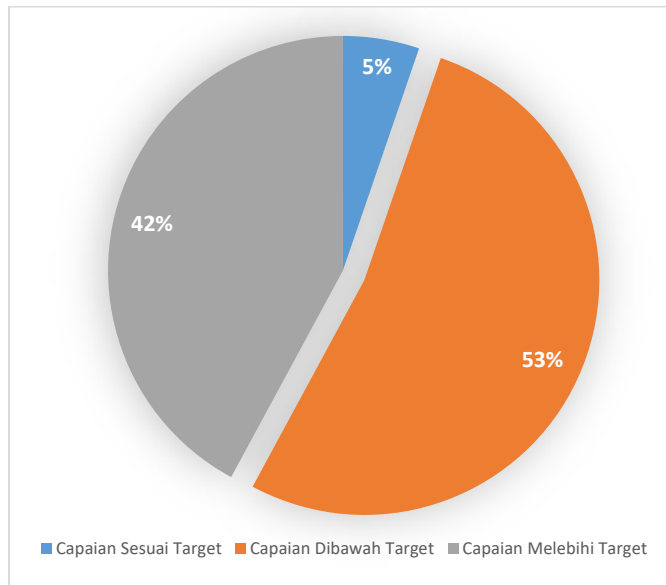
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Perubahan RPJMD Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 19 Tahun 2018				
			Target		Realisasi		
			PK 2020	Akhir RPJMD 2021	PK 2020	%	
					Terhadap RPJMD	Terhadap Akhir RPJMD 2021	
1	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	klasifikasi	8.0 (Baik)	8.5	7.7	96.25%	90.59%
2	Umur Harapan Hidup	tahun	73.65	73.56	73.86	100.29%	100.22%
3	Angka Harapan Lama sekolah	tahun	15.38	15.54	15.17	98.63%	97.62%
4	Angka Kemiskinan	persen	9.59	8.32	13.5	59.23%	37.74%
5	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.50	5.60	0.49	-88.73%	8.75%
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	persen/ angka	0.38	0.37	0.38	100.00%	97.30%
7	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisataan	persen	23	24	-54.55	-237.17%	-227.29%
8	Cakupan Industri Kreatif	persen	47	50	46.2	98.30%	92.40%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Perubahan RPJMD Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 19 Tahun 2018				
			Target		Realisasi		
			PK 2020	Akhir RPJMD 2021	PK 2020	%	
					Terhadap RPJMD	Terhadap Akhir RPJMD 2021	
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan.	persen	0.1025	0.10	0.71	692.68%	689.32%
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	1.10	1.25	2.91	90.91%	232.80%
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0.30	0.35	2.8	933.33%	800.00%
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	persen	0.90	1.00	0.93	103.33%	93.00%
13	Pertumbuhan Produksi Perikanan	persen	1.45	1.50	1.59	109.66%	106.00%
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	klasifikasi	78	80	74.98	96.13%	93.73%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	63	72	63.02	100.03%	87.53%
16	Desa Tangguh Bencana	persen	45.33	52	46.66	102.93%	89.73%
17	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	75	80	75.01	100.01%	93.76%
18	Angka Kriminalitas	persen	0.065	0.06	0.076	83.08%	73.33%
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	70	75	67.52	96.46%	90.03%

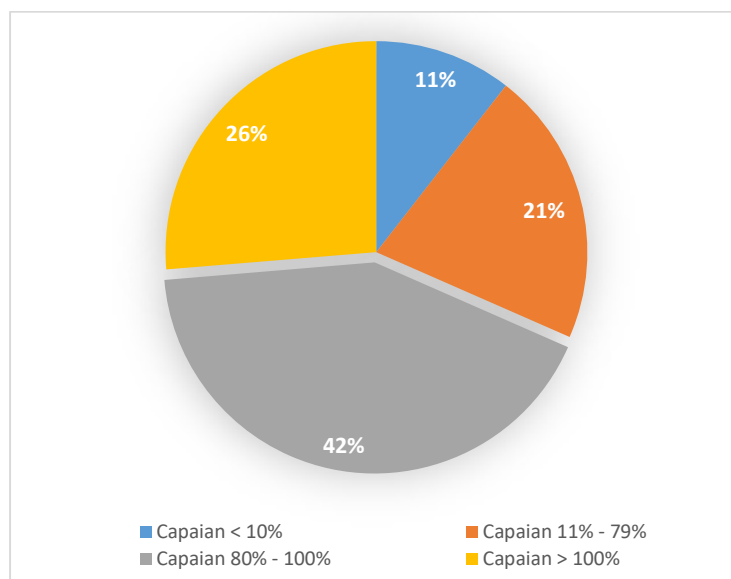
Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2020; Bappeda 2021; data diolah

Secara umum sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3.5 capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020 terhadap target pada RPJMD 2016-2021 pada tahun yang sama sebanyak 10 (sepuluh) indikator dengan capaian tidak tercapai, 1 (satu) indikator tercapai 100% (Gini Ratio), dan 8 Indikator memiliki capaian lebih dari 100%. Sepuluh indikator yang realisasi terhadap target pada RPJMD 2016-2021 tidak tercapai ada 2 (dua) Indikator yang memiliki capaian minus yaitu Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian sebesar -88,73% dan Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan capaian -237.17%.

Capaian Kinerja Utama tahun 2020 terhadap target dalam RPJMD 2016-2021 secara umum sebagaimana terlihat dalam **Grafik 2.3.3** sebesar 52,63% terealisasi dibawah target RPJMD 2016-2021 atau 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama memiliki capaian kurang dari 100%; sedangkan 42,11% tercapai melebihi target kinerja dan 5,26% atau 1 indikator memiliki capaian sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama.



Grafik 2.3.3 Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2020 terhadap Target tahun 2020 pada RPJMD 2016-2021



Grafik 2.3.4 Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

Terhadap target Akhir RPJMD 2016-2021 (

Grafik 2.3.4) sebesar 42,11% atau 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020 menyumbangkan capaian sebesar 80%-100%; 4 (empat) indikator atau 21,05% dari 19 indikator memiliki capaian 11%-79%; dan 5 (lima) indikator atau 26,23% dari 19 indikator memiliki capaian melebihi target akhir RPJMD 2016-2021, sedangkan 2 indikator pada tahun 2020 ini memiliki capaian kinerja kurang dari 10% terhadap target akhir RPJMD 2016-2021.

2.3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional

Indikator Capaian Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yang dapat disandingkan dengan Capaian Tingkat Nasional hanya ada 6 Indikator (Tabel 2.3.6), yaitu Umur Harapan Hidup; Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Kemiskinan; Pertumbuhan Ekonomi; Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio); dan Angka Kriminalitas. Indikator Angka Kriminalitas**) pada Kabupaten Bantul menggunakan satuan persen dengan definisi jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk, sedangkan pada tingkat Nasional dengan data bersumber dari Badan Pusat Statistik didapatkan definisi Angka Kejahatan per 100.000 penduduk dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan. Dengan demikian, agar dapat disandingkan perlu standarisasi perumusan, sehingga didapatkan angka kriminalitas di Kabupaten Bantul 2,95.

Tabel 2.3.6 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 terhadap Capaian pada tingkat Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2020		% Realisasi
			Bantul	Nasional	
1	Umur Harapan Hidup	tahun	73.86	71,47	103,34%
2	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	15.17	12,98	116,87%
3	Angka Kemiskinan	persen	13.5	10.9	76,15%
4	Pertumbuhan Ekonomi	persen	0.49	2.09	23,44%
5	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	persen/ angka	0.38	0,385	101,30%
6	Angka Kriminalitas	persen	0.076**)	103*)	197,14%

Sumber : Bappeda 2021; BPS 2021; *)Capaian 2019

Capaian Kinerja Utama kabupaten Bantul pada tahun 2020 terhadap menunjukkan 4 (empat) indikator memiliki tingkat capaian yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian pada Tingkat Nasional (Tabel 2.3.6). Keempat Indikator tersebut adalah Umur Harapan Hidup dengan capaian 103,34%; Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 116,87%; Pemerataan Pendapatan sebesar 101,30%; dan Angka Kriminalitas sebesar 197,14%.

2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact).

Merebaknya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi seluruh kehidupan di dunia serta terbitnya Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Penjelasan tentang mekanisme ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) dan seterusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2020. Perubahan RKPD ini didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19, serta memprioritaskan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring

pengaman sosial.

Perubahan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2020 juga berpengaruh terhadap perubahan target Indikator Kinerja yang sebelumnya telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2020 oleh Bupati Kabupaten Bantul. Sebagaimana ditampilkan sebelumnya dalam sub-sub bab 2.3.2 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mengalami perubahan target kinerja pada tahun 2020 sesuai dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 yang disahkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 99 Tahun 2020.

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2020 terhadap Target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 94,74% atau 18 dari 19 Indikator Kinerja Utama memiliki kriteria Sangat Tinggi dan hanya 1 Indikator Kinerja Utama yang memiliki kriteria Tinggi. Capaian Indikator Utama dapat dikatakan berhasil apabila tercapai > 100% terhadap target yang ditetapkan, dengan demikian sebagaimana terlihat pada data yang disajikan di Tabel 2.3.2 dan Grafik 2.3.1, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebesar 68,42% atau 13 dari 19 Indikator Kinerja Utama berhasil dicapai dan 31,58% atau 6 dari 19 Indikator Kinerja Utama gagal untuk dicapai pada tahun 2020.

a. Indeks Tata Kelola Pemerintahan/ Indonesia Governance Index (IGI)

Untuk mengukur derajat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, mulai periode awal RPJMD tahun 2016-2021 akan dilakukan perhitungan indeks tata kelola pemerintahan yang baik dalam wujud indeks tata kelola pemerintah yang baik (Bantul Governance Index/Indonesia Governance Index).

Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah nilai 8 realisasi tercapai sebesar 7,70, atau tercapai 96,25% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 90,82% dari target akhir RPJMD tahun 2021. Capaian indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena dalam RPJMD perubahan ada perubahan target berbeda bilangannya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercapai sebesar 7,72 dengan target nilai 7,5 maka capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,02. Hal ini terjadi karena kondisi pemerintah baik legislatif dan eksekutif maupun

masyarakat sipil terkonsentrasi penanganan covid 19, sedangkan masyarakat ekonomi cenderung dalam kondisi lesu akibat adanya pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia.

Indonesia Governance Index (IGI) merupakan alat untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan (governance) di Indonesia yang sangat komprehensif, khususnya terhadap empat pilar pemerintahan yaitu arena pemerintah (legislatif dan eksekutif), birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur. Dengan kata lain, IGI merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengukur sejauh mana implementasi tata kelola pemerintahan kabupaten/kota/provinsi, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk evaluasi bagi pembuat kebijakan atau pengambil keputusan.

Keempat arena tersebut diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu meliputi Partisipasi, Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas

Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat baik).

Tabel 2.3.7 Hasil Pengukuran Arena Indikator IGI

	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas	Nilai
Birokrasi	8,21	8,15	7,71	8,4	7,45	7,7	7,94
Pejabat Politik	8,62	8,07	7,32	7,43	7,46	7,56	7,74
Masyarakat Sipil	7,97	7,78	7,29	7,79	7,53	7,78	7,69
Masyarakat Ekonomi	7,20	7,57	7,34	7,38	7,45	7,69	7,44
Bobot	8,00	7,89	7,42	7,75	7,47	7,68	7,70

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021;

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Nilai prinsip partisipasi pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,03 menjadi 8,00 dibandingkan tahun 2019, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 semua arena andil dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bantul

dan Lurah.

2. Nilai prinsip transparansi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,04 menjadi 7,89 dibandingkan tahun 2019. Hal ini terjadi karena beberapa arena belum memberikan kemudahan akses data.
3. Nilai prinsip keadilan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,01 menjadi 7,42 dibandingkan tahun 2019. Hal ini menandakan setiap arena sudah bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya serta responsif terhadap publik.
4. Nilai prinsip akuntabilitas ada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,04 menjadi 7,75 dibandingkan tahun 2019 yang menandakan bahwa rincian program dan anggaran yang dibuat terserap secara optimal.
5. Nilai prinsip efektivitas ada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,04 menjadi 7,47 dibandingkan tahun 2019. Nilai ini dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul yang disebabkan oleh pembatasan aktivitas ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat.
6. Nilai prinsip efisiensi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,14 menjadi 7,68 dibandingkan tahun 2019. Nilai prinsip efisiensi yang menunjukkan pelayanan pada masyarakat oleh masing-masing arena tersebut mengalami penurunan dikarenakan adanya penerapan protokol kesehatan (PSBB) dalam pandemi Covid-19. Hasil penilaian IGI Kabupaten Bantul untuk tahun 2020 adalah sebesar 7,70. Nilai indeks tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 (7,72).

Tercapainya kinerja IGI diatas didorong oleh penyelenggaraan pemerintahan di Bantul telah menunjukkan beberapa keberhasilan, diantaranya adalah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memperoleh nilai 81,91 atau predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan

budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menunjukkan hasil yang baik.

Perbaikan akuntabilitas kinerja yang diterapkan telah memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul. Hal ini dilihat dari penyederhanaan sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, dapat mengefisienkan anggaran yang ada serta mengefisienkan kegiatan demi mewujudkan prioritas daerah.

Selain akuntabilitas kinerja yang mendapatkan penilaian baik dengan predikat A, hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) juga memberikan hasil yang baik. Tahun 2020 Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 3,4463 (Sangat Tinggi).

Tahun 2020, Kabupaten Bantul juga telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya. Hal ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul yang baik dalam berkinerja memberikan pelayanan, demi kesejahteraan masyarakat Bantul.

Kabupaten Bantul juga melakukan upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), telah dicanangkan untuk diusulkan evaluasi Zona Integritas ke Kementerian PANRB. Untuk Tahun 2020 usulan zona integritas ada 4 OPD sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari WBK menjadi WBBM.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu WBK menuju WBBM.
3. RSUD Panembahan Senopati menuju WBK.
4. Kecamatan Pundong menuju WBK.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/WBBM Tahun 2020 diberikan langsung oleh Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo, Senin (21/12/2020) di Jakarta. Hal ini

berarti tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik yang berkualitas serta memiliki budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan berkualitas dan anti terhadap segala bentuk dan jenis tindak pidana korupsi.

Faktor pendorong lainnya adalah terkait dengan arena kebijakan pemerintah yang berorientasi untuk meningkatkan 3 sektor penting dalam kesejahteraan masyarakat yakni pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Cakupan pemenuhan terhadap sektor-sektor tersebut terus didorong untuk optimalnya pelayanan dan pemenuhan kepentingan masyarakat.

Kemudian optimalisasi keterlibatan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan yang luas dan dalam program yang demikian beragam dan ekstensif sehingga masyarakat sipil, institusi politik, dan masyarakat ekonomi berjalan selaras dan berinteraksi secara seimbang sehingga mampu mencapai visi bersama dalam bingkai kepentingan rakyat.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan perencanaan sistemik dengan menggunakan alat tolak ukur yang dapat mengukur semua arena akan dapat mendorong interaksi antar arena. Hal ini adalah kunci reformasi birokrasi.

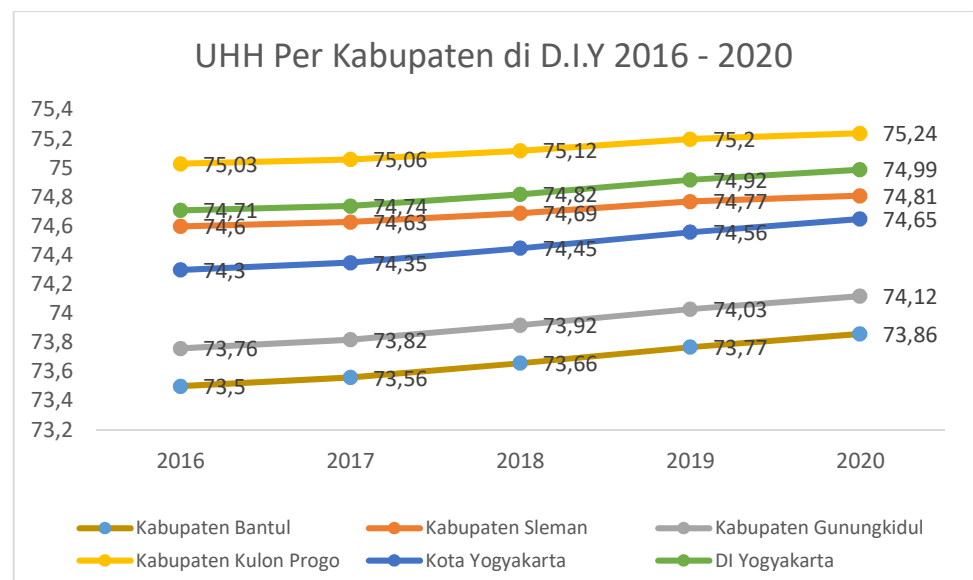
b. Umur Harapan Hidup

Sasaran untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2020, dari target 73,65 tahun, realisasi tahun 2020 menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Bantul mencapai 73,86 tahun atau 100,29% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Dengan capaian ini pula, telah mencapai 100,22% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Trend Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada gambar berikut. UHH pada tahun 2012 sebesar 73,19, tahun 2013 sebesar 73,22 tahun, tahun 2014 sebesar 73,24 tahun, tahun 2015 sebesar 73,44 tahun, tahun 2016 sebesar 73,50 tahun, tahun 2017 sebesar 73,47, tahun 2018 sebesar 73,56, tahun 2019 sebesar 73,77 dan tahun

2020 sebesar 73,86. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17 kecamatan, dengan jumlah Puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan, maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah. Selain itu, sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Bantul telah memiliki puskesmas pembantu.

Puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul sebanyak Pustu 67 unit pada 75 Desa. Puskesmas pembantu ini tersebar pada wilayah padat penduduk, sehingga Puskesmas pembantu ini dapat menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bantul. Kondisi wilayah sebagian besar adalah dataran yang cukup menguntungkan bagi masyarakat karena mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan jarak terjauh dari desa dalam satu Kecamatan ke Pusat Kesehatan Masyarakat hanya \pm 3 Km



Grafik 2.3.5 Trend Umur Harapan Hidup Kabupaten Bantul dan Kabupaten lainnya dalam Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016 – 2020

UHH pada tahun 2016 sebesar 73,50, tahun 2017 sebesar 73,56 tahun, tahun 2018 sebesar 73,66 tahun, tahun 2019 sebesar 73,77 tahun. Jika

dibandingkan dengan UHH wilayah lain di D.I.Yogyakarta ternyata dalam 4 tahun terakhir, UHH Kabupaten Bantul berada pada posisi terendah. UHH tertinggi tahun 2020 berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,24 tahun diikuti Kabupaten Sleman sebesar 74,81 tahun, Kota Yogyakarta sebesar 74,65 tahun dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 74,12 tahun. Sedangkan UHH penduduk Daerah D.I Yogyakarta tahun 2019 sebesar 74,92 tahun sedangkan tahun 2020 sebesar 74,99 tahun. Walaupun UHH Kabupaten Bantul terendah di Daerah D.I. Yogyakarta pada tahun 2020, namun masih termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan UHH sebagian besar Kabupaten/Kota lain di Indonesia, bahkan UHH Nasional 2020 hanya sebesar 73,4 tahun (proyeksi Bappenas).

Untuk mendukung terwujudnya derajat kesehatan yang optimal, seluruh Puskesmas melakukan kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). UKP yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Dalam rangka pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, semua Puskesmas melaksanakan kegiatan inovasi untuk mempercepat tercapainya tujuan pelayanan UKM di Puskesmas. Selama Tahun 2020 kita memasuki masa pandemi Covid-19, ada beberapa kegiatan inovasi Puskesmas yang dilaksanakan namun dengan modifikasi, sedangkan untuk inovasi yang mengharuskan tatap muka memang ditiadakan. Adapun kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas disajikan pada Tabel 2.3.8 berikut :

Tabel 2.3.8 Kegiatan Inovasi Puskesmas Dalam Rangka Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tahun 2020

NO	PUSKESMAS	NAMA INOVASI
1	Sanden	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur (PASMANTAP), Pendampingan Difabel Pada Sekolah Luar Biasa (EMPING DESA), Skrining Fleksibilitas, Keseimbangan, Kekuatan Otot, Hambatan Aktifitas Sehari-hari Dan Kebugaran (SIMBAH BUGAR),

NO	PUSKESMAS	NAMA INOVASI
		<ul style="list-style-type: none"> Bumil Risti Sanden (BUTISTA), Pemasangan Stiker ANC Terpadu Bumil Pada Buku KIA (MASTRI ANTER BUMIL), Juru Pemantau Batuk (JUMANTUK)
2	Imogiri I	<ul style="list-style-type: none"> GEBRAK PTM (Gerakan Bersama Rangkul Penyakit tidak menular), SAPA PTM (Screening Awal Pada Penyakit Tidak Menular), TUMAN TENSI (Kartu Pemantauan Hipertensi) dan Tuman Gendis (Kartu Pemantauan DM), IMAS PAKE MAS (Integrated Management Schedule UpayaKesehatanMasyarakat) PILKUAT (Penyuluhan Imunisasi dasar Lengkap dan booster KUdu AkuraT), SIDIYAN CERDAS (Sweeping Imunisasi dasar lengkap dan booster DI posYANdu agar anak sehat dan CERDAS), AKU DI DESA SAJA (AYO KUATKAN UPAYA DENGAN INOVASI DESA SIAGA SEHAT JIWA), ELING JIWA (Injeksi Keliling Pasien Jiwa), WAMIL SEKSI (grup WhatsApp ibu haMIL SEkalurahan di puskesmas imogiri Siji), SOMAT GEMBIL (ANC SOre di hari juMAT kaGEM iBu haMIL), PESTA BUTIK (PEnempelan Stiker TAnda iBU hamil risTI di buku Kia), DEDI TUPERWARE (DEteksi DIni TUMbuh kembang anak di Posyandu agar balita gEneRasi WARga imogiRi sEhat dan tumbuh kembang maksimal, PEKA SIGIMAS (Pembentukan Kader Orang Tua Siswa Dalam Kegiatan Sikat Gigi Mandiri Di Rumah Dan Sekolah)
3	Imogiri II	<ul style="list-style-type: none"> Geprek Emping
4	Pleret	<ul style="list-style-type: none"> MAS DULIMUN TUKU GENSET (Forum masyarakat Peduli Imunisasi untuk Generasi Sehat),Ambekan(Ambulan Mubeng Kelurahan)
5	Srandakan	<ul style="list-style-type: none"> Caten Terpadu,Kentong lemut
6	Pundong	<ul style="list-style-type: none"> Geplak Manis dibawa andong
7	Bambanglipu ro	<ul style="list-style-type: none"> Pandu bumil ke pantai (Pelayanan terpadu ibu hamil kurang energi protein dan anemia terintegrasi), Geliat Jiwa (Gerakan Bambanglipuro sehat Jiwa), Pandu Semar (Pengelolaan terpadu Diabetes Melitus dan Hipertensi menuju pribadi yang sehat mandiri dan religius)
8	Banguntapan I	<ul style="list-style-type: none"> GERDU BATUK : Gerakan Terpadu Bantu Penderita Tuberculosis

NO	PUSKESMAS	NAMA INOVASI
9	Banguntapan II	• Sana Sini (Sehatkan anak Sejak Dini), Sapha Lansia (Satu atap Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia) Selama pandemi tidak dilaksanakan
10	Banguntapan III	Gemar Mbatik
11	Bantul I	Tenda Tensi (Temukan tanda-tanda hipertensi). Program 1 Jumantik 1 Keluarga
12	Bantul II	• Kiper Tensi (Kelompok Kendali Hipertensi), Nona Nolly (No-Narkoba, No-Bullying), Desaku Resik (Desa Siaga Aktif Kurangi Resiko AKI/Angka Kematian Ibu) Gemar (Generasi Muda Anti Rokok), Peran Ibu Aktif Jaman Now
13	Dlingo I	• Keladi, Kedapi
14	Dlingo II	Tiwul Gatot (Tingkatkan Kualitas dan gaya hidup Sehat secara total), Emping Jamil (Pendampingan Remaja pada Ibu Hamil)
15	Jetis I	Gardu Angkring Covid 19, Gregah Covid 19
16	Jetis II	Garpu salad, Duta Bagiku, Kuda Jingkrak, Tebar Kasebar
17	Kasihani I	Pasangan Peri
18	Kasihani II	Jamah Linsek Viagra (Jumat kunjungan Rumah dan Pelayanan Rujukan lintas sektoral ataupun Penjemputan Via Grhasia), Budiman Dasi Merah (Budidaya Manfaat Daun sirih Mencegah Gusi berdarah), Pepes Katuk (Pemuda Pemudi Sumberan Kenalkan ASI Terbaik Keluarga)
19	Kretek	• Sapu Lidi (Pasukan Anak Peduli Kepada Penanggulangan Dbd Mandiri), Pantai Pasetan (Pantau Tensi Pada Setiap Kegiatan), Makan Ikan Seceting (Makan Ikan Segar Cegah Stunting), Sunda Kelapa (Dusun Sadar Kepada Pengendalian Hiv Aids)
20	Pajangan	• Bunga Kertas (Bantu Penanganan Korban Kekerasan Rumah Tangga), Butik Bela (Bunda Sehat Cantik Besarkan Bayi Balita), Catin Cetar (Calon Pengantin Cerdas Dan Pintar Dikhususkan Pada Kelas Pengantin), Ingkung Seniman (Ingat Dukung Sekolah Sehat Kini Dan Selamanya), Jawara Gaul (Jaga Jiwa Raga Warga Binaan Rutan Bantul), Kleting Kuning (Kelola Dan Tingkatkan Gizi Untuk Kurangi Stunting), Pelangi Batik (Pelayanan Gigi Balita Untuk Senyum Cantik), Raja Ampuh (Rawat Gangguan Jiwa Sampai Sembuh), Sajam Gurantik (Satu Jam Dalam Seminggu)

NO	PUSKESMAS	NAMA INOVASI
		Berantas Jentik Nyamuk), Sambung Rasa (Sarana Hubungan Dengan Masyarakat)
21	Pandak I	Senam Mobile Srikandi, Klinik MESRA (Menuju Keluarga Sehat Sejahtera), Mas Gundul Nyekungkung (Masyarakat Gunting Peduli dan Nyengkuyung Kasus Bebas Pasung), Gunting Sate (Dusun Gunting Sadar Tensi)
22	Pandak II	• Pandu Pesat Mobile ,Peka Tensi
23	Piyungan	Situs Payak Piyungan (Eliminasi TB), Pinggang Wader Mas (Tentang Jiwa)
24	Sedayu I	• GAMET MISTERI- Penggalangan Komitmen Suami Istri dalam Perencanaan KB Paska Salin, TANTE SOSIALITA (Pemanfaatan Taman Obat Keluarga, Solusi Sehat Alami untuk Kita)
25	Sedayu II	• ODAMANTIK(Orang Dampingan Pemantau Jentik), MASDA (Germas Muda Sedayu), DOKMANTIK (Dokter Kecil Pemantau Jentik), PEMBATIK(Pemuda Pemberantas Jentik), RATU JUM (Rumah Satu Jumantik)
26	Sewon I	Sabar Mas (Sabtu Sehat Bersama Masyarakat)
27	Sewon II	Pemberdayaan Terpadu Kesehatan

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021;

Kegiatan UKP dan UKM di Puskesmas dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dengan sasaran keluarga yang didasarkan pada data dan informasi dari profil kesehatan keluarga.

Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga ke luar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Selain itu Puskesmas juga harus meningkatkan kerjasama dengan jejaringnya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain di wilayah kerjanya, agar fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut turut berperan aktif dalam pembangunan kesehatan selain memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat perorangan.

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Bantul dilakukan secara bertahap. Tahap pada Tahun 2020

PIS-PK sudah dilaksanakan diseluruh Puskesmas. Kegiatan PIS-PK dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke setiap keluarga di wilayah kerjanya untuk memotret kondisi kesehatan dari setiap anggota keluarga, sekaligus memberikan intervensi dan edukasi kesehatan. Ada 12 indikator yang ditanyakan dan dilakukan pengecekan pada saat kunjungan PIS-PK, yaitu :Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga. Sedangkan keadaan masing-masing indikator, mencerminkan kondisi PHBS dari keluarga yang bersangkutan.

Pada Tahun 2020 seluruh puskesmas telah melaksanakan PIS-PK di wilayah kerja masing-masing. Untuk Hasil capaian IKS di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 per indikator dapat dilihat pada **Tabel 2.3.9** berikut :

Tabel 2.3.9 Capaian Indikator IKS Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Indikator IKS	Capaian
1	Keluarga mengikuti program KB	0,512
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	0,974
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	0,971
4	Bayi mendapat ASI eksklusif	0,917
5	Balita yang dipantau pertumbuhannya	0,945
6	Penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	0,263
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	0,187
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	0,300

No	Indikator IKS	Capaian
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	0,557
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN/Jaminan Kesehatan	0,707
11	Keluarga mempunyai akses/menggunakan sarana air bersih	0,935
12	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	0,975

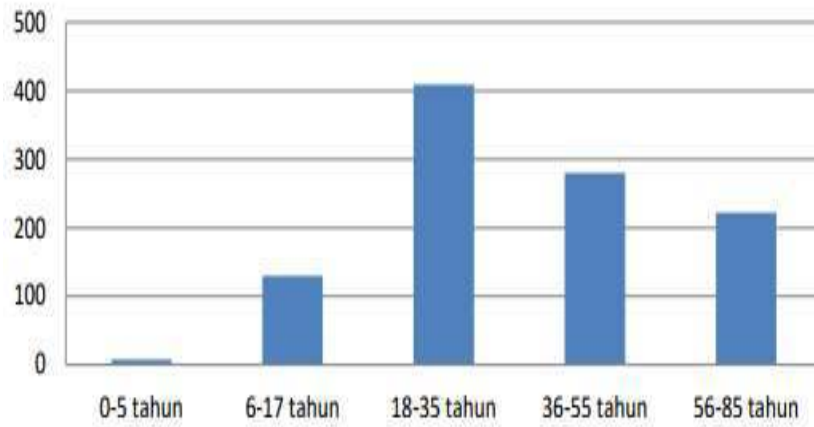
Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021;

Selain kegiatan Inovasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan mempunyai Inovasi terkait dengan pelayanan yaitu PSC 119 Bantul yang merupakan upaya penanganan pertama kasus kegawatdaruratan di masyarakat dengan jaminan respon yang cepat dan tepat. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan masyarakat/korban gawat darurat terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. Untuk terselenggaranya SPGDT maka dibentuk PSC (Public Safety Center), seperti yang sudah ada di kabupaten bantul.

PSC 119 mengandalkan aplikasi sistem penanggulangan gawat darurat publik (SIGAP). Aplikasi ini terhubung ke puskesmas dan beberapa rumah sakit di Kabupaten Bantul, sehingga mampu memonitoring dan memberikan pelayanan dengan cepat. Adapun layanan di PSC 119 yang dapat diakses antara lain adalah 1) penanganan kegawatdaruratan dengan menggunakan protokol; 2) kebutuhan informasi ruang di rumah sakit; 3) informasi fasilitas kesehatan terdekat; dan 4) Informasi ambulans.

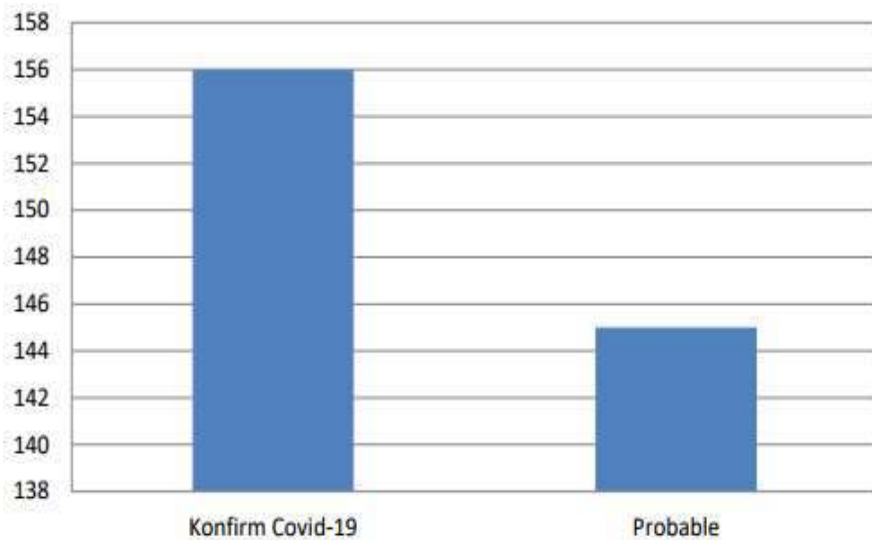
Operator call center merupakan tenaga kesehatan sehingga dapat memandu penanganan awal kasus sebelum tim tenaga kesehatan datang. Dalam menanggulangi Kegawatdaruratan medis di Kabupaten Bantul diperlukan sistem komunikasi yang terintegrasi, terpadu dan cepat, yaitu melalui call center 119 yang terintegrasi secara nasional di National command center (NCC) Kementerian Kesehatan. Tahun 2020 dilakukan kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan NCC dalam hal integrasi SPGDT call center untuk mendukung pelayanan di PSC 119. Dalam masa pandemi Covid-19, PSC 119

merupakan salah satu garda terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berikut hasil yang dicapai oleh PSC 119 selama tahun 2020 :



Grafik 2.3.6 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu-Lintas yang ditangani PSC 119 di Kabupaten Bantul berdasarkan Umur pada Tahun 2020

Selama masa Pandemi Covid-19, PSC 119 juga melakukan pelayanan kepada pasien Covid-19 baik pasien suspect maupun pasien terkonfirmasi. Berikut kami sajikan data pasien Covid-19 yang ditangani PSC 119 :



Grafik 2.3.7 Distribusi berdasarkan Kelompok Kategori Status di Kabupaten Bantul pada Tahun 2020

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Untuk tahun 2020, Capaian kegiatan adalah desa yang telah mengimplementasikan 5 (lima) pilar STBM. Dari target 27 desa yang mendeklarasikan sebagai desa STBM mengalami kemajuan pesat yaitu sebanyak 58 desa. Penghargaan pencapaian desa STBM Berkelanjutan diberikan pada Lurah Desa Trimulyo sebagai Lurah terbaik serta Kader Kesehatan Desa Banguntapan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan berhasil mempertahankan penganugerahan STBM berkelanjutan pada tahun 2020.

Kegiatan berupa pembinaan lokasi tatanan, pembinaan kelompok kerja (Pokja) desa sehat dan rapat koordinasi antar OPD. Pembinaan dilakukan untuk mempersiapkan lokasi tatanan menuju verifikasi di tahun 2021. Kegiatan pelaksanaan Kabupaten Sehat Bantul yang memadukan upaya pemerintah dan peran aktif masyarakat pada tiap lokasi tatanan yaitu:

1. Kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum;
2. Kawasan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, ketahanan pangan dan gizi;
3. Tatanan Pasar;
4. Tatanan Pendidikan;
5. Kehidupan social yang sehat dan penanganan bencana;
6. Transportasi dan tata tertib lalulintas jalan;
7. Perkantoran, perindustrian (IKM) dan UMKM;
8. Tatanan pariwisata;
9. Rumah ibadah;
10. Kota pintar

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah pada tahun 2020 Kabupaten Bantul mempertahankan penghargaan tertinggi yaitu Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara Klasifikasi Pengembangan untuk keempat kalinya.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah pada tahun 2020 Kabupaten Bantul mempertahankan penghargaan tertinggi yaitu Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara Klasifikasi Pengembangan untuk keempat kalinya.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya.

Salah satu Program kegiatan pada tahun 2020 adalah Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari.

Pembinaan PHBS dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2020 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada :

Tabel 2.3.10 Hasil Capaian Tatanan PHBS Tahun 2016-2020

No.	Tatanan PHBS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga	41,21%	47,14%	50,27%	53%	53,1%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,31%	83,82%	83,82%	91,67%	91,70%
3	Institusi Pendidikan	44,38%	54,77%	54,77%	61%	62,20%
4	Tempat Kerja	26,15%	39,15%	39,15%	41,21%	41,21%
5	Tempat-tempat Umum	63,18%	58,52%	58,52%	59%	59,15%

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021;

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selain kegiatan Pembinaan PHBS, yaitu kegiatan inovatif pemberdayaan masyarakat berupa Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) yang sudah di mulai sejak tahun 2007. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui indikator desa siaga. Sebanyak 43 desa siaga termasuk dalam kategori baik, yaitu memiliki strata purnama dan mandiri.

Tujuan Utama kegiatan ini adalah untuk mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh stakeholder, termasuk juga para pejabat dan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan utama, yaitu menurunkan kematian ibu maternal, menurunkan kematian bayi, menurunkan jumlah penderita gizi buruk, menekan kasus DBD, dan meningkatkan penemuan kasus TB.

Unit analisis DB4MK telah diubah dari desa bebas 4 masalah kesehatan menjadi dusun bebas 4 masalah kesehatan. Hal ini berdasarkan aspirasi kepala desa dan masyarakat karena peluang masyarakat untuk mendapatkan reward lebih besar dengan unit analisis yang lebih kecil yaitu pedukuhan dan masyarakat mempunyai harapan yang lebih besar untuk mengupayakan daerahnya bebas empat masalah kesehatan. Reward diberikan bagi dusun dengan kriteria bebas kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk, dan DBD.

Khusus untuk tahun 2020, tidak diberikan reward dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran DB4MK dialihkan untuk kegiatan tanggap darurat Covid-19.

Sedangkan pembayaran premi asuransi kesehatan bagi peserta JKN PBI APBD, pembayaran jaminan pemeliharaan kesehatan (pengganti pembayaran klaim dan pembayaran klaim PSC (Public Safety Centre), pada tahun 2020 ditambahkan untuk pembayaran klaim perawatan pengobatan pasien Covid 19. Dengan adanya pembayaran premi asuransi kesehatan bagi peserta JKN PBI APBD merupakan salah satu wujud nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya menjamin semua warganya agar menjadi peserta jaminan kesehatan sehingga masyarakat Kabupaten Bantul dapat memenuhi kebutuhan kesehatannya.

Selain itu untuk penanganan Covid 19 bangunan fisik Rumah Sakit yang

telah ada selama masa pandemi Covid-19 sementara dipergunakan sebagai Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid (RSLKC) dengan kapasitas 50 TT. Pelayanan diperuntukkan untuk merawat pasien terkonfirmasi Covid -19 dengan gejala ringan sampai sedang. Selain rumah sakit lapangan ditambahkan beberapa salter untuk penampungan pasien covid 19.

Faktor kecukupan tenaga kesehatan dibandingkan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya rasio dokter umum dibanding jumlah penduduk adalah 40/100.000 penduduk. Dengan demikian pada tahun 2020, Kabupaten Bantul membutuhkan dokter umum sejumlah 382 orang. Rasio dokter spesialis adalah 6/100.000 penduduk atau dibutuhkan sejumlah 57 dokter spesialis.

Rasio ketersediaan tenaga dokter umum maupun dokter spesialis di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 32/100.000 dokter umum dan meningkat menjadi 44/100.000 dokter umum pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan pada tahun 2020 rasio tenaga dokter di Kabupaten Bantul sudah tercukupi. Sedangkan rasio dokter spesialis sebesar 22/100.000 penduduk di tahun 2019 dan terus meningkat ditahun 2020 menjadi 32/100.000 penduduk.

Tabel 2.3.11 Jumlah Dokter Kabupaten Bantul tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Dokter Umum	103	186	261	235	307	417
2.	Jumlah Dokter Spesialis	46	149	206	201	215	304
3.	Jumlah Penduduk	971.511	928.676	931.356	939.718	945.441	954.706
4.	Rasio Dokter Umum (per 100.000 penduduk)	11	20	28	25	32	44

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	5,0	16	22	21	22	32

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Selain itu, data penting yang terkait dengan pencapaian sasaran peningkatan angka harapan hidup adalah cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 838.108 jiwa pada tahun 2020.

Tabel 2.3.12 Daftar Kepesertaan Jaminan Kesehatan

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2018	2019	2020
1.	Jaminan Kesehatan Nasional			
1.1.	Penerima Bantuan Iur (PBI) APBN	499.511	443.462	442.505
1.2	Penerima Bantuan Iur (PBI) APBD	61.280	46.674	50.887
1.3	Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah dan Badan Usaha	199.542	216.212	224.980
1.4	Bukan Pekerja	35.842	32.340	31.048
1.5	Mandiri/PBPU	87.849	88.543	88.688
Jumlah penduduk yang terdaftar JKN		884.024	827.231	838.108
Total Jumlah penduduk Kab Bantul		927.181	945.441	952.980
Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN		43.157	118.210	114.872
Persentase		95,35 %	87,50 %	87,95 %

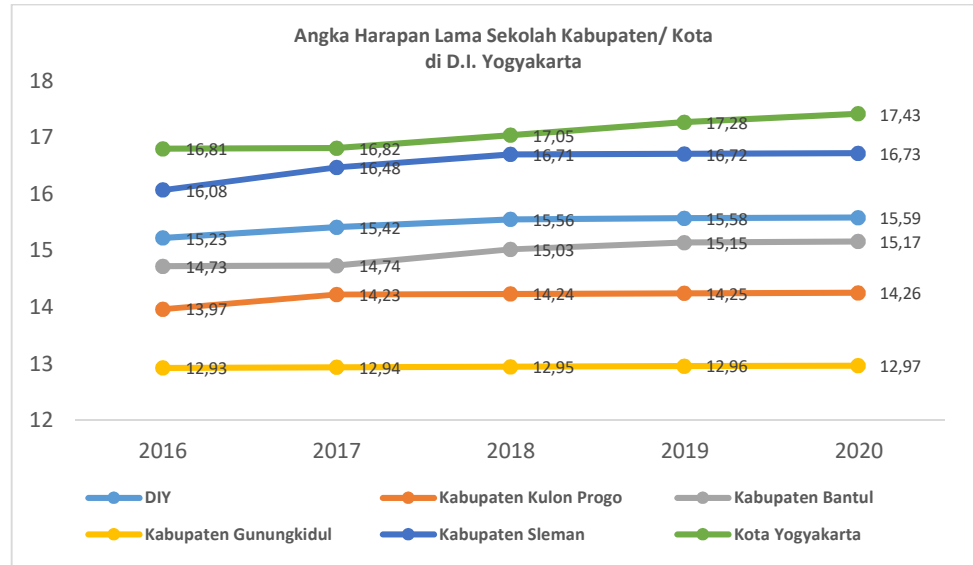
Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

c. Angka Harapan Lama Sekolah

Sasaran untuk mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 menargetkan sebesar 15,38 terealisasi sebesar 15,17 atau 98,63% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Angka Harapan lama Sekolah Bantul sebesar 15,17 tahun, artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 15,17 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu

menempuh jenjang pendidikan hingga Diploma III.

Kabupaten Bantul masih tetap berada pada posisi ketiga, apabila dibandingkan dengan angka kabupaten lain se DIY, angka HLS Kabupaten Bantul masih berada di bawah angka Provinsi D.I Yogyakarta (15,59 tahun).



Grafik 2.3.8 Trend Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020

Angka HLS Kabupaten Bantul tahun 2020 meningkat 0,29 poin dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.

Pembangunan pendidikan telah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan, yang dapat digambarkan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3.13, antara lain melalui:

Tabel 2.3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2020	
		2019	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	APK SD/MI	95,26	96,40	92,77	96.23
2.	APK SMP/MTs	101,38	95,30	97,24	102.04
3.	APM SD/MI	85,86	84,65	86,55	102.24
4.	APM SMP/MTs	76,80	68,20	76,31	111.89
5.	Angka Melanjutkan SD/MI	108,56	100	101,27	101.27
6.	Angka Melanjutkan SMP/MTS	111,18	100	105,93	105.93
7.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,54	8,99	9,55	106.23

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021;

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI. Pada tahun 2020 mentargetkan sebesar 96.40% terealisasi sebesar 92,77%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 96,23%. Realisasi diperoleh dari data Jumlah siswa di jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 80107 siswa dibanding dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 86340 jiwa. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 95,26%, capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,73%.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 95.30% realisasi sebesar 97,24, tercapai 102,04%. Realisasi diperoleh dari data Jumlah siswa di jenjang SMP/MTs/Pkt.B dan SMP sebanyak 39891 siswa dibanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 41023 jiwa sehingga terealisasi sebesar 97,24 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 101,38 %, maka capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,14 %.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 84.65%, realisasi sebesar 86,55, tercapai 102,24% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi diperoleh dari data Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/ Paket A sebanyak 74739 siswa dibanding dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn sebanyak 86340 jiwa sehingga

terrealisir sebesar 86,55%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 85,86 %, maka capaian tahun 2020 meningkat 0,69%.

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 68,20%, realisasi sebesar 76,31, tercapai 111,89% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi diperoleh dari data Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Pkt.B sebanyak 31309 siswa dibanding dengan Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 41023 jiwa sehingga terealisasi sebesar 76,31 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 76,80%, maka capaian tahun 2020 menurun 0,51 %.
5. Capaian Nilai Angka melanjutkan rata-rata SD/MI ke SMP/Mts. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 109, realisasi sebesar 101,27, tercapai 101,27%. Realisasi diperoleh dari data Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 13907 siswa dibanding dengan lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 13732 siswa sehingga terealisasi sebesar 101,27%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 108,56%, maka capaian tahun 2020 menurun 7,29%.
6. Capaian Nilai Angka melanjutkan rata-rata SMP/MTs ke SMA/SMK. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 111,50% realisasi sebesar 105,93%. Realisasi diperoleh dari data Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 13533 siswa dibanding dengan lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 12775 siswa. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 111,18%, maka capaian tahun 2020 menurun 5,25 %.
7. Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 8,99, realisasi sebesar 9,55, tercapai 106.23 atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 9,54%, maka capaian tahun 2020 meningkat 0,01%. Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah diperoleh dari tabel Index Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2019/2020 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul.

Tabel 2.3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2020	
		2019	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Persentase Kelulusan SD/ MI	100	100	100	100
2.	Persentase Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100
3.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,004	0,004	0,004	100
4.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,01	0	0	100
5.	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	4	4	4	100

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021;

1. Tingkat Kelulusan SD/MI Pada tahun 2020 mentargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 14.169 siswa sehingga terealisasi sebesar 100%, kelulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata hasil belajar pada kelas 4, 5 dan 6 bukan dengan Ujian Nasional. Jika dibanding dengan tahun 2019 bahwa tingkat Kelulusan SD/MI terealisasi 100%, sehingga capaian pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan.
2. Tingkat kelulusan SMP/MTs pada Tahun 2020 mentargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data. Jumlah lulusan pada jenjang SMP/Mts sebanyak 12.428 siswa sehingga terealisasi sebesar 100%, kelulusan tahun 2020 tidak ditentukan dengan UNBK tetapi dengan menggunakan nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas 7,8 dan 9. Jika dibanding dengan tahun 2019 bahwa tingkat Kelulusan SMP/MTs terealisasi 100%, sehingga capaian pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan.
3. Angka Putus Sekolah SD/MI pada tahun 2020 mentargetkan sebesar 0,004% terealisasi sebesar 0,004 % , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 0,004 % diperoleh

dari data Jumlah anak putus sekolah pada jenjang SD/ MI sebanyak 3 siswa, sedangkan jumlah siswa SD/MI di jenjang SD/MI sebanyak 80.107 siswa sehingga terealisasi sebesar 0,004 % Jika dibanding dengan tahun 2019 bahwa angka putus sekolah terealisasi 0,004 % angka putus sekolah ditahun 2020 tidak mengalami perubahan.

4. Angka Putus Sekolah SMP/MTs. pada tahun 2020 mentargetkan sebesar 0 % terealisasi sebesar 0 %, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100 % dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 0 % diperoleh dari data Jumlah anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTs sebanyak 0 siswa, sedangkan jumlah siswa SMP/MTs di jenjang SMP/MTs sebanyak 39.891 siswa sehingga terealisasi sebesar 0 % Jika dibanding dengan tahun 2019 bahwa angka putus sekolah terealisasi 0 % angka putus sekolah ditahun 2020 tidak mengalami perubahan.
5. Jumlah Prestasi Non Akademik Tingkat Nasional pada Tahun 2020 mentargetkan juara sejumlah 4 terealisasi juara sejumlah 4, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100 % dengan kategori sangat tinggi.

Besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direncanakan akan dinaikkan secara bertahap sehingga pada lima tahun ke depan besaran BOP sudah bisa mendekati Unit Cost Standar untuk masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2020 untuk jenjang SD/MI besaran BOP dan BOS sebesar Rp. 1.450.000,00/siswa/tahun sudah mencapai 85,29% dari Unit Cost Standar, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS besaran BOP dan BOS sebesar Rp1.750.000/siswa/tahun sudah mencapai 70,00% dari Unit Cost Standar.

Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Bantul salah satunya adalah perpustakaan. Selain Kantor Perpustakaan Umum, juga diadakan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Selain perpustakaan, terdapat 30 pojok baca (taman bacaan) Masyarakat juga memberikan dukungan terhadap perwujudan akses dan mutu pendidikan masyarakat yang berkualitas.

Tabel 2.3.15 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bantul

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1
2	Perpustakaan Desa	75
3	Perpustakaan SD/MI	395
4	Perpustakaan SMP/MTs	116
5	Perpustakaan SMA/SMK/MA	99
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56
8	Perpustakaan Komunitas	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7
Jumlah		864

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021;

Sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak 24 perpustakaan yang terakreditasi.

Permasalahan :

1. Kondisi Pandemi Covid-19 belum dapat diprediksi kapan berakhirnya
2. Biaya Operasional pendidikan masih belum tercapai
3. Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT
4. Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM;
5. Untuk memenuhi SPM pendidikan dasar masih diperlukan pemenuhan sarana-prasarana seperti laboratorium, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan.
6. Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan

Solusi :

1. Meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19
2. Perencanaan anggaran pendidikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
3. Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM.
4. Kesejahteraan bagi GTT dan PTT diupayakan penambahan insentif secara bertahap.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap.

6. Optimalisasi pendidik dan pemberdayaan guru kontrak oleh dewan sekolah.

Kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas.

d. Angka Kemiskinan

Target angka kemiskinan pada tahun 2020 mengalami perubahan yang awalnya 9,59% berubah menjadi 13,94% dikarenakan pandemi Covid-19. Untuk realisasi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Bantul sebesar 13,50 %. Hal ini dapat diartikan meskipun angka kemiskinan naik sebesar 0,58% tetapi angka tersebut masih dibawah target angka perubahan. Dari data tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Kabupaten Bantul mampu menekan peningkatan jumlah warga miskin.

Selanjutnya konsentrasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan selama Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Bantul adalah:

1. Pemberian Tambahan Makanan Boga Sehat
2. Pendampingan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Tabel 2.3.16 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bantul Tahun 2014 – 2020

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bl)
2014	15,89	2,19	0,48	301.986
2015	16,33	3,16	0,89	312.514
2016	14,55	2,02	0,41	332.057
2017	14,07	2,21	0,56	347.476
2018	13,43	2,17	0,46	369.480
2019	12,92	1,87	0,43	381.538
2020	13,50	1,85	0,43	405.613

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021;

Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rerata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Adapun Keparahan Kemiskinan (P2), adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rerata pengeluaran warga dari garis kemiskinan, serta semakin tinggi ketimpangan di antara warga prasejahtera. Pada tahun 2020 Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bantul menunjukkan angka yang semakin membaik yaitu sebesar 1,85 dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,87. Hal tersebut dikarenakan selama tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 telah didistribusikan bantuan sosial yang cukup merata. Bantuan Sosial tersebut dengan alokasi APBN, APBD I, APBD Kabupaten, dan APBDes.

Tabel 2.3.17 Data Jumlah Bantuan Sosial Terdampak Covid-19

NO	Nama Bantuan Sosial	Jumlah (KK)	Sumber Anggaran
1	Bantuan Sosial Tunai (BST)	17.328	Kementerian Sosial RI
2	Sembako (BPNT)	102,805	Kementerian Sosial RI
3	Top Up DIY	36.858	APBD DIY
4	BLT APBD	5.340	APBD Bantul
5	BLT DD (Dana Desa)	17.886	APBDES

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021;

Tabel 2.3.18 Data Kemiskinan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)
1	BAMBANG LIPURO	6.698
2	BANGUNTAPAN	8.224
3	BANTUL	6.309
4	DLINGO	9.775
5	IMOGIRI	13.949
6	JETIS	8.895
7	KASIHAN	10.836
8	KRETEK	3.562
9	PAJANGAN	8.897
10	PANDAK	11.453
11	PIYUNGAN	7.708
12	PLERET	8.731
13	PUNDONG	6.516

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)
14	SANDEN	5.110
15	SEDAYU	6.015
16	SEWON	10.579
17	SRANDAKAN	5.403
JUMLAH		138.660

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021;

Dari Tabel 2.3.18 tersebut diatas dapat dilihat kapanewon jumlah jiwa miskin tertinggi ada pada kecamatan Imogiri, Pandak, dan Sewon. Sedangkan jumlah jiwa miskin yang rendah terdapat di Kretek, Srandakan, Sanden dan Srandakan. Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul di tahun 2020 antara lain:

1. Program Keluarga Harapan
2. Bantuan Pangan Non Tunai
3. Program Bantuan Iuran
4. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
5. Program Boga Sehat
6. Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin
7. Padat Karya
8. Pelatihan

Dikarenakan pandemi covid-19 terdapat program penanggulangan kemiskinan yang mengalami refocusing, yaitu Program Pelatihan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Permasalahan dalam pengentasan kemiskinan :

1. Belum semua stakeholder melek dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan data dasar untuk penentuan sasaran program.
2. Program pengentasan kemiskinan yang berkesinambungan belum optimal
3. Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi program pengentasan Kemiskinan, sehingga berdampak pada alur perencanaan program penanggulangan kemiskinan

Solusi :

1. Memperkuat fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daritingkat kabupaten sampai dengan tingkat dusun untuk bersama-sama melaksanakan dan mendukung pemutakhiran DTKS.
2. Meningkatkan fungsi koordinasi dan membuat Peta Proses Bisnis, yang di dukung oleh Tim Kreatif dari OPD pengampu program penanggulangan kemiskinan.
3. Penyusunan peta masalah, dan implementasi Monitoring dan Evaluasi dengan menggunakan kertas kerja.

e. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan pengamatan terhadap Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2020 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai sebesar Rp.19,25 triliun sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai sebesar Rp.26,59 triliun.

Tabel 2.3.19 PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan
1	2016	20,913,085.87	8.22	16,375,513.12	5.09
2	2017	22,611,706.76	8.12	17,209,871.55	5.10
3	2018	24,443,273.98	8.10	18,150,877.00	5.47
4	2019	26,345,477.41	7.78	19,154,769.08	5.53
5	2020*)	26,588,571.54	0.92	19,248,827.17	0.49

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021; *) angka proyeksi Bappeda

Tabel 2.3.20 Komponen yang Mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2015-2020

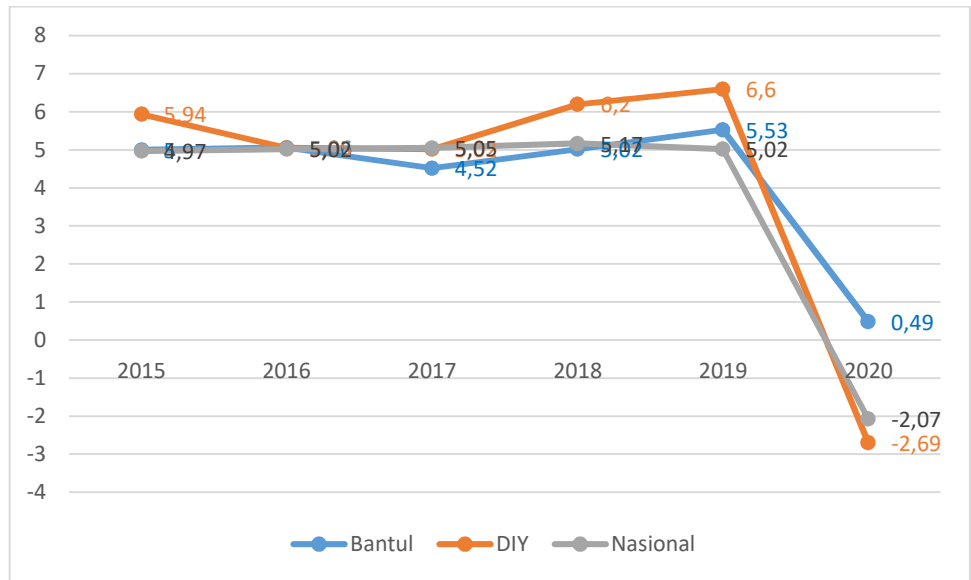
Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**	2020*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,12	1,52	2,50	2,00	0,13	8.54
B	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,35	0,06	1,57	-0,27	-8.69
C	Industri Pengolahan	2,67	5,43	6,39	5,52	5,38	-2.54

D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,08	15,58	3,99	4,85	4,73	-4.65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,95	2,96	3,18	5,16	8,25	16.85
F	Konstruksi	4,05	4,07	5,93	7,24	5,17	-11.06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,77	6,54	5,79	5,64	5,19	-1.12
H	Transportasi dan Pergudangan	3,80	4,23	3,88	5,51	6,46	-13.69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	6,19	5,70	6,75	8,68	-10.40
J	Informasi dan Komunikasi	5,65	8,41	5,87	6,18	7,29	20.93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	4,65	2,82	6,59	9,97	11.72
L	Real Estate	6,87	5,82	4,97	5,41	6,43	8.99
M,N	Jasa Perusahaan	7,06	4,26	4,27	5,37	7,38	-2.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	5,84	4,98	4,55	3,42	-7.30
P	Jasa Pendidikan	7,80	2,95	5,16	6,08	6,65	6.36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	5,20	5,13	4,62	7,02	16.80
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,41	6,02	5,61	7,14	6,09	-19.15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,97	5,05	5,10	5,47	5,53	0.49

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021; *) angka proyeksi Bappeda

Kondisi tingkat inflasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 2,71. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan angka nasional. Pencapaian inflasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2019 (

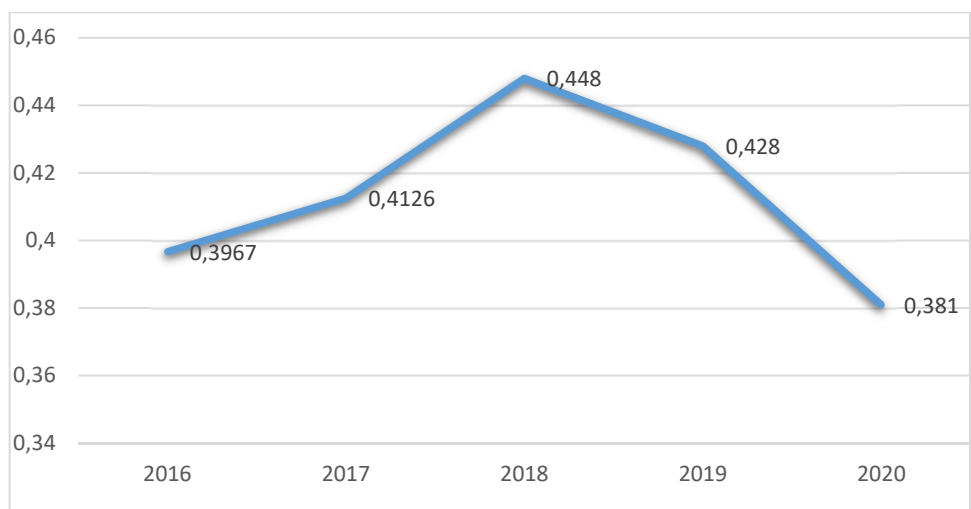
Grafik 2.3.9) menunjukkan angka yang selalu lebih rendah dari inflasi DIY dan nasional, hal ini menandakan tingkat tingkat keberhasilan Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya penendalian inflasi daerah.



Grafik 2.3.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dan Nasional Tahun 2016-2020

f. Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)

Trend indeks gini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 (Grafik 2.3.10) mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks gini mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2020, hal ini berarti ketimpangan pendapatan semakin tinggi atau distribusi pendapatan semakin tidak merata. Indeks Gini pada tahun 2019 sebesar 0,428 dan turun sebesar 0,381 pada tahun 2020.



Grafik 2.3.10 Trendline Gini Ratio Kabupaten Bantul tahun 2016-2020

Capaian ini masih dalam batas kewajaran dan merupakan implikasi dari cepatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti oleh bukan mayoritas penduduk. Capaian ini juga merupakan implikasi dari transformasi struktur ekonomi yang masih terus berproses dari sektor primer dan sekunder ke arah tersier.

Permasalahan pada sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan adalah kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan dikarenakan pengaruh ekonomi dunia dan Pandemi covid 19. Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan peningkatan daya saing daerah, melalui penguatan produk lokal daerah; percepatan dan pemerataan investasi daerah serta peningkatan infrastruktur selain itu program bantuan sosial bagi masyarakat miskin sangat penting untuk mempersempit ketimpangan pendapatan .

Upaya meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan.

Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
5. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

g. **Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020 dalam RPJMD ditargetkan sebesar 23% akan tetapi dengan terjadinya Pandemi covid 19 target tersebut mengalami penyusutan menjadi -67% terealisasi -54,55% atau 104,05%. Sedangkan target akhir tahun RPJMD saat penyusunan RKPD 2021 diprediksi pariwisata sudah pulih sehingga target tetap 24 persen maka capai tahun 2020 terhadap akhir tahun RPJMD sebesar -227.29%

Dalam pengembangan wisata yang aman dan sehat maka perlu mendapat perhatian dan perlu diberdayakan dalam penerapan protokol kesehatan. Di lokasi wisata perlu perhatian apakah itu wisata alam, wisata non alam, wisata kuliner, atau wisata budaya, atau kombinasi dari beberapa wisata. Pada tahun 2020 kunjungan wisata di Kabupaten Bantul turun drastis dari tahun sebelumnya, ini dipengaruhi antara lain :

1. Penutupan obyek wisata
2. Pembatasan jam operasional obyek wisata
3. Pembatasan jumlah pengunjung obyek wisata
4. Minimnya wisatawan yang datang dari luar daerah maupun manca negara

Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata dengan berbagai strategi antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata. selain itu penerapan protocol kesehatan dilaksanakan di obyek wisata seperti pembuatan tempat cuci tangan yang memadai, pengecekan suhu saat masuk obyek wisata dan pembuatan posko pengawasan untuk memastikan penerapan protocol kesehatan oleh pengunjung.

Desa wisata di Kabupaten Bantul telah dibentuk. Sampai saat ini Desa Wisata di Bantul sebagai salah satu pengembangan destinasi wisata baru di Bantul sebanyak 43 desa wisata. Kecuali itu juga banyak adanya homestay yang juga mendukung kenaikan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.3.21 Obyek Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Daya Tarik Wisata	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan	Keterangan
1	Alam	20	20	25	32	55	Unit	
2	Buatan	54	59	59	84	129	Unit	

No.	Usaha Pariwisata						Satuan	
1	Hotel bintang	1	1	3	3	3	Unit	Sudah mempunyai ijin
2	Hotel non-bintang	94	117	56	56	56	Unit	Sudah mempunyai ijin
3	Restoran/rumah makan	199	225	142	142	142	Unit	Sudah mempunyai ijin
4	Jasa perjalanan wisata	25	67	33	33	33	Unit	Sudah mempunyai ijin

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2019 mencapai 5.166.615 orang menjadi 2.348.313 orang pada tahun 2020 dengan penyebaran kunjungan wisatawan di obyek wisata termasuk di desa wisata se Kabupaten Bantul (tidak hanya di obyek wisata yang bertribusi). Sedangkan jumlah PAD yang disumbangkan tahun 2019 sebesar Rp. 31.756.578.250,00, dan pada tahun 2020 menjadi 16.. Penurunan jumlah pendapatan dikarenakan pada tahun 2020 adanya pandemi covid-19 sehingga target kunjungan wisatawan dan pendapatan diturunkan. Namun dari target tersebut realisasinya tercapai dan melebihi sampai 138,14% dari target perubahan.

Tahun ini banyak kegiatan event di destinasi wisata maupun promosi pariwisata baik dalam maupun luar daerah yang tidak dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi covid-19.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung akselerasi perekonomian Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bantul yang dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan dunia kepariwisataan Kabupaten Bantul yang cukup dinamis serta berkesinambungan diharapkan

dapat memberikan peran yang lebih konstruktif dari sektor ini dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bantul dimasa mendatang.

Tabel 2.3.22 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah PAD (Rp.)
2016	2.800.800	12.739.875.250,00
2017	3.711.384	17.090.253.000,00
2018	4.204.422	29.066.376.750,00
2019	5.166.615	31.756,578.250,00
2020	2.348.313	16.874.969.250,00

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Tabel 2.3.23 Prestasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selama Tahun 2020

No	Ajang Kegiatan	Tingkat	Prestasi
1	Lomba Desa Wisata “Desa Wisata Kaki Langit Mangunan”	DIY	Juara I
2	Penghargaan Apresiasi Pesona Destinasi Indonesia “Desa Wisata Kaki Langit Mangunan”	Nasional	Juara III
3	Lomba Homestay “Homestay Sahara”	Nasional	Juara V
4	Lomba Pokdarwis “Pokdarwis Wukirsari”	Nasional	Juara V
5	Anugerah Pesona Indonesia “Surga Tersembunyi Terpopuler”	Nasional	Juara II
6	Anugerah Pesona Indonesia “Kampung Adat Terpopuler”	Nasional	Juara III
7	Anugerah Pesona Indonesi kategori Cinderamata Terpopuler “Kerajinan Bambu Munthuk Dlingo”	Nasional	Juara II
8	Lomba Homestay “Rejo” Kaki Langit, Mangunan	Nasional	Juara I
9	Lomba Homestay “Rejo” Kaki Langit, Mangunan	DIY	Juara I
10	Lomba Desa Wisata “Desa Wisata Kreet”	DIY	Juara II
11	Lomba Homestay “Homestay Nara” Mangunan	DIY	Juara III
12	Lomba Pokdarwis “Pokdarwis Santan”	DIY	Juara III
13	Lomba Desa Wisata “Desa Wisata Tapak Tilas” Mangunan	DIY	Juara IV

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Permasalahan :

1. Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah seperti RDKP, RTOW.
2. Belum meratanya perwujudan Sapta Pesonadi setiap obyek wisata dan pokdarwis di Kabupaten Bantul seperti penyediaan sarana dan prasarana

kebersihan, juga pembinaan kelembagaan pengelolaan obyek wisata

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana obyek wisata seperti penambahan fasilitas untuk wisata edukasi di obyek wisata

Solusi :

1. Penyusunan RDKP untuk 17 kecamatan dan RTOW untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi
2. Peningkatan sarana dan prasarana wisata serta penguatan kapasitas SDM dan lembaga pengelolaan obyek wisata, dengan melaksanakan sosialisasi Sapta Pesona, Sadar Wisata dan syarat terbentuknya Desa Wisata
3. Penguasaan lahan perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangnya, sehingga pembangunan destinasi wisata lebih optimal
4. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung serta meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pengelola obyek wisata. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung serta meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pengelola obyek wisata.

Strategi yang dilakukan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan promosi Pariwisata dan pengelolaannya.

h. Cakupan Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang memiliki andil dalam meningkatkan perekonomian daerah. Kabupaten Bantul merupakan daerah yang potensial untuk industri kreatif, karena memiliki sumber daya alam yang berlimpah, serta lokasi dan jenis industri yang tersebar juga bervariasi. Keunggulan Industri Kecil Menengah (IKM) dari Bantul adalah pada pendekatan pasarnya dan pembinaan IKM di seluruh wilayah dengan baik.

Pandemi Covid 19 yang menyerang seluruh negara di dunia dan juga Indonesia membuat perekonomian pada hampir semua daerah turun termasuk Kabupaten Bantul. Secara umum, industri kreatif merupakan industri yang memanfaatkan kreativitas, bakat, dan kemampuan individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini mengeksploitasi hasil karya

seseorang seperti kerajinan tangan, karya tulis, musik, seni pertunjukan, film, kuliner, dan lain-lain. Kabupaten Bantul memiliki beragam industri seperti industri kerajinan dimana sebagian besar produk kerajinan di DIY berasal dari Kabupaten Bantul, mulai dari sentra keramik, kerajinan kulit, asesoris keris, batik, kerajinan bamboo, kayu batik, dan lain-lain.

Keberadaan ekonomi kreatif sebenarnya mampu menjadi pilar perekonomian, akan tetapi dalam kondisi pandemi tahun 2020 ini beberapa sektor usaha turun drastis yang mengakibatkan ekonomi/industri kreatif terutama pada sub sektor kriya, kuliner dan fesyen juga ikut menurun baik dari sisi unit usahanya maupun dari jumlah produksinya. Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan dukungan yang kuat terhadap pertumbuhan, penguatan dan pengembangan Industri kreatif di Kabupaten Bantul pada masa pandemi saat ini yaitu dengan inovasi, adaptasi dan kolaborasi.

Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas dengan indikator Cakupan Industri Kreatif mengalami pencapaian kinerja Sangat Tinggi. Capaian Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 46.2%, Hal ini menunjukkan bahwa 46.20% dari industri yang ada di Kabupaten Bantul merupakan industri kreatif. Dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 50%. capaian industry kreatif pada tahun 2020 telah menyumbang 92.4 %.

Tabel 2.3.24 Cakupan Industri Kreatif Tahun 2017-2020

KETERANGAN	2017	2018	2019	2020
Jumlah Unit Usaha Industri	22,310	23,535	24,359	24,359
Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif	9,171	10,097	11,253	11,253
Prosentase Industri Kreatif	41,11 %	42,90 %	46,2 %	46,2 %

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Capaian indikator cakupan industri kreatif berasal dari jumlah industri kreatif sebanyak 11,253 unit dibagi 24.359 unit. Unit usaha tersebut terdiri dari pangan 9.712 unit, sandang 1.092 unit, kerajinan umum 8.574 unit, kimia dan bahan bangunan 3.488 unit, logam dan jasa 1.493 unit

Faktor pendorong dalam pencapaian IKU Cakupan Industri Kreatif :

1. Adanya program penanganan covid-19 dari pemerintah pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Bantul mempunyai keunikan, ciri khas dan kreatif serta ada sentuhan inovasi dalam menghasilkan produk, disamping itu sifat struggle IKM dalam menghadapi pandemi sangat mendorong masih eksisnya keberadaan mereka.
3. Kemudahan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
4. Mengikuti seleksi Kriya KaTa (Kabupaten Kota) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Baparekraf dan hasilnya Kabupaten Bantul mendapat apresiasi nilai tertinggi di sektor kriya

Permasalahan :

Dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Bantul, permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Penutupan tempat wisata di awal pandemi berimbas di penurunan nilai produksi industri kreatif karena tidak adanya wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke tempat wisata.
2. Daya beli masyarakat turun dikarenakan penurunan pasar domestik mengakibatkan penurunan kapasitas produksi dan pengurangan tenaga kerja.
3. Penurunan permintaan terhadap barang mereka membuat arus kas pelaku ekonomi kreatif ikut tertekan
4. Konsep pembinaan Kabupaten/Kota Kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kurang komprehensif dan tidak berkelanjutan.

Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif antara lain :

1. Penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan kegiatan industri kreatif.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mulai membuka tempat wisata pada

kurun waktu beberapa bulan ini dengan membatasi jumlah pengunjung, sehingga industri kreatif mulai menggeliat kembali.

3. Kebijakan Pemerintah dalam kondisi pandemi terutama yang berpihak kepada pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan ketegasannya.
4. Aktualisasi kolaborasi antar aktor akademisi, pemerintah, pelaku bisnis, komunitas dan media

Perkembangan industri kreatif pada era new normal dapat dicapai melalui beberapa strategi yaitu :

1. Menumbuhkan wirausaha pemula atau inovasi usaha di sektor industri kreatif
2. Penguatan Industri Kreatif melalui kolaborasi dan penguatan institusi dengan merumuskan kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif
3. Peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan karya produk
4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta penguatan kelembagaan
5. Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang berkembangnya industri kreatif.

i. Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan

Pertumbuhan produksi tanaman pangan kinerjanya tercapai 264,55% dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi. Dari target 0,1025%, realisasi tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi tanaman pangan mencapai 0,71%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 689,32% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Berikut adalah tabel lengkap dari luas tanam, produksi dan produktivitas dari ketiga komoditas tersebut.

Pertumbuhan produksi tanaman pangan pada Tahun 2020 menunjukkan keberhasilan, dimana capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang Sangat Tinggi, dari target 0,1025 % terealisasi 0,7 % Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 689,32% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan produksi

padi di mana pada tahun 2020 terjadi peningkatan produksi padi sebesar 1,2 % atau naik sebesar 2.275 ton dibandingkan tahun 2019. Dari produksi padi sebesar 188.089 ton GKG menjadi 190.364 ton GKG. Peningkatan produksi padi tahun 2020 ini disebabkan kondisi iklim yang kondusif (curah hujan normal), distribusi pupuk subsidi lancar dan bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik. Selain itu, organisme pengganggu tanaman (OPT) terkendali dengan adanya Gerakan-gerakan Pengendalian (Gerdal) diberbagai kelompok seluruh Kabupaten Bantul. Berikut adalah tabel lengkap dari luas tanam, produksi dan produktivitas dari ketiga komoditas tersebut.

Tabel 2.3.25 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2018-2020

No.	Komoditas	Uraian	Tahun			Ket.
			2018	2019	2020*	
1	Padi	Luas Panen	31.379,3	29.597	30.077	Ha
		Produktivitas	59,97	63.55	63.29	ku/ha
		Produksi (GKG)	188.183	188.089	190.364	Ton
		Produksi beras	120.474,7	120.377		Ton
2	Jagung	Luas Panen	3.565,1	4934	3.452	Ha
		Produksi (pipilan)	26.086	34.903	34.583	Ton
		Produktivitas	73,17	70,74	100,18	ku/ha
3	Kedelai	Luas Panen	1.213,6	909	616	Ha
		Produksi (wose)	1.883	1445	1086	Ton
		Produktivitas	15,52	15.90	17,63	ku/ha

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Sementara itu, produksi jagung pada tahun 2020 adalah 34.583 ton sedangkan tahun 2019 adalah 34.903 ton sehingga bisa dikatakan produksi jagung mengalami penurunan yaitu sebesar 0,9 % atau turun sebesar 320 ton dibandingkan tahun 2019. Penurunan produksi jagung terjadi akibat musim tanam jagung yang mundur satu bulan, menyebabkan terjadinya serangan penggerek batang (Spedhotera glytura / eksigua) pada fase vegetatif. Ditambah

lagi dengan mundurnya pemupukan karena mulai bulan September diterapkan Kartu Tani sehingga petani kesulitan mengakses kebutuhan pupuk. Di sisi lain, produktivitas jagung meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 30,06 ku/ha. Peningkatan produktivitas tersebut disebabkan oleh penggunaan kualitas unggul benih hibrida dan budidaya yang lebih insentif.

Selain tanaman padi dan jagung, komoditas yang termasuk tanaman pangan unggulan Kabupaten Bantul adalah kedelai. Produksi kedelai, pada tahun 2020 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Penurunan produksi kedelai mencapai 24,84% atau 359 ton. Produksi kedelai menurun karena penurunan luas panen yang disebabkan oleh penurunan luas tanam. Luas tanam yang turun disebabkan oleh minat petani yang rendah untuk budidaya kedelai, hal tersebut dikarenakan harga jual panen yang rendah hasil produksi kurang diminati pengrajin tahu dan tempe, penanganan panen dan pasca panen yang relatif sulit.

Upaya yang dilakukan demi peningkatan produksi tanaman pangan ini diantaranya dengan penyediaan berbagai prasarana dan sarana pertanian (seperti pembangunan saluran irigasi), pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani mulai dari on farm sampai dengan off farm, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pengendalian hama dan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Selain itu, dukungan terhadap penyediaan benih berkualitas senantiasa dilakukan oleh UPT Balai Benih Pertanian (BBP). Pada tahun 2020, UPT BBP mampu memproduksi benih padi sebanyak 98,905 ton terdiri dari benih dasar (BD) dan benih pokok (BP), benih yang siap dipasarkan, sebagai berikut :

Tabel 2.3.26 Produksi Benih Padi UPT BBP Tahun 2020

No	Varicatas	Jumlah Produksi (ton)		
		BD	BP	Total
1	Situ Bagendit	1.725	16.815	18.540
2	Sunggal	-	22.680	22.680
3	Mekongga	1.280	20.380	21.660
4	Ciherang	-	19.160	19.160
5	Pepe	895	8.820	9.715
6	Inpari 19	595	-	595

No	Varicatas	Jumlah Produksi (ton)		
		BD	BP	Total
7	Inpari 24	1.815	-	1.815
8	Inpari 33	-	4.740	4.740
Total (ton)		6.310	92.595	98.905

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Pada tahun 2020 terdapat 9 kelompok penangkar benih padi. Total luasan yang dikelola oleh kelompok penangkar seluas 22 ha, yang merupakan total luasan dalam satu kali musim tanam. Kelompok agribisnis penangkar yang bekerjasama dengan UPT Balai Benih Pertanian melakukan tanam benih padi tiga kali dalam setahun.

j. **Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura**

Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura menunjukkan keberhasilan, dimana pada tahun 2020 capaian kinerjanya tercapai 264,55 % dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi. Pencapaian ini telah menyumbang sebesar 258,67 % dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021. Produksi Tanaman Hortikultura pada tahun 2020 meningkat sebesar 2,5 % dari sebesar 15.805,41 ton pada tahun 2019 menjadi 16.265,1 ton di tahun 2020.

Data luas panen, produksi dan produktivitas tanaman hortikultura sebagai berikut :

Tabel 2.3.27 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Hortikultura di Kabupaten Bantul tahun 2018-2020.

No.	Komoditas	Uraian	Tahun			Ket
			2018	2019	2020*	
1	Bawang Merah	Luas Panen	835	893	860	Ha
		Produksi	7.979,8	9.427	9.487,6	Ton
		Produktivitas	9,61	10,56	11,03	ton/ha
2	Cabai Merah	Luas Panen	402	298	561,5	Ha
		Produksi	7.979,8	1.166,41	1.667,70	Ton

No.	Komoditas	Uraian	Tahun			Ket
			2018	2019	2020*	
		Produktivitas	4,79	3,91	2,97	Ton/ha
3	Pisang	Produksi	5.902,90	5.211,40	5.109	Ton

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 0,64 % atau 60,6 ton. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan produktifitas sebesar 4,45 %. Peningkatan produksi ini karena penerapan sistem tata tanam tepat, musim yang kondusif, OPT terkendali, minat budidaya bawang merah petani tinggi karena harga jual tinggi (adanya pandemi covid-19 mengakibatkan tidak ada impor).

Produksi cabai merah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 1.166,41 ton pada tahun 2019 menjadi 1.667,70 ton pada tahun 2020. Peningkatan produksi ini karena adanya bantuan benih sebanyak 35.000 polybag dari Kementan RI, penerapan sistem tata tanam tepat, musim yang kondusif, OPT terkendali, minat budidaya cabai merah petani tinggi karena harga jual tinggi. Tingginya harga bawang merah juga dipengaruhi oleh dampak pandemi covid-19 di mana tidak ada impor bawang merah sehingga kebutuhan bawang merah hanya dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Pisang juga mengalami penurunan produksi sebesar 1,96 % dari produksi sebesar 5.211,40 ton pada tahun 2019 menjadi 5.109 ton pada tahun 2020. Penurunan pisang ini dipengaruhi oleh cuaca iklim yang tidak mendukung produksi dimana pada tahun 2020 bulan basah lebih panjang dari bulan kering sehingga mengganggu pertumbuhan pohon pisang. Bulan basah yang panjang mengakibatkan pohon pisang kebanyakan air sehingga mengganggu pertumbuhan dan pemasakan buah. Akibatnya produksi pisang juga ikut menurun.

k. **Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan**

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu dan kelapa. Pertumbuhan produksi tanaman

perkebunan kinerjanya tercapai 933,33% dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi. Dari target 0,57%, realisasi tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi tanaman perkebunan mencapai 2,8%. Pencapaian ini telah menyumbang sebesar 800% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Berikut adalah tabel lengkap Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan :

Tabel 2.3.28 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

No.	Komoditas	Uraian	Tahun			Ket.
			2018	2019	2020**	
1	Tembakau Rakyat	Luas Panen	305,00	173	206	ha
		Produksi	2.893,00	1.321,3	1.331,50	ku (rajang kering)
		Produktivitas	9,49	7,64	6,46	ku/ha (rajang kering)
2	Tebu	Luas Panen	1.022,89	1.042,67	1.096	ha
		Produksi	38.430,00	39.971,17	43.881,75	ku (hablur)
		Produktivitas	37,57	38,33	43,88	ku/ha (hablur)
3	Kelapa	Luas Panen	7.050,03	7.107,81	7.195,98	ha
		Produksi	103.931,80	104.794,70	104.967,70	ku (kopra)
		Produktivitas	14,74	14,74	14,71	ku/ha (kopra)

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura pada Tahun 2020 menunjukkan keberhasilan, dimana capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang Sangat Tinggi, dari target 0,3 % terealisasi 2,8 %. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan produksi tembakau. Pada tahun 2020 produksi tembakau mengalami peningkatan sebesar 2,28 % atau 30,2 ku yang disebabkan oleh bertambahnya luas panen pada tahun 2020 sebanyak 33 Ha. Sementara itu, produksi kelapa juga mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 173 ku. Meningkatnya produksi disebabkan oleh meningkatnya luas panen pada tahun 2020 yaitu sebesar 94,17 ha. Selain itu, jumlah kelapa yang produktif berbuah meningkat pada tahun 2020.

Produksi tebu tahun 2020 meningkat cukup signifikan sebesar 9,78 % atau 3.910,31 ku dibanding tahun 2019. Peningkatan produksi ini didukung oleh adanya program Rawat Ratoon yang lebih intensif. Rawat ratoon adalah

pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensif. Dengan adanya program ini terjadi peningkatan rendemen tebu sehingga produksi tebu juga meningkat. Selain itu, cuaca cukup kondusif untuk budidaya tebu pada tahun 2020.

I. Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).

Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas) menunjukkan keberhasilan, dimana pada tahun 2020 capaian kinerjanya tercapai 103,33 % dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Dari target 0,9%, realisasi tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi daging mencapai 0,93 %. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 93% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang dapat diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Produksi daging pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,9 % dari sebesar 15.088,32 ton pada tahun 2019 menjadi 15.288,52 ton.

Peningkatan produksi hasil peternakan menjadi sebuah tuntutan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Peningkatan produksi daging ini didukung oleh adanya peningkatan populasi ternak yaitu melalui program Sikomandan (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yang merupakan program lanjutan dari Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) dan Inseminasi Buatan gratis untuk kambing dan domba. Pada tahun 2020 target untuk Program Sikomandan sudah melebihi target akseptor sebanyak 15.645 dosis, target bunting 10.951 ekor dan lahir 8.761 pedet. Dari target tersebut diperoleh realisasi akseptor sebanyak 39.380 (251,71%), bunting 10.548 (96,32%), dan lahir 13.199 (150,66%). Pemberian bantuan juga dilakukan untuk meningkatkan populasi seperti pemberian ternak domba dan ayam jowo super. Domba yang diberikan sebanyak 100 ekor untuk 4 Kelompok Ternak di Desa Pendowoharjo, Sewon; Desa Timbulharjo, Sewon; Desa Terong, Dlingo dan Desa Sidomulyo, Bambanglipuro. Selain domba juga diberikan bantuan berupa Ayam Jowo Super sebanyak 8.750 ekor ke 14 kelompok yang tersebar di Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sanden, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sedayu.

m. Pertumbuhan Produksi Perikanan

Produksi perikanan tahun 2020 mengalami kenaikan 1,5 % dari produksi tahun 2019, yaitu sebanyak 13.440,60 ton menjadi 13.453,92 ton. Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, sebagai berikut :

1. Produksi perikanan budidaya

Pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 1,5 % dari 13.440.597 kg pada tahun 2019 menjadi 12.629.050 kg pada tahun 2020. Perikanan budidaya yang telah dikembangkan terdiri dari berbagai macam jenis ikan, sebagaimana berikut :

Tabel 2.3.29 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan tahun 2019-2020

No.	Uraian	Jumlah	
		2019	2020*
1	Gurami	1.723.948	1.672.601
2	Lele	7.425.503	7.498.039
3	Nila	2.618.329	2.482.902
4	Patin	42.888	103.535
5	Bawal	218.661	236.653,000
6	Mas	36.828	35.876,000
7	Udang Vaname	374.440	599.444,000
8	Lain-lain	-	-
Jumlah		12.440.597	12.629.050*

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Kenaikan produksi ini didukung oleh adanya peningkatan produksi perikanan budidaya. Hal ini disebabkan adanya penerapan teknologi baru di masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi MATLAIR (hemat lahan dan air) ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik.

Selain itu faktor lain adalah adanya fasilitasi bantuan sarpras budidaya baik dari APBN Pusat maupun APBD I DI Yogyakarta berupa kolam bulat, terpal, benih dan pakan kepada 65 kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Bantul yang meningkatkan luas panen perikanan budidaya dan

meningkatkan produksi perikanan.

2. Produksi Perikanan Tangkap

Pada tahun 2020 terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap dibanding periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,02 ton atau 2,67 %. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan produksi dari ikan ekonomis tinggi seperti ikan bawal dan ikan layur. Selain itu, program restocking ikan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan sehingga pada akhirnya meningkatkan produksi ikan tangkap perairan umum.

Tabel 2.3.30 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Produksi (ton)	
		2019	2020*
1	Produksi tangkap laut	450,90	470,14
2	Produksi tangkap perairan umum	351,95	354,73
Jumlah		802,85	824,87

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Permasalahan :

1. Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah
2. Rendahnya minat generasi muda dalam usaha di bidang kelautan dan perikanan
3. Rendahnya daya saing produk perikanan

Solusi

1. Melaksanakan kampanye “Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)”
2. Melaksanakan sosialisasi/kampanye wirausaha perikanan budidaya serta menciptakan kader-kader nelayan baru dengan mengadakan pelatihan dan magang di kapal.
3. Meningkatkan daya saing produk perikanan dengan melaksanakan :
 - a) Introduksi teknologi budidaya ikan padat tebar hemat lahan dan air (MATLAIR).
 - b) Meningkatkan pemahaman kepada para pelaku usaha perikanan tentang food safety melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara

Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Penanganan Ikan yang Baik.

- c) Mempermudah akses informasi kondisi cuaca dan iklim bagi para nelayan.
- d) Meningkatkan kemampuan nelayan dan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk menangkap ikan di jalur penangkapan ikan II dan III

n. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat yang diukur melalui IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur (IKLI) menunjukkan angka yang baik, di mana pada tahun 2020 capaian kinerjanya sebesar 96,13% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Dari target 78, realisasi tahun 2020 menunjukkan bahwa IKLI telah mencapai 74,98. Dibandingkan dengan capaian tahun 2019, terjadi penurunan sebesar 1,79% yaitu turun dari 76,77% pada tahun 2019 menjadi 74,98% pada tahun 2020. Penurunan ini sebagai dampak adanya pandemi covid 19 karena banyak pembangunan infrastruktur yang di refocusing untuk penanganan penanggulangan penyebaran virus covid 19.

Penentuan IKLI didasarkan pada kepuasan pelayanan infrastruktur sesuai 4 (empat) IKU OPD dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021, yaitu : kondisi jalan kabupaten; kondisi gedung pemerintah; kondisi infrastruktur kawasan kumuh perkotaan dan infrastruktur irigasi. Dari 4 (empat) IKU OPD tersebut digolongkan dalam kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.3.31 Skala Kriteria Nilai IKLI

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKLI	Nilai interval Konversi IKLI	Waktu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1,00 – 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2.	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3.	2,51 – 3, 25	62,51 - 81,25	B	Baik
4.	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Tabel 2.3.32 Nilai Indeks Pelayanan Infrastruktur Gabungan

No	IKU OPD	Indeks Pelayanan Infrastruktur		Mutu Pelayanan Infrastruktur	Kinerja Pelayanan
		Nilai	Konversi (%)		
1	Kondisi jalan kabupaten	2,98	74,66	B	Baik
2	Kondisi gedung pemerintah	3,21	80,21	B	Baik
3	Kondisi infrastruktur kawasan kumuh perkotaan	2,88	72,14	B	Baik
4	Kondisi infrastruktur irigasi	2,92	72,92	B	Baik
Indeks Gabungan		3,00	74,98	B	Baik

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Berdasarkan Tabel 2.3.31 dan diatas, dapat diketahui bahwa mutu pelayanan infrastruktur jalan kabupaten, jalan kabupaten, gedung pemerintah, dan irigasi berada pada kategori ‘B’ dengan kinerja pelayanan ‘Baik’. Mutu pelayanan infrastruktur gabungan di Kabupaten Bantul secara umum berada pada kategori ‘B’ dengan kinerja pelayanan ‘Baik’.

1. Kondisi Jalan Kabupaten

Hasil penilaian kepuasan layanan infrastruktur jalan kabupaten menunjukkan bahwa nilai indeks pelayanan unsur fasilitas penunjang jalan kabupaten mempunyai nilai pelayanan 2,98. Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2020 sepanjang 471km atau 75,42% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 153,47km atau 24,58% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang 624,47km. Sedangkan kondisi jalan perdesaan sebagai salah satu sarana dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap.

Mutu yang baik pada hasil penilaian kepuasan layanan infrastruktur jalan merupakan hasil dari kegiatan baik rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan jalan, jembatan, talud jalan, gorong-gorong maupun drainase jalan. Sedangkan pengukuran penilaian kepuasan layanan infrastruktur jalan kabupaten ditentukan oleh 5 (lima) unsur yaitu : (1) kesesuaian lokasi pembangunan, (2) pengaruh hasil pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan, (3) kondisi/keadaan infrastruktur saat ini, (4) pengaruh proses pembangunan terhadap aktivitas masyarakat, (5) kualitas dan kelengkapan

fasilitas jalan dan (6) keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

2. Kondisi Gedung Pemerintah

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Dari hasil survei IKLI infrastruktur gedung kantor mendapatkan nilai 80,21 dengan kinerja pelayanan “baik”. Namun demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah terutama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya masih kurang memadai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD di Kabupaten Bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun puskesmas.

Indeks kepuasan layanan infrastruktur gedung pemerintah ditentukan berdasarkan 5 (lima) unsur, yaitu: (1) kesesuaian lokasi pembangunan, (2) pengaruh hasil pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan, (3) kondisi/keadaan infrastruktur saat ini, (4) pengaruh proses pembangunan terhadap aktivitas masyarakat, dan (5) keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

3. Kawasan Kumuh

Indeks kepuasan layanan infrastruktur kawasan kumuh perkotaan ditentukan berdasarkan pada 6 (enam) unsur, yaitu: (1) ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori, (2) ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (MCK), (3) kondisi pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), (4) kondisi prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R), (5) kondisi jalan lingkungan, dan (6) ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik).

Kondisi infrastruktur kawasan kumuh perkotaan mendapatkan nilai IKLI sebesar 72,14 dengan kinerja pelayanan “baik”. Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2020 adalah 92,49 % dari target akhir RPJMD yaitu 100% atau tercapai 92,49%. Atau sekitar 73,63 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2017 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2014).

Dalam rangka mengurangi dan mengatasi kawasan permukaan

kumuh di wilayah perkotaan telah dibangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang berasal anggaran APBN. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 4 Rusunawa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan (Pringgolayan) dan Rusunawa Tamanan.

Sedangkan untuk memenuhi layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dilaksanakan bantuan stimulan pembangunan swadaya yang selama ini mendapat anggaran dari pemerintah pusat/daerah. Pada tahun 2020, rumah tidak layak huni dapat tertangani 1.715 unit dengan rincian 1.577 unit dengan sumber dana BSPS Kementerian PUPR, dan 138 unit dari dana DAK bidang Perumahan dan Pemukiman Rakyat.

4. Jaringan Irigasi

Kondisi infrastruktur irigasi mendapat nilai 72,92 dengan kinerja pelayanan “baik”. Kondisi infrastruktur irigasi dibagi dalam beberapa unsur yaitu ketersediaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi, kecukupan kebutuhan air irigasi, pemerataan/distribusi air irigasi, keandalan/kontinuitas air irigasi, serta partisipasi petani pengguna air (P3A) dalam pemeliharaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi.

Permasalahan :

1. Terbatasnya pilihan alternatif pendanaan infrastruktur terutama dimasa pandemi covid 19 ini.
2. Semakin besarnya potensi kerusakan jalan kabupaten, akibat banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah (seperti : material dan tenaga kerja) dalam pemenuhan infrastruktur dasar
4. Belum optimalnya pencapaian target master plan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, dan jaringan irigasi untuk pengurangan ketimpangan wilayah.
5. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan jalan untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi overlapping

pembangunan dan pemeliharannya

6. Belum optimalnya pengelolaan cadangan air irigasi
7. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan irigasi untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi overlapping pembangunan dan pemeliharannya.
8. Masih rendahnya kualitas jasa konstruksi khususnya di bidang pengembangan permukiman

Solusi :

1. Prioritas pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas lokus-lokus ekonomi masyarakat.
2. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur
3. Perlunya pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi serta pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan.
4. Koordinasi dengan instansi/ pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur
5. Optimalisasi sumberdaya lokal dalam pembangunan infrastuktur.

Strategi kedepan guna meningkatkan capaian indikator di atas, diupayakan dengan beberapa hal antara lain :

1. Meningkatkan kecukupan jumlah jalan kabupaten, meningkatkan kenyamanan jalan kabupaten, peningkatan kondisi dan kualitas jalan kabupaten, dan terutama pada fasilitas penunjang jalan kabupaten (PJU, trotoar, marka, drainase jalan).
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (IPAL, MCK), pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R, bank sampah), dan peningkatan jalan lingkungan. Ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori dan ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik) akan ditingkatkan.

3. Meningkatkan ketersediaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi, kecukupan kebutuhan air irigasi, pemerataan/distribusi air irigasi, keandalan/kontinuitas air irigasi; partisipasi petani pengguna air (P3A) dalam pemeliharaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi.

o. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kerangka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh KLHK adalah yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan lahan sebagai indikator. Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 terealisasi 51,08 dari target 50, Indeks Kualitas Udara (IKU) terealisasi 85,18 dari target sebesar 85, sedangkan Indeks Tutupan Lahan terealisasi 54,82 dari target 52,93.

Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 belum cukup baik, dimana dari data status mutu air sungai tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul berstatus pencemaran sedang. Hal ini selain dipengaruhi oleh faktor geografis dimana Kabupaten Bantul terletak di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga secara alami Kabupaten Bantul merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengakibatkan banyak pencemaran yang berasal dari hulu masuk ke Kabupaten Bantul. Kemudian, kesadaran pelaku usaha juga masih relatif rendah dalam pengelolaan lingkungan khususnya pembuangan air limbah, sehingga limbah yang masuk ke badan sungai/media lingkungan belum seluruhnya memenuhi baku mutu. Pada aspek budaya bersih masyarakat, tingginya konsentrasi Fecal Coli dan Total Coli pada beberapa air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan tidak melakukan BAB dan buang sampah di sungai masih belum optimal.

Sekalipun belum dapat memenuhi baku mutu air kelas II dan III sebagaimana peruntukannya, namun kualitas air sungai di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan peningkatan Indeks Kualitas Air dari tahun 2016 hingga 2020.

Faktor-faktor tersebut diatas diharapkan dapat tertangani pada tahun berikutnya dengan menetapkan strategi berupa menjalin kerjasama dan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kualitas air sungai, pendampingan dan , sosialisasi pengelolaan limbah industri secara mikro, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas dan masyarakat peduli sungai dan intensifikasi pengawasan dan pembinaan terhadap penataan ijin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri/pelaku usaha.

Pencapaian target indeks kualitas udara digunakan sebagai tolok ukur kinerja Kabupaten Bantul dalam penanganan masalah kualitas udara ambien, yaitu terjadinya pencemaran udara. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2020 masuk dalam kategori baik, ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas udara ambien Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 85,18. Hal ini dipengaruhi oleh semakin berkurangnya emisi gas buang kendaraan dan industri, peningkatan penghijauan sempadan dan lingkungan jalan, serta keterlibatan para pihak dan masyarakat dalam pengelolaan LH yang semakin meningkat dan membaik.

Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dihitung berdasarkan luas tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten. Tutupan lahan/vegetasi yang dimaksud adalah luasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan lindung bervegetasi dan lain-lain. Secara umum kondisi tutupan lahan/vegetasi di Kabupaten Bantul menunjukkan hasil sebesar 54,83 atau naik sebesar 1,73 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan luasan tutupan lahan ini seiring dengan penambahan luasan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, RTH dan kawasan lainnya di Kabupaten Bantul, yaitu seluas 9,54 km² sehingga secara keseluruhan luas tutupan lahan Kabupaten Bantul Tahun 2020 mencapai 178,60 km².

Kemudian upaya-upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan pembangunan RTH.

Penambahan tutupan lahan pada tahun 2020 antara lain berasal dari penanaman pohon pada area dan kawasan kawasan hutan, lahan kritis, sempadan

sungai yang tersebar di wilayah Kecamatan Imogiri, Banguntapan, Dlingo, Sanden, Srandakan, Piyungan dan Kretek. Juga berasal dari penanaman bibit Mangrove yang ditanam di Kawasan Mangrove Baros, Tirtohargo, Kecamatan Kretek sebanyak 10.000 batang. Selain itu juga berasal dari pembangunan Ruang Terbuka hijau (RTH) di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu wilayah Kecamatan Bantul, Banguntapan, Kretek, dan Kecamatan Dlingo.

Permasalahan :

1. Tingkat pencemaran yang masih relatif tinggi khususnya pada air sungai di Kabupaten Bantul;
2. Kecenderungan alih fungsi lahan yang masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan luas tutupan lahan;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai);
4. Cakupan ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan minimal 20% belum terpenuhi.

Solusi :

1. Sinergitas pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup dengan melibatkan semua unsur pemerintahan, Institusi Polri dan TNI melalui Babinsa dan Babinkamtibnas, Swasta dan Akademisi dan Masyarakat;
2. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah secara terpadu;
3. Peningkatan fungsi pengawasan bagi industri terkait dengan pengelolaan limbah;
4. Pemberian reward pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan limbah industrinya serta punishment pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik;
5. Peningkatan ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul;
6. Peningkatan gerakan dan budaya konservasi lingkungan hidup.

p. Desa Tangguh Bencana

Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Bantul dimulai pada tahun 2010 dengan menggunakan pendanaan yang berasal dari 3 sumber yaitu: APBD Kabupaten Bantul, APBD Pemda DIY, APBN, dan Lembaga Swadaya Mandiri (LSM).

Sampai dengan tahun 2020, jumlah Kalurahan yang sudah dikukuhkan sebagai Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Bantul berjumlah 35 (tiga puluh lima) Kalurahan dari 75 (tujuh puluh lima) kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu kalurahan Wonolelo, Mulyodadi, Tirtoharjo, Gadingharjo, Gadingsari, Poncosari, Srimulyo, Mangunan, Jatimulyo, Wukirsari, Kebonagung, Parangtritis, Srigading, Seloharjo, Selopamioro, Munthuk, Karangtengah, Girirejo, Imogiri, Trimulyo, Sriharjo, Srimartani, Srihardono, Bangunjiwo, Donotirto, Panjangrejo, Sidomulyo, Wonokromo, Terong, Temuwuh, Guwosari, Dlingo, Tirenggo, Triwidadi dan Trimurti.

Tahun 2020 tidak dapat melaksanakan pembentukan Desa Tangguh Bencana yang disebabkan kebijakan pengurangan kegiatan yang melibatkan kerumunan di masa Tanggap Darurat COVID-19. Optimalisasi peran Desa beserta Relawan Desa diarahkan untuk pencegahan dan penanggulangan pandemic COVID-19 yang meliputi sosialisasi, pendataan, pendampingan, desinfeksi, sampai dengan pemakaman jenazah terduga maupun terkonfirmasi

positif COVID-19.

Tabel 2.3.33 Potensi Bencana di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Bencana	Lokasi yang berpotensi
1	Tanah longsor	Dlingo, Imogiri, Kasihan, Pajangan, Piyungan, Pleret, Pindong, Sedayu, Sewon
2	Angin kencang	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
3	Kekeringan	Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, Pundong
4	Banjir	Imogiri, Pajangan, Pleret, Sewon, Banguntapan, Jetis, Kasihan, Piyungan, Pundong, Kretek, Pandak, Srandakan, Bantul
5	Gempa bumi	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
6	Tsunami	Srandakan, Kretek, Sanden
7	Abrasi/Erosi	Kretek, Imogiri, Banguntapan, Kasihan, Pleret, Sewon, Pajangan, Piyungan
8	Kebakaran	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
9	Banjir Lahar Dingin	Sepanjang aliran sungai Code, Gajahwong, Winongo, dan Opak Kalikuning

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Upaya merintis desa tangguh bencana dilakukan secara terus menerus dan memperhatikan banyak faktor kesiapan masing-masing desa. Desa tangguh bencana dirintis kerja sama langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Desa tangguh bencana menuntut kesadaran masyarakat tentang perilaku menyelamatkan keluarga saat terjadi bencana.

Wilayah Kabupaten Bantul termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Bencana yang terjadi hampir setiap tahun di adalah banjir, tanah longsor, angin ribut, kebakaran, abrasi dan erosi. Dari seluruh kejadian bencana di Kabupaten Bantul, yang paling menonjol adalah tanah longsor, angin ribut dan kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana, yaitu “Mewujudkan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana” sehingga mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan termasuk mengantisipasi dampak bencana.

Tabel 2.3.34 Kejadian dan Lokasi Bencana di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Kebakaran	Tanah Longsor	Tanah retak	Erosi	Angin Kencang		Tersambar Petir	Pohon Tumbang	Dahan Patah	Abrasi & Gelombang Pasang	Iaka Sungai	Laka Sumur	Bangunan Roboh (Kegagalan Teknologi)	Banjir	Gempa di DIY	
						Dampak (Titik)	Jumlah Kejadian									Jumlah gempa di DIY	Gempa dirasakan di Bantul
1	Bantul	11	0	0	1	96	Januari : 5 Februari : 3 Maret : 5 April : 2 Oktober : 1 November : 4 Desember : 2	0	12	4	0	0	0	0	0	141	13
2	Banguntapan	25	0	0	0	40		0	7	1	0	1	0	1	0		
3	Piyungan	5	19	0	0	142		0	1	0	0	0	0	0	0		
4	Srandakan	1	1	0	0	16		0	13	0	0	0	0	0	0		
5	Sanden	3	0	0	1	14		0	9	0	0	0	0	0	0		
6	Kretek	5	3	0	0	18		0	4	0	1	0	0	0	0		
7	Pundong	4	4	0	1	20		0	2	1	0	0	1	0	0		
8	Jetis	7	0	0	1	81		0	10	0	0	1	0	0	0		
9	Sewon	19	3	0	3	59		1	13	3	0	0	0	1	0		
10	Kasih	16	3	0	2	42		0	7	0	0	0	0	0	0		
11	Dlingo	3	15	0	0	31		0	5	0	0	0	0	0	0		
12	Pajangan	3	1	0	0	17		0	2	0	0	0	0	0	0		
13	Pandak	5	0	0	1	39		0	1	0	0	1	0	0	0		
14	Sedayu	4	1	0	0	11		1	3	0	0	0	0	0	0		
15	Pleret	7	7	0	0	35		0	8	0	0	0	0	1	0		
16	Imogiri	6	28	1	4	43		1	11	1	0	1	0	0	0		
17	Bambanglipuro	6	0	0	0	84		0	7	0	0	0	0	0	0		
Jumlah		130	85	1	14	788	22	3	115	10	1	4	1	3	0	141	
Total		530															

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Permasalahan :

1. Belum optimalnya fungsi dokumen penanggulangan bencana dan kebakaran dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
3. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya;
4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang kebencanaan dan kebakaran
5. Beragamnya potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Bantul
6. Masih minimnya pemahaman sebagian masyarakat dan stakeholder terhadap upaya pengurangan risiko bencana;
7. Belum optimalnya pelaksanaan tahapan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
8. Belum optimalnya proses pemulihan pasca bencana;

Solusi :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan melalui penguatan fungsi Dokumen Penanggulangan Bencana dan kebakaran dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah serta pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
2. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
3. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
4. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
5. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana melalui optimalisasi penerapan Rencana Kontinjensi dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
6. Pengembangan sistem pemulihan bencana melalui penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan.

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan

prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum, kecuali dengan standar konstruksi tahan gempa dan rutin dilakukan pendidikan mitigasi bencana;
2. Pada daerah-daerah wilayah rawan bencana, dibentuk desa tangguh bencana, sekolah siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.
3. Selain itu juga upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yaitu penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara dan Early Warning Sistem (EWS) di sepanjang pantai serta peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
2. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai aktor utama penanggulangan bencana dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan bencana, memberi pelayanan yang optimal mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas mitigasi struktural

q. Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya terhadap penggunaan lahan eksisting sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.3.35, dapat ditentukan “kategori” kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Bantul. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kriteria ‘sesuai’ pada kawasan lindung seluas 5.291,7 Ha atau 77,64%, pada kawasan budidaya seluas 32.230,19 Ha atau 74,59 sehingga luas total sebesar 37.521,26 Ha atau 75,01 % dari luas Kabupaten Bantul; selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.3.35 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul

FUNGSI KAWASAN		Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
LINDUNG	Kawasan Hutan Lindung	1009,82	33,15	228,01	1.270,98
	Kawasan Resapan Air	2.231,20	0	408,53	2.639,71
	Sempadan Pantai	187,33	0	67,09	254,42
	Sempadan Sungai	1.716,24	0	657,93	2.374,17
	Kawasan Cagar Budaya	146,48	20,14	109,02	275,64
Jumlah Lindung (Ha)		5.291,07	53,29	1.470,58	6.814,92
% terhadap Kawasan Lindung		77,64	0,78	21,58	100,00
% terhadap Kabupaten Bantul		9,73	0,37	3,52	13,62
BUDDAYA	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	10110,43	752,34	73,23	10.936,00
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	7.005,58	5.182,31	7,87	12.195,75
	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	410,27	383,85	385,39	1.179,52
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	8.284,00	654,09	1.728,10	10.666,19
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	3.660,16	2,15	1.122,99	4.785,30
	Kawasan Peruntukan Industri	1.776,79	-	686,96	2.463,75
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	982,96	-	-	982,96
Jumlah Budidaya (Ha)		32.230,19	6.974,74	4.004,54	43.209,47
% terhadap Kawasan Budidaya		74,59	16,14	9,27	100
% terhadap Kabupaten Bantul		64,43	13,94	8,01	86,38
TOTAL (Ha)		37.521,26	7.028,03	5.475,12	50.024,41
% terhadap Kabupaten Bantul		75,01	14,05	10,94	100

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul; Bappeda 2021

Berdasarkan nilai atau persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Bantul masuk dalam kriteria “sesuai” dapat ditentukan “kategori” kesesuaian pemanfaatan ruang Sangat Tinggi, diartikan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rujukan rencana tata ruang (termasuk indikasi program).

Permasalahan :

1. Upaya perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang sering terkendala masalah kepemilikan lahan, dimana Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam

- mengatur penggunaan lahan yang dimiliki masyarakat maupun Badan Usaha
2. Terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan Budidaya dan lindung
 3. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang berada pada kriteria ‘belum sesuai dan ‘tidak sesuai’

Solusi :

1. Untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan pengaturan penggunaan lahan melalui rencana tata ruang yang lebih detail (RDTRK), aturan zonasi, aturan perijinan, penerapan sanksi, insentif, dan desinsentif penggunaan lahan.
2. Pengembangan aturan konsolidasi lahan dan sistem ganti untung lahan dalam upaya alih fungsi pemanfaatan lahan.
3. Pemerintah Kabupaten perlu melengkapi aturan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara intensif.
4. Pembuatan sistem informasi pengawasan (surveillance) dan monitoring evaluasi penggunaan lahan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Penertiban dan penataan permukiman yang berada di sempadan sungai dan sempadan pantai.
6. Penyusunan aturan penggunaan lahan dan pembangunan pada kawasan resapan air, sempadan sungai, dan sempadan pantai.
7. Penegakan aturan dan hukum melalui kegiatan penindakan dan penuntutan.
8. Diperlukan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan sehingga perwujudan ruang nantinya dapat sesuai dengan rencana pola ruang.
9. Penetapan lokasi PLP2B sebagai upaya ketahanan pangan dan pengendalian penggunaan lahan pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan kering, LP2B dan LCP2B.
10. Pengembangan insentif bagi kawasan pertanian melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.
11. Penyusunan aturan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukan permukiman baik di perkotaan dan perdesaan

yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukungnya dan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Strategi untuk pencapaian indikator kedepan antara lain :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder dalam peningkatan keterwujudan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bantul.
2. Melaksanakan pengawasan dengan menggunakan aplikasi teknologi kamera (drone) yang terhubung dengan data base map, sehingga lebih valid dan meminimalisir human error, untuk areal yang relatif tidak luas dan pemanfaatan citra satelit untuk mengcover seluruh kabupaten Bantul.

r. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.3.36 Angka Kriminalitas pada Kabupaten Bantul tahun 2020

No	Jenis Tindak Kriminal	Jumlah Kasus
1	Jumlah kasus narkoba	98
2	Jumlah kasus pembunuhan	2
3	Jumlah kejahatan seksual	43
4	Jumlah kasus penganiayaan	87
5	Jumlah kasus pencurian	375
6	Jumlah kasus penipuan	125
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	0
Total kasus		730
Jumlah penduduk		954.706
Angka kriminalitas		0.076

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul 2021

Angka kriminal sebesar pada Tabel 2.3.36 sebesar 0.076 tidak tercapai dari target, ini karena beberapa faktor dilihat dari jenis kriminal jumlah kasus pencurian, penipuan, penganiayaan dan kasus narkoba yang meningkat.

Penyebabnya antara lain permasalahan keluarga, pengaruh media sosial dan pergaulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang menurun dibanding tahun lalu, serta kesenjangan ekonomi yang semakin lebar sebagai dampak pandemi Covid 19 menjadikan kondisi ekonomi masyarakat Bantul semakin sulit, hal ini membawa dampak munculnya aksi nekat pencurian dan penipuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Saat Pandemi Covid 19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, banyak orang mengalami depresi/ kebingungan dalam mencari nafkah sehingga melakukan tindak kejahatan.
2. Faktor Sosial, perkembangan teknologi dan informasi saat ini membawa dampak sosial pada kehidupan masyarakat. Meningkatnya kasus narkoba, perubahan gaya hidup anak muda saat ini, jika tidak dapat dikontrol akan membawa ke arah pergaulan yang salah dan terjerat pada penggunaan narkoba maupun minuman keras. Kasus klitih merupakan salah satu kasus yang masuk dalam kategori penganiayaan.
3. Kurang maksimalnya sanksi hukum bagi pelaku kriminalitas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Solusi yang dilakukan untuk meminimalisir tindak kriminal diantaranya :

1. Memberdayakan dan meningkatkan peran anggota Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus yang terjadi.
3. Mengoptimalkan peran PPNS yang ada untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengarah pada tindak kriminal.

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian indikator adalah :

1. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.
2. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.

3. Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Hukum dan Peraturan Daerah
4. Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Hukum dan Peraturan Daerah.

s. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Idealnya, proses penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ini didukung oleh data-data dari lembaga terkait lainnya, sehingga memenuhi 7 dimensi IPK. Akan tetapi karena pertimbangan tertentu, indikator penyusunan IPK dibatasi pada tiga dimensi tersebut, yang menjadi wilayah kerja Dinas Kebudayaan. Pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud antara lain, Pertama, ketersediaan data. Penyusunan IPK Kabupaten Bantul tahun 2020 memerlukan data terbaru, yaitu data 2020 yang bersumber dari BPS atau lembaga lain. Namun ketersediaan data tersebut belum memadai, sehingga akan sulit untuk melakukan penghitungan. Kedua, belum adanya alat ukur untuk menghitung dimensi budaya literasi dan dimensi kesetaraan gender Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak dimungkinkan untuk melakukan penelitian mandiri.

Sehingga saat ini Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul dihitung berdasar prosentase capaian dari 3 indikator yaitu 1) indikator ekonomi budaya, 2) indikator program pembangunan kebudayaan, dan 3) indikator objek kebudayaan.

Dimensi ekonomi budaya menunjukkan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatan tersebut sebagai sumber penghasilan. Untuk kasus Kabupaten Bantul, belum terdapat angka pasti berapa jumlah penduduk yang berprofesi sebagai pelaku seni. Namun, dalam dimensi ekonomi budaya ini dapat terepresentasi dari jumlah desa wisata atau desa budaya yang melibatkan masyarakatnya dalam usaha-usaha di bidang kebudayaan. Dimensi kedua, warisan budaya. Dimensi ini berkaitan dengan persentase warisan budaya baik benda (benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya), maupun warisan tak benda yang telah

ditetapkan terhadap total registrasi.

Capaian Kinerja Pembangunan Berbasis Program merupakan rangkuman kegiatan ekspresi budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sebagai upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang bersifat luas pada 3 program pendukung sasaran daerah. Sedangkan dimensi obyek-obyek pembangunan kebudayaan (tradisi lisan, manuskrib, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional) diambil dari budaya tradisional yang masih ada dan berkembang di masyarakat (17 kecamatan). Penghitungan angka Indek Pembangunan Kebudayaan berasal dari akumulasi perolehan skor dari tiap dimensi kemudian dibagi tiga untuk memperoleh skor rata-rata dan dikali 100 untuk mencapai angka IPK di Kabupaten Bantul. Perhitungan Nilai IPK dapat dilihat pada Tabel 2.3.37 di bawah ini :

Tabel 2.3.37 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Indikator	Nilai
1	Capaian Kinerja Pembangunan Kebudayaan berbasis Program Pengembangan	98,4
2	Capaian Obyek Pemajuan Kebudayaan	76,18
3	Capaian Pemajuan Ekonomi Budaya	28
Indeks Pembangunan Kebudayaan		67,52

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul 2021

Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten merupakan refleksi dari realisasi program-program yang dilaksanakan dan didorong oleh kondisi sosial budaya di wilayah Kabupaten Bantul yang memiliki daya dukung cukup signifikan, terutama dalam menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

Faktor pendukung upaya pembangunan di bidang kebudayaan Kabupaten Bantul adalah :

1. Keberadaan obyek-obyek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam tersebar di 17 kecamatan dengan karakter dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni, dan ritus;
2. Keterlibatan masyarakat untuk melestarikan budaya yang tinggi ;

3. Banyaknya kelompok-kelompok seni, paguyuban atau sanggar yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sewabagai wadah berkekspresi dan berkreasi (sejumlah:Kelompok seni yang terdaftar/memiliki register Nomor Induk Kesenian)
4. Ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang yang tersebar disetiap desa dan ditingkat kecamatan, seperti balai desa, lapangan, gedung serbaguna, panggung terbuka, alat-alat kesenian, panggung terbuka, joglo atau pendopo yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seni budaya masyarakat;
5. Masih adanya para pelaku seni, terutama yang senior dan menguasai pakem tradisi
6. Adanya festival atau lomba-lomba seni tradisi sebagai ajang untuk menunjukkan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat.

Dalam proses-proses upaya pembangunan kebudayaan, ditemui permasalahan diantaranya terkait: regenerasi, pembinaan, pendanaan, serta pengembangan dan pemanfaatan objek-objek budaya :

1. Regenerasi, kesinambungan menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah maupun masyarakat. Minat generasi muda terhadap budaya lokal sangat terbatas, disebabkan oleh adanya pergeseran nilai-nilai / muncul anggapan bahwa seni tradisi merupakan aktivitas yang kolot dan tidak modern. Selain itu, banyaknya pilihan aktivitas untuk menyalurkan ekspresi selain seni tradisi, kalangan muda terlalu sibuk dengan aktivitas akademis dan bekerja sehingga hampir tidak sempat untuk terlibat dalam kegiatan seni budaya serta masifnya kemajuan teknologi
2. Pembinaan, Kelompok seni budaya tradisi menghendaki adanya fasilitasi atau pembinaan guna menguatkan pengetahuan mereka terkait tradisi yang mereka geluti. Namun kesadaran / pemahaman kelompok untuk register /administrasi kelompok masih kurang, sehingga dibutuhkan pembinaan tidak hanya pada kegiatan seni nya saja namun juga pad urusan administrasi, misalnya mengurus registrasi kelompok seni, cara penyusunan proposal, serta mekanisme koordinasi dengan pihak-pihak lain

3. Pengembangan dan pemanfaatan objek-objek budaya, masyarakat yang terlibat langsung pada umumnya adalah berusia tua dan aktivitas kesehariannya sudah terbatas, sehingga mereka bisa meluangkan waktu untuk bergabung dalam suatu paguyuban. Dari segi pemanfaatan objek-objek budaya juga masih minim. Objek budaya tersebut, seperti situs-situs atau bangunan cagar budaya yang dapat diaktualisasi dan mengadopsi adaptive reuse masih terbatas. Melalui mekanisme pelestarian tersebut, bangunan cagar budaya dapat dijaga kelestariannya dengan memaksimalkan kemanfaatannya tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah pelestarian dalam arkeologi
4. Sejak pandemi COVID-19, beragam dampak dirasakan signifikan oleh para pelaku seni budaya. Hal-hal mendasar seperti pelaksanaan latihan kesenian, pertemuan rutin membahas rencana pementasan atau penyelenggaraan acara kesenian, secara otomatis berhenti/berkurang. Selain pada proses dan pelaksanaan kegiatan seni budaya. Pandemi COVID-19 membawa dampak sangat besar terutama bagi para pelaku seni budaya yang dalam kesehariannya memperoleh penghasilan utama dari kegiatan kesenian. Tidak adanya kegiatan kesenian berarti tidak ada penghasilan.

Terkait permasalahan-permasalahan tersebut, dirumuskan solusi sebagai berikut:

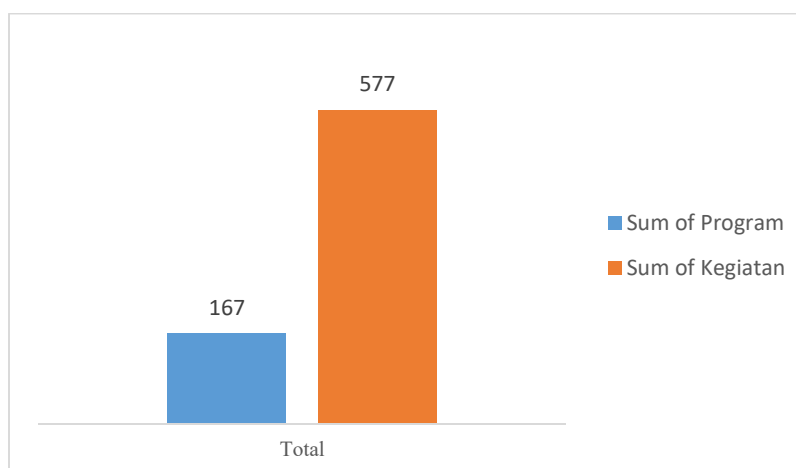
1. Diperlukan mekanisme regenerasi terhadap tradisi seni budaya, misalnya dengan melibatkan generasi muda dalam berbagai kegiatan budaya. Kolaborasi seni tradisi dengan seni modern untuk menarik minat generasi muda.
2. Menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah pada level kecamatan, desa, hingga pedukuhan terkait potensi dan perkembangan objek-objek pemajuan kebudayaan. Level terkecil di tingkat pedukuhan dapat dilibatkan untuk melakukan pemetaan dan pendataan potensi objek pemajuan kebudayaan. Beberapa kecamatan telah melakukan hal tersebut, namun belum mendapatkan tindak lanjut dari pihak pedukuhan. Jika hal ini dilakukan dapat membantu inventarisasi warisan baik benda ataupun

takbenda, sehingga dapat disusun perancangan strategi pelestariannya.

3. Menggencarkan pembinaan bagi masyarakat melalui kelompok-kelompok seni budaya terkait menggali kembali referensi seni budaya, mekanisme regenerasi, serta pembinaan dalam aspek administrasi, meliputi pembuatan proposal, wawasan manajerial, dan sebagainya.
4. Perlunya upaya peningkatan capaian aspek ekonomi budaya, salah satunya dengan menguatkan sektor ekonomi kreatif bidang kebudayaan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama sektor pariwisata dalam hal promosi dan penataan wilayah.
5. Diperlukan dukungan infrastruktur digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama kalangan seniman dan pegiat budaya. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi merupakan fasilitas utama dalam menghadapi situasi pandemi seperti saat ini. Dengan tersedianya fasilitas serta pendampingan kepada pelaku budaya, dimungkinkan mereka akan tetap berkarya meskipun secara daring.
6. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat harus tetap menggunakan petunjuk teknis protokol kesehatan

2.3.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan oleh Kabupaten Bantul telah melalui perencanaan yang cukup komprehensif dimana penentuan sasaran strategis sudah disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta kemampuan anggaran yang dimiliki. Program dan kegiatan juga telah dipetakan dalam rangka mendukung tercapainya target sasaran strategis. Jumlah keseluruhan program kegiatan di tahun 2020 yang mendukung capaian sasaran strategis sebanyak 167 program dan 577 kegiatan, sebagaimana tersaji pada Grafik 2.3.11. Rincian jumlah program kegiatan per indikator kinerja utama sasaran strategis tersaji pada Tabel 2.45.



Grafik 2.3.11 Grafik Jumlah Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran Strategis (Sumber : Bappeda, BKAD 2020; data diolah)

Tabel 2.3.38 Jumlah Program Kegiatan per IKU Sasaran Strategis Kabupaten Bantul yang didukung.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	42	165
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	26	107
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	8	47
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	16	60
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	13	41
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	3	10
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	6	10
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Cakupan Industri Kreatif	6	15
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)		
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan		
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura		
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan		
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1	4
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	19	36

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4	16
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	3	22
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	3	10
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	12	24
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	5	10
Jumlah			167	577

Sumber : Bappeda, BKAD, 2020, data diolah

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan perencanaan sistemik dengan menggunakan alat tolak ukur yang dapat mengukur semua arena akan dapat mendorong interaksi antar arena. Hal ini adalah kunci reformasi birokrasi. Selain itu, kunci penting keberhasilan didalam akuntabilitas kinerja adalah optimalisasi keterlibatan dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang luas sehingga program yang demikian beragam dan ekstensif dapat berjalan selaras dan berinteraksi secara seimbang. Jika hal ini dapat berjalan, maka visi misi yang telah ditetapkan dalam koridor kepentingan rakyat dapat tercapai. Keberagaman program kegiatan di tahun 2020 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagai upaya mewujudkan visi misi tersaji pada.

Tabel 2.3.39 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3. Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah 4. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 5. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah 6. Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan 7. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 2. Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus 3. Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul 4. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online 5. Pelaporan LP2P dan LHKPN 1. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 2. Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai 4. Penilaian PNS 1. Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga 1. Analisis Kebijakan Pembangunan 2. Pelaporan Pembangunan 3. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD 4. Sistem Informasi Jasa Konstruksi 1. Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik 2. Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3. Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik 4. Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Procedure dan Ketatalaksanaan 2. Penerimaan Kunjungan Kerja 3. Pengelolaan Informasi Media Massa 4. Peningkatan Kemampuan Keprotokolan 5. Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten 1. Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah 2. Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1. Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten 3. Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara
			9. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 2. Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah 3. Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
			10. Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa 2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa 3. Pedampingan Administrasi Desa 4. Pemberdayaan lembaga desa 5. Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa 6. Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa 7. Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa 8. Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa 9. Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa 10. Update Data Monografi Desa
			11. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
			12. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan 2. Pemberian bantuan hukum 3. Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 4. Pengawasan produk hukum pemerintah desa 5. Penyuluhan Hukum 6. Penyusunan Produk Hukum Daerah 7. Publikasi peraturan perundang-undangan
			13. Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Bantuan Sosial bagi Warga Miskin 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				Sosial Kemasyarakatan
				6. Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan
				7. Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan
				8. Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
			14. Program Analisis Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1. Kajian Kitab Keislaman 2. Pendamping halaqoh & berbagai forum keagamaan lainnya 3. Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu 4. Peningkatan Pemberdayaan kaum rois & penjaga masjid
			15. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	1. Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah 2. Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat 3. Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat 4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah 5. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 6. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat 7. Pengembangan Ekonomi Masyarakat 8. Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah 9. Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat
			16. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	1. Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis 2. Peningkatan Pelayanan Kearsipan 3. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
			17. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1. Kajian sistem administrasi kearsipan 2. Pengawasan Kearsipan 3. Pengklasifikasian data
			18. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1. Akuisisi dan Pengelolaan Arsip 2. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
			19. Program peningkatan pelayanan masyarakat	1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2. Peningkatan pelayanan masyarakat
			20. Program Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				<ol style="list-style-type: none"> 3. Musrenbang tingkat kecamatan 4. Pelaksanaan Rakorpem desa 5. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 6. Pengendalian keamanan lingkungan 7. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 8. Peningkatan pemberdayaan keagamaan 9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 10. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 11. Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan 12. Rapat koordinasi unsur Muspika 13. Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
			21. Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam 2. Pemberdayaan lembaga desa 3. Pemberdayaan Petani 4. Pembinaan Organisasi Perempuan 5. Pendampingan kegiatan TMMD 6. Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			22. Program Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
			23. Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian 2. Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi
			24. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
			25. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan KID dan PPID 2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 3. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			26. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
			27. Program Penataan Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak) 2. Pelayanan Mutasi Penduduk 3. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 4. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 5. Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM
			28. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 2. Sinkronisasi Kebijakan 3. Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
			29. Program Pengelolaan Data Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran Data Kependudukan 2. Publikasi Kebijakan Kependudukan 3. Penyusunan Buku Profil Kependudukan 4. Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 5. Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data
			30. Program Penegakan Perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Penegakan Perda 2. Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian
			31. Program pendidikan politik masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forkom Ormas, Orsos, dan LSM 2. Pendidikan politik di masyarakat
			32. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah 2. Rapat-rapat paripurna 3. Reses 4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 5. Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD 6. Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya 7. Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 8. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 9. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			33. Program Pengembangan Data/Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan pengelolaan data daerah 2. Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
			34. Program Kerjasama Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			35. Program perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penganggaran 2. Perencanaan pembangunan sektoral 3. Perencanaan pembangunan kewilayahan
			36. Program perencanaan pembangunan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri 2. Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam
			37. Program perencanaan sosial dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan pemerintahan 2. Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat 3. Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat
			38. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah
			39. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
			40. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem inovasi daerah
			41. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 2. Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD
			42. Program Pengelolaan Barang Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM aparatur Pemda 2. Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang 3. Penataan aset 4. Penghapusan barang daerah 5. Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah 6. Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah 7. Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah 8. Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah 9. Penyusunan regulasi pengelolaan BMD
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 4. Program obat dan perbekalan kesehatan 5. Program upaya kesehatan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan anak dan Balita 1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 2. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3. Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1. Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi 1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 2. Peningkatan kesehatan masyarakat 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				4. Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan 5. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan 6. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden 7. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek 8. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong 9. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro 10. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I 11. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II 12. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I 13. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II 14. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I 15. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II 16. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I 17. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II 18. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I 19. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II 20. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret 21. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan 22. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I 23. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II 24. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III 25. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I 26. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II 27. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I 28. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II 29. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan 30. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I 31. Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II 32. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan 33. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden 34. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek 35. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong 36. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro 37. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I 38. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				39. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I 40. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II 41. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I 42. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II 43. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I 44. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II 45. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I 46. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II 47. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret 48. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan 49. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I 50. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II 51. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III 52. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I 53. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II 54. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I 55. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II 56. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan 57. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I 58. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II 59. Operasional Rumah Sakit
			6. Program Pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
			7. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1. Promosi Kesehatan 2. Pemberdayaan masyarakat sehat
			8. Program perbaikan gizi masyarakat	1. Peningkatan status gizi
			9. Program pengembangan lingkungan sehat	1. Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan
			10. Program standarisasi pelayanan kesehatan	1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 2. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 3. Pelayanan Kesehatan Rujukan
			11. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	1. Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda
			12. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan	1. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 3. Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
			13. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Jamkesda
			14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan Lansia
			15. Program peningkatan pencegahan penyakit tidak menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
			16. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya
			17. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan BLUD RSUD
			18. Program pelayanan kontrasepsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
			19. Program keluarga berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan KIE 2. Pembinaan Keluarga Berencana 3. Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal 4. Pemantapan mekanisme operasional 5. Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten 6. Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB 7. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB
			20. Program kesehatan reproduksi remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2. Lomba forum PIK remaja 3. KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja
			21. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Forum IMP
			22. Program pengembangan analisa data dan dampak kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Data dan Dampak Kependudukan 2. Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah 3. Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan
			23. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan 2. Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak) 3. Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya 4. Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				POSDAYA
			24. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga	5. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
			25. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	1. Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
			26. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	1. Pengembangan olahraga rekreasi 2. Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga 1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 3. Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD 4. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
			2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP 2. Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar 3. Perijinan SD dan SMP Baru 4. Pengembangan Pendidikan Dasar SMP 5. Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar 6. Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar 7. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 8. Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD 9. Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal 10. Pengembangan Pendidikan Dasar SD 11. Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD 12. Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD 13. Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD 14. penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI 15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa 16. Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP 17. Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP 18. Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				19. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 20. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP
			3. Program Pendidikan Non Formal	1. Penyelenggaraan pendidikan non formal 2. Pengembangan Pendidikan non formal 3. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B 4. Penyelenggaraan Paket C setara SMU
			4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Evaluasi standar pelayanan minimal 2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan 3. Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
			5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 2. Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 3. Pembinaan dan operasional dewan pendidikan 4. Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia 5. Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi
			6. Program Peningkatan Nilai Akademik	1. Penambahan Pelajaran 2. Peningkatan Metode Pengajaran 3. Peningkatan Peran Orangtua
			7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan 2. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 3. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelporan 5. Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan 6. Pengembangan Sarpras Perpustakaan
			8. Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	1. Pengembangan Pelayanan Perpustakaan 2. Peningkatan Promosi Perpustakaan
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	1. Program penempatan tenaga kerj	1. Penyuluhan ketenagakerjaan 2. Penempatan pencari kerja
			2. Program perluasan kerja	1. Kegiatan terapan teknologi tepat guna 2. Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur 3. Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				4. Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri
		3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja		1. Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan 2. Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
		4. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja		1. Kegiatan Pembinaan LPK 2. Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan 3. Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan 4. Uji kompetensi peserta latihan di BLK 5. Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja 6. Sosialisasi dan Pelatihan Tentang Produktifitas Tenaga Kerja 7. Pelatihan Menjahit 8. Pelatihan Mekanik 9. Pelatihan Teknisi 10. Pelatihan Meubelair 11. Pelatihan Juru Las 12. Pelatihan Software 13. Pelatihan Tata Boga 14. Pelatihan Batik Tulis 15. Pelatihan Bahasa Inggris
		5. Program transmigrasi regional		1. Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi
		6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 2. Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 3. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 4. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Protistusi
		7. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 2. Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak) 3. Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya 4. Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA 5. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
			8. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 3. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 4. Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan
			9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2. Penyelenggaraan lomba desa 3. Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD 4. Pendampingan kegiatan TMMD 5. Bantul Ekspo dan karnaval 6. Pengembangan desa siaga 7. Pengembangan Kerjasama Desa
			10. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)
			11. Program pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat
			12. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN 2. Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan 3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna
			13. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
			14. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin 2. Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin 3. Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan
			15. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 2. Pendampingan Kegiatan Karang taruna 3. Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional
			16. Program pelayanan pendataan jaminan bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Updating Keluarga Miskin 2. Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan
5	Terwujudnya perekonomian	Pertumbuhan ekonomi	1. Program peningkatan dan pengembangan ekspor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha 2. Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
	daerah yang berkualitas	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 3. Program pemberdayaan pedagang 4. Program penataan pasar rakyat 5. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 7. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 8. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan 9. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif 10. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 12. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 2. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1. Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar 1. Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat 2. Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI 3. Revitalisasi Pasar Rakyat 4. Insentififikasi Pendapatan Pasar 1. Pelayanan Kemetrolgian Daerrah 1. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 2. Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang 3. Peningkatan pelayanan perdagangan 1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 1. Sosialisasi pengelolaan perijinan 2. Operasional pelayanan perijinan 3. Pendataan dan penetapan perijinan 4. Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan 5. Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan 6. Pengelolaan perijinan online 7. Survei kepuasan masyarakat 8. Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo 9. Lokakarya penanganan pengaduan 10. Pengawasan dan Pengendalian Perijinan 11. Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan 1. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 1. Pengembangan Kewirausahaan 1. Peningkatan Promosi UMKM 1. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			13. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2. Peningkatan Manajemen Perkoperasian 3. Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi 4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA 1. penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2. penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 3. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 4. Pendampingan dewan pengupahan 5. Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah 6. bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial 7. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 8. Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja 9. Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	1. Program pengembangan kemitraan 2. Program pengembangan destinasi pariwisata 3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata 2. Pemberdayaan Desa Wisata 3. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata 1. Pengembangan daerah tujuan wisata 2. Peningkatan daya tarik Wisata 3. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 4. Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	1. Program potensi energi 2. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	1. Pendataan Potensi Energi 1. Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			3. Program pengembangan industri kecil dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul 2. Pengembangan dan Pemberdayaan IKM 3. Pengembangan Pemasaran IKM 4. Pengembangan Industri Kreatif
			4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kewirausahaan
			5. Program penataan struktur industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri
			6. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan IKM Sentra 2. Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan 2. Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemetongan Hewan 3. Peningkatan Kesehatan Ternak
			2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah
			3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	4. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 2. Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan 3. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	5. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Prasarana Pertanian
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	6. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 2. Pengembangan Agribisnis Tembakau 3. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan 4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP) 5. Pengendalian dan Perlindungan Tanaman 6. Pengembangan Agribisnis Pertanian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1. Program peningkatan produksi perikanan	1. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya 2. Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan 3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan 4. Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	1. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2. Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur perdesaan 3. Program Pengendalian Banjir 4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 5. Program pengembangan jasa konstruksi 6. Program Pembangunan Gedung 7. Program Pengembangan Perumahan 8. Program Lingkungan Sehat Perumahan 9. Program Pengelolaan Area Pemakaman 10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 11. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Peningkatan jalan 1. Pembangunan infrastruktur perdesaan 1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai 1. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. Pengembangan Jasa Konstruksi 2. Peningkatan Teknologi Informasi 1. Pembangunan Gedung 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 2. Penyelenggaraan pengembangan perumahan 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1. Penanganan Kawasan Kumuh 1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 2. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air 1. Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah 2. Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				3. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
			13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 3. Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
			14. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	1. Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
			15. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 2. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 3. Pelayanan perijinan di bidang perhubungan 4. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
			16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 2. Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU
			17. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	1. Pengadaan pagar pengaman jalan 2. Pengadaan Flashing Lamp 3. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
			18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
			19. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1. Pengadaan Prasarana Pendukung PKB
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2. Kerjasama pengelolaan persampahan 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Evaluasi Adipura
			2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pengkajian dampak lingkungan 2. Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup 3. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
			3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 2. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 3. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
			4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan data dan informasi lingkungan 2. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup 5. Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 2. Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran 1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 2. Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam 3. Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial 4. pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam 5. Pengembangan desa siaga bencana 6. Gladi posko dan gladi lapang 7. Pengembangan budaya sadar bencana 8. Penyelenggaraan posko pengendalian bencana 9. Penguatan kapasitas satgas BPBD 10. Penguatan FPRB 11. Pembentukan Sekolah Siaga Bencana 12. Pembentukan Desa Tangguh Bencana 13. Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan 14. Pengembangan Sekolah Siaga Bencana 15. Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana
			3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Rawan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relokasi Korban Bencana ALam 2. Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana ALam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	1. Program perencanaan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> 3. Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam 4. Rekonstruksi Pasca Bencana 5. Rehabilitasi Pasca Bencana
			2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 2. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 4. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 5. Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 6. Studi tentang Tata Ruang
			3. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Inventarisasi tanah kas desa 2. Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY 3. Pemanfaatan Tanah SG
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1. Program pengembangan wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Wawasan Kebangsaan
			2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan orang asing 2. Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis
			3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan
			4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin 2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
			5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah
			6. Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat
			7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan 2. Pemberdayaan Linmas
			8. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak 2. Pengembangan Kabupaten Layak Anak 3. Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul
			9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2. Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				Pemberdayaan Perempuan dan Anak
				3. Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
				4. Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)
			10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
				2. Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
				3. Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
			11. Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
				2. Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda
			12. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. Program Pengembangan Nilai Budaya;	1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
			3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;	2. Pembuatan Film Dokumenter
			2. Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda;	1. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
				1. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
				2. Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
				3. Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal
				4. Pengelolaan Tata Nilai
			5. Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	1. Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya
				2. Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya
				3. Rehab Cagar Budaya

Sumber : Bappeda, 2020, data diolah

2.3.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2020 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.2.157.411.830.374,19 dan belanja sebesar Rp. 2.383.458.652.405,17 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 226.046.822.030,98 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2020 untuk pendapatan sebesar Rp. 2.104.834.822.639,42 realisasi belanja Rp. 2.094.142.043.125,77 terdapat surplus pembiayaan Rp. 10.692.779.513.65,-

Tabel 2.3.40 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Bertambah/(berkurang) (Rp)	(%)
A	PENDAPATAN	2.157.411.830.374,19	2.104.834.822.639,42	52.577.007.734,77	97,56%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	420.780.615.321,87	479.604.971.572,42	(58.824.356.250,55)	113,98%
	DANA PERIMBANGAN	1.279.745.464.554,00	1.268.337.753.395	11.407.711.159	99,11%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	456.885.750.498,32	356.892.097.672	99.993.652.826,32	78,11%
B	BELANJA	2.383.458.652.405,17	2.094.142.043.125,77	289.316.609.279,40	87,86%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.389.050.261.074,07	1.170.873.717.698,78	218.176.543.375,29	84,29%
	BELANJA LANGSUNG	994.408.391.331,10	923.268.325.426,99	71.140.065.904,11	92,85%
C	PEMBIAYAAN DAERAH	226.046.822.030,98	227.079.899.281,98	(1.033.077.251)	100,46%
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	263.047.636.293,60	238.678.713.544,60	24.368.922.749,000	90,74%
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.000.814.262,62	11.598.814.262,62	25.402.000.000	31,35%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	237.772.678.795,63	(237.772.678.795,63)	

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul 2020; Bappeda 2021.

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.383.458.652.405,17 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :

Tabel 2.3.41 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)	(%)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Rp48.411.709.120	4,87%
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Rp356.938.246.674	35,89%
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Rp194.319.545.695	19,54%
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Rp47.939.807.515	4,82%
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Rp3.907.639.400	0,39%
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Rp6.828.349.800	0,69%
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Rp14.125.964.890	1,42%
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Rp5.082.075.690	0,51%
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Rp1.611.591.000	0,16%
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Rp89.595.009.500	9,01%
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Rp12.479.237.964	1,25%
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Rp65.320.744.334	6,57%
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Rp5.778.797.900	0,58%
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rp6.391.676.411	0,64%
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Rp10.417.891.890	1,05%
Jumlah		Rp869.148.287.783	87,40%
Program/kegiatan pendukung		Rp125.260.103.548	12,60%
Total Belanja Langsung		Rp994.408.391.331	100%

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul 2020; Bappeda 2021.

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 869.148.287.783 atau sebesar 87,40% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 125.260.103.548 atau sebesar 12,60% dari total belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, yaitu sebesar 35,89% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relative besar adalah sasaran Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dengan besaran anggaran 19,54%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat sebesar 0,16% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 92,85%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 92,83%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,95%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Pertumbuhan Ekonomi sebesar 97,94%. Anggaran pada IKU ini efektif mendukung akuntabilitas kinerja. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indonesia Governance Index (IGI) sebesar 80,95%, atau kurang efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.3.42 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	8	7,7	96,25%	Rp48.411.709.120	Rp39.189.741.892	80,95%
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,65	73,86	100,29%	Rp356.938.246.674	Rp330.804.595.595	92,68%
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	15,38	15,17	98,63%	Rp194.319.545.695	Rp184.606.990.939	95,00%
4	Turunnya Masyarakat Mampu	Jumlah Kurang Kemiskinan	13,94	13,5	103,16%	Rp47.939.807.515	Rp46.852.901.036	97,73%
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	-0,13	0,49	576,92%	Rp3.356.514.200	Rp3.287.343.993	97,94%
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,38	0,38	100,00%	Rp551.125.200	Rp533.217.800	96,75%
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	-67	-54,55	118,58%	Rp6.828.349.800	Rp6.638.809.908	97,22%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	47	46,2	98,30%	Rp14.125.964.890	Rp12.785.500.500	90,51%
8	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pangan	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	0,1025	0,71	692,68%	Rp5.082.075.690	Rp4.953.734.106	97,47%
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	1,1	2,91	264,55%			
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	0,3	2,8	933,33%			
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,9	0,93	103,33%			
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,45	1,59	109,66%	Rp1.611.591.000	Rp1.416.585.844	87,90%
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	78	76,77	98,42%	Rp89.595.009.500	Rp82.191.562.436	91,74%
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63	63,02	100,03%	Rp12.479.237.964	Rp12.349.584.532	98,96%
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	45,33	46,66	102,93%	Rp65.320.744.334	Rp60.245.287.443	92,23%
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	75	75,01	100,01%	Rp5.778.797.900	Rp5.187.590.181	89,77%
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,065	0,076	83,08%	Rp6.391.676.411	Rp6.214.614.593	97,23%
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	70	67,52	96,46%	Rp10.417.891.890	Rp9.576.708.732	91,93%
Jumlah						Rp869.148.287.783	Rp806.834.769.531	92,83%
Belanja Langsung Pendukung						Rp125.260.103.548	Rp116.433.555.896	92,95%
Total Belanja Langsung						Rp994.408.391.331	Rp923.268.325.427	92,85%

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul 2020; Bappeda 2021.

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 7,15%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 7,17%, Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indonesia Governance Index (IGI) pada sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas sebesar 19,05% sedangkan

efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada sasaran Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas sebesar 1,04%.

Efisiensi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3.43 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)		Efisiensi Anggaran	
		Target	Realisasi	Rp	%
1	Indonesia Governance Index (IGI)	Rp48.411.709.120	Rp39.189.741.892	Rp9.221.967.228	19,05%
2	Umur Harapan Hidup	Rp356.938.246.674	Rp330.804.595.595	Rp26.133.651.079	7,32%
3	Angka Harapan Lama sekolah	Rp194.319.545.695	Rp184.606.990.939	Rp9.712.554.756	5,00%
4	Angka Kemiskinan	Rp47.939.807.515	Rp46.852.901.036	Rp1.086.906.479	2,27%
5	Pertumbuhan ekonomi	Rp3.356.514.200	Rp3.287.343.993	Rp69.170.207	2,06%
6	Pemerataan Pendapatan	Rp551.125.200	Rp533.217.800	Rp17.907.400	3,25%
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Rp6.828.349.800	Rp6.638.809.908	Rp189.539.892	2,78%
8	Cakupan Industri Kreatif	Rp14.125.964.890	Rp12.785.500.500	Rp1.340.464.390	9,49%
9	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)				
10	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Rp5.082.075.690	Rp4.953.734.106	Rp128.341.584	2,53%
11	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura				
12	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan				
13	Pertumbuhan produksi perikanan	Rp1.611.591.000	Rp1.416.585.844	Rp195.005.156	12,10%
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Rp89.595.009.500	Rp82.191.562.436	Rp7.403.447.064	8,26%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp12.479.237.964	Rp12.349.584.532	Rp129.653.432	1,04%
16	Desa Tangguh Bencana	Rp65.320.744.334	Rp60.245.287.443	Rp5.075.456.891	7,77%
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Rp5.778.797.900	Rp5.187.590.181	Rp591.207.719	10,23%

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)		Efisiensi Anggaran	
		Target	Realisasi	Rp	%
18	Angka Kriminalitas	Rp6.391.676.411	Rp6.214.614.593	Rp177.061.818	2,77%
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Rp10.417.891.890	Rp9.576.708.732	Rp841.183.158	8,07%
Jumlah		Rp869.148.287.783	Rp806.834.769.531	Rp62.313.518.252	7,17%
Program/kegiatan pendukung		Rp125.260.103.548	Rp116.433.555.896	Rp8.826.547.652	7,05%
Total Belanja Langsung		Rp994.408.391.331	Rp923.268.325.427	Rp71.140.065.904	7,15%

Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Bantul 2020; Bappeda 2021.

BAB III
CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dapat memberikan tugas pembantuan (medebewind) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah. Pemerintah provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten dalam hal tugas pembantuan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota

Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2020 tidak melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota

Pemerintah Kabupaten Bantul menerima Tugas Pembantuan melalui Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebanyak 2 (dua) program pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Nomor 948/02544 Tahun 2020 Tentang: Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 948/00072 Tentang Pejabat Pengelola Kegiatan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan TA 2020. Program tersebut antara lain adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (SP DIPA 018.03.4.049087/2020) serta Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

(SP DIPA 018.04.4.049088/2020).

3.2.1. Target Kinerja

Target kinerja program dan kegiatan tugas pembantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan selaku perangkat daerah yang mengampu penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang urusan pangan dan urusan pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Alokasi anggaran tugas pembantuan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan adalah sebesar Rp2.616.881.000,00. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul hanya melaksanakan kegiatan pendukung pelaksanaan program tersebut dengan alokasi anggaran sebesar Rp164.453.000,00. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan meliputi kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, dan kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penerapan budidaya kedelai dan kacang tanah. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia diwujudkan dalam bentuk fasilitasi teknis pengelolaan produksi tanaman serealia [baseline], pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman serealia, dan fasilitasi penyediaan benih bersertifikat [baseline]. Sedangkan kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan diwujudkan dalam fasilitasi dukungan teknis pengelolaan produksi tanaman jagung hibrida, pengelolaan sistem penyediaan benih padi Inbrida serta fasilitasi penyediaan benih bersertifikat. Target waktu pelaksanaan dari tugas pembantuan program ini adalah 12 bulan, dimulai dari persiapan hingga pelaporan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pembantuan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yang ditugaskan oleh Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan DIY selaku satker kepada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp420.450.000,00. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Sarana Pasca Panen Hortikultura, kegiatan Prasarana Pasca Panen Hortikultura, dan kegiatan Sarana Pemasaran Hortikultura. Kegiatan Sarana Pasca Panen Hortikultura diwujudkan dalam bentuk fasilitasi pasca panen hortikultura. Kegiatan Prasarana pasca Panen Hortikultura diwujudkan dalam bentuk fasilitasi prasarana pasca panen hortikultura. Sedangkan kegiatan Sarana Pemasaran Hortikultura diwujudkan dalam bentuk fasilitasi sarana pemasaran hortikultura.

3.2.2. Realisasi

Pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan pada tahun 2020 terealisasi 100%. Sedangkan penggunaan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp164.448.000,00 atau 99,99%. Dalam rangka mendukung pencapaian target produksi di tahun 2020, melalui tugas pembantuan program ini, pemerintah Kabupaten Bantul telah menyerahkan bantuan berupa benih kedelai (22.095 kg), benih kacang tanah (24.000 kg), benih jagung hibrida (15.000 kg) dan benih padi inbrida (50.000 kg) serta sarana budidaya lainnya berupa pupuk hayati (1.473 liter), pestisida (1.473 liter dan rhizobium (122.750 gram) kepada penerima bantuan yang tersebar di 17 Kapanewon. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul juga melaksanakan kegiatan pendampingan teknis dan monev kepada penerima bantuan dari tahap awal penjarangan, budidaya hingga panen agar bantuan yang disalurkan dapat lebih maksimal hasilnya. Realisasi penyaluran benih kedelai sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2.1, benih kacang tanah tersaji pada Tabel 3.2.2, benih padi inbrida tersaji pada Tabel 3.2.3, dan benih jagung hibrida tersaji pada Tabel 3.2.4.

Tabel 3.2.1 Realisasi penyaluran bantuan benih kedelai tahun 2020 (per Desember)

No	Kapanewon	SK CPCL	Realisasi (Ha)	Pupuk Hayati (liter)	Rhizobium (kg)	Herbisida (liter)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Provitass (Ku/Ha) Wose Kering	Produksi (Ton) Wose Kering
1	Srandakan	5	5	15	1,25	15	5	5	12,00	6,00
2	Pandak	82	82	246	20,50	246	82	82	16,91	138,70
3	Jetis	80	80	240	20,00	240	80	80	17,36	138,90

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Kapanewon	SK CPCL	Realisasi (Ha)	Pupuk Hayati (liter)	Rhizobium (kg)	Herbisida (liter)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha) Wose Kering	Produksi (Ton) Wose Kering
4	Imogiri	17	17	51	4,25	51	17	17	12,88	21,90
5	Dlingo	216	216	648	54,00	648	216	216	19,51	421,50
6	Banguntapan	8	8	24	2,00	24	8	8	15,24	12,19
7	Sewon	16	16	48	4,00	48	16	16	24,31	38,90
8	Pajangan	16	16	48	4,00	48	16	16	13,22	21,15
9	Sedayu	51	51	153	12,75	153	51	51	14,66	74,76
Kabupaten Bantul		491	491	1473	122,75	1473	491	491	17,80	874,00

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 3.2.2 Realisasi penyaluran bantuan benih kacang tanah tahun 2020 (per Desember)

No	Kapanewon	SK CPCL	Realisasi (Ha)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Belum Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha) Wose Kering	Produksi (Ton) Wose Kering
1	Srandakan	10	10	10	10	-	17,00	17,00
2	Pundong	70	70	70	70	-	17,49	122,43
3	Bantul	15	15	15	15	-	14,99	22,49
4	Jetis	25	25	25	25	-	19,78	49,45
5	Dlingo	65	65	65	-	65	0,00	0,00
6	Banguntapan	15	15	15	15	-	13,24	19,85
Kabupaten Bantul		200	200	200	135	65	17,13	231,23

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 3.2.3 Realisasi penyaluran bantuan benih padi inbrida tahun 2020 (per Desember)

No	Kapanewon	SK CPCL	Realisasi (Ha)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Belum Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha) Wose Kering	Produksi (Ton) Wose Kering
1	Srandakan	50	50	50	50	-	78,00	390,00
2	Sanden	100	100	100	100	-	79,20	792,00
3	Kretek	150	150	150	15	135	82,60	123,90
4	Pundong	150	150	150	150	-	85,65	1284,70
5	Bambanglipuro	150	150	150	150	-	90,18	1352,69
6	Pandak	150	150	150	110	40	92,44	1016,80
7	Bantul	150	150	150	150	-	86,67	1300,10
8	Jetis	150	150	150	150	-	79,56	1193,40
9	Imogiri	50	50	50	50	-	75,55	377,75
10	Dlingo	100	100	100	100	-	76,80	768,00

No	Kapanewon	SK CPCL	Realisasi (Ha)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Belum Panen (Ha)	Provitasi Wose Kering (Ku/Ha)	Produksi Wose Kering (Ton)
11	Pleret	125	125	125	125	-	78,70	983,76
12	Piyungan	125	125	125	125	-	78,33	979,13
13	Banguntapan	150	150	150	150	-	85,28	1279,17
14	Sewon	150	150	150	150	-	86,17	1292,50
15	Kasih	50	50	50	50	-	109,55	547,75
16	Pajangan	50	50	50	50	-	80,09	400,45
17	Sedayu	150	150	150	150	-	69,90	1048,53
Kabupaten Bantul		2000	2000	2000	1825	175	83	15130,63

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 3.2.4 Realisasi penyaluran benih jagung hibrida tahun 2020

No	Kapanewon	SK CPCL	Realisasi (Ha)	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Provitasi Wose Kering (Ku/Ha)	Produksi Wose Kering (Ton)
1	Srandakan	35	35	35	35	80,29	281,00
2	Sanden	125	125	125	125	84,87	1060,86
3	Kretek	100	100	100	100	93,53	935,25
4	Pundong	60	60	60	60	87,26	523,58
5	Bambanglipuro	50	50	50	50	90,45	452,24
6	Pandak	167	167	167	167	88,16	1472,25
7	Bantul	28	28	28	28	80,36	225,00
8	Pleret	100	100	100	100	71,38	713,82
9	Piyungan	45	45	45	45	96,11	432,50
10	Banguntapan	19	19	19	19	79,95	151,90
11	Pajangan	168	168	168	168	83,02	1394,70
12	Sedayu	103	103	103	103	79,10	814,75
Kabupaten Bantul		1000	1000	1000	1000	84,58	8457,85

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, 2020

Realisasi fisik tugas pembantuan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura pada tahun 2020 tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp364.340.000,00 atau sebesar 86,65 %. Program ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan nilai tambah dan memperkuat daya saing produk hortikultura di pasar. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan telah mewujudkan pelaksanaan tugas pembantuan berupa fasilitasi pasca panen dan pengolahan cabai dan bawang merah dengan sasaran 1 unit, fasilitasi prasarana pasca

panen hortikultura 1 unit, sarana pasca panen hortikultura 1 unit, pembelian produk hortikultura 1 paket/unit, pengemasan produk 1 unit dan pemasaran produk hortikultura dengan 1 unit. Adapun perincian target dan realisasi pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.2.5 Target dan Realisasi Pembinaan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Hortikultura tahun 2020 dengan sumber dana Tugas Pembantuan.

Kegiatan	Lokasi/Kelompok Penerima	Target	Realisasi
Fasilitasi prasarana pasca panen bawang merah	Kelompok Tani Lestari Mulyo, Nawungan, Selopamioro, Imogiri	1 unit	1 unit
Fasilitasi sarana pasca panen hortikultura	Kelompok Tani Lestari Mulyo, Nawungan, Selopamioro, Imogiri	1 unit	1 unit
Pemasaran produk hortikultura	Kelompok Tani Pasir Makmur, Soge Sanden, Srigading, Sanden	1 unit	1 unit
Pembelian produk hortikultura	Imogiri, Sanden, Kretek	1 paket	1 paket
Pengemasan produk hortikultura	Asosiasi Pasar Tani, Komunitas Tanam Lestari dan Asosiasi KWT Kab. Bantul	1 paket	1 paket

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 3.2.6 Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintah Daerah DIY yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pertanian	Keputusan Pengguna Anggaran dan Ketahanan Pangan DIY No. 948/02544 Tahun 2020 Tentang: Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 948/00072 Tentang Pejabat Pengelola Kegiatan Tugas Pembantuan Pada	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 1. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Keluaran (Output) : • Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai dan Kacang Tanah. 2. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Keluaran (Output) : • Fasilitasi Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia [Base Line],	Bantul	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan	2.616.881.000	2.616.831.000	99,99	1. Juknis pelaksanaan kegiatan; 2. Sosialisasi, rapat koordinasi dan pembinaan sebanyak 2 kali. • Penetapan CPCL; • Pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan budidaya kacang tanah. 1. Juknis pelaksanaan kegiatan 2. Sosialisasi, rapat koordinasi dan pembinaan sebanyak 16 kali • Penetapan CPCL; • Pembinaan dan pendampingan teknis kepada petani penerima bantuan benih.	100	

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan TA 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Sereal, dan • Fasilitasi Penyediaan Benih Bersertifikat [Base Line]. 						<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan monitoring bantuan benih. • Penyaluran sarana produksi kacang tanah dan kedelai kepada penerima, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Benih kedelai 22.095 kg; 2) Benih kacang tanah 24.000 kg; 3) pupuk hayati 1.473 liter; 4) pestisida 1.473 liter; dan 5) rhizobium 122.750 gram. 		
			3. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.						1. Juknis pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat koordinasi sebanyak 1 kali.		
			Keluaran (Output) :						<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan CPCL; • Pembinaan dan pendampingan teknis kepada petani jagung hibrida penerima bantuan benih. 		

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Padi Inbrida, dan • Fasilitasi Penyediaan Benih Bersertifikat. 						<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan monitoring bantuan benih • Penyaluran benih yang telah disediakan oleh satker berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Benih padi inbrida 50.000 kg; 2) Benih jagung hibrida 15.000 kg 		
2.	Dinas Pertanian Provinsi DI. Yogyakarta	Keputusan Pengguna Anggaran Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY No. 948/02544 Tahun 2020 Tentang: Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran	Kuasa Dinas dan Pangan 1. Kegiatan Sarana Pasca Panen Hortikultura. Keluaran (Output) : <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Sarana Pasca Panen Hortikultura 		Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	420.450.000	364.340.000	86,65		100	
									<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi, pendampingan; 2. Penetapan calon penerima (Kelompok Tani Lestari Mulyo, Nawungan, Selopamioro, Imogiri). <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 1 (satu) unit bangunan bangsal panen bawang merah. • Penyaluran bantuan berupa: 		

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 948/00072 Tentang Pejabat Pengelola Kegiatan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan TA 2020	2. Kegiatan Prasarana Pasca Panen Hortikultura. Keluaran (Output) :						1) timbangan digital 1 (satu) unit; 2) kipas 2 (dua) unit; 3) Container 80 buah; 4) terpal 20 buah; 5) bagor sayur 1000 buah; 6) angkong 5 unit; 7) troli roda 2 (2 unit); 8) troli roda 4 (1 unit).		
			• Fasilitasi Prasarana Pasca Panen Hortikultura.						1. Rapat koordinasi, pendampingan; 2. Penetapan calon penerima (Kelompok Tani Pasir Makmur, Soge Sanden, Srigading, Sanden;).		
			3. Kegiatan Sarana Pemasaran Hortikultura. Keluaran (Output) :						• Penyaluran sarana pasca panen kepada penerima berupa motor roda 3 dan genset untuk menunjang kegiatan pasar lelang		
									1. Rapat koordinasi, pendampingan; 2. Penetapan calon penerima (Asosiasi Pasar Tani; Komunitas Tanam		

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									Lestari; Assosiasi KWT Kab. Bantul).		
			<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Sarana Pemasaran Hortikultura. 						<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bantuan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tas furing/belanja untuk wadah produk (1900 buah); 2) Plastik kresek (2000 lembar/buah); 3) Karung buah (1000 lembar/buah). • Pemasaran produk hortikultura Kelompok Tani Pasir Makmur, Soge Sanden, Srigading, Sanden • Pembelian produk hortikultura di Kapanewon Imogiri, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek • Pengemasan produk hortikultura dengan sasaran Asosiasi Pasar Tani, Komunitas Tanam Lestari dan Asosiasi KWT Kab. Bantul. 		

3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain:

1. Kemasan bantuan benih kedelai terlalu besar (50 kg) dan juga terlalu tipis sehingga mempengaruhi masa simpan benih;
2. Droning bantuan benih kacang tanah di sebagian kelompok terlambat dari jadwal tanam karena kualitas benih kurang baik sehingga harus diganti dan memerlukan waktu yang cukup lama;
3. Bantuan benih yang diserahkan kepada petani tidak sesuai dengan harapan petani. Pemerintah memberikan bantuan benih UM3 sedangkan petani mengharapkan benih yang diterima adalah benih UM2 yang memiliki produksi dan produktivitas lebih tinggi;
4. Masa penanaman jagung hibrida dilaksanakan pada MT 2 (Juni-Agustus) bersamaan dengan merebaknya hama ulat grayak (*Spodoptera frugiperda*) sehingga petani melakukan gerakan pengendalian;
5. Proses penyelesaian status tanah untuk lokasi pembangunan bangsal membutuhkan waktu cukup lama, sehingga pembangunan bangsal terhambat dan belum termanfaatkan secara maksimal.
6. Kebanyakan petani menjual hasil produknya melalui pengepul atau ditebas. Hal tersebut menyebabkan harga yang diperoleh petani belum dapat mensejahterakan mereka. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan harga yang baik untuk petani adalah melalui pasar lelang. Kelompok Tani Pasir Makmur Soge Sanden Srigading Sanden sudah melaksanakan proses pasar lelang untuk komoditas cabai, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala terbatasnya fasilitas. Selain itu pedagang yang membeli di pasar lelang masih merupakan pedagang di sekitar lokasi.
7. Nilai jual produk hortikultura masih belum layak dikarenakan penanganan pasca panen yang belum baik dan masa simpannya terbatas.
8. Program pembelian produk segar hortikultura belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan penganggaran yang tidak sesuai dengan waktu panen petani. Sehingga hanya sedikit petani/kelompok tani yang masa panennya bertepatan dengan rencana penganggaran. Selain itu, petani/kelompok tani lebih tertarik menjual ke pasar umum

dikarenakan harganya sudah tinggi, melebihi standar harga yang telah ditetapkan dalam rencana penganggaran. Belum diaturnya mekanisme pembelian dalam pedoman umum sehingga menimbulkan keraguan Tim Kabupaten dalam melaksanakan program ini.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan maupun rekomendasi saran yang ditawarkan dalam menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi/konsolidasi ke provinsi agar penganggaran pada tahun 2021 menggunakan benih jagung UM2;
2. Melakukan koordinasi dengan provinsi agar dalam pengadaan benih kedelai, meminta pihak penyedia untuk mengemas/packing benih dalam ukuran lebih kecil dan bahan lebih tebal agar memudahkan dalam penyimpanan dan benih dapat terjaga kualitasnya;
3. Melakukan koordinasi dengan provinsi agar kedepannya dalam pengadaan benih kacang tanah diperhitungkan waktu pengujian benih agar jadwal tanam tidak mundur.
4. Melakukan koordinasi dengan PPL dan POPT di tiap kecamatan untuk terus memantau serangan hama ulat grayak di wilayah masing-masing.
5. Fasilitas prasarana pasca panen bawang merah berupa bangsal pasca panen di KT Lestari Mulyo Nawungan Selopamioro Imogiri agar segera dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
6. Minimnya fasilitas pasar lelang yang dimiliki Kelompok Tani Pasir Makmur mendorong Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menunjuk Kelompok Tani Pasir Makmur sebagai penerima fasilitas pasar lelang. Dengan pemberian fasilitas tersebut diharapkan Kelompok Tani Pasir Makmur dapat menyelenggarakan pasar lelang dengan baik dan bisa lebih menarik pedagang di luar daerah.
7. Petani/kelompok tani penerima bantuan diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas pengemasan produk dengan baik agar produk mereka terjaga kualitasnya. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pendampingan terhadap petani/kelompok tani penerima bantuan dalam pemanfaatan fasilitas yang diberikan agar nilai jual lebih tinggi dan masa simpannya lebih lama. Dengan demikian, petani diharapkan dapat memanfaatkan media sosial atau *platform online* untuk memasarkan produknya.
8. Mengidentifikasi waktu panen hortikultura dan menghitung kuantitas, kualitas dan kontinuitas secara tepat.

9. Mengusulkan agar mekanisme pembelian diatur secara jelas di dalam Pedoman Umum

BAB IV
PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan Kabupaten Bantul tersaji pada **Tabel 4.1.1.**

Tabel 4.1.1. Jenis pelayanan dasar dan indikator pada bidang urusan pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang Penyebut
Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 th yang berpartisipasi dalam PAUD	Σ anak usia 5 – 6 th yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini <hr/> Σ anak usia 5 – 6 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
Pendidikan dasar (SD)	Jumlah warga negara usia 7 – 12 th yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	Σ anak usia 7 – 12 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar <hr/> Σ anak usia 7 – 12 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
Pendidikan dasar (SMP)	Jumlah anak usia 12– 15 th yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	Σ anak usia 12 – 15 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama <hr/> Σ anak usia 12 – 15 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 th yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Σ anak usia 7 – 18 th yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan <hr/> Σ anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan

Sumber : Permendikbud 32/2018

Mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan pendidikan per jenis pelayanan tersaji pada **Tabel 4.1.2.**

Tabel 4.1.2. Jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang urusan pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
Pendidikan anak usia dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Gambar; 2. Alat Mewarnai 3. satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c 4. Pembiayaan biaya personil peserta didik 5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV 7. jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan
Pendidikan dasar (SD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku teks pelajaran 2. Perlengkapan belajar 3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat 5. jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan 6. satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c 7. Pembiayaan peserta didik 8. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV
Pendidikan dasar (SMP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku teks pelajaran 2. Perlengkapan belajar 3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat 5. jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan 6. satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c 7. Pembiayaan peserta didik 8. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV
Pendidikan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul belajar 2. Perlengkapan belajar 3. Jumlah rombongan belajar di PKBM 4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV 6. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 7. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat 8. PKBM Terakreditasi minimal C

Sumber : Permendikbud 32/2018

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target capaian indikator utama per jenis layanan SPM bidang urusan pendidikan dalam laporan ini berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data anak pada kisaran usia tertentu diperoleh melalui data kependudukan umur

tunggal Kabupaten Bantul semester 2 (dua) tahun 2020. Sedangkan data anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan disajikan berdasarkan data umur tunggal penduduk Kabupaten Bantul usia 7-18 tahun dikurangi dengan jumlah anak usia 7-18 yang berpartisipasi dalam pendidikan pada tingkatan SD hingga SMA. Di samping itu, mutu layanan per jenis pelayanan disajikan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Bantul. Target capaian indikator utama dan mutu layanan per jenis layanan tertuang pada **Tabel 4.1.3**.

Tabel 4.1.3. Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

Jenis Layanan	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 th yang berpartisipasi dalam PAUD	25.029	100
	Σ anak usia 5 – 6 th yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	25.029	
	Σ anak usia 5 – 6 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	26.653	
	1) buku gambar	300.348	100
	2) alat Mewarnai	50.058	100
	3) satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	339	100
	4) pembiayaan biaya personil peserta didik	304	100
	5) kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	482	100
	6) kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.835	100
	7) jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.654	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	123.172	100
1. SD	Jumlah warga negara usia 7 – 12 th yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	82.166	100

Jenis Layanan	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
	Σ anak usia 7 – 12 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	82.166	
	Σ anak usia 7 – 12 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	86.597	
	1) Buku teks pelajaran	82.166	100
	2) Perlengkapan belajar	164.332	100
	3) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	387	100
	4) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	254	100
	5) jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.623	100
	6) satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	394	100
	7) Pembiayaan peserta didik	51.803	100
	8) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	4.776	100
2. SMP	Jumlah anak usia 13– 15 th yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	41.006	100
	Σ anak usia 13 – 15 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	41.006	
	Σ anak usia 13 – 15 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	41.694	
	1) Buku teks pelajaran	41.006	100
	2) Perlengkapan belajar	82.012	100
	3) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	116	100
	4) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	352	100
	5) jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.387	100

Jenis Layanan	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
	6) satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	113	100
	7) Pembiayaan peserta didik	5.108	100
	8) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.730	100
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 th yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.046	100
	Σ anak usia 7 – 18 th yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2.046	
	Σ anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	15.076	
	1) Modul belajar	2.046	100
	2) Perlengkapan belajar	4092	100
	3) jumlah rombongan belajar di PKBM	207	100
	4) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	245	100
	5) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	316	100
	6) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	17	100
	7) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	45	100
	8) PKBM Terakreditasi minimal C	15	100

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2020

4.1.3. Realisasi

Realisasi capaian SPM bidang urusan pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersaji pada **Tabel 4.1.4.**

Tabel 4.1.4. Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
1. Pendidikan Anak Usia Dini			100
Jumlah warga negara usia 5 – 6 th yang berpartisipasi dalam PAUD	Σ anak usia 5 – 6 th yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	25.029	
	Σ anak usia 5 – 6 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	26.653	
	1) buku Gambar	300.348	100
	2) alat Mewarnai	50.058	100
	3) satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	339	100
	4) pembiayaan biaya personil peserta didik	304	100
	5) kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	482	100
	6) kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.835	100
	7) jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.654	100
2. Pendidikan Dasar			100
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)		123.172	
1. SD	Σ anak usia 7 – 12 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	82.166	
	Σ anak usia 7 – 12 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	86.597	
	1) Buku teks pelajaran	82.166	100
	2) Perlengkapan belajar	164.332	100
	3) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	387	100
	4) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	254	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
	5) jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.623	100
	6) satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	394	100
	7) Pembiayaan peserta didik	51.803	100
	8) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	4.776	100
2. SMP	Σ anak usia 13 – 15 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	41.006	
	Σ anak usia 13 - 15 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	41.694	
	1) Buku teks pelajaran	41.006	100
	2) Perlengkapan belajar	82.012	100
	3) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	116	100
	4) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	352	100
	5) jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.387	100
	6) satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	113	100
	7) Pembiayaan peserta didik	5.108	100
	8) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.730	100
3. Pendidikan Kesetaraan			100
Jumlah warga negara usia 7 – 18 th yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Σ anak usia 7 – 18 th yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2.046	
	Σ anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	15.076	
	1) Modul belajar	2.046	100
	2) Perlengkapan belajar	4092	100
	3) jumlah rombongan belajar di PKBM	207	100

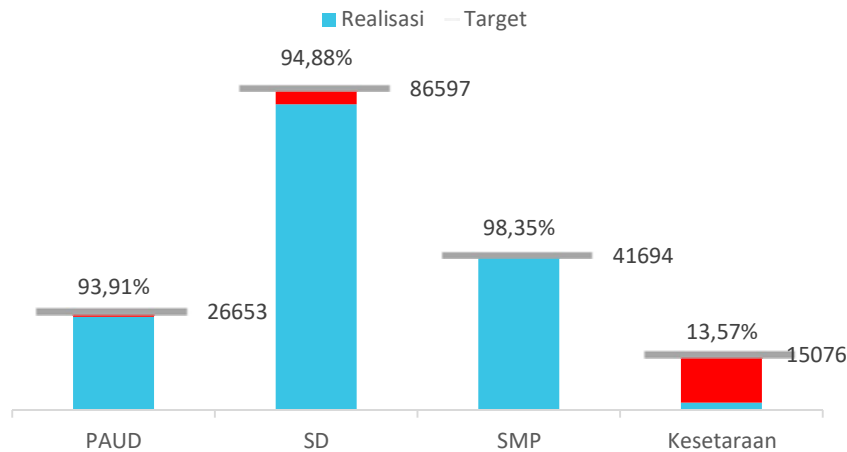
Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
	4) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	245	100
	5) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	316	100
	6) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	17	100
	7) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	45	100
	8) PKBM Terakreditasi minimal C	15	100

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2020

Realisasi capaian layanan SPM bidang urusan pendidikan di Kabupaten Bantul tahun 2020 sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.1.4** menunjukkan bahwa mutu layanan per jenis pelayanan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam perencanaan atau terealisasi 100%. Sedangkan jika melihat capaian realisasi partisipasi anak pada tiap jenjang pendidikan pada masing-masing indikator utama per jenis layanan jika dibandingkan dengan target/data usia anak pada kisaran usia tertentu (sesuai dengan jenjang pendidikan) tidak seluruhnya terlayani atau tidak 100%, sebagaimana tersaji pada **Grafik 4.1.1**. Hal ini dimungkinkan karena data peserta didik yang disajikan merupakan peserta didik yang terdata menempuh pendidikan di sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Bantul yang terekam dalam database Dapodik. Selisih data yang ada diperkirakan karena ada warga Kabupaten Bantul yang bersekolah di sekolah yang berada dalam wilayah kabupaten lain.

Data ini tidak dapat diakses oleh Kabupaten Bantul dikarenakan Dapodik merupakan aplikasi data kependidikan berbasis wilayah sehingga masing-masing pemerintah daerah hanya memiliki akses terhadap data kependidikan di satuan pendidikan yang ada di masing-masing wilayahnya. Berdasarkan pedoman pemenuhan capaian SPM bidang urusan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Permendikbud 32/2018, peserta didik yang mengikuti pendidikan di wilayah

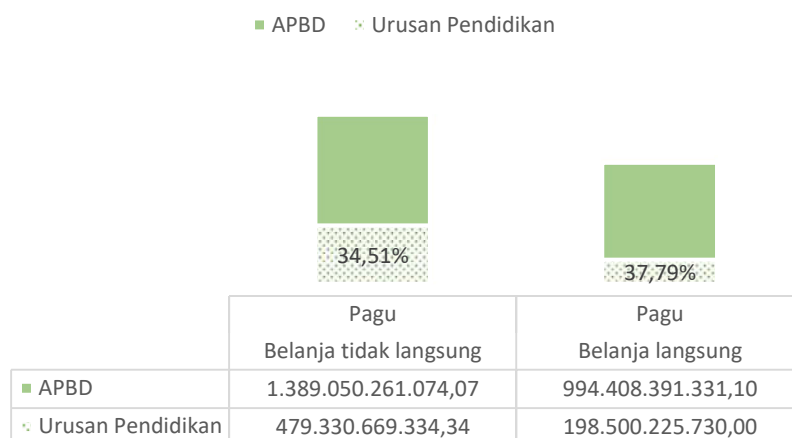
kabupaten lain dihitung telah memperoleh layanan SPM. Namun, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memiliki data tersebut, maka tidak dapat dipastikan berapa jumlah warga yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Bantul.



Grafik 4.1.1. Persentase selisih realisasi indikator utama capaian SPM bidang urusan pendidikan terhadap usia anak kisaran umur tertentu

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan urusan pendidikan merupakan yang terbesar dibandingkan dengan alokasi untuk penyelenggaraan pemerintahan urusan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bantul di dalam perencanaan tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan urusan pendidikan sebesar Rp677.830.895.064,34 atau 28,44% dari total pagu APBD (Rp2.383.458.652.405,17). Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan pendidikan terdiri dari belanja tidak langsung (Rp479.330.669.334,34) dan belanja langsung (Rp198.500.225.730,00). Perbandingan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan terhadap total alokasi anggaran keseluruhan dalam APBD Kabupaten Bantul tersaji pada **Grafik 4.1.2**.



Grafik 4.1.2. Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan pendidikan terhadap APBD

Keseluruhan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan pendidikan, sebanyak Rp102.608.693.450,00 dialokasikan untuk pemenuhan SPM atau sebesar 51,69% dari total anggaran belanja langsung (Rp198.500.225.730,00). Alokasi anggaran dan realisasi pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan Kabupaten Bantul tahun 2020 tersaji pada **Tabel 4.1.5**.

Tabel 4.1.5. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pemenuhan SPM bidang pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Pendidikan Anak Usia Dini	<u>18.262.856.000</u>	<u>17.786.003.000</u>	<u>97</u>
1) penyediaan biaya personal peserta didik PAUD	457.600.000	422.200.000	92
2) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi seluruh PAUD	16.956.600.000	16.516.400.000	97
3) pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	848.656.000	847.403.000	99
Pendidikan Dasar	<u>83.043.533.000</u>	<u>81.785.590.275</u>	<u>98</u>
1. Sekolah Dasar (SD/MI)	<u>57.390.883.000</u>	<u>56.716.580.123</u>	<u>99</u>
1) penyediaan biaya personal peserta didik sekolah dasar	30.715.250.000	30.535.275.123	99

Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
2) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	21.988.800.000	21.495.700.000	98
3) penambahan ruang kelas baru	4.486.008.000	4.486.008.000	100
4) rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	200.825.000	199.597.000	99
2. Sekolah Dasar (SMP/MTs)	<u>25.652.650.000</u>	<u>25.069.010.152</u>	<u>98</u>
1) penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	16.133.950.000	15.867.210.152	98
2) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	7.951.200.000	7.634.300.000	96
3) rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	1.567.500.000	1.567.500.000	100
Pendidikan Kesetaraan	<u>1.302.304.450</u>	<u>1.258.449.361</u>	<u>97</u>
1) penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan	551.400.000	528.000.000	96
2) penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan	47.600.000	46.725.000	98
3) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	703.304.450	683.724.361	97

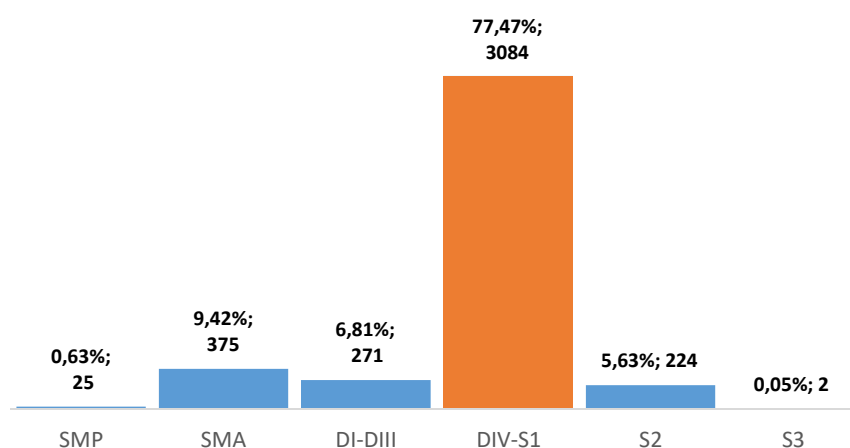
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2020

4.1.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga. Struktur kelembagaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, bidang teknis pengampu

urusan pemerintahan bidang pendidikan (Bidang PAUD dan Pendidikan Non Fprmal; Bidang Pendidikan Sekolah Dasar; Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, UPT, Kelompok Jabatan Fungsional), serta bidang teknis pengampu urusan kepemudaan dan olahraga (Bidang Pemuda dan Olahraga).

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul sebanyak 3.992 orang, terdiri dari 3.981 orang pegawai pelaksana bidang urusan pendidikan dan 11 orang bidang urusan kepemudaan dan olahraga. Personil pengampu bidang urusan pendidikan terdiri dari Kepala OPD (1 orang), Sekretaris Dinas (1 orang), Sekretariat (26 orang), bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang pendidikan (602 orang) dan fungsional (3.362 orang). Sebaran tingkat pendidikan personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan pendidikan sebagaimana tersaji pada **Grafik 4.1.3** menunjukkan bahwa tingkat pendidikannya relatif baik dimana sebanyak 89,95% merupakan lulusan perguruan tinggi (DI – S3) dan hanya 10,05% yang lulusan SMP-SMA.



Grafik 4.1.3. Personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan pendidikan berdasarkan pendidikan

Sebaran data sebaran personil pengampu penerapan SPM bidang urusan pendidikan pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.1.6**.

Tabel 4.1.6. Sebaran personil pengampu penerapan SPM bidang urusan pendidikan pada masing-masing unit kerja

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretaris Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	26	1	12	13	-
Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	-	4	3	2
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	11	-	1	9	1
Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9	-	2	2	5
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11	-	3	6	2
Kelompok Jabatan Fungsional	3.913	20	140	1692	2061
Total	3.981	21	162	1725	2073

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2020

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Pengumpulan data dalam bidang pendidikan difasilitasi melalui Dapodik, dimana masing-masing pemerintah daerah memiliki akses dengan basis data kewilayahan untuk melakukan updating data yang dilakukan di level penyelenggara satuan pendidikan. Namun dengan basis data kewilayahan tersebut berimbas pada pemerintah daerah tidak dapat mengakses data warganya yang bersekolah di satuan pendidikan yang ada di luar wilayah kewenangannya.

2) Perhitungan kebutuhan:

- Perhitungan kebutuhan terkait erat dengan ketersediaan database sesuai

dengan kebutuhan. Selain itu, pemahaman definisi operasional dan teknis/mechanisme juga berpengaruh pada kesesuaian hasil dari perhitungan kebutuhan yang menjadi dasar dalam perencanaan pemenuhan SPM. Pemahaman Permendagri 32/2018 yang menjadi acuan dalam penerapan SPM bidang urusan pendidikan masih belum komprehensif sehingga masih ditemukan perbedaan persepsi baik di tingkat internal Pemerintah Kabupaten Bantul maupun dengan pemda lain di DIY.

3) Pelaksanaan:

- Pemenuhan layanan SPM bidang urusan pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan dengan kondisi keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, pemenuhan layanan SPM bergantung dengan adanya dana dari pemerintah pusat, seperti BOP dan BOS. Namun demikian, pemerintah pusat telah memiliki ketentuan mengikat terkait jenis belanja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam penggunaan dana BOP dan BOS. Banyak menu di BOP yang tidak dapat digunakan untuk pemenuhan layanan SPM. Di sisi lain, tidak ada menu untuk pemenuhan layanan SPM di BOS.
- Keterbatasan Anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul baik itu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta rencana penghapusan Bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Belum semua lembaga penyelenggara pendidikan memahami secara detail tentang kewajiban pemenuhan SPM Pendidikan Dasar di satuan pendidikan. Kepala Sekolah dan Komite Sekolah kurang memahami kewajiban untuk memenuhi SPM Pendidikan Dasar yang harus dilakukan oleh semua satuan pendidikan sehingga masih ada sekolah yang lebih mengutamakan kebutuhan yang lain daripada memenuhi SPM Pendidikan Dasar.

- Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penentuan kriteria penerima bantuan baik itu bantuan DAK atau bantuan lainnya yang tidak sinkron dengan kebijakan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar, misalnya bantuan dari Pemerintah Pusat dapat diberikan bagi sekolah-sekolah yang jumlah siswanya memenuhi ketentuan jumlah siswa minimal padahal masih ada sekolah dengan jumlah siswa sedikit (dibawah ketentuan jumlah minimal) yang belum terpenuhi SPM Pendidikan Dasar.
- Keterbatasan Sumber Daya Alam/lahan untuk pembangunan ruang kelas baru, ruang kepala sekolah/madrasah, ruang guru serta ruang laboratorium bagi satuan pendidikan swasta.
- Penerapan *reward* dan *punishment* yang belum konkrit, baik oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah daerah terhadap perangkat daerahnya sehingga penerapan SPM belum maksimal atau belum menjadi prioritas utama didalam perencanaan daerah walaupun jika melihat dokumen perencanaan, alokasi anggaran pada penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar (dimana SPM termasuk didalamnya) sudah menyita lebih dari 50% APBD.

4) Pelaporan:

- Pelaporan online melalui aplikasi yang difasilitasi oleh Kemendagri belum disosialisasikan secara detail, sehingga data yang dilaporkan masih menurut persepsi masing-masing.

b. Solusi

1) Pengumpulan data:

- Perlu adanya kebijakan yang dapat mengakomodir akses data oleh pemerintah daerah terkait warganya yang menempuh pendidikan di luar wilayah kabupaten bersangkutan dalam aplikasi Dapodik, atau
- Aplikasi Dapodik perlu mengakomodir laporan data peserta didik di seluruh satuan pendidikan yang ada di wilayah NKRI yang langsung terkoneksi ke database pemerintah daerah tertentu (masih dalam aplikasi

Dapodik) berdasarkan kewilayahan sesuai dengan data NIK, sehingga pemerintah daerah dapat mengakses data terkait warganya yang bersekolah di luar wilayah kewenangannya.

2) Perhitungan kebutuhan:

- Koordinasi di tingkat pemerintah provinsi sudah dilakukan namun belum diperoleh hasil yang diharapkan karena pemerintah provinsi mengembalikan kebijakan kepada pemerintah daerah masing-masing;
- Perlu adanya penjelasan lebih mendalam oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang sifatnya penjelasan teknis, bukan penjelasan kebijakan formalitas agar terjadi satu pemahaman yang sama.

3) Pelaksanaan

- Menyusun prioritas pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber anggaran yang ada dan mengutamakan tingkat urgensi untuk pemenuhan SPM.
- Sosialisasi dan Pelatihan Standar Pelayanan Minimal kepada Pengawas, Kepala sekolah, Guru, Bendahara dan Komite sekolah agar dapat menyelesaikan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar di satuan pendidikan masing-masing dengan mengintegrasikan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M).
- Optimalisasi koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kebijakan di bidang pendidikan.
- Optimalisasi koordinasi dengan lembaga penyelenggara pendidikan dalam rangka percepatan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar di satuan pendidikan swasta.
- Sosialisasi dan Optimalisasi kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk mendukung tuntasnya SPM di satuan pendidikan di Kabupaten Bantul .

- Pemberian penghargaan bagi DUDI yang peduli/mendukung pencapaian SPM di satuan pendidikan.
- Pemberian sertifikat SPM bagi sekolah yang mencapainya.

4) Pelaporan

- Sudah dilakukan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Pemda DIY, namun masih belum maksimal dan belum sesuai harapan karena masih terdapat perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan yang telah ditetapkan dalam Permendikbud 32/2018

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan kesehatan Kabupaten Bantul terdiri atas 12 jenis pelayanan sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.2.1.**

Tabel 4.2.1. Jenis pelayanan dasar dan indikator pada bidang urusan kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang Penyebut
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Σ ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun Σ sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Σ ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun Σ sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Σ bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang Penyebut
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<p>bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Σ sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>
Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<p>Σ bayi baru lahir usia 12-23 + Σ balita usia 24-35 + Σ balita usia 36-59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <hr/> <p>Σ sasaran balita usia 12-59 di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Σ anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran</p> <hr/> <p>Σ semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama</p>
Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	<p>Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrinning kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr/> <p>Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	<p>Σ orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrinning kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)</p> <hr/> <p>Σ semua warga negara usia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)</p>
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ penderita hipertensi usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang Penyebut
		Σ estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Σ estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Σ ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Σ ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan peayanan TBC sesuai standar	Σ orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun Σ orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HumanImmunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Sumber : Permenkes 4/2019

Mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan kesehatan per jenis pelayanan tersaji pada **Tabel 4.2.2:**

Tabel 4.2.2. Jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang urusan kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksin Tetanus Difetri (Td) 2. Tablet Tambah Darah 3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil: <ol style="list-style-type: none"> a. Test Kehamilan; b. Pemeriksaan HB c. Pemeriksaan Golongan Darah d. Pemeriksaan Glukoprotein Urin 4. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu 5. Buku KIA
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Fotograf 2. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) 3. Buku KIA
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksin Hepatitis BO 2. Vitamin K1 Injeksi 3. Salep/Tetes Mata Antibiotik 4. Formulir Bayi Baru Lahir 5. Formulir MTBM 6. Buku KIA
Pelayanan kesehatan balita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku 2. Formulir DDTK 3. Buku KIA 4. Vitamin A Biru 5. Vitamin A Merah 6. Vaksin Imunisasi Dasar: <ol style="list-style-type: none"> a. HBO; b. BCG; c. Polio; d. IPV; e. DPT-HB –Hib; f. Campak Rubell 7. Vaksin Imunisasi Lanjutan : <ol style="list-style-type: none"> a. DPT -HB –Hib; b. Campak Rubella 8. Jarum Suntik dan BHP 9. Peralatan Anafilaktik
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Raport Kesehatanku 2. Buku Pemantauan Kesehatan 3. Kuesioner Skrining Kesehatan 4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah 5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah
Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman dan Media KIE: <ol style="list-style-type: none"> a. Alat Ukur Berat Badan;

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	<ul style="list-style-type: none"> b. Alat Ukur Tinggi Badan; c. Alat Ukur Lingkar Perut; d. Tensimeter; e. Glukometer; f. Tes Strip Gula Darah; g. Lancet; h. Kapas Alkohol; i. KIT IVA Tes <ol style="list-style-type: none"> 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strip Uji Pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Gula Darah; b. Kolesterol 2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3. Buku Kesehatan Lansia
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 2. Tensimeter 3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Glukometer; b. Strip Tes Gula Darah; c. Kapas Alkohol; d. Lancet 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM 3. Pedoman dan Media KIE
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) 2. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi 3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 4. Media KIE
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 2. Reagen Zn TB 3. Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng 5. Catridge Tes Cepat Molekuler 6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan 7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner 2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan
	3. a. Bahan Medis Habis Pakai; b. Handschoen; c. Alkohol Swab; d. Plester; e. Lancet/ Jarum Steril; f. Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai 4. a. Alat tulis; b. Rekam Medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK

Sumber : Permenkes 4/2019

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Penentuan target sasaran layanan pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan diperoleh melalui proyeksi dengan rumus perhitungan tertentu yang telah ditetapkan. Rumus perhitungan proyeksi sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.2.3**.

Tabel 4.2.3. Rumus perhitungan proyeksi target sasaran per jenis layanan dasar

Jenis Layanan Dasar	Proyeksi Penentuan Target Sasaran
Pelayanan kesehatan ibu hamil.	$1,05 \times \Sigma$ bayi baru lahir th (n – 1)
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	$1,05 \times \Sigma$ bayi baru lahir th (n – 1)
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Σ bayi baru lahir th (n – 1)
Pelayanan kesehatan balita	Σ bayi balita th (n – 1)
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Σ siswa kelas 1 (setingkat SD) dan kelas 7 (setingkat SMP)
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Σ usia produktif menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) th (n-1)
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Σ usia lanjut menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) th (n-1)
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Σ penderita hipertensi menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) th (n-1)

Jenis Layanan Dasar	Proyeksi Penentuan Target Sasaran
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Σ penderita DM menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) th (n-1)
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Σ ODGJ berat lanjut menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) th (n-1)
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	$54\% \times (\Sigma \text{ penduduk} \times 71\%) \times 10$
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	75% ibu hamil, pasien TB, pasien IMS dan populasi kunci

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Target sasaran layanan berdasarkan hasil proyeksi sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.2.3** dan mutu layanan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersaji pada **Tabel 4.2.4**.

Tabel 4.2.4. Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	13.772	100
	Σ ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	13.772	
	Σ sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	13.772	
	1) Vaksin Tetanus Difetri (Td)	8.600	100
	2) Tablet Tambah Darah	732.698	100
	3) Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil:	22.506	100
	a. Test Kehamilan		
	b. Pemeriksaan HB		
	c. Pemeriksaan Golongan Darah		
	d. Pemeriksaan Glukoprotein Urin		

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	4) Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	24.068	100
	5) Buku KIA	14.675	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	13.772	100
	Σ ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	13.772	
	Σ sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	13.772	
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1) Formulir Fotograf	6.866	100
	2) Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	24.068	100
	3) Buku KIA	14.675	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	13.224	100
	Σ bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.224	
	Σ sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	13.224	
	1) Vaksin Hepatitis BO	10.955	100
	2) Vitamin K1 Injeksi	2.864	100
	3) Salep/Tetes Mata Antibiotik	3.129	100
	4) Formulir Bayi Baru Lahir	7.670	100
5) Formulir MTBM	10.388	100	
6) Buku KIA	14.675	100	
Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	60.699	100
	Σ bayi baru lahir usia 12-23 + Σ balita usia 24-35 + Σ balita usia 36-59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60.699	
	Σ sasaran balita usia 12-59 di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	60.699	
	1) Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	26.674	100
	2) Formulir DDTK	36.558	100

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
	3) Buku KIA	14.675	100
	4) Vitamin A Biru	19.746	100
	5) Vitamin A Merah	83.065	100
	6) Vaksin Imunisasi Dasar: a. HBO; b. BCG; c. Polio; d. IPV; e. DPT-HB –Hib; f. Campak Rubell	74.049	100
	7) Vaksin Imunisasi Lanjutan: a. DPT -HB –Hib; b. Campak Rubella	53.048	100
	8) Jarum Suntik dan BHP	77.998	100
	9) Peralatan Anafilaktik	104	100
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	123.148	100
	Σ anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	123.148	
	Σ semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	123.148	
	1) Buku Raport Kesehatanku	5.637	100
	2) Buku Pemantauan Kesehatan	4.713	100
	3) Kuesioner Skrining Kesehatan	36.764	100
	4) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	532	100
	5) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	0	0
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	462.093	100
	Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	462.093	
	Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	462.093	
	1) Pedoman dan Media KIE:	67.447	100

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
	a. Alat Ukur Berat Badan; b. Alat Ukur Tinggi Badan; c. Alat Ukur Lingkar Perut; d. Tensimeter; e. Glukometer; f. Tes Strip Gula Darah; g. Lancet; h. Kapas Alkohol; i. KIT IVA Tes		
	2) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4.590	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	102.429	100
	Σ orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrinning kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	102.429	
	Σ semua warga negara usia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)	102.429	
	1) Strip Uji Pemeriksaan: a. Gula Darah; b. Kolesterol	14.494	100
	2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	29.346	100
	3) Buku Kesehatan Lansia	3.095	100
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57.807	100
	Σ penderita hipertensi usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	57.807	
	Σ estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	57.807	
	1) Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	6.107	100

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
	2) Tensimeter	60	100
	3) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	27	100
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18.516	100
	Σ penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	18.516	
	Σ estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	18.516	
	1) a. Glukometer; b. Strip Tes Gula Darah; c. Kapas Alkohol; d. Lancet	44.282	100
	2) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	2.476	100
	3) Pedoman dan Media KIE	2.743	100
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.643	100
	Σ ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.643	
	Σ ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.643	
	1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	4	100
	2) Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	2	100
	3) Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	955	100
	4) Media KIE	1.202	100
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	9.332	100
	Σ orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	9.332	

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
	Σ orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun	9.332	
	1) Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.243	100
	2) Reagen Zn TB	197	100
	3) Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	21.997	100
	4) Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	4.723	100
	5) Catridge Tes Cepat Molekuler	8.100	100
	6) Formulir Pencatatan dan Pelaporan	27	100
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur	27	100
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	12.562	100
	Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	12.562	
	Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	12.562	
	1) Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	2.802	100
	2) Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	7.580	100
	3) a. Bahan Medis Habis Pakai: b. Handschoen; c. Alkohol Swab; d. Plester; e. Lancet/ Jarum Steril; f. ;Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai	11.000	100
	4) a. Alat tulis b. Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, nomor KTP/NIK	16.500	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

4.2.3. Realisasi

Realisasi capaian SPM bidang urusan kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersaji pada **Tabel 4.2.5**.

Tabel 4.2.5. Realisasi capaian SPM bidang urusan kesehatan

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil.			100
Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Σ ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	12.088	
	Σ sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	12.708	
	1) Vaksin Tetanus Difetri (Td)	6.767	100
	2) Tablet Tambah Darah	577.045	100
	3) Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil: a. Test Kehamilan b. Pemeriksaan HB c. Pemeriksaan Golongan Darah d. Pemeriksaan Glukoprotein Urin	18.805	100
	4) Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	16.729	100
	5) Buku KIA	12.226	100
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin			100
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Σ ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	12.697	
	Σ sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	12.708	
	1) Formulir Fotograf	3.582	100
	2) Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	16.729	100
	3) Buku KIA	12.226	100
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			100
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Σ bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	10.680	
	Σ sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	12.624	
	1) Vaksin Hepatitis BO	7.560	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
	2) Vitamin K1 Injeksi	2.799	100
	3) Salep/Tetes Mata Antibiotik	2.919	100
	4) Formulir Bayi Baru Lahir	3.515	100
	5) Formulir MTBM	5.686	100
	6) Buku KIA	12.226	100
4. Pelayanan kesehatan balita			100
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	(Σ bayi baru lahir usia 12-23 + Σ balita usia 24-35 + Σ balita usia 36-59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39.055	
	Σ sasaran balita usia 12-59 di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	53.647	
	1) Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	19.194	100
	2) Formulir DDTK	26.799	100
	3) Buku KIA	12.226	100
	4) Vitamin A Biru	17.477	100
	5) Vitamin A Merah	74.014	100
	6) Vaksin Imunisasi Dasar: a. HBO; b. BCG; c. Polio; d. IPV; e. DPT-HB –Hib; f. Campak Rubell	63.856	100
	7) Vaksin Imunisasi Lanjutan: a. DPT -HB –Hib; b. Campak Rubella	48.199	100
	8) Jarum Suntik dan BHP	72.328	100
	9) Peralatan Anafilaktik	104	100
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	108.659	
	Σ semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	113.650	

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
	1) Buku Raport Kesehatanku	5.637	100
	2) Buku Pemantauan Kesehatan	4.713	100
	3) Kuesioner Skrining Kesehatan	36.764	100
	4) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	532	100
	5) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	0	100
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif			100
Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	407.090	
	Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	584.084	
	1) Pedoman dan Media KIE: <ul style="list-style-type: none"> a. Alat Ukur Berat Badan; b. Alat Ukur Tinggi Badan; c. Alat Ukur Lingkar Perut; d. Tensimeter; e. Glukometer; f. Tes Strip Gula Darah; g. Lancet; h. Kapas Alkohol; i. KIT IVA Tes 	57.368	100
	2) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4.590	100
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			100
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Σ orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	29.086	
	Σ semua warga negara usia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)	132.562	
	1) Strip Uji Pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Gula Darah; b. Kolesterol 	14.494	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
	2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	29.346	100
	3) Buku Kesehatan Lansia	3.095	100
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ penderita hipertensi usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	36.777	
	Σ estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	60.204	
	1) Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	5.617	100
	2) Tensimeter	60	100
	3) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	27	100
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus			100
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.584	
	Σ estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	21.138	
	1) a. Glukometer; b. Strip Tes Gula Darah; c. Kapas Alkohol; d. Lancet	33.728	100
	2) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	1.765	100
	3) Pedoman dan Media KIE	2.354	100
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Σ ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.178	

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
	Σ ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2.353	
	1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	4	100
	2) Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	2	100
	3) Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	955	100
	4) Media KIE	1.202	100
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			100
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Σ orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	4.885	
	Σ orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun	4.885	
	1) Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.243	100
	2) Reagen Zn TB	185	100
	3) Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	21.342	100
	4) Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	3.657	100
	5) Catridge Tes Cepat Molekuler	4.100	100
	6) Formulir Pencatatan dan Pelaporan	27	100
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur	27	100
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV			100
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	12.011	
	Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	12.562	
	1) Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	2.263	100
	2) Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	7.143	100
	3) a. Bahan Medis Habis Pakai: b. Handschoen;	10.238	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
	c. Alkohol Swab; d. Plester; e. Lancet/ Jarum Steril; f. ;Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai		
	4) a. Alat tulis b. Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, nomor KTP/NIK	12.101	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Realisasi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bantul tidak seluruhnya mencapai 100% jika dihitung dari persentase sasaran yang terlayani, namun jika dihitung sesuai dengan aplikasi SPM maka capaiannya 100% tiap layanan, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Capaian pelayanan kesehatan pada ibu hamil 95,12 %. Dari 12.708 sasaran, 12.261 ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil yang sesuai standar. Masih ada 616 ibu hamil yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, hal ini dikarenakan :

- Selama pandemi, kunjungan ibu hamil ke puskesmas menurun. Bahkan setelah ada pengaturan jadwal kunjungan dan dilakukan kunjungan luar gedung, masih terdapat ibu hamil yang tidak berkunjung sesuai dengan jadwal.
- Masih terdapat Ibu hamil datang pertama kali ke puskesmas sudah lewat dari 12 minggu jadi tidak bisa dihitung sebagai K1.
- Terdapat Ibu hamil yang memeriksa ke fasilitas kesehatan swasta, kunjungan K1 nya tidak terpantau.
- Terdapat kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sehingga ketika kunjungan ke puskesmas sudah lewat K1 dan K 2.

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Capaian pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 99,91%. Dari 12.708 ibu bersalin, 12.697 ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan ibu bersalin sesuai standar. Hal ini disebabkan oleh:

- Lahir spontan di rumah sebelum mendapatkan pertolongan nakes.
- Ibu hamil datang ke Rumah Sakit untuk persalinan tetapi sesuai indikasi medis dipulangkan, namun ternyata sampai rumah melahirkan.
- Ibu hamil menyandang gangguan jiwa (ODGJ) melahirkan di rumah
- Beberapa ibu hamil tidak melakukan kunjungan nifas ketiga ke fasyankes karena pandemi covid meskipun telah dilakukan konsultasi kesehatan oleh puskesmas lewat whatsapp.

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 84,60 %. Terdapat 12.624 bayi lahir hidup di tahun 2020. Namun dari jumlah tersebut, 10.680 bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan :

- Beberapa bayi baru lahir belum dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).
- Kunjungan Neonatal (KN3) ditunda bahkan tidak dilakukan karena kondisi pandemi covid.

d. Pelayanan kesehatan balita

Capaian pelayanan kesehatan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 72,80%. Capaian pelayanan kesehatan balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan kondisi pandemi covid yang berimbas pada belum maksimalnya pelayanan oleh posyandu dan kegiatan luar gedung dalam pelaksanaan Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB).

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 95.61%. Capaian pelayanan kesehatan balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100 % disebabkan Adanya pandemic covid-19 sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaan skrining, sebagian besar skrining (pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar) dilakukan melalui aplikasi mobscreen penjarkes. Aplikasi online ini memerlukan kerjasama aktif dari para wali murid dan guru. Sedangkan yang menjadi kendala yaitu masih adanya wali murid belum bisa menggunakan aplikasi ini.

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 69.70%. Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100 % disebabkan pandemi covid sehingga screening tidak maksimal. Selama pandemi kegiatan masyarakat dibatasi, sehingga skrining dilakukan jika telah mendapat ijin pelaksanaan pertemuan. Pelayanan kesehatan pada usia produktif di dalam gedung juga turun karena kunjungan ke puskesmas menurun.

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 21.94%. Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:

- selama pandemi kegiatan luar gedung tidak berjalan, screening dioptimalkan pada kunjungan lansia di puskesmas padahal kunjungan pasien juga menurun.
- Banyak lansia yang masih terkendala dalam pengisian instrument Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan.

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

Capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 61.09%. Capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:

- Kerja sama dengan jejaring swasta untuk pelaporan kasus masih kurang, sehingga penderita Hipertensi yang mengakses fasyankes swasta belum terdata.
- Kunjungan menurun karena ketakutan masyarakat periksa di layanan Kesehatan selama era pandemi. Selain itu, kegiatan pelayanan diluar gedung juga menurun.

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

Capaian pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 64,26%. Capaian pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:

- Kerja sama dengan jejaring swasta untuk pelaporan kasus masih kurang, sehingga penderita Hipertensi yang mengakses fasyankes swasta belum terdata
- Kunjungan menurun karena ketakutan masyarakat periksa di layanan Kesehatan selama era pandemi. Selain itu, kegiatan pelayanan diluar gedung juga menurun

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

Capaian pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 92.56%. Capaian pelayanan kesehatan pada penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:

- Kunjungan menurun karena ketakutan masyarakat periksa di layanan Kesehatan selama era pandemi. Selain itu, kegiatan pelayanan diluar gedung juga menurun
 - Kesadaran Pasien dan keluarganya untuk rutin berobat masih rendah.
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- Capaian pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100 %.
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
- Capaian pelayanan kesehatan pada orang risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 95.61%. Capaian belum mencapai 100 % hal ini disebabkan karena adanya pandemic covid sehingga :
- Pemeriksaan ANC terpadu tidak dilakukan pada beberapa ibu hamil
 - Layanan VCT mobile terhenti

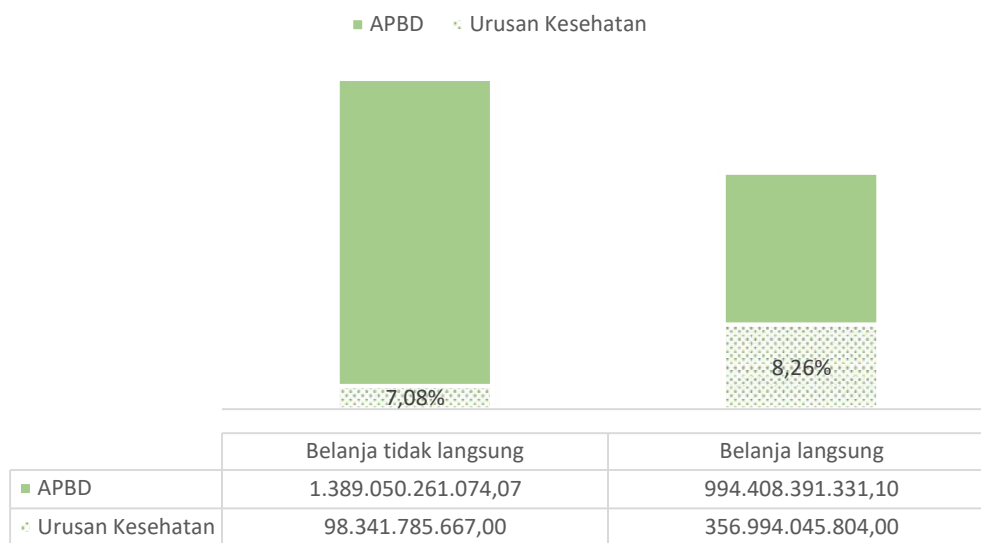
4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan urusan kesehatan merupakan yang terbesar kedua setelah urusan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bantul di dalam perencanaan tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan urusan kesehatan sebesar Rp455.335.831.471,00 atau 19,10% dari total pagu APBD (Rp2.383.458.652.405,17). Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan kesehatan terdiri dari belanja tidak langsung (Rp98.341.785.667,00) dan belanja langsung (Rp356.994.045.804,00). Perbandingan alokasi anggaran (belanja tidak langsung dan belanja langsung) untuk urusan kesehatan terhadap total alokasi anggaran keseluruhan dalam APBD Kabupaten Bantul tersaji pada **Grafik 4.2.1**.

Anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD untuk penerapan layanan SPM

bidang urusan kesehatan berasal dari APBD dan APBN. Anggaran ini dalam pelaksanaannya dibagi menjadi anggaran untuk pelayanan langsung kepada sasaran/penerima layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan anggaran penunjang SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Jumlah anggaran pelayanan langsung kepada sasaran/penerima per jenis layanan kesehatan yang terealisasi di tahun 2020 sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.2.6**. Sedangkan anggaran penunjang SPM yang terealisasi di tahun 2020 tersaji pada

Tabel 4.2.7.



Grafik 4.2.1. Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan kesehatan terhadap APBD

Tabel 4.2.6. Anggaran pelayanan langsung kepada sasaran/penerima layanan per jenis layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Pelayanan kesehatan ibu hamil	501.160.750	501.160.750
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	169.527.000	169.527.000
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	162.037.000	162.037.000
Pelayanan kesehatan balita	382.146.000	382.146.000
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	310.283.325	310.283.325
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	343.156.100	343.156.100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	448.472.400	448.472.400

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	188.959.500	188.959.500
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	201.937.420	201.937.420
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	164.869.500	164.869.500
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	268.520.800	268.520.800
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	119.305.000	119.305.000
Total	3.260.374.795	3.260.374.795

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 4.2.7. Anggaran penunjang SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

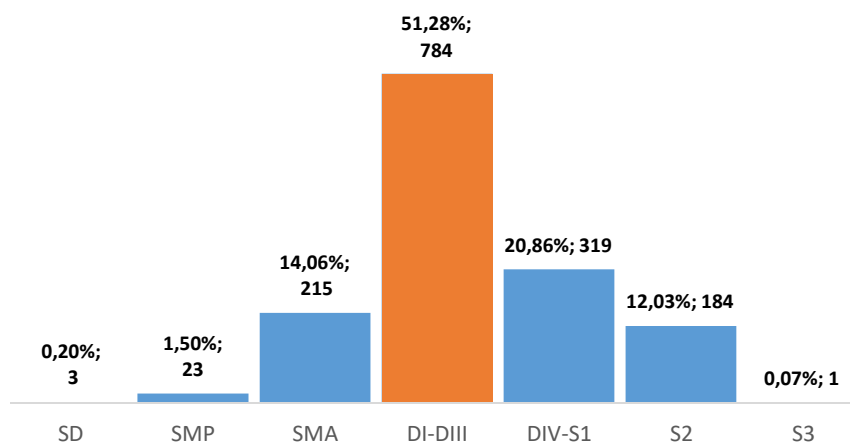
KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	6.417.225.000,00	5.109.341.316,80	79,62%
Peningkatan kesehatan masyarakat	23.833.482.885,00	23.780.609.914,00	99,78%
Promosi Kesehatan	532.979.000,00	512.223.500,00	96,11%
Pemberdayaan masyarakat sehat	55.962.500,00	39.425.000,00	70,45%
Peningkatan status gizi	2.191.181.000,00	1.820.126.074,00	83,07%
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	2.517.498.500,00	2.425.780.302,00	96,36%
Pelayanan Kesehatan Rujukan	398.066.500,00	385.146.600,00	96,75%
Program pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya	5.676.408.000,00	4.963.536.926,00	87,44%
Pelayanan kesehatan anak dan Balita	9.950.000,00	8.950.000,00	89,95%
Pelayanan kesehatan Lansia	25.950.000,00	25.950.000,00	100,00%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	4.963.663.000,00	4.491.703.369,00	90,49%
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	204.308.000,00	186.830.000,00	91,45%
Total	46.826.674.385,00	43.749.623.001,80	93,43%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

4.2.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Struktur kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sekretariat, bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang kesehatan (Bidang Kesehatan Masyarakat; Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Bidang Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Bidang Sumber Daya Kesehatan), serta Puskesmas sebagai pelaksana teknis yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebanyak 1.059 orang, terdiri dari 106 orang personil penunjang penerapan SPM (penempatan di dinas) dan 953 orang personil (penempatan di Puskesmas). Sebaran tingkat pendidikan personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan kesehatan sebagaimana tersaji pada **Grafik 4.2.2** menunjukkan bahwa tingkat pendidikannya relatif baik dimana sebanyak 84,24% merupakan lulusan perguruan tinggi (DI – S3) dan hanya 15,76% yang lulusan SD-SMA.



Grafik 4.2.2. Sebaran tingkat pendidikan personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan kesehatan

Sebaran data sebaran personil pengampu penerapan SPM bidang urusan kesehatan pada masing-masing unit kerja berdasarkan golongan di lingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.2.8**.

Tabel 4.2.8. Sebaran personil pengampu penerapan SPM bidang urusan kesehatan pada masing-masing unit kerja

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretaris Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	27	-	7	19	1
Bidang Kesehatan Masyarakat	22	-	1	16	5
Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	22	-	0	18	4
Bidang Bidang Pelayanan Kesehatan	14	-	2	9	3
Bidang Bidang Sumber Daya Kesehatan	19	-	4	12	3
Puskesmas	953	5	181	681	86
Total	1.059	5	195	755	104

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul membawahi 27 puskesmas, 67 puskesmas pembantu yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bisa melakukan pelayanan sesuai standar. Dukungan personil SPM bidang urusan kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada **Tabel 4.2.9** menggambarkan jumlah personil atau tenaga kesehatan yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Tabel 4.2.9. Dukungan personil atau tenaga kesehatan yang terlibat secara langsung dalam pelayanan SPM bidang urusan kesehatan

Jenis tenaga	Jumlah
Dokter umum	110
Dokter gigi	40
Perawat	226
Perawat Gigi	57

Jenis tenaga	Jumlah
Tenaga medis kefarmasian	33
Apoteker	20
Kesehatan Masyarakat	35
Kesehatan lingkungan	37
Nutrisionis	47
Fisioterapis	20
Radiografer	3
Analisis kesehatan	41
Rekam medis dan informasi kesehatan	24
Jumlah	693

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Monitoring dan evaluasi pada trimester 2 tidak terlaksana dengan dikarenakan pandemi covid

2) Perhitungan kebutuhan:

- Perhitungan kebutuhan standar kualitas barang dan jasa untuk pelayanan SPM, sulit dilakukan karena pembelian BMHP di puskesmas secara langsung untuk pelayanan puskesmas (bukan untuk perhitungan per layanan). Begitu juga dengan penggunaan alat untuk pelayanan SPM juga digunakan bersama-sama untuk layanan, tidak terpisah-pisah per layanan. Anggaran untuk memenuhi target masih kurang terutama untuk pembelian Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan reagen untuk pemeriksaan.

3) Pelaksanaan:

- Anggaran untuk memenuhi target masih kurang terutama untuk pembelian Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan reagen untuk

pemeriksaan.

- Beberapa target SPM tidak tercapai karena kendala teknis pelaksanaan disebabkan pandemi covid
- Belum tersusun payung hukum pelaksanaan PSM bidang kesehatan

4) Pelaporan:

- Pelaporan online (Komdat SPM dan SPM bangda) belum disosialisasikan secara detail, sehingga data yang dilaporkan menurut persepsi masing-masing.

b. Solusi

1) Pengumpulan data:

- Data SPM diperoleh dari web kesga, laporan penjangkauan kesehatan, *Digital Government Service (DGS)*, sistem informasi HIV dan sistem informasi TB. Monitoring dan evaluasi serta feedback data dilakukan secara online.

2) Perhitungan kebutuhan:

- Perhitungan kebutuhan pelayanan SPM dilakukan dengan mengkalikan capaian dengan unit cost per layanan yang dilakukan oleh masing-masing puskesmas.

3) Pelaksanaan

- Koordinasi dengan pemerintah desa melalui Anggaran Dana Desa untuk pembelian BMHP dan reagen pemeriksaan
- Selama pandemi, pelayanan online dilakukan meskipun secara kualitas tidak memenuhi layanan SPM

4) Pelaporan

- Mengusulkan ke Dinas Kesehatan DIY dan bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bantul untuk bisa memfasilitasi kejelasan definisi operasional SPM sehingga tidak timbul perbedaan persepsi.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum sebagaimana dimaksud tersaji pada **Tabel 4.3.1**.

Tabel 4.3.1. Jenis pelayanan dasar dan indikator pada bidang urusan pekerjaan umum

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang
		Penyebut
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Σ rumah tangga terlayani air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan Σ rumah tangga di kabupaten/kota
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Σ rumah tangga terlayani pengolahan air limbah melalui SPALD-S dan SPALD-T Σ rumah tangga di kabupaten/kota

Sumber : PermenPUPR 29/PRT/M/2018

Mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan pekerjaan umum per jenis pelayanan tersaji pada **Tabel 4.3.2**.

Tabel 4.3.2. Jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang urusan pekerjaan umum

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Pelayanan SPAM jaringan perpipaan; 2. Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
	kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha
	2. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan
	3. Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T

Sumber : PermenPUPR 29/PRT/M/2018

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.3.3.**

Tabel 4.3.3. Target capaian SPM bidang pekerjaan umum

Jenis Pelayanan	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	329.616	100
	Σ rumah tangga terlayani air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	329.616	
	Σ rumah tangga di kabupaten/kota	329.616	
	1) Pelayanan SPAM jaringan perpipaan;	46.445	100
	2) Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan	283.171	100
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	329.616	100

Jenis Pelayanan	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
	Σ rumah tangga terlayani pengolahan air limbah melalui SPALD-S dan SPALD-T	329.616	
	Σ rumah tangga di kabupaten/kota	329.616	
	1) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	314.755	100
	2) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	112	100
	3) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	14.749	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

4.3.3. Realisasi

Realisasi Capaian SPM bidang urusan pekerjaan umum Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.4. Realisasi capaian SPM bidang pekerjaan umum

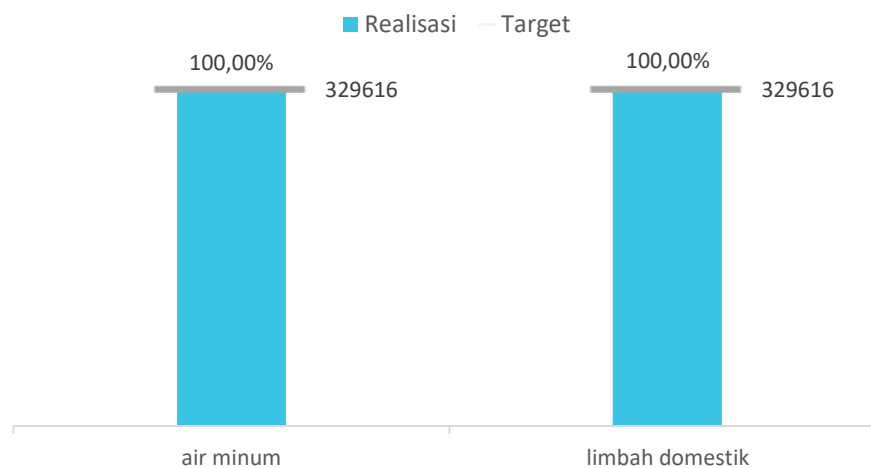
Jenis Pelayanan	Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			100
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air	Σ rumah tangga terlayani air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	329.616	

Jenis Pelayanan Indikator	Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Σ rumah tangga di kabupaten/kota	329.616	
	1) Pelayanan SPAM jaringan perpipaan;	46.445	100
	2) Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan	283.171	100
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik			100
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Σ rumah tangga terlayani pengolahan air limbah melalui SPALD-S dan SPALD-T	329.616	
	Σ rumah tangga di kabupaten/kota	329.616	
	1) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	314.755	100
	2) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	112	100
	3) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	14.749	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

Realisasi capaian layanan SPM bidang urusan pekerjaan umum di Kabupaten Bantul tahun 2020 sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.3.3** menunjukkan bahwa jenis layanan dan mutu layanan per jenis pelayanan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam perencanaan atau terealisasi 100%. Lebih lanjut lagi, **Grafik 4.3.1** memperlihatkan bahwa realisasi layanan, baik penyediaan air minum maupun pengolahan limbah domestik adalah 100%. Hal ini menggambarkan bahwa

seluruh rumah tangga di Kabupaten Bantul telah memperoleh akses kebutuhan air minum dan akses pengolahan limbah domestik. Pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Bantul sebagian besar didapat melalui SPAM bukan jaringan perpipaan, yakni sebanyak 283.171 rumah tangga, berbanding 46.445 rumah tangga yang memperoleh layanan melalui SPAM jaringan perpipaan. Pemenuhan pengolahan air limbah juga serupa dengan pemenuhan kebutuhan air minum, dimana pada pengolahan limbah domestik sebagian besar pemenuhan layanan berasal dari SPALD-S. Pengolahan melalui SPALD-S adalah sebesar 314.867 rumah tangga, berbanding 14.749 rumah tangga melalui SPALD-T.

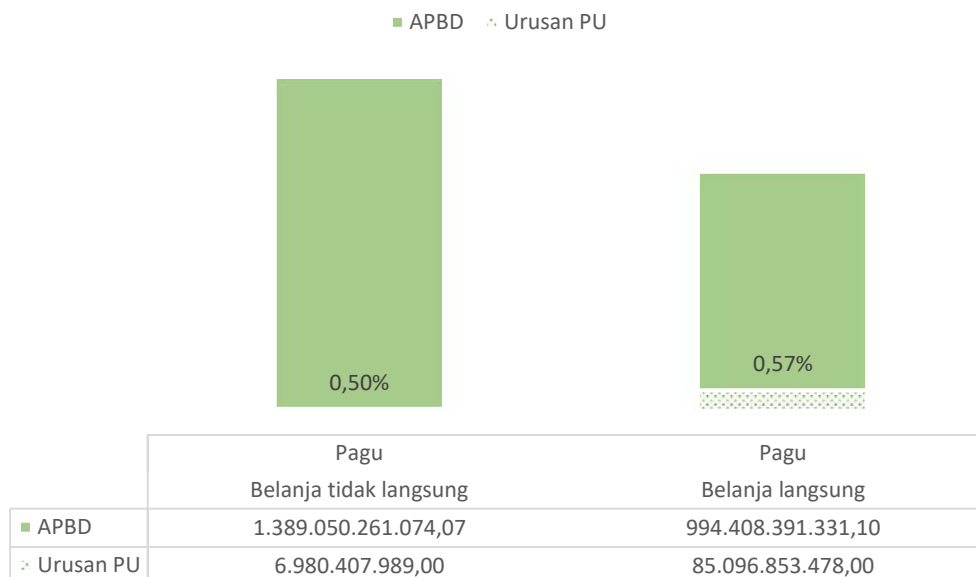


Grafik 4.3.1. Persentase selisih realisasi indikator utama capaian SPM bidang urusan pekerjaan umum terhadap usia anak kisaran umur tertentu

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan urusan pekerjaan umum merupakan yang terbesar ketiga dibandingkan dengan alokasi untuk penyelenggaraan pemerintahan urusan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bantul di dalam perencanaan tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan urusan pekerjaan umum sebesar Rp92.077.261.467,00 atau 3,86% dari total pagu APBD (Rp2.383.458.652.405,17). Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan pekerjaan umum terdiri dari belanja tidak langsung (Rp6.980.407.989,00) dan belanja langsung (Rp85.096.853.478,00). Perbandingan alokasi anggaran (belanja tidak langsung dan belanja langsung) untuk urusan

pekerjaan umum terhadap total alokasi anggaran keseluruhan dalam APBD Kabupaten Bantul tersaji pada **Grafik 4.3.2**.



Grafik 4.3.2. Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan pekerjaan umum terhadap APBD

Keseluruhan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan pekerjaan umum, sebanyak Rp15.955.373.000,00 dialokasikan untuk pemenuhan SPM atau sebesar 18,75% dari total anggaran belanja langsung (Rp85.096.853.478,00). Alokasi anggaran dan realisasi pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum Kabupaten Bantul tahun 2020 tersaji pada **Tabel 4.3.5**.

Tabel 4.3.5. Alokasi anggaran dan realisasi pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum

Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	<u>7.972.483.000,00</u>	<u>7.665.262.450,00</u>	<u>96,15%</u>
1) Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	55.125.000,00	50.657.000,00	92
2) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	7.917.358.000,00	7.614.605.450,00	99

Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	<u>7.982.890.000,00</u>	<u>7.846.654.500,00</u>	<u>98,29%</u>
1) Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	7.982.890.000,00	7.846.654.500,00	97
Total	<u>15.955.373.000,00</u>	<u>15.511.916.950,00</u>	<u>97,22%</u>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

Pemenuhan layanan dasar SPM bidang urusan pekerjaan umum dilaksanakan melalui 2 (dua) program kegiatan, yakni (1) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dan (2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Pemenuhan layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yang ada di kedua program tersebut. Sedangkan pemenuhan layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan limbah yang menjadi bagian dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku yang menjadi bagian dari Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kualitas air minum rumah tangga yang memperoleh akses penyediaan air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan. Layanan yang diberikan berupa perbaikan dan pemeliharaan sumur warga.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dimaksudkan untuk menyediakan dan memperluas cakupan pelayanan air bersih, air limbah, dan drainase sehingga dapat menanggulangi kerawanan air, pencemaran lingkungan dan genangan air hujan. Pada kapasitasnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyediaan sarana dan prasarana air minum.

Uraian kegiatan yang dilaksanakan untuk layanan penyediaan air minum berupa :

- a. Peningkatan dan Perluasan SPAM Perdesaan melalui dana DAK yaitu meliputi Peningkatan SPAM Seloharjo, Peningkatan SPAM Mangunan, Peningkatan SPAM Srimulyo, Perluasan SPAM Girirejo
- b. Peningkatan dan Perluasan SPAM Perkotaan melalui dana DAK yaitu meliputi Perluasan SPAM Banguntapan, Perluasan SPAM Bangunharjo, Perluasan SPAM Tamantirto, Perluasan SPAM Ngestiharjo dan Perluasan SPAM Argomulyo.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, didukung oleh program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa pembangunan IPAL Komunal pada 6 lokasi, antara lain:

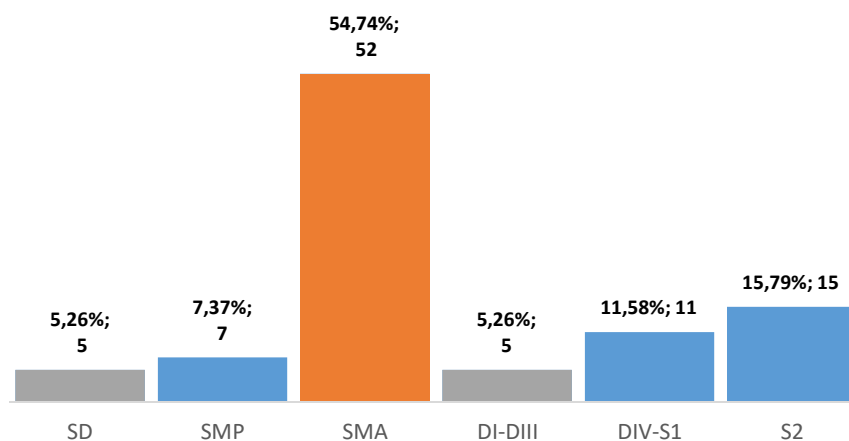
- a. Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan;
- b. Kalurahan Sumber Agung Kapanewon Jetis;
- c. Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri;
- d. Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret;
- e. Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan, dan
- f. Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon.

4.3.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) merupakan perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan

permukiman. Struktur kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sekretariat, bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum (Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Penelitian Teknologi Informasi Jasa Konstruksi Perbekalan dan Peralatan), serta bidang teknis pengampu urusan perumahan dan kawasan permukiman (Bidang Perumahan dan Permukiman).

Jumlah keseluruhan pegawai di DPUPKP Kabupaten Bantul sebanyak 105 orang. Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, personil pengampu urusan pekerjaan umum berjumlah 95 orang, terdiri dari Kepala OPD (1 orang), Sekretaris Dinas (1 orang), Sekretariat (30 orang), bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum (63 orang). Sebaran tingkat pendidikan personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan pekerjaan umum sebagaimana tersaji pada **Grafik 4.3.3** menunjukkan bahwa tingkat pendidikannya relatif kurang dimana sebanyak 67,37% bukan merupakan lulusan perguruan tinggi (SD-SMA) dan hanya 32,63% yang lulusan perguruan tinggi (Di-S2).



Grafik 4.3.3. Personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan pekerjaan umum berdasarkan pendidikan

Sebaran data sebaran personil pengampu penerapan SPM bidang urusan pekerjaan umum pada masing-masing unit kerja di lingkungan DPUPKP Kabupaten Bantul sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.3.6**.

Tabel 4.3.6. Sebaran personil pengampu penerapan SPM bidang urusan pendidikan pada masing-masing unit kerja

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretaris Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	30	4	15	11	-
Bidang Bina Marga	12	1	3	7	1
Bidang Cipta Karya	7	-	2	3	2
Bidang Sumber Daya Air	12	-	5	4	3
Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa konstruksi Perbekalan dan Peralatan	12	-	3	7	2
UPT Pengamatan Pengairan Bedok Winongo Kecil	5	-	3	2	-
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	5	1	2	2	-
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	8	-	7	1	-
Arsiparis/JFT	2	-	1	1	-
Total	95	6	41	38	10

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2020

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Kegiatan pengumpulan data dasar SPM baik SPM Air Minum dan Sanitasi mengalami refocusing anggaran untuk penanganan Covid

2) Perhitungan kebutuhan

- Penghitungan kebutuhan didasarkan atas proposal atau usulan dari masyarakat yang masuk melalui Musrenbang atau usulan melalui Dinas

3) Pelaksanaan

- Pelaksanaan fisik konstruksi perluasan jaringan air minum dan sanitasi / air limbah melalui penyedia sering mengalami kendala teknis karena pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga

diperlukan penyesuaian kontrak pekerjaan.

- Pelaksanaan fisik konstruksi secara swakelola mengalami kemunduran jadwal karena terkendala pembatasan kegiatan sosialisasi/pelatihan pada kelompok masyarakat di masa pandemic covid.
- Belum tersusun payung hukum pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan permukiman di level Pemerintah Daerah DIY maupun Kabupaten Bantul.

4) Pelaporan

- Pelaporan online melalui website spm.bangda.kemendagri.go.id belum disosialisasikan secara detail, sehingga data yang dilaporkan menurut persepsi masing-masing.

b. Solusi

1) Pengumpulan data

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data

2) Perhitungan kebutuhan

- Perhitungan kebutuhan pelayanan SPM didasarkan atas usulan masyarakat

3) Pelaksanaan

- Peningkatan kegiatan supervisi di lapangan, dan melakukan koordinasi dengan pihak penyedia serta melakukan addendum kontrak jika diperlukan.
- Melakukan koordinasi dengan pembatasan jumlah peserta atau dilakukan melalui daring

4) Pelaporan

- Mengusulkan ke Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bantul untuk bisa memfasilitasi konsultasi kepada Kemendagri terkait dengan

kejelasan definisi operasional SPM sehingga tidak timbul perbedaan persepsi.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan perumahan rakyat berdasarkan PermenPUPR 29/2018 sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.4.1**.

Tabel 4.4.1. Jenis pelayanan dasar dan indikator pada bidang urusan perumahan rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang
		Penyebut
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	Σ unit rumah rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
		Σ total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	Σ rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni
		Σ total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan

Sumber : PermenPUPR 29/PRT/M/2018

Mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat per jenis pelayanan tersaji pada **Tabel 4.4.2**.

Tabel 4.4.2. Jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang urusan perumahan rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana; 2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana; 3. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana; 4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; 2. Subsidi uang sewa;

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
terkena relokasi program pemerintah 3. Penyediaan rumah layak huni kabupaten/kota	daerah

Sumber : PermenPUPR 29/PRT/M/2018

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.4.3.**

Tabel 4.4.3. Target capaian SPM bidang perumahan rakyat

Jenis Pelayanan	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	10	100
	Σ unit rumah rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	10	
	Σ total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	10	
	1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana;	0	100
	2) Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana;	0	100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	3) Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana;	10	100
	4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	0	100
	Σ rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	

Jenis Pelayanan	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	%
	Σ total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0	
	1) Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan;	0	100
	2) Subsidi uang sewa;	0	100
	3) Penyediaan rumah layak huni	0	100

Sumber : BPBD; DPUPKP Kabupaten Bantul, 2020

4.4.3. Realisasi

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.4.4.**

Tabel 4.4.4. Realisasi capaian SPM bidang perumahan rakyat

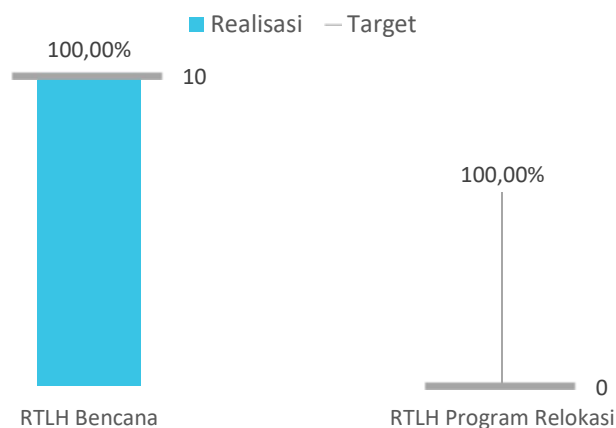
Jenis Pelayanan	Indikator/Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		10	100
Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	Σ unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	10	
	Σ total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	10	
	1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana;	0	100
	2) Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana;	0	100
	3) Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana;	10	100
	4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	100
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang		0	100

Jenis Pelayanan	Indikator/Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	%
terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota			
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	Σ rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	
	Σ total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0	
	1) Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan;	0	100
	2) Subsidi uang sewa;	0	100
	3) Penyediaan rumah layak huni	0	100

Sumber : BPBD; DPUPKP Kabupaten Bantul, 2020

Realisasi capaian layanan SPM bidang urusan perumahan rakyat di Kabupaten Bantul tahun 2020 sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.4.4** menunjukkan bahwa jenis layanan dan mutu layanan per jenis pelayanan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam perencanaan atau terealisasi 100%. Lebih lanjut lagi, **Grafik 4.4.1** memperlihatkan bahwa realisasi layanan, baik penyediaan RTLH bagi korban bencana maupun penyediaan RTLH bagi korban relokasi terdampak program pemerintah adalah 100%.

Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2020 merelokasi warga terdampak korban bencana Badai Cempaka yang terjadi pada tahun 2017 dimana penerima bantuan relokasi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 282 Tahun 2020 tentang Daftar Warga Korban Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Yang Akan Di Relokasi. Daftar warga penerima bantuan tersaji pada **Tabel 4.4.5**. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak melaksanakan penyediaan RTLH bagi warga yang terdampak relokasi karena program pemerintah. Penyediaan RTLH yang dilaksanakan masih difokuskan pada program peningkatan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.



Grafik 4.4.1. Persentase selisih realisasi indikator utama capaian SPM bidang urusan pekerjaan umum terhadap usia anak kisaran umur tertentu

Tabel 4.4.5. Daftar warga korban bencana yang direlokasi tahun 2020

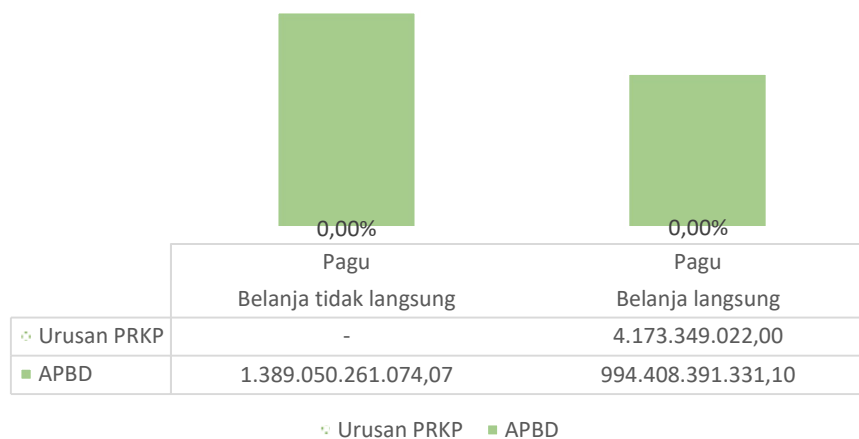
No	Nama	Kecamatan	Desa	Dusun	RT
1	Trisno Diharjo/Ponijan	Imogiri	Sriharjo	Sompok	02
2	Wakiyem	Imogiri	Sriharjo	Sompok	03
3	Darmaji	Imogiri	Sriharjo	Sompok	04
4	Giyem/Yasmudi	Imogiri	Sriharjo	Pengkol	03
5	Subandi	Imogiri	Sriharjo	Wunut	06
6	Surat/Radi Utomo	Imogiri	Sriharjo	Kedungmiri Wunut	03
7	Paino/kartorejo	Imogiri	Selomapioro	Siluk I	06
8	Dakir/Daryo kasmito	Imogiri	Selomapioro	Kajor kulon	03
9	Rochmat/Siswo Sukartono	Imogiri	Selomapioro	Siluk I	01
10	Tukino	Imogiri	Selomapioro	Siluk II	04

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2020

4.4.4. Alokasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bantul di dalam perencanaan tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sebesar Rp4.173.349.022,00 atau 0,18% dari total pagu APBD (Rp2.383.458.652.405,17). Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terdiri dari belanja

tidak langsung (Rp0,00) dan belanja langsung (Rp4.173.349.022,00). Belanja tidak langsung pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dalam APBD bernilai Rp0,00 rupiah dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019, urusan ini dilaksanakan oleh DPUPKP Kabupaten Bantul yang juga melaksanakan urusan pekerjaan umum sebagai urusan utama. Sehingga didalam perencanaan, komponen belanja tidak langsung untuk urusan ini dituangkan dalam urusan pekerjaan umum sebagai urusan utama yang dilaksanakan oleh DPUPKP Kabupaten Bantul. Perbandingan alokasi anggaran (belanja tidak langsung dan belanja langsung) untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman terhadap total alokasi anggaran keseluruhan dalam APBD Kabupaten Bantul tersaji pada **Grafik 4.4.2**.



Grafik 4.4.2. Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terhadap APBD

Alokasi anggaran sebagaimana tersaji pada **Grafik 4.4.2** merupakan alokasi anggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh DPUPKP Kabupaten Bantul. Keseluruhan anggaran tersebut yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sebanyak Rp2.711.232.000,00 atau 64,97% bersumber dari DAK Bidang Perumahan dan Permukiman yang dipergunakan untuk penanganan rumah tidak layak huni. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian fasilitas dan stimulan kepada masyarakat tidak mampu yang kondisi rumah nya termasuk dalam kriteria tidak layak huni berdasarkan assessment dari Kelompok

Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan stimulan melalui SK Bupati Bantul Nomor 430 Tahun 2020. Jumlah penerima stimulan di tahun 2020 sebanyak 138 rumah dimana masing-masing memperoleh dana sebesar Rp.17.500.000,00. Melalui kegiatan ini diharapkan rumah penerima stimulan mengalami peningkatan kondisi dari tidak layak huni menjadi layak huni. Jika merujuk pada PermenPUPR 29/2018 sebagai pedoman penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat, maka kegiatan ini tidak bisa dijadikan sebagai capaian penerapan SPM karena tujuan dan sasaran penerima berbeda dengan mutu pelayanan SPM urusan perumahan rakyat yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2020 juga menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat (BNPB) diperuntukan bagi penanganan pasca bencana yang menjadi layanan SPM bidang urusan perumahan rakyat. Anggaran ini, oleh pemerintah pusat (BNPB) diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemenuhan layanan SPM bidang urusan perumahan rakyat adalah sebesar Rp979.131.000,00 yang direalisasikan kepada 10 penerima layanan. Alokasi anggaran dan realisasi pemenuhan SPM bidang urusan perumahan rakyat Kabupaten Bantul tahun 2020 tersaji pada **Tabel 4.4.6**.

Tabel 4.4.6. Alokasi anggaran dan realisasi pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum

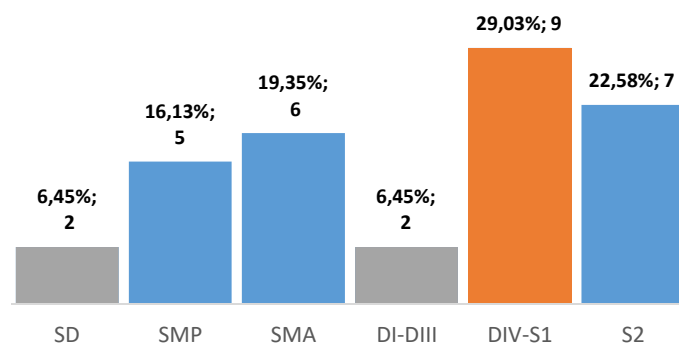
Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	<u>979.131.000,00</u>	<u>874.195.000,00</u>	<u>89,28</u>
1) Rekonstruksi pasca bencana	979.131.000,00	874.195.000,00	89,28
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Total	979.131.000,00	874.195.000,00	89,28%

Sumber : DPUPKP & BPBD Kabupaten Bantul, 2020

4.4.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bantul. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada **Grafik 4.4.3**.



Grafik 4.4.3. Personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat berdasarkan pendidikan

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Pengumpulan data terkait dengan korban bencana sifatnya insidental jika terjadi bencana yang menimbulkan dampak bagi warga masyarakat;
- Pengumpulan data terkait rumah warga yang terletak di wilayah rawan bencana belum dapat dilakukan secara maksimal.

2) Perhitungan kebutuhan

- Perhitungan kebutuhan terkait dengan layanan rumah terdampak bencana bisa dilaksanakan jika terjadi bencana, sehingga target layanan dapat

ditentukan dan dapat ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

3) Pelaksanaan

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sifatnya sangat insidental, tergantung ada/tidaknya kejadian, sehingga penyediaan anggaran terbatas;
- Masih tingginya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor;
- Kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana untuk direlokasi oleh pemerintah;
- Proses penyediaan lokasi untuk relokasi hingga siap untuk digunakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan sangat kompleks. Selain itu, membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit.

4) Pelaporan

- Pemerintah pusat dalam hal ini BNPB mengucurkan dana untuk penanganan pasca bencana terkait dengan layanan SPM perumahan rakyat langsung kepada BPBD sedangkan dalam PermenPUPR 29/2019 disebutkan bahwa BPBD dalam pelaksanaannya bertindak sebagai supervisi dalam memberikan pertimbangan teknis kepada perangkat daerah pengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Sehingga dalam pelaporan, tim penyusun kesulitan untuk memilah alokasi anggaran dan realisasi dikarenakan dalam perencanaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terpilah-pilah berdasarkan urusan pemerintahan. Selain itu, pemilahan personil berdasarkan layanan SPM per urusan menjadi rancu dan tidak sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Pelaporan SPM melalui aplikasi yang disediakan oleh Bangda belum tersosialisasikan secara detail sehingga data yang dilaporkan masih menurut persepsi masing-masing.

b. Solusi

1) Pengumpulan data

- Segera mungkin melakukan pendataan bila terjadi bencana;
- Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan usulan rumah yang perlu untuk direlokasi.

2) Perhitungan kebutuhan

- Segera mungkin melakukan perhitungan kebutuhan bila terjadi bencana

3) Pelaksanaan

- Peningkatan sinergitas dengan stakeholder terkait kebencanaan untuk pemenuhan anggaran dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang sewaktu-waktu bias terjadi
- Peningkatan pemahaman kepada masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana untuk direlokasi
- Menyiapkan lokasi relokasi dengan fasilitas pendukungnya (Drainase, sumur, listrik, fasum lainnya)

4) Pelaporan

- Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan kewenangan urusan pemerintahan;
- Perlu adanya sosialisasi dan penjelasan secara detail oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menu penyampaian pertanyaan yang ada di aplikasi SPM agar difungsikan dan direspon.

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rakyat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) terbagi menjadi 3 (tiga) sub urusan

dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6 (enam) jenis pelayanan. Rincian indikator capaian dan mutu layanan pelayanan dalam masing-masing sub urusan sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.5.1**.

Tabel 4.5.1. Indikator capaian dan mutu layanan tiap jenis pelayanan dasar pada masing-masing sub urusan SPM bidang urusan trantibumlinmas

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu layanan
1. Ketentraman dan Ketertiban Umum		
a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil 2. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah penegakan perda sesuai mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Perda sesuai SOP 2. Pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar 3. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan sarpras sesuai standar
2. Bencana		
a. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana 2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 3. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana Test Kehamilan; 4. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 5. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Sub Urusan	Indikator	Mutu layanan
Jenis Pelayanan Dasar		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana 3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana 4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana 6. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas
3. Kebakaran		
a. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak; 2. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan

Sumber : Permendagri 121/2018; Permendagri 101/2018; Permendagri 114/2019

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Penentuan target layanan SPM bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat tidak bisa semuanya dapat ditentukan. Beberapa diantaranya adalah target sasaran layanan seperti target pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi (sub urusan ketentraman dan ketertiban), pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (sub urusan bencana), serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (sub urusan kebakaran). Target capaian SPM bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Bantul tersaji pada **Tabel 4.5.2.**

Tabel 4.5.2. Target capaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Sub Urusan Jenis Layanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Target	
		Jumlah	%
1. Sub urusan ketentraman dan ketertiban			
a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			100
	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0	100
	1) warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	100
	2) warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	100
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			100
	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	32	100
	1) Penegakan Perda sesuai SOP	32	100
	2) Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	32	100
	3) Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	32	100
2. Sub urusan bencana			
a. Pelayanan informasi rawan bencana			100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	954.706	100
	1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	9	100
	2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	954.706	100

Sub Urusan Jenis Layanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Target	
		Jumlah	%
	3) Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana Test Kehamilan;	954.706	100
	4) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	26	100
	5) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	80	100
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		954.706	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	954.706	100
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.159	100
	1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.159	100
	2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	3.159	100
	3) Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	4	100
	4) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	100
	5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3.159	100
	6) Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	100
3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	130	100

Sub Urusan Jenis Layanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Target	
		Jumlah	%
	1) Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak;	130	100
	2) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0

Sumber : Satpol PP; BPBD Kabupaten Bantul, 2020

4.5.3. Realisasi

Realisasi capaian SPM bidang urusan trantibumlinmas Kabupaten Bantul tahun 2020 sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.5.3**.

Tabel 4.5.3. Realisasi capaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Sub Urusan Jenis Indikator	Layanan Dasar	Mutu Layanan	Realisasi	
			Jumlah	%
1. Sub urusan ketentraman dan ketertiban				
a.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			100
	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		0	100
		1) warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	100
		2) warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	100
b.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap			100

Sub Urusan		Realisasi		
Jenis Indikator	Layanan Dasar	Mutu Layanan	Jumlah	%
Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu				
Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			32	100
1) Penegakan Perda sesuai SOP			32	100
2) Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar			32	100
3) Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar			32	100
2. Sub urusan bencana				
a. Pelayanan informasi rawan bencana				100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			954.706	100
1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana			9	100
2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana			954.706	100
3) Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana Test Kehamilan;			954.706	100
4) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana			26	100
5) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana			80	100
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan			954.706	100

Sub Urusan		Realisasi		
Jenis Indikator	Layanan Dasar	Mutu Layanan	Jumlah	%
	kesiapsiagaan terhadap bencana			
c.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3.159	100
		1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.159	100
		2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	3.159	100
		3) Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	4	100
		4) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	100
		5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3.159	100
		6) Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	100
3.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		130	100
		1) Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak;	130	100
		2) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0

Sumber : Satpol PP; BPBD Kabupaten Bantul, 2020

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada Tahun 2020 di Kabupaten Bantul tidak ada warga negara yang memperoleh layanan karena tidak ada korban akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada . Tidak adanya korban tersebut karena Satpol PP telah berupaya memenuhi mutu pelayanan dasar, yang terdiri dari:

- 1) Memiliki beberapa SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada ;
- 2) Selalu meningkatkan kompetensi SDM yang humanis dan profesional ;
- 3) Optimalisasi Sarpras yang telah dimiliki.

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2010. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada tahun 2019 dilaksanakan mengacu pada acuan teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana :

- 1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)

Pemetaan lokasi rawan bencana dimasukkan dalam Dokumen Kajian Resiko Bencana sudah dilaksanakan pada tahun 2019 untuk 9 jenis ancaman yaitu: Kebakaran; Banjir; Tsunami; Gempa; Longsor; Kekeringan; Cuaca Ekstrim; Gelombang Ekstrim dan Abrasi; Epidemik dan Wabah penyakit. Pemetaan yang dilakukan meliputi penyusunan peta kerentanan, peta bahaya dan peta resiko.

- 2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana

Dalam Dokumen KRB menghasilkan analisis warga yang menempati wilayah rawan bencana untuk 9 jenis ancaman.

- 3) Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana

Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana dalam Dokumen KRB tersaji pada **Tabel 4.5.4:**

Tabel 4.5.4. Jenis Ancaman dan Jumlah Penduduk Terpapar

No	Jenis Ancaman	Jumlah Penduduk Terpapar
1	Kebakaran	94.878
2	Banjir	24.558
3	Tsunami	34.735
4	Gempa	93.414
5	Longsor	63.369
6	Kekeringan	93.460
7	Cuaca Ekstrim	692.936
8	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	7.031
9	Epidemi dan Wabah penyakit	1.006.692
Jumlah		2.111.073

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2020

4) Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana pada Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan jenis ancaman dengan rincian **Tabel 4.5.5.**

Tabel 4.5.5. Media sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) per jenis ancaman

No	Jenis Ancaman	Jenis Sosialisasi			Jumlah
		Tatap Muka	Media Sosial	Media Lainnya	
1	Kebakaran	4	4	-	8
2	Banjir	4	4	-	8
3	Tsunami	4	4	-	8
4	Gempa	4	4	-	8
5	Longsor	4	4	-	8
6	Kekeringan	4	4	-	8
7	Cuaca Ekstrim	4	4	-	8
8	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	4	4	-	8
9	Epidemi dan Wabah penyakit	13	5	4	22

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2020

- 5) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana.

Pemasangan rambu evakuasi di tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 75 titik dengan rincian 65 titik untuk jalur evakuasi tsunami di pesisir dan 10 titik di TPST Piyungan. Sedangkan pemasangan papan informasi bencana di 5 lokasi yaitu Pundong, Srandakan, Pajangan, Imogiri dan Sanden. Rincian jumlah dan lokasi pemasangan tersaji pada **Tabel 4.5.6**.

Tabel 4.5.6. Jumlah pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi bencana

Kapanewon	Kalurahan	Jumlah
Srandakan	Poncosari	10
Sanden	Gadingsari	19
Sanden	Gadingharjo	5
Sanden	Srigading	4
Kretek	Tirtoharjo	10
Kretek	Tirtosari	2
Kretek	Tirtomulyo	1
Kretek	Donotirto	4
Kretek	Parangtritis	14
Piyungan	Sitimulyo	10
Jumlah		75

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2020



Gambar 4.5.1. Rambu dan papan informasi yang terpasang di tahun 2020

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelaksanaan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2020 mengacu pada pedoman teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu layanan sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota mencapai 954.706 jiwa atau 100% mencakup seluruh warga masyarakat di Kabupaten Bantul: Mutu pelayanan yang telah dilaksanakan meliputi:

1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Pada tahun 2020 dilakukan reviu atas dokumen RPB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dengan memasukkan memasukkan beberapa hal yaitu: perubahan cakupan area dan prioritas ancaman bencana; kenaikan kapasitas pemerintah daerah dan turunnya angka kerentanan. Dokumen RPB belum dapat disahkan dalam bentuk peraturan kepala daerah karena masih memerlukan pengesahan materi dari BNPB.

2) Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)

Sampai dengan tahun 2020 sudah disusun 4 Dokumen Rencana Kontinjensi dari target 9 Rencana Kontinjensi atau sudah realisasinya mencapai 44,44% yaitu Rencana Kontinjensi Banjir, Rencana Kontinjensi Longsor, Rencana Kontinjensi Tsunami dan Rencana Kontinjensi Wabah Penyakit khususnya COVID-19.

3) Pelatihan pencegahan dan mitigasi

Pelatihan pada tahun 2020 menitikberatkan pada peningkatan kemampuan teknis dalam pencegahan dan mitigasi bencana non alam untuk penanganan Pandemi COVID-19. Pelaksanaan pelatihan mencakup 75 desa di Kabupaten Bantul.

4) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pengendalian operasi dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Operasi

Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang bekerja 24 jam selama 7 hari kerja. Sarana dan prasarana kesiapsiagaan di Kabupaten Bantul terdiri dari Sistem Peringatan Dini Bencana yang terintegrasi dengan BMKG dan EWS longsor dan banjir hasil pengembangan dari BPBD Bantul. Selain hal tersebut juga dikembangkan sistem komunikasi dengan memanfaatkan frekuensi radio yang dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan mengoptimalkan fungsi relawan dan stakeholder di bidang kebencanaan sebagai sumber informasi dan tenaga penanganan bencana.

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada tahun 2020 dilaksanakan mengacu pada acuan teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu layanan sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

1) Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas.

Pada tahun 2020 tidak terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas.

2) Respon cepat darurat bencana

Pada Tahun 2020 terdapat 2 bencana yang masuk dalam fase penanganan Tanggap Darurat yaitu:

- Bencana Hidrometeorologi

Keputusan Tanggap darurat melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bantul. Keputusan tanggap darurat diambil pada hari yang sama dengan permohonan pengajuan penetapan status dari Kepala Pelaksana BPBD Nomor: 188/0355 tanggal 5 Maret 2020 atau sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.

- Bencana Non Alam

Keputusan Tanggap darurat melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bantul. Keputusan tanggap darurat diambil pada hari yang sama dengan permohonan pengajuan penetapan status yaitu pada tanggal 20 Maret 2020 atau sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.

3) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Sistem Komando penanganan darurat bencana didasarkan pada Keputusan Bupati tentang penetapan Tanggap Darurat. Pelaksanaan Sistem komando sudah berjalan baik dan melibatkan semua potensi penanganan bencana seperti unsur TNI, POLRI, BUMN, Perangkat Daerah, LSM, dan Relawan dan Masyarakat. Fungsi komando dan koordinasi dijalankan oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) untuk skala bencana ringan. Apabila skala sedang sampai besar, dinaikkan ke level pimpinan.

4) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

Pelaksanaan Sub Layanan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2020 sudah berjalan dan terorganisasi dengan baik. Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada tahun 2020 dilaksanakan dengan melibatkan semua potensi Relawan dalam koordinasi BPBD. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2020 sebanyak 3.159 jiwa atau mencapai target 100%.

Selain bencana yang sifatnya masif, terdapat kejadian kebencanaan yang sifatnya kecil sampai dengan sedang selama tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 4.5.7**.

Tabel 4.5.7. Jumlah kejadian bencana dalam kurun 2016 - 2020

Bencana	Jumlah Kejadian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah Longsor	77	345	23	174	85
Cuaca Ekstrem/Angin Kencang	4	22	0	24	22
Kebakaran	48	111	208	227	130
Erosi	36	27	8	11	1
Abrasi	1	2	3	0	0
Laka Sungai	5	12	16	6	4
Banjir	20	22	0	8	0
Gempa	11	27	97	0	13

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2020

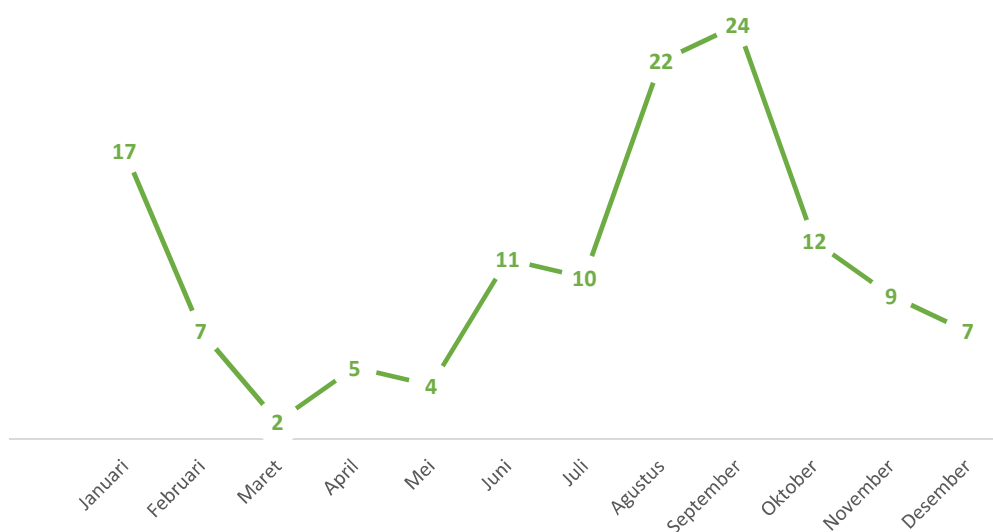
e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui BPBD selaku perangkat daerah pengampu sub urusan kebakaran telah melaksanakan kegiatan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan mengacu pada Permendagri No 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Selain layanan utama pada sub urusan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah melaksanakan kegiatan layanan pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia, antara lain meliputi:

1) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Keseluruhan kejadian kebakaran di tahun 2020 berjumlah 130 kejadian dengan rerata waktu tanggap 10 menit 25 detik. Kejadian kebakaran terdata ada di tiap bulan sepanjang tahun 2020 dengan jumlah kejadian fluktuatif tiap bulannya, lihat **Grafik 4.5.1**. Secara umum, jumlah kejadian

terbanyak ada di bulan September sebanyak 24 kejadian dan paling sedikit terjadi di bulan Maret sebanyak 2 kejadian. Jumlah korban yang dapat diselamatkan dari kejadian kebakaran sebanyak 306 orang sedangkan korban meninggal 1 orang dan 3 orang mengalami luka-luka. Di sisi lain, kerusakan yang ditimbulkan dari kejadian kebakaran diperkirakan mencapai Rp13.473.170.000,00.



Grafik 4.5.1. Kejadian kebakaran di Kabupaten Bantul tahun 2020

2) Layanan Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

Layanan pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia di tahun 2020 total berjumlah 453 layanan, lihat **Tabel 4.5.8**. Layanan ini terdiri dari evakuasi sarang tawon dan *animal rescue* sebanyak 338 layanan dan penanganan pohon tumbang sebanyak 115 layanan.

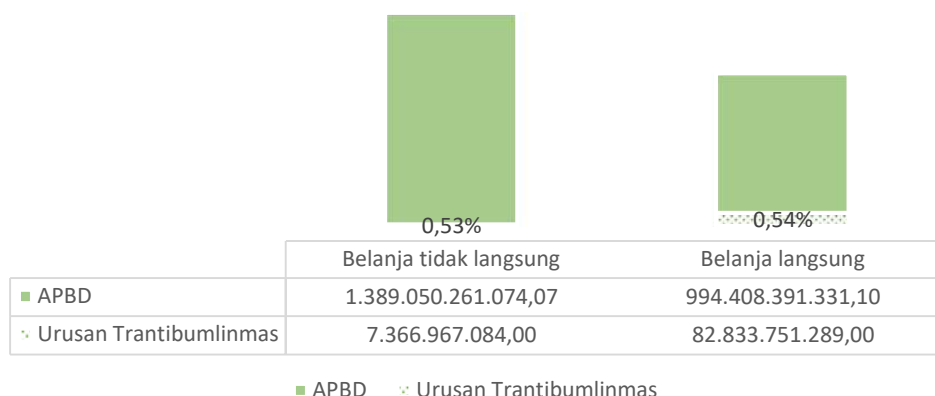
Tabel 4.5.8. Jumlah layanan per jenis layanan pencarian dan pertolongan

Jenis layanan pencarian dan pertolongan	Jumlah
Evakuasi sarang tawon dan <i>animal rescue</i>	338
Penanganan pohon tumbang	115
Penanganan kecelakaan lalu lintas	-
Penanganan percobaan bunuh diri	-
Evakuasi korban terjatuh di sumur	-
Evakuasi korban hanyut	-
Jumlah	453

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2020

4.5.4. Alokasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bantul di dalam perencanaan tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan urusan trantibumlinmas sebesar Rp90.200.718.373,00 atau 3,78% dari total pagu APBD (Rp2.383.458.652.405,17). Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan trantibumlinmas terdiri dari belanja tidak langsung (Rp7.366.967.084,00) dan belanja langsung (Rp82.833.751.289,00). Perbandingan alokasi anggaran (belanja tidak langsung dan belanja langsung) untuk urusan trantibumlinmas terhadap total alokasi anggaran keseluruhan dalam APBD Kabupaten Bantul tersaji pada **Grafik 4.5.2.**



Grafik 4.5.2. Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan trantibumlinmas terhadap APBD

Keseluruhan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan trantibumlinmas, sebanyak Rp15.955.373.000,00 dialokasikan untuk pemenuhan SPM atau sebesar 18,75% dari total anggaran belanja langsung (Rp85.096.853.478,00). Alokasi anggaran dan realisasi pemenuhan SPM bidang urusan trantibumlinmas Kabupaten Bantul tahun 2020 tersaji pada **Tabel 4.5.9**.

Tabel 4.5.9. Alokasi anggaran dan realisasi pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas

Sub urusan Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
1. Sub urusan ketentraman dan ketertiban	4.915.144.250,00	4.771.860.800,00	97,08
a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0,00	0,00	0,00
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	4.915.144.250,00	4.771.860.800,00	97,08
2. Sub urusan bencana	3.291.681.389	3.017.996.755	91,69
a. Pelayanan informasi rawan bencana	615.350.000	581.170.605	94,45
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.736.283.105	1.511.700.340	87,07
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	940.048.284	925.125.810	98,41
3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.505.042.400	1.483.021.995	98,54
Total	9.711.868.039,00	9.272.879.550,00	95,48

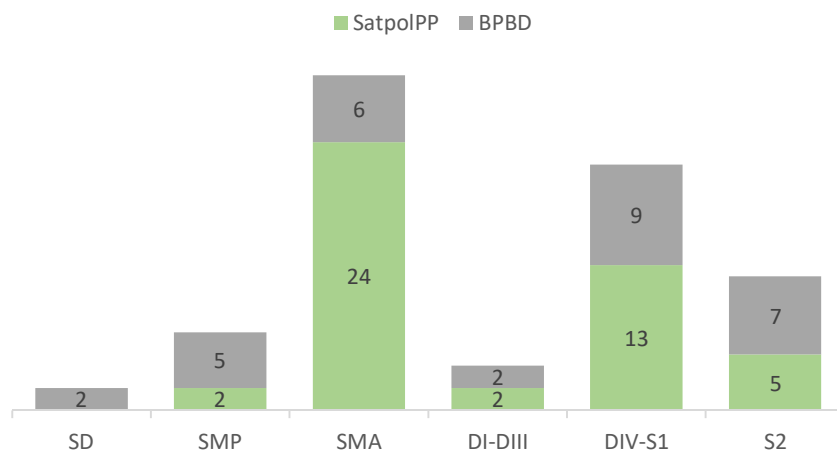
Sumber : SatpolPP; BPBD, 2020

4.5.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang

urusan trantibumlinmas melalui 2 (dua) perangkat dinas, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) dan BPBD. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, SatpolPP merupakan perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Sedangkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Jumlah keseluruhan pegawai Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan bidang trantibumlinmas adalah sebanyak 77 orang, 46 merupakan personil dari SatpolPP dan 31 orang personil BPBD. Sebaran tingkat pendidikan personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan trantibumlinmas sebagaimana tersaji pada **Grafik 4.5.3** menunjukkan bahwa tingkat pendidikannya relatif berimbang antara lulusan perguruan tinggi (49,35%) dan bukan lulusan perguruan tinggi (50,65%). Jumlah lulusan perguruan tinggi sebanyak 38 orang (SatpolPP 20; BPBD 18) sedangkan jumlah lulusan bukan perguruan tinggi sebanyak 39 orang (SatpolPP 26; BPBD 13).



Grafik 4.5.3. Personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan trantibumlinmas

Sebaran data sebaran personil pengampu penerapan SPM bidang urusan trantibumlinmas pada masing-masing unit kerja di lingkungan Satpol PP dan BPBD Kabupaten Bantul sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.5.10**.

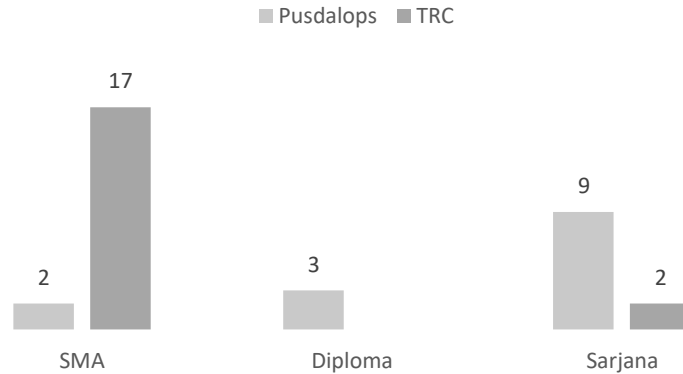
Tabel 4.5.10. Sebaran personil pengampu penerapan SPM bidang urusan trantibumlinmas pada masing-masing unit kerja

Perangkat Daerah	Bidang	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
SatpolPP	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
	Sekretaris Dinas	1	-	-	-	1
	Sekretariat	7	-	1	6	-
	Bidang Perlindungan Masyarakat	11	-	2	8	1
	Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah	13	-	2	11	-
	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	13	-	3	10	-
BPBD	Kepala Pelaksana	1	-	-	-	1
	Sekretaris Pelaksana	1	-	-	-	1
	Sekretariat	8	1	1	6	-
	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6	1	-	4	1
	Bidang Kedaruratan dan Logistik	7	-	3	4	-
	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	8		3	4	1
Total		77	2	15	53	7

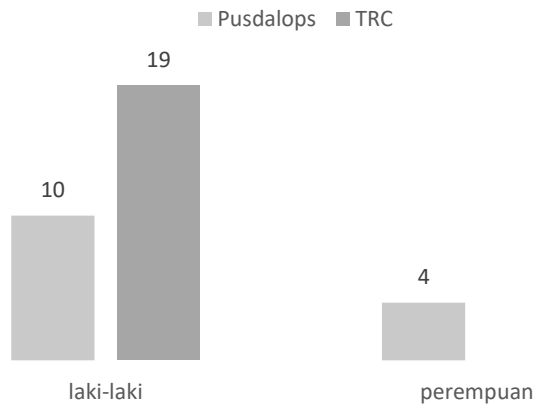
Sumber : SatpolPP; BPBD, 2020

Lebih lanjut lagi didalam pelaksanaan pemenuhan SPM sub urusan bencanaBPBD Kabupaten Bantul dilengkapi dengan 2 unit Satuan Tugas yaitu: Satgas Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) dan Satgas Tim Teaksi Cepat (TRC). Jumlah keseluruhan personil pada satgas Pusdalops ada sebanyak 14 orang dan satgas TRC sebanyak 17 orang. Sebaran personil pada masing-masing satgas berdasarkan tingkat pendidikan berbeda, dimana pada satgas Pusdalops didominasi oleh personil dengan tingkat pendidikan sarjana (10 orang) sedangkan pada satgas TRC didominasi oleh personil dengan tingkat pendidikan SMA (15 orang), lihat **Grafik 4.5.4**. Di satu sisi, sebaran personil satgas menurut jenis kelamin (lihat

Grafik 4.5.5) menunjukkan bahwa sebagian besar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki.



Grafik 4.5.4. Sebaran satgas menurut tingkat pendidikan



Grafik 4.5.5. Sebaran satgas menurut jenis kelamin

Pelaksanaan sub urusan kebakaran di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaan pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dilengkapi dengan 1 unit Satuan Tugas yaitu: Satgas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) dengan jumlah 80 personil yang seluruhnya adalah Non ASN dengan rincian kompetensi, 51 petugas memiliki sertifikat Pemadam I, 4 petugas bersertifikat Pemadam II, dan 25 petugas belum tersertifikasi. Sebaran kompetensi Satgas Penanggulangan Bahaya

Kebakaran tersaji pada **Grafik 4.5.6.**



Grafik 4.5.6. Sebaran kompetensi satgas PBK

Peningkatan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran terus dilakukan dengan mengoptimalkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang sudah ditentukan. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada **Gambar 4.5.2.**



Gambar 4.5.2. Peta Wilayah Manajemen Kebakaran

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Pengumpulan data terkait dengan korban bencana sifatnya insidental jika terjadi bencana yang menimbulkan dampak bagi warga masyarakat;
- Pengumpulan data terkait rumah warga yang terletak di wilayah rawan bencana belum dapat dilakukan secara maksimal.
- Data waktu penanganan masih menggunakan rekap manual.

2) Perhitungan kebutuhan

- Belum ada pemahaman terhadap pasal 9 ayat (2) Permendagri No 121 Tahun 2018 terkait biaya perbaikan atas kerugian materiil dan cedera fisik ringan pendanaanya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada
- Perhitungan kebutuhan terkait dengan layanan rumah terdampak bencana bisa dilaksanakan jika terjadi bencana, sehingga target layanan dapat ditentukan dan dapat ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- Semua komponen dalam pemenuhan SPM belum dapat terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran.

3) Pelaksanaan

- Sarpras yang dimiliki belum sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2019
- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sifatnya sangat insidental, tergantung ada/tidaknya kejadian, sehingga penyediaan anggaran terbatas;
- Masih tingginya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor;
- Kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana untuk direlokasi oleh pemerintah;

- Proses penyediaan lokasi untuk relokasi hingga siap untuk digunakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan sangat kompleks. Selain itu, membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit.
- Komponen dalam pemenuhan SPM belum dapat dilaksanakan seluruhnya yang disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 serta ketiadaan personil pemadam yang berstatus ASN yang mempunyai kewenangan melakukan inspeksi.

4) Pelaporan

- Pemerintah pusat dalam hal ini BNPB mengucurkan dana untuk penanganan pasca bencana terkait dengan layanan SPM perumahan rakyat langsung kepada BPBD sedangkan dalam PermenPUPR 29/2019 disebutkan bahwa BPBD dalam pelaksanaannya bertindak sebagai supervisi dalam memberikan pertimbangan teknis kepada perangkat daerah pengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Sehingga dalam pelaporan, tim penyusun kesulitan untuk memilah alokasi anggaran dan realisasi dikarenakan dalam perencanaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terpilah-pilah berdasarkan urusan pemerintahan. Selain itu, pemilahan personil berdasarkan layanan SPM per urusan menjadi rancu dan tidak sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Pelaporan SPM melalui aplikasi yang disediakan oleh Bangda belum tersosialisasikan secara detail sehingga data yang dilaporkan masih menurut persepsi masing-masing.

b. Solusi

1) Pengumpulan data

- Segera mungkin melakukan pendataan bila terjadi bencana;
- Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan usulan rumah yang perlu untuk

direlokasi.

- Mengembangkan aplikasi untuk pelaporan dan pencatatan laporan sampai dengan penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan.

2) Perhitungan kebutuhan

- Perlu adanya penjelasan lebih lanjut terhadap pasal 9 ayat (2) Permendagri No 121 Tahun 2018 perihal anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada
- Segera mungking melakukan perhitungan kebutuhan bila terjadi bencana
- Sinkronisasi antara Perhitungan Pemenuhan SPM dengan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran

3) Pelaksanaan

- Pengadaan Sarpras sesuai dengan ketentuan Permendagri No 17 Tahun 2019
- Peningkatan sinergitas dengan stakeholder terkait kebencanaan untuk pemenuhan anggaran dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang sewaktu-waktu bias terjadi
- Peningkatan pemahaman kepada masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana untuk direlokasi
- Menyiapkan lokasi relokasi dengan fasilitas pendukungnya (Drainase, sumur, listrik, fasum lainnya)
- Perlunya komitmen bersama untuk pemenuhan SPM terutama pemenuhan personil pemadam kebakaran

4) Pelaporan

- Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan kewenangan urusan pemerintahan;
- Perlu adanya sosialisasi dan penjelasan secara detail oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menu penyampaian pertanyaan yang

ada di aplikasi SPM agar difungsikan dan direspon.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan sosial berdasarkan Permensos 9/2018 sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.6.1**.

Tabel 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Capaian SPM Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang
		Penyebut
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti Populasi anak telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti	Persentase warga lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah warga lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti Populasi warga lanjut usia telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis telantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis telantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti Populasi gelandangan dan pengemis telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang
		Penyebut
		setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Sumber : Permensos 9/2019

Mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan sosial per jenis pelayanan tersaji pada **Tabel 4.6.2**.

Tabel 4.6.2. Jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang urusan sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permakanan 2. Sandang 3. Alat bantu 4. Perbekalan kesehatan 5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial 6. Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang 7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan 8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 9. Penelusuran keluarga 10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga 11. rujukan
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permakanan 2. Sandang 3. Alat bantu 4. Perbekalan kesehatan 5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial 6. Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang 7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan 8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 9. Penelusuran keluarga 10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga 11. rujukan
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permakanan 2. Sandang 3. Alat bantu 4. Perbekalan kesehatan 5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial 6. Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang 7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan 8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 9. Penelusuran keluarga

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan
	10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga 11. rujukan
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	1. Permakanan 2. Sandang 3. Alat bantu 4. Perbekalan kesehatan 5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial 6. Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang 7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan 8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 9. Penelusuran keluarga 10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga rujukan
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	1. Permakanan 2. Sandang 3. Tempat penampungan pengungsi 4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan 5. Dukungan psikososial

Sumber : Permensos 9/2019

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target SPM urusan sosial pada tahun 2019 lebih kepada pemilahan data PMKS agar sasaran penerima manfaat pelayanan SPM tepat sasaran pada tahun berikutnya. Target Pencapaian SPM bidang urusan sosial tersaji pada **Tabel 4.6.3.**

Tabel 4.6.3. Target Capaian SPM Bidang Sosial

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	(%)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti		100
	Jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	6.535	100
	Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	6.535	
	1. layanan data dan pengaduan	3.158	100

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	(%)
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	30	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100
	5. penyediaan permakanan	125	100
	6. penyediaan sandang	105	100
	7. penyediaan alat bantu	17	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	135	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	105	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	105	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	10	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3.818	100
	13. pemberian penelusuran keluarga	30	100
	14. pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	38	100
	15. layanan rujukan	30	100
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti		100

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	(%)
	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	1.475	100
	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1.475	
	1. layanan data dan pengaduan	809	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	111	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100
	5. penyediaan permakanan	1.475	100
	6. penyediaan sandang	1.475	100
	7. penyediaan alat bantu	1	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	1.475	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	1.475	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	1.475	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	30	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	933	100

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	(%)
	13. pemberian penelusuran keluarga	3	100
	14. pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	27	100
	15. layanan rujukan	3	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase warga lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti		100
	Jumlah warga lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	7.684	100
	Populasi warga lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	7.684	
	1. layanan data dan pengaduan	3.676	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	8	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100
	5. penyediaan permakanan	1.411	100
	6. penyediaan sandang	110	100
	7. penyediaan alat bantu	9	100
8. penyediaan perbekalan kesehatan	370	100	
9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	370	100	

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	(%)
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	370	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	3	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4.564	100
	13. pemberian penelusuran keluarga	5	100
	14. pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	5	100
	15. layanan rujukan	8	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti		100
	Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	40	100
	Populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	40	
	1. layanan data dan pengaduan	14	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	3	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan	0	100

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	(%)
	kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan		
	5. penyediaan permakanan	3	100
	6. penyediaan sandang	3	100
	7. penyediaan alat bantu	3	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	40	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	40	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	40	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	3	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	19	100
	13. pemberian penelusuran keluarga	40	100
	14. pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	37	100
	15. layanan rujukan	3	100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100
	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	405	100
	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	405	
	1. Permakanan	200	100
	2. Sandang	21	100

Jenis Layanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan	Target	
		Jumlah	(%)
	3. Tempat penampungan pengungsi	75	100
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	100
	5. Dukungan psikososial	12	100

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Bantul, 2020

4.6.3. Realisasi

Realisasi capaian SPM bidang urusan sosial Kabupaten Bantul tahun 2020 sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.6.4.**

Tabel 4.6.4. Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	(%)
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti			86,67
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	6.535	100
	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	6.535	
	1. layanan data dan pengaduan	3.158	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	30	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang	0	0

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	(%)
	belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan		
	5. penyediaan permakanan	125	100
	6. penyediaan sandang	105	100
	7. penyediaan alat bantu	17	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	135	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	105	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	105	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	10	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3.818	100
	13. pemberian penelusuran keluarga	30	100
	14. pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	38	100
	15. layanan rujukan	30	100
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			86,67
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	1.475	100
	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1.475	
	1. layanan data dan pengaduan	809	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	111	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	(%)
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0
	5. penyediaan permakanan	1.475	100
	6. penyediaan sandang	1.475	100
	7. penyediaan alat bantu	1	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	1.475	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	1.475	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	1.475	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	30	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	933	100
	13. pemberian penelusuran keluarga	3	100
	14. pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	27	100
	15. layanan rujukan	3	100
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			86,67
Persentase warga lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah warga lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	7.684	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	(%)
	Populasi warga lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	7.684	
	1. layanan data dan pengaduan	3.676	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	8	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0
	5. penyediaan permakanan	1.411	100
	6. penyediaan sandang	110	100
	7. penyediaan alat bantu	9	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	370	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	370	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	370	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	3	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4.564	100
	13. pemberian penelusuran keluarga	5	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	(%)
	14. pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	5	100
	15. layanan rujukan	8	100
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			86,67
Persentase gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	40	100
	Populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	40	
	1. layanan data dan pengaduan	14	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	3	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100
	5. penyediaan permakanan	3	100
	6. penyediaan sandang	3	100
	7. penyediaan alat bantu	3	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	40	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	40	100

Jenis/ Indikator Layanan Dasar	Capaian Mutu Pelayanan	Realisasi	
		Jumlah	(%)
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	40	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	3	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	19	100
	13. pemberian penelusuran keluarga	40	100
	14. pemberian reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga	37	100
	15. layanan rujukan	3	100
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota			100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	405	100
	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	405	
	1. Permakanan	200	100
	2. Sandang	21	100
	3. Tempat penampungan pengungsi	75	100
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	100
	5. Dukungan psikososial	12	10

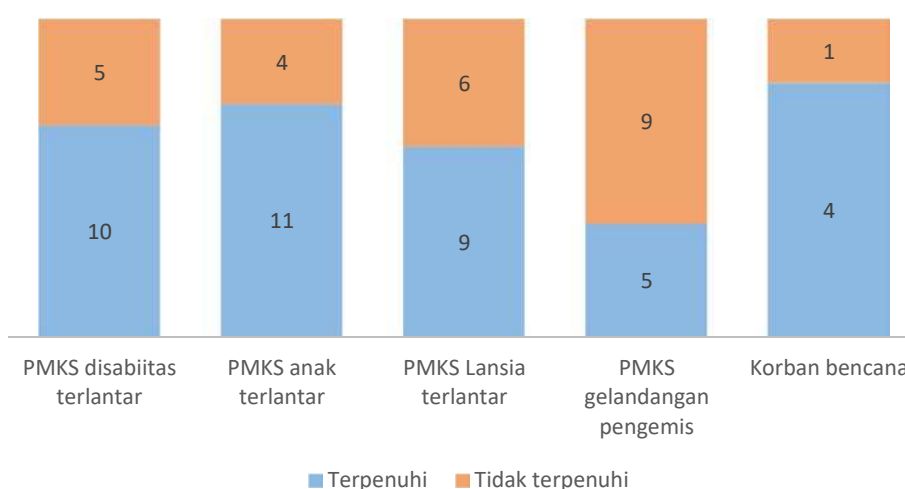
Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Bantul, 2020

Pemenuhan pelayanan SPM di tahun 2020 merupakan pelaksanaan pemenuhan oleh Pemerintahan Kabupaten Bantul yang kedua kali dan telah merujuk pada amanat Permendagri 100/2018 dan Permensos 9/2018. Perencanaan pemenuhan ini juga masih berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan

atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021. Program kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 juga telah disusun dan disesuaikan untuk mengakomodir pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan sosial.

Capaian pemenuhan SPM bidang urusan sosial per jenis layanan di Kabupaten Bantul mencapai 100%. Hal ini apabila diasumsikan bahwa satu atau lebih mutu layanan telah terpenuhi. Berbeda apabila tiap mutu layanan harus terpenuhi sehingga pemenuhan spm bidang urusan sosial di Kabupaten Bantul menjadi tidak 100%. Perbedaan persepsi ini menjadi hal yang “*debatable*” di lingkup internal tim pemenuhan spm Kabupaten Bantul, begitu pula di level Pemerintah Daerah DIY.

Kebutuhan masing-masing kelompok PMKS berbeda-beda dan bersifat situasional. PMKS kelompok gelandangan pengemis yang ada di Kabupaten Bantul tidak membutuhkan permakanan dan sandang dikarenakan gelandangan pengemis yang terdata berdasarkan hasil razia adalah warga bantul yang memiliki tempat tinggal, sehingga kebutuhan yang diberikan berupa bimbingan dan dikembalikan ke tempat tinggal masing- masing. Di sisi lain, PMKS kelompok difabel, lansia, dan anak terlantar memiliki kebutuhan relatif lebih banyak. Selain itu, terkait mutu layanan penelusuran keluarga dan reunifikasi pada PMKS kelompok anak terlantar pada penerapannya juga baru bisa dilaksanakan apabila percobaan tindak pidana perdagangan orang dan untuk layanan kependudukan dilaksanakan layanan berupa fasilitasi pengasuhan anak/adopsi. Pemenuhan mutu layanan tiap jenis layanan SPM bidang urusan sosial tersaji pada **Grafik 4.6.1**.



Grafik 4.6.1. Pemenuhan mutu layanan per jenis layanan

Kabupaten Bantul bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan smp bidang urusan sosial. Kemampuan anggaran dan SDM di Kabupaten Bantul menjadi salah satu permasalahan utama yang berimbas pada belum bisa terpenuhinya pemenuhan layanan secara maksimal. Di sisi lain, mutu layanan SPM yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2020 juga tidak bisa direalisasikan seluruhnya sebagai imbas dari adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Solusi yang hingga saat ini baru bisa dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bantul terkait SPM bidang urusan sosial adalah bekerja sama dengan mitra PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti LKS/A, TKSK, Karang Taruna, WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat), dan rumah singgah yang dikelola oleh perseorangan/yayasan. Pelaksanaan pemenuhan oleh mitra PSKS di Kabupaten Bantul di tahun 2020 juga terkendala oleh keterbatasan anggaran yang juga terkena imbas dari Pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan mitra PSKS juga menggantungkan biaya operasionalnya melalui donasi dari perseorangan atau kelompok masyarakat atau yayasan atau swasta atau pihak lain.

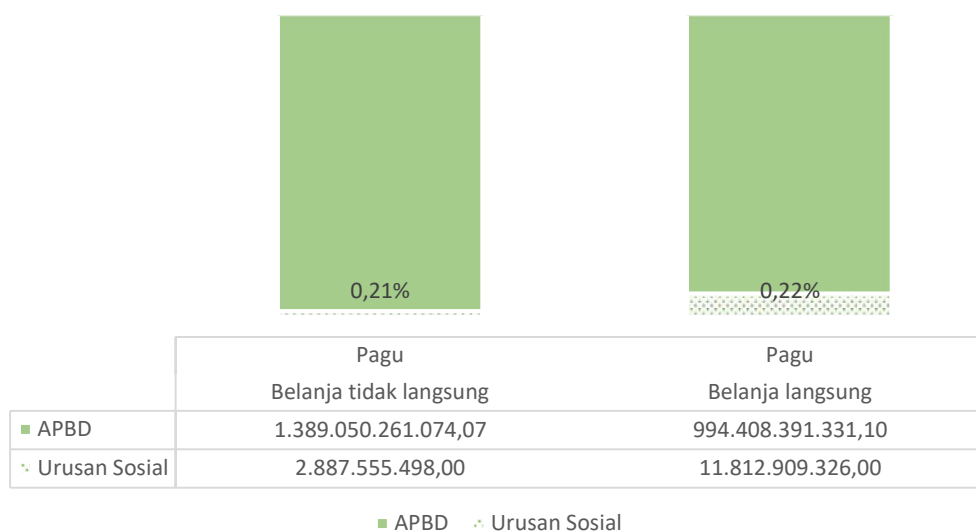
Beberapa dokumentasi kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2020 sebagaimana tersaji pada **Gambar 4.6.1**.



Gambar 4.6.1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemenuhan SPM urusan bidang sosial oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

4.6.4. Alokasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bantul di dalam perencanaan tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan urusan sosial sebesar Rp14.700.464.824,00 atau 0,62% dari total pagu APBD (Rp2.383.458.652.405,17). Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan sosial terdiri dari belanja tidak langsung (Rp2.887.555.498,00) dan belanja langsung (Rp11.812.909.326,00). Perbandingan alokasi anggaran untuk urusan sosial terhadap total alokasi anggaran keseluruhan dalam APBD Kabupaten Bantul tersaji pada **Grafik 4.6.2**.



Grafik 4.6.2. Perbandingan alokasi anggaran penyelenggaraan pemerintahan urusan sosial terhadap APBD

Keseluruhan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan sosial meliputi seluruh program kegiatan yang dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan sosial yang tidak seluruhnya mendukung SPM. Anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung SPM urusan sosial sebanyak Rp7.606.233.350,00 atau sebesar 64,39% dari total anggaran belanja langsung (Rp11.812.909.326,00). Namun, alokasi anggaran tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pemenuhan SPM bidang urusan sosial. Alokasi anggaran dan realisasi program kegiatan yang mendukung SPM bidang urusan sosial Kabupaten Bantul tahun 2020 tersaji pada **Tabel 4.6.5**.

Tabel 4.6.5. Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang urusan sosial

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<u>6.635.079.000,00</u>	<u>6.587.269.000,00</u>	<u>99,28</u>
1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	6.457.211.000,00	6.456.301.000,00	99,99
2) Kegiatan Peningkatan kualitas kampanye sosial, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	150.548.000,00	111.903.000,00	74,33
3) Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	27.320.000,00	19.065.000,00	67,78
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Bantuan Sosial	<u>627.590.000,00</u>	<u>627.377.500,00</u>	<u>97,97</u>
1) Kegiatan Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	627.590.000,00	627.377.500,00	97,97
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<u>343.564.350,00</u>	<u>343.409.350,00</u>	<u>99,95</u>
1) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	343.564.350,00	343.409.350,00	99,95
Total	<u>7.606.233.350,00</u>	<u>7.558.055.850,00</u>	<u>99,37</u>

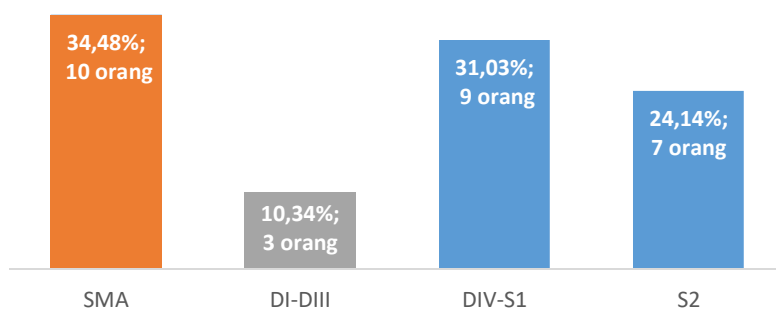
Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Bantul, 2020

4.6.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan sosial melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Struktur kelembagaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, bidang teknis

pengampu urusan pemerintahan bidang sosial (Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial), serta bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak; UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul sebanyak 37 orang, terdiri dari 29 orang pegawai pelaksana bidang urusan sosial dan 8 orang bidang urusan pemberdayaan perempuan dan anak. Personil pengampu bidang urusan sosial terdiri dari Kepala OPD (1 orang), sekretariat (14 orang), bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang sosial (14 orang). Sebaran tingkat pendidikan personil pelaksana penerapan SPM bidang urusan sosial sebagaimana tersaji pada **Grafik 4.6.3** menunjukkan bahwa tingkat pendidikannya relatif cukup baik dimana sebanyak 65,51% merupakan lulusan perguruan tinggi (DI – S2) dan hanya 34,48% yang lulusan SMA.



Grafik 4.6.3. Grafik Personil Pelaksana Penerapan SPM Bidang urusan Sosial Berdasarkan Pendidikan

Sebaran data sebaran personil pengampu penerapan SPM bidang urusan sosial pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.6.6**.

Tabel 4.6.6. Sebaran personil pengampu SPM bidang urusan sosial pada masing-masing unit kerja

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	0	0	0	1
Sekretariat	13	0	3	9	1
Bidang Pelayanan & Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5	0	0	4	1
Bidang Pengembangan & Pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	5	0	2	2	1
Bidang Bantuan Jaminan Sosial	5	0	0	3	2
Total	29	0	5	18	6

Sumber: BKPP, 2020

Pemerintah Kabupaten Bantul bekerja sama dengan mitra PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) didalam pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan sosial. Mitra PSKS yang bekerja sama sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.6.7**. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 380 Tahun 2020 mengukuhkan kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Periode 2020 – 2024 dengan ketugasan utama antara lain:

1. Memfasilitasi komunikasi antar Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul untuk berhimpun dan membahas informasi tentang permasalahan, sumber daya, rencana kegiatan dan pelaksanaan tugas dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul;
2. Mengadakan konsultasi yang mencakup permasalahan kesejahteraan sosial serta dampak yang akan dihadapi;
3. Mengadakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul dengan pihak terkait lainnya

Tabel 4.6.7. Mitra PSKS yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul

Mitra PSKS	Jumlah
TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	17
Karang Taruna	93
WKSMB (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	45
IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat)	17

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2020

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Pengumpulan data baseline terkait dengan kelompok PMKS masih belum dapat dilakukan secara detail. Kegiatan updating data ditahun 2020 hanya sebatas jumlah total keseluruhan dari tiap kelompok kategori PMKS, yakni jumlah seluruh difabel, anak terlantar, lansia. Hasil updating data belum sampai pada rincian kategori difabel, rincian kondisi anak terlantar, rincian kondisi lansia. Selain itu, pendataan kelompok PMKS gelandang dan pengemis di Kabupaten Bantul di tahun 2020 diperoleh melalui pendataan oleh *grass root* berdasarkan gelandang dan pengemis kambuhan yang ada/berdomisili di lingkungan sekitar wilayah *grass root*. Sedangkan di tahun 2019, data gelandangan dan pengemis diperoleh melalui kegiatan razia PMKS, dimana di tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19. Namun demikian hasil razia PMKS di tahun 2019 belum dapat dijadikan sebagai baseline data dikarenakan kegiatan pendataan belum dilakukan secara rinci. Selain itu, pendataan terkait korban bencana hanya dapat dilakukan pada saat kejadian sehingga tidak bisa dilakukan penentuan target dan perencanaan pemenuhan hanya dilakukan berdasarkan estimasi kemampuan daerah untuk mengakomodir pelaksanaan pemenuhan layanan terhadap korban bencana.

2) Perhitungan kebutuhan:

- Perhitungan kebutuhan standar mutu layanan bidang urusan sosial di tahun 2020 belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan database PMKS yang terhimpun di Pemerintah Kabupaten Bantul belum terspesifikasi/terinci per kategori ataupun kondisi PMKS. Hal ini menjadi penting dikarenakan kebutuhan per kategori atau kondisi masing-masing PMKS berbeda dan bersifat spesifik, tidak bisa digeneralisir antara satu dengan yang lain.

3) Pelaksanaan:

- Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penerapan SPM di Kabupaten Bantul sangat terbatas dikarenakan kemampuan keuangan daerah.
- Kebijakan *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 berimbas pada dialihkannya beberapa anggarannya yang sebelumnya sudah direncanakan untuk pelaksanaan pemenuhan SPM bidang urusan sosial sehingga ada beberapa capaian mutu layanan yang tidak terpenuhi.
- Pandemi Covid-19 juga berimbas pada menurunnya kantung donasi yang diperoleh mitra PSKS sehingga capaian mutu layanan yang diberikan oleh mitra PSKS sebagai salah satu alternatif pendukung pemenuhan mutu layanan SPM bidang urusan sosial menjadi tidak maksimal.

4) Pelaporan:

- Pelaporan online (Komdat SPM dan SPM bangda) belum disosialisasikan secara detail, sehingga data yang dilaporkan menurut persepsi masing-masing.

b. Solusi

1) Pengumpulan data:

- Updating data lebih rinci disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang urusan sosial

2) Perhitungan kebutuhan:

- Melakukan perhitungan kebutuhan ulang disesuaikan dengan database yang telah diupdate.

3) Pelaksanaan

- Perlu adanya kebijakan yang disesuaikan dengan prioritas daerah dan kemampuan sumberdaya;
- Mengoptimalkan peran swasta atau stakeholder untuk pemenuhan layanan SPM

4) Pelaporan

- Perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah pusat secara rinci agar tidak terjadi lagi perbedaan persepsi.

BAB V PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul dibuat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya kewajiban Kepala Daerah dalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden. LPPD diharapkan juga dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketentuannya.

Laporan ini juga diperlukan oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu kekurangan atau kelebihan yang terdapat dalam laporan ini agar dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat untuk penyusunan kebijakan terhadap daerah dimasa yang akan datang, khususnya di Kabupaten Bantul.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) menyebutkan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan daerah kepada Presiden akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan format dan sistematika penyusunan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120.04/6931/OTDA dan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA AWAL 2020



BUPATI BANTUL

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bantul, 8 Januari 2020

BUPATI BANTUL

Drs. H. SUHARSONO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KABUPATEN BANTUL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	5
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	80
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,65
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	15,38
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	9,59
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	5,5
		Pemerataan pendapatan (gini ratio)	0,38
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	23
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	47
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1025
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	1,1
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,3
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	0,9
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,45
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	78
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63

12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	45,33
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,065
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	70

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
	Pendidikan	116.449.564.475,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.277.801.350,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.079.050.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	762.741.425,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	144.950.000,00
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.967.964.000,00
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	55.574.415.700,00
7	Program Pendidikan Non Formal	1.015.555.000,00
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	48.766.482.000,00
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	545.635.000,00
10	Program Peningkatan Nilai Akademik	314.970.000,00
	Kesehatan	242.117.252.087,00
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.101.542.660,00
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	980.391.000,00
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	141.248.000,00
14	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	257.649.000,00
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	863.155.000,00

16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	66.592.581.427,00
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	101.400.000,00
18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	511.212.500,00
19	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	354.796.500,00
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	637.700.000,00
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	751.263.000,00
22	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	447.310.500,00
23	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	29.320.000.000,00
24	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	1.650.940.000,00
25	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	3.853.785.000,00
26	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	252.315.000,00
27	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	24.175.000,00
28	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	11.625.000,00
29	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	63.870.000,00
30	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	200.292.500,00
31	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	130.000.000.000,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	206.326.636.131,00
32	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.803.568.000,00
33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.345.400.000,00
34	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.875.000,00
35	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	198.250.000,00
36	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	10.349.820.000,00
37	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	54.050.000,00
38	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.111.855.000,00

39	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	14.699.170.000,00
40	Program Pengendalian Banjir	13.736.672.200,00
41	Program Pembangunan Gedung	20.903.050.000,00
42	Program Perencanaan Tata Ruang	1.815.825.000,00
43	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.567.280.000,00
44	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	76.489.666.000,00
45	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	15.087.100.000,00
46	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	42.997.692.431,00
47	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.144.362.500,00
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.286.160.000,00
48	Program Pengembangan Perumahan	1.646.260.000,00
49	Program Lingkungan Sehat Perumahan	82.100.000,00
50	Program pengelolaan areal pemakaman	557.800.000,00
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.889.819.671,00
51	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.323.370.361,00
52	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.492.508.910,00
53	Program peningkatan disiplin aparatur	245.125.000,00
54	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	157.500.000,00
55	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.045.000,00
56	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	486.265.000,00
57	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.510.830.000,00
58	Program pengembangan wawasan kebangsaan	187.689.000,00
59	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	111.090.000,00
60	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	171.547.500,00
61	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	44.052.500,00

62	Program pendidikan politik masyarakat	483.700.000,00
63	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.403.136.000,00
64	Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	372.935.000,00
65	Program Penegakan Perda	321.232.500,00
66	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	519.834.900,00
67	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	1.283.045.500,00
68	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	715.037.500,00
69	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan	50.875.000,00
	Sosial	17.101.466.234,00
70	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.459.674.660,00
71	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.248.255.675,00
72	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78.760.000,00
73	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	89.653.270,00
74	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	1.569.231.000,00
75	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	9.733.006.191,00
76	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	807.246.350,00
77	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	1.115.639.088,00
	Tenaga Kerja	28.085.778.141,00
78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.516.758.941,00
79	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.219.433.800,00
80	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	753.860.000,00
81	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.005.165.900,00
82	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	610.950.000,00
83	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	979.504.500,00
84	Program Penempatan Tenaga Kerja	196.200.000,00

85	Program Perluasan Kerja	18.803.905.000,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	726.340.468,00
86	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	175.535.825,00
87	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	152.797.643,00
88	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	398.007.000,00
	Pangan	758.348.000,00
89	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	758.348.000,00
	Pertanahan	12.594.882.043,00
90	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	968.795.043,00
91	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	289.562.000,00
92	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	111.625.000,00
93	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	11.002.150.000,00
94	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	222.750.000,00
	Lingkungan Hidup	32.178.448.300,00
95	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.951.745.300,00
96	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.418.486.000,00
97	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	59.900.000,00
98	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9.308.997.000,00
99	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.585.660.000,00
100	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5.075.310.000,00
101	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	778.350.000,00
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.577.880.550,00
102	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.183.599.300,00
103	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400.352.000,00
104	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.248.750,00

105	Program Penataan Administrasi Kependudukan	531.201.000,00
106	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	1.105.945.000,00
107	Program Pengelolaan Data Kependudukan	344.534.500,00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.494.656.250,00
108	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	184.096.000,00
109	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	296.345.250,00
110	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.424.027.500,00
111	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	99.800.000,00
112	Program pemberdayaan masyarakat	2.490.387.500,00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.999.630.495,00
113	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.841.430.495,00
114	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	788.170.000,00
115	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.000.000,00
116	Program Keluarga Berencana	720.560.000,00
117	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	145.750.000,00
118	Program pelayanan kontrasepsi	171.275.000,00
119	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	40.140.000,00
120	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	88.655.000,00
121	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	17.500.000,00
122	Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	170.150.000,00
	Perhubungan	30.425.248.700,00
123	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.862.712.700,00
124	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	532.512.500,00
125	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	111.700.000,00
126	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23.226.000,00

127	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.911.510.000,00
128	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	689.225.000,00
129	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	164.075.000,00
130	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	21.283.314.000,00
131	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	850.145.000,00
132	Pengembangan Kelalu-lintasan	2.996.828.500,00
	Komunikasi dan Informatika	14.719.906.634,00
133	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.845.314.113,00
134	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	923.425.021,00
135	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	81.480.000,00
136	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9.871.137.500,00
137	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	325.475.000,00
138	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	49.500.000,00
139	Program kerjasama informasi dengan mas media	1.623.575.000,00
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.607.886.391,00
140	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.655.296.991,00
141	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	267.000.000,00
142	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.300.000,00
143	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.875.000,00
144	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	423.141.000,00
145	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	768.475.000,00
146	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	16.250.000,00
147	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	452.548.400,00
	Penanaman Modal	3.437.735.074,00
148	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.842.040.174,00

149	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	931.832.400,00
150	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.700.000,00
151	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	113.500.000,00
152	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	480.162.500,00
153	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	33.500.000,00
	Kepemudaan dan Olahraga	10.045.319.005,00
154	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	787.195.000,00
155	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.757.187.500,00
156	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	59.280.000,00
157	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	77.803.000,00
158	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	6.307.878.525,00
159	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.055.974.980,00
	Statistik	121.250.000,00
160	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	121.250.000,00
	Persandian	2.665.975.000,00
161	Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	2.665.975.000,00
	Kebudayaan	22.756.421.168,00
162	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	905.002.534,00
163	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	393.372.908,00
164	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.150.000,00
165	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90.588.226,00
166	Program Pengembangan Nilai Budaya	10.856.307.500,00
167	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	6.850.000.000,00
168	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	3.650.000.000,00
	Perpustakaan	2.322.218.286,00

169	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.052.022.000,00
170	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	552.885.000,00
171	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000,00
172	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.342.000,00
173	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	392.831.786,00
174	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	309.137.500,00
	Arsip	414.645.000,00
175	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	100.425.000,00
176	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	240.305.000,00
177	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	73.915.000,00
	Kelautan dan Perikanan	1.793.541.000,00
178	Program Peningkatan Produksi Perikanan	1.793.541.000,00
	Pariwisata	10.843.475.200,00
179	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.091.164.700,00
180	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	444.365.000,00
181	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.395.500,00
182	Program pengembangan pemasaran pariwisata	776.585.000,00
183	Program pengembangan destinasi pariwisata	6.087.890.000,00
184	Program pengembangan Kemitraan	440.075.000,00
	Pertanian	10.157.029.681,00
185	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.482.084.815,00
186	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	286.300.000,00
187	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.320.000,00
188	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	3.444.897.200,00
189	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	420.746.900,00

190	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	802.428.266,00
191	Program peningkatan produksi hasil peternakan	761.165.000,00
192	Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	415.350.000,00
193	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	1.529.737.500,00
	Energi dan Sumber Daya Mineral	105.150.000,00
194	Program Potensi Energi	105.150.000,00
	Perdagangan	10.946.563.861,00
195	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.406.930.261,00
196	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	490.600.000,00
197	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2.330.450.000,00
198	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	719.135.000,00
199	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	94.512.000,00
200	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	882.128.800,00
201	Program Pemberdayaan Pedagang	507.896.800,00
202	Program Penataan Pasar Rakyat	514.911.000,00
	Perindustrian	8.535.153.000,00
203	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	142.850.000,00
204	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.310.253.000,00
205	Program penataan struktur industri	6.562.050.000,00
206	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	520.000.000,00
	Transmigrasi	1.232.803.000,00
207	Program Transmigrasi Umum	1.232.803.000,00
	Administrasi Pemerintahan	41.557.607.743,00
208	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.185.101.468,00
209	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.327.569.000,00

210	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	143.000.000,00
211	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	58.010.000,00
212	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	15.915.765.000,00
213	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	587.073.000,00
214	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	125.510.000,00
215	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	523.993.000,00
216	Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah	61.097.000,00
217	Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	516.525.000,00
218	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	340.333.000,00
219	Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan	850.642.600,00
220	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	728.656.200,00
221	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	419.116.700,00
222	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1.130.405.000,00
223	Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.048.105.775,00
224	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	596.705.000,00
	Pengawasan	2.248.700.000,00
225	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	910.892.600,00
226	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	244.000.000,00
227	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	141.080.000,00
228	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	952.727.400,00
	Perencanaan	7.267.985.000,00
229	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.704.135.000,00
230	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	536.425.000,00
231	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	132.975.000,00
232	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.300.000,00

233	Program pengembangan data/informasi	394.827.500,00
234	Program perencanaan pembangunan daerah	1.839.825.000,00
235	Program perencanaan pembangunan ekonomi	531.680.000,00
236	Program perencanaan sosial dan budaya	890.300.000,00
237	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	364.950.000,00
238	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	135.567.500,00
239	Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah	721.000.000,00
	Keuangan	40.021.457.284,00
240	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.551.576.684,00
241	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.787.486.550,00
242	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.706.250,00
243	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	122.162.500,00
244	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	10.452.757.800,00
245	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.071.767.500,00
	Kepegawaian	6.596.000.000,00
246	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.412.862.500,00
247	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	791.495.000,00
248	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.500.000,00
249	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	3.086.249.500,00
250	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	527.249.000,00
251	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	766.644.000,00
	Penelitian dan Pengembangan	294.800.000,00
252	Program Kerjasama Pembangunan	163.100.000,00
253	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	131.700.000,00
	Fungsi Lainnya	15.942.370.162,00

254	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.565.373.088,00
255	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.363.450.038,00
256	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.533.751,00
257	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	87.381.405,00
258	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	107.175.000,00
259	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	449.400.000,00
260	Program peningkatan pelayanan masyarakat	306.706.175,00
261	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	3.026.399.155,00
262	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	1.886.149.950,00
263	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	1.131.801.600,00
JUMLAH		939.646.104.034,00

Bantul, 8 Januari 2020

BUPATI BANTUL
Drs. H. SUHARSONO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2020



**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020**



**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020**



BUPATI BANTUL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Suharsono
Jabatan : Bupati Bantul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bantul, 13 November 2020

BUPATI BANTUL

Drs. H. SUHARSONO

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020
KABUPATEN BANTUL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	8
2.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,65
3.	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,38
4.	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persentase	13,94
5.	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	-0,13
		Gini Ratio	Angka	0,38
6.	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase	-67
7.	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	Persentase	47
8.	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persentase	1,1025
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persentase	1,1
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persentase	0,3
		Pertumbuhan produksi daging (sapi,kambing, domba, kuda, unggas)	Persentase	0,9
9.	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persentase	1,45
10.	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	78
11.	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63

12.	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Persentase	45,33
13.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase	75
14.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Persentase	0,065
15.	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	70

URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	643.690.872.194,00
Pendidikan	116.661.731.160,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.420.727.206,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.135.645.324,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	455.164.500,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	269.825.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.371.351.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	56.221.088.130,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	49.355.766.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	316.080.000,00
Program Peningkatan Nilai Akademik	0,00
Kesehatan	341.800.023.919,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.892.313.630,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	783.800.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	106.217.500,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	122.139.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.417.225.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	89.062.003.317,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan	324.015.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	588.941.500,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.191.181.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	672.822.500,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5.349.119.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.432.949.500,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	35.035.515.371,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	5.676.408.000,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	244.436.500,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	9.950.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25.950.000,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4.963.663.000,00
Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	204.308.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	37.268.752.100,00
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	145.428.314.001,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.947.016.478,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.530.878.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.322.200.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	437.175.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	293.696.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	9.687.210.000,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	55.125.000,00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.071.455.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	15.900.248.000,00
Program Pengendalian Banjir	7.836.875.000,00
Program Pembangunan Gedung	3.238.900.000,00
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	25.546.023.978,00
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	4.181.050.000,00
Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	10.311.740.000,00

Program Pengembangan Jasa Konstruksi	684.277.500,00
Program Perencanaan Tata Ruang	1.228.925.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	621.238.000,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.173.349.022,00
Program Pengembangan Perumahan	4.039.249.022,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan	78.300.000,00
Program pengelolaan areal pemakaman	55.800.000,00
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	82.295.842.289,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	142.803.237,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115.860.000,00
Program pengembangan wawasan kebangsaan	150.489.825,00
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	75.907.425,00
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	421.113.000,00
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	25.350.000,00
Program pendidikan politik masyarakat	319.659.925,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.577.101.180,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	776.885.744,00
Program peningkatan disiplin aparatur	177.125.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67.060.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.150.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	522.030.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	3.405.918.750,00
Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	226.136.000,00
Program Penegakan Perda	516.874.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.163.216.435,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.538.287.650,00
Program peningkatan disiplin aparatur	329.340.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.650.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	2.171.812.500,00
Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1.505.042.400,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	61.643.889.434,00
Program Penanganan Kedaruratan Bencana	402.139.284,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan	0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.814.690.979,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	762.876.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.100.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66.090.347,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	802.394.500,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6.678.869.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	444.206.000,00
Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	1.234.682.500,00
Tenaga Kerja	23.784.900.855,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.671.683.855,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.305.745.800,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.960.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	961.421.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	379.825.000,00
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	551.125.200,00
Program Penempatan Tenaga Kerja	201.176.000,00
Program Perluasan Kerja	18.667.964.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	422.178.911,00
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	50.192.825,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	58.694.643,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	313.291.443,00
Pangan	605.468.500,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	605.468.500,00

Pertanahan	4.407.107.112,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	615.736.112,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	144.112.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	51.720.000,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	3.408.314.000,00
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	187.225.000,00
Lingkungan Hidup	21.734.811.710,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.344.958.746,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.893.365.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.250.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.048.223.200,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.720.359.500,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5.455.810.264,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	254.845.000,00
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.884.984.200,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.671.679.700,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	425.906.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	43.500.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.611.703.500,00
Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	843.632.500,00
Program Pengelolaan Data Kependudukan	288.562.500,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.705.634.500,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	350.196.000,00
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	821.240.250,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	855.196.500,00
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	81.850.000,00
Program pemberdayaan masyarakat	1.597.151.750,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.352.176.750,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.733.757.750,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.753.748.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.000.000,00
Program Keluarga Berencana	5.697.059.000,00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	501.750.000,00
Program pelayanan kontrasepsi	401.775.000,00
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	6.340.000,00
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	128.847.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0,00
Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	112.900.000,00
Perhubungan	8.860.394.900,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.677.182.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	442.802.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	111.700.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.650.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2.035.270.000,00
Program peningkatan pelayanan angkutan	501.225.000,00
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	164.075.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.471.537.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	822.595.000,00
Pengembangan Kelalu-lintasan	1.620.358.000,00
Komunikasi dan Informatika	12.910.854.741,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.017.948.220,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	759.099.021,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65.880.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9.363.150.000,00
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	156.790.000,00
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	45.750.000,00

Program kerjasama informasi dengan mas media	1.502.237.500,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.418.850.691,10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.168.990.991,10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	299.406.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.500.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.875.000,00
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	432.855.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	842.458.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	0,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	650.765.200,00
Penanaman Modal	1.643.770.766,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.157.915.168,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	417.168.098,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.300.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	58.262.500,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.125.000,00
Kepemudaan dan Olahraga	4.059.500.095,00
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	263.245.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan	820.027.500,00
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	59.280.000,00
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	319.489.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.711.925.315,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	885.533.280,00
Statistik	85.600.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	85.600.000,00
Persandian	883.529.000,00
Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	883.529.000,00

Kebudayaan	11.245.737.401,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	475.821.795,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	326.643.716,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.825.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya	3.975.180.180,00
Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	3.681.045.000,00
Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	2.764.221.710,00
Perpustakaan	1.489.610.600,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	840.214.443,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	462.207.257,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.454.500,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	61.684.500,00
Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	122.049.900,00
Arsip	289.813.300,00
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	37.520.000,00
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	219.188.300,00
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	33.105.000,00
Kelautan dan Perikanan	1.611.591.000,00
Program Peningkatan Produksi Perikanan	1.611.591.000,00
Pariwisata	9.955.644.450,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.517.909.950,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	604.258.400,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.395.500,00
Program pengembangan pemasaran pariwisata	803.807.000,00
Program pengembangan destinasi pariwisata	5.281.513.600,00
Program pengembangan Kemitraan	744.760.000,00
Pertanian	7.341.963.005,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.283.920.315,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	421.758.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.160.000,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.259.652.590,00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	147.224.000,00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	524.326.100,00
Program peningkatan produksi hasil peternakan	536.397.000,00
Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	109.940.000,00
Energi dan Sumber Daya Mineral	700.000,00
Program Potensi Energi	700.000,00
Perdagangan	7.457.307.421,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.368.296.421,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	903.125.000,00
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	65.000.000,00
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	245.655.000,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	69.230.000,00
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	119.375.000,00
Program Pemberdayaan Pedagang	260.625.000,00
Program Penataan Pasar Rakyat	426.001.000,00
Perindustrian	6.047.112.000,00
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	134.200.000,00
Program pengembangan industri kecil dan menengah	949.730.000,00
Program penataan struktur industri	4.443.182.000,00
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	520.000.000,00
Transmigrasi	162.812.500,00
Program Transmigrasi Umum	162.812.500,00
Administrasi Pemerintahan	38.067.459.114,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.542.931.476,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.225.581.375,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.410.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	623.295.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	68.435.000,00
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	355.983.000,00
Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah	9.947.000,00
Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	254.600.000,00
Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	150.438.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan	355.574.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	987.913.750,00
Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	888.345.500,00
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	778.760.000,00
Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.253.646.380,00
Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	368.755.383,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.926.586.250,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.353.614.600,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	161.500.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.600.000,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	16.744.542.400,00
Pengawasan	1.949.138.335,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	942.721.835,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	139.360.300,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97.300.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	769.756.200,00
Perencanaan	3.633.922.635,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	848.273.575,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	358.079.060,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.950.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.300.000,00
Program pengembangan data/informasi	301.322.500,00
Program perencanaan pembangunan daerah	778.560.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi	226.675.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya	425.685.000,00
Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	166.200.000,00
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	65.750.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah	429.127.500,00
Keuangan	43.775.784.790,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	34.732.945.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	986.029.900,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	59.737.500,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7.235.694.890,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	761.377.500,00
Kepegawaian	4.730.937.800,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	870.878.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.560.629.500,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.811.710.800,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	145.357.500,00
Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	330.861.500,00
Penelitian dan Pengembangan	81.320.000,00
Program Kerjasama Pembangunan	34.412.500,00
Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	46.907.500,00
Fungsi Lainnya	11.269.940.000,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	107.175.000,00
Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	137.375.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	386.490.100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	195.056.500,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.700.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	11.583.400,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	37.200.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	29.020.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	18.950.000,00
Kecamatan Piyungan	680.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	285.790.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151.276.600,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.445.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	12.020.000,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	81.820.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	99.289.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	43.359.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292.994.833,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	241.392.667,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.587.500,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	6.500.000,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	74.875.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	38.325.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	19.325.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	264.846.100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	227.378.900,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.100.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	7.550.000,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	53.250.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	71.550.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	50.325.000,00
Kecamatan Pandak	612.500.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	198.539.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.750.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	450.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	12.230.000,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	74.706.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	76.175.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	42.825.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	271.667.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	229.615.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	41.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	750.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	4.300.000,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	73.820.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	78.548.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	21.300.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	333.844.200,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	203.375.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	17.662.000,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	47.485.800,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	45.331.500,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	22.301.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	248.891.393,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	211.280.650,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.656.700,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	4.074.650,00


Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	73.584.207,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	41.940.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	28.862.400,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	240.020.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	259.145.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.800.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	11.400.000,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	56.000.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	12.785.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	28.350.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	344.422.150,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	243.408.650,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.000.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	12.499.200,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	35.390.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	22.180.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	18.100.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	287.287.750,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	199.057.025,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.460.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	9.717.025,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	47.850.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	39.675.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	27.453.200,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326.063.625,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	203.469.738,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.374.637,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	8.590.000,00

Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	29.520.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	25.542.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	15.940.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	244.269.800,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	249.895.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	205.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	15.857.600,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	46.300.300,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	11.958.800,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	44.013.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	302.168.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	216.775.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.507.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	15.300.000,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	78.500.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	32.000.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	33.350.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	345.755.304,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	279.409.696,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.100.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	1.510.000,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	7.975.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	20.700.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	23.550.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	205.344.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	189.216.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.700.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.880.000,00

Program peningkatan pelayanan masyarakat	32.025.000,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	94.350.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	59.160.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	29.825.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	286.167.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210.712.500,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.000.000,00
Program peningkatan pelayanan masyarakat	11.800.000,00
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	44.360.000,00
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	31.275.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	26.185.000,00
TOTAL	896.561.429.276

Bantul, 13 November 2020

BUPATI BANTUL



Drs. H.SUHARSONO



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Parasamya JL.RW Monginsidi no.1 Bantul 55711
Telepon: (0274) 367509 ext. 301,256 ; fax: (0274) 367796
e-mail: bappeda@bantulkab.go.id